Dokter Soetomo

Peter Kasenda
Dr. Yudha Tangkilisan
Prof. Dr. Djoko Marihandono



Museum
Kebangkitan Nasional

105 tahun
Kebangkitan
Nasional

Dokter Soetomo

Diterbitkan dalam rangka
105 tahun Kebangkitan Nasional

Jakarta
cetakan pertama, 2013

ISBN xxxxxxxxxx

Museum Kebangkitan Nasional
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

KATA PENGANTAR
KEPALA MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL

Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai amanat yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk melalui suatu proses yang panjang. Pendirian NKRI terus-menerus diupayakan oleh para pendiri negara ini dengan segala jerih payah mereka. Upaya untuk merealisasikannya bukannya tanpa risiko. Ada di antara mereka yang harus mengalami siksaan, keluar-masuk penjara, bahkan ada sebagian di antaranya harus mengorbankan nyawanya demi tetap berdirinya prinsip yang dicita-citakannya. Para pendiri negeri ini berjuang di bawah tekanan politik pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus, semua orang yang mengaku dirinya sebagai warga negara Indonesia wajib hukumnya untuk melestarikan perjuangan para pendiri negeri ini dengan berpartisipasi aktif dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebagai negara yang berdaulat, semua warga negara Indonesia berhak untuk menentukan ke mana arah bangsa kita akan dibawa. Para pendiri negeri ini telah memberikan contoh yang sangat konkret dalam memperjuangkan kemerdekaan itu. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apabila sebagai generasi penerus, kita ingin memahami, mendalami, dan mengaktualisasikan gagasan-gagasan mereka yang hingga kini masih dirasakan relevan. Salah satu gagasan yang masih relevan, bahkan sangat diperlukan hingga kini yaitu gagasan pentingnya azas persatuan di antara seluruh komponen bangsa, yang selalu dijunjung tinggi oleh oleh Dr. Soetomo.

Dr. Soetomo memiliki pemikiran jauh ke depan. Persatuan seluruh komponen bangsa merupakan suatu unsur yang mutlak harus dimiliki oleh seluruh bangsa. Apa pun permasalahan yang dihadapi bangsa ini, akan mudah diatasi apa bila azas persatuan dijadikan alas pemikiran dan perdebatan dalam mengatasi masalah aktual dewasa ini. Layaknya dalam suatu keluarga, tidak ada seorang pun di antara anggota keluarga yang menginginkan keluarganya pecah sebagai akibat dari terpaan masalah yang mendera keluarga tersebut.

Untuk itu, Museum Kebangkitan Nasional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkewajiban memfasilitasi penerbitan hasil penelitian para akademisi yang intinya akan memperkuat nilai persatuan dan kesatuan yang dijadikan alas

pendirian negara dan pembentukan bangsa ini. Semoga buku ini bermanfaat, khususnya demi upaya membangkitkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengenang jasa-jasa para pendiri bangsa ini. Diharapkan buku ini juga dapat membangkitkan kesadaran bangsa ini akan pentingnya memahami sejarah perjuangan bangsa ini, demi terwujudnya masyarakat yang berbudaya yang memiliki identitas tersendiri di antara bangsa-bangsa lain demi kejayaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta, 28 Oktober 2013

R.Tjahjopurnomo

Daftar Isi

Peter Kasenda

Soetomo, Etnosentrisme dan Natiosentrisme

Kewajibannya kaum intelektual kita,
yaitu menjaga supaya rakyat menaruh kepercayaan kepada kita,
sehingga dengan kepercayaan ini mereka lalu
berdiri dibelakang kita . Buat ini haruslah dijaga
dengan tak pandang susah payah dan kerugian sehingga
pergerakan vak itu menjadi suatu kenyataan dari pada suatu
organisasi yang kuat, yang tidak dapat dibinasakan pula.

Soetomo

Sebelum tahun 1945 tak pernah ada Indonesia, yang ada hanyalah sekumpulan pulau yang menbentang di garis Khatulistiwa yang oleh Belanda disatukan ke dalam Hindia (the Netherland East Indies). Pada tahun 1898 seorang ratu baru Wilhelmina naik ke tahta Kerajaan Belanda. Imperium Khatulistiwa Wilhelmina, hanya dikenal sebagai Indies, saat itu berpenduduk lebih dari 28 juta orang di pulau Jawa dan sekitar 7 juta lainnya di daerah yang dulu disebut Pulau-pulau Luar (Outer Island), meskipun belum semua pulau ini dikuasai oleh Belanda. Walau ia berkuasa sampai dengan akhir masa kolonial. Wilhelmina tak pernah mengunjungi koloninya. Ia tak pernah melihat derasnya musim penghujan, hamparan permadani hijau di kaki gunung berapi, atau panas yang menyengat, namun setiap ia berulang tahun, perayaan besar digelar di negeri itu, lengkap dengan pasar malam dan gapura-gapura plengkung.

Untuk menciptakan sebuah koloni modern para abdi setia Wihelmina harus menyelesaikan penaklukan yang telah dimulai saat nenek moyang mendirikan kota pelabuhan Batavia di ujung pulau Jawa pada tahun 1619. Penting bagi Indonesia sebagai sebuah koloni tak terencana bahwa Batavia didirikan atas pertimbangan bisnis, bukan karena semangat

ekspansionisme bangsa Belanda. Orang-orang Belanda abad ketujuh belas yang merancang koloni adalah para investor perusahaan multinasional pettama di dunia Vereenigde Oost-Indische Compagnie Batavia menjadi pusat-pusat jaringan perdagangan Asia perusahaan ini.

Selama 200 tahun berikutnya, Kompeni memperoleh penaklukan-penaklukan tambahan sebagai pangkalan perdagangan, dan membentengi kepentingan mereka dengan secara bertahap mengambil-alih daerah-daerah sekitarnya. Pada tahun 1800 Kompeni telah mulai mengendor, tetapi orang-orang Belanda telah menguasai sebagian besar Jawa, sebagian besar pulau Sumatera, pulau-pulau rempah-rempah Maluku yang legendaris, dan daerah-daerah-daerah pedalaman dari berbagai pelabuhan yang telah mereka kuasai, seperti Makasar di pulau Sulawesi dan Kupang di Pulau Timor.

Pada akhir abad kesembilan belas, teknologi kapal uap dan pembukaan Terusan Zues memperpendek waktu perjalanan dari Eropa, dan munculnya sikap-sikap ekspansionis. Belanda, yang bernostalgia dengan kejayaannya sebagai salah satu adidaya perdagangan dunia pada abad ketujuh belas, bergabung dalam kompetisi imperium yang tengah mendominasi mentalitas Eropa. Meskipun ada klaim bahwa pemerintah Belanda tidak memiliki kebijakan agresi, tetapi hanya kebijakan imperialisme setengah hati, mulai dari tahun 1870-an dan seterusnya Belanda terlihat dalam serangkaian perang untuk memperbesar dan mengukuhkan kepemlikan mereka.

Usaha habis-habisan yang dilakukan Belanda untuk membangun imperium dimulai dengan upaya penaklukan kesultanan Aceh yang kuat dan mandiri. Nama Aceh juga berlumuran darah pada abad kesembilan belas. Perancis, Inggris, Belanda, semuanya berusaha mengukuhkan kekuasaan mereka di Aia Tenggara, dan tergiur dengan kekayaan alam yang ditawarkan Aceh, khususnya lada dan minyak. Pada tahun 1873 Belanda menyerang Aceh, dengan tak terlalu menyadari bahwa ia kelak memerlukan tiga puluh tahun lamanya untuk menaklukan Aceh. Pada tahun 1909, Belanda telah berhasil mendirikan sebuah wilayah yang terintegrasi melalui penaklukan-penaklukan (Adrian Vickers, 2011 : 13 – 21)

Hal yang mendasari perubahan yang mulai terjadi di Indonesia pada awal abad ke-20 adalah kebijakan kolonial baru yang dikeluarkan. Pemerintah Belanda pada 1901, yaitu Politik Etis. Motivasi dari kebijakan ini adalah gabungan antara keprihatinan terhadap menurunnya kesejahteraan orang Jawa dan keinginan eksportir barang manufaktur Belanda untuk meningkatkan daya beli masyarakat besar yang berpotensi sebagai konsumen pasar. Praktek kebijakan ini berlangsung sama di seluruh daerah, yaitu memperdalam intervensi pemerintah untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan dan produktivitas, serta untuk membuka jalan bagi masyarakat lokal untuk terjun dalam bidamg politik. Lebih banyak sekolah, pusat kesehatan, kebebasan berpolitik dan dewan perwakilan adalah sejumlah tanda yang paling nyata atas Politrik Etis yang diterapkan di kota-kota Indonesia seperti Batavia.

Pendidikan adalah salahsatu kekuatan pendorong zaman. Hal ini terutama berlaku terhadap Batavia sebagai pusat pendidikan terbesar yaitu tempat berdirinya sebagian besar lembaga pendidikan menengah dan tinggi di koloni. Para pemimpin setiap setiap kelompok etnis sangat mempercayai kekuatan sekolah modern. Tanpa pendidikan modern tidak mungkin membayangkan perkembangan nasionalisme.

Bagi kaum Etisi – orang Eropa yang secara ideologis berkomitmen terhadap Politik Etis – berharap bahwa pendidikan akan menguntungkan orang Indonesia dan menciptakan ikatan antara penduduk koloni dengan penguasanya. Pada tahun-tahun awal abad ke-20, perasaan terhadap keinginan menciptakan ikatan tersebut sangat kuat dan dikenal sebagai " Ide Asosiasi", pengharapan bahwa setelah diperkenalkan kepada budaya Barat melalui sekolah modern, orang Indonesia – bahkan yang termasuk penganut Islam taat – akan menyadari kebesaran budaya tersebut dan belajar mengapresiasi keinginan tulus pemerintah kolonial untuk mengangkat kedudukan mereka. Pada akhirnya, hal ini akan menciptakan kerjasama antara penguasa dan yang dikuasai untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menyebarkan manfaat-manfaat kebudayaan Barat – individualisme, kemajuan material, pemikiran ilmiah – kepada rakyat Indonesia pada umumnya.

Sekolah-sekolah Belanda berupaya menanamkan loyalitas terhadap Kerajaan Belanda. Anak-anak sekolah dari berbagai kelompok etnis mempelajari sejarah dan geografi Belanda serta merayakan semua hari peringatan Belanda. Peringatan Hari Ulang Tahun Ratu merupakan peringatan paling penting, anak-anak akan mengenakan pakaian putih terbaik mereka dan kain selempang berwarna oranye (warna Keluarga Kerajaan Oranje-Nassau) serta menyanyikan lagu-lagu Belanda. Namun yang paling penting, paparan terhadap ide-ide Barat telah mengubah kehidupan orang Indonesia yang nenerima pendidikan modern.

Orang Indonesia yang belajar di Batavia mulai berpikir secara independen tentang kebudayan mereka sendiri dan juga pemerintahan kolonial. Mereka banyak membaca teori dan sejarah politik Eropa serta mulai menerapkan pandangan Eropa tentang kebebasan dan hak menentukan nasib bangsa pada situasi mereka sendiri. Mereka bertanya-tanya, kepada siapa lotalitas mereka harus diberikan. Sebagian dampak pendidikan Di Batavia berasal dari berbaurnya para pelajar dari seluruh nusantara. Untuk pertama kalinya pemuda Jawa tidak hanya bertemu dengan pemuda Eropa namun juga dengan pemuda Sumatera, Ambon dan Sunda. Dampaknya membingungkan dan mengairahkan. Meskipun pada mulanya kecintaan terhadap daerah masing-masing mendorong mereka untuk membentuk organisasi seperti Jong Java dan Jong Ambon, kebutuhan untuk berbaur dengan lainnya menghasilkan banyak kesadaran terhadap kesamaan budaya dan pertanyaan yang sama terhadap kekuasaan kolonial.

Jadi tidak terlalu mengherankan bila kebangkitan politik terjadi di awal abad ke-20 di kalangan pelajar Indonesia di Batavia. Awal nasionalisme Indonesia modern secara

konvensional dianggap dimulai pada 1908 dengan pembentukan Budi Utomo, yaitu suatu organisasi yang didirikan oleh para prelajar STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen), sekolah dokter pribumi di Weltevreden yang sekarang dilestarikan sebagai tempat bersejarah. Pada saat itu, STOVIA merupakan satu-satunya lembaga pendidikan tinggi di Batavia. Setelah itu didirikan Rechts Hogeschool atau RHS (sekolah hukum) pada 1926 dan Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte (Fakultas Ilmu Budaya) pada 1940. Sementara itu, di Bandung terdapat Technische Hogeschool (sekolah tinggi teknik) pada 1920. Sebenarnya, Budi Utomo merupakan organisasi Jawa dan berfokus pada kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, inilah organisasi pertama yang didirikan oleh orang Indonesia. (Susan Blackburn, 2011 : 132 – 136)

Menurut *moral prescription*, pernindasan suatu bangsa terhadap bangsa lain tidak diperkenankan. Hal-hal semacam itulah yang menjadi pertimbangan didirikan organisasi-organisasi yang mengandung unsur antikolonial. Dengan *moral prescription* yang sama banyak gerakan nasional memaklumkan perlawanan terhadap Belanda yang disebut orang *sana* untuk membedakannya dengan orang *sini* – orang-orang Indonesia. Hampir semua gerakan nasional adalah gerakan tantangan. Sebutlah sejak Budi Utomo sampai tercapainya kemerdekaan.

Bilamana setiap gerakan nasional adalah gerakan tantangan, maka ideologi yang tumbuh adalah ideologi penantang. Dia berusaha secara perlahan-lahan dalam kesadaran kedaerahan, kesukuan, dan lantas mencapai tingkat kesadaran kebangsaan; berkembang menjadi kesadaran akan kemampuan menentukan nasib sendiri dan akhirnya mengusir penjajah dan merdeka. Nasionalisme tidak dapat dilihat di luar kerangka ini. Atau sekurang-kurangnya secara historis nasionalisme tidak dapat dilihat terlepas dari lingkungan sosial-politik tersebut dalam arti nasionalisme adalah ideologi penantang (Daniel Dhakidae 1986 : 61 – 62)

Proses perubahan dari etnosentrisme ke nasiosentrisme, seperti dari regionalisme ke nasionalisme, tidak terjadi tanpa menimbulkan ketegangan atau antagonisme antara kedua ideologi itu. Kita mengetahui bahwa pergerakan nasional pada fase permulaan ditandai oleh nasionalisme regional, misalnya, nasionalisme Jawa, Ambon dan Sumatera. Ternyata etnosentrisme bercokol kuat dalam alam pikiran protagonisme nasionalisme, sehingga nasionalisme Jawa didasarkan atas persepsi sejarah bahwa di masa lampau kebesaran Jawa menjulang tinggi mendominasi panggung sejarah Indonesia. Peradaban Jawa digambarkan mencapai puncak perkembangannya. Seperti Wahidin sendiri dalam wejangannya kepada para pemuda, membayangkan suatu kerajaan besar Jawa di masa depan. Dalam proses pergerakan nasional, diperlukan hampir dua puluh tahun untuk menumbuhkan nasionalisme Indonesia, dengan mengesampingkan nasionalisme regional (Sartono Kartodirdjo, 1983 : IX)

Sekolah Dokter Djawa

Ekspansi besar-besaran modal swasta, terutama yang berasal dari Belanda, ke dalam sektor pertanian perkebunan Hindia Belanda selama tiga puluh tahun terakhir abad XIX, tidak saja mendorong proses industrialisasi tetapi juga menimbulkan konsekuensi bersifat struktural dalam sistem kemasyarakatan Hindia Belanda. Wajah Hindia Belanda yang lama secara perlahan, tetapi pasti, berubah bentuknya menjadi berkarakteristik modern. Muncul sejumlah tanda modernitas. Misalnya, pertama, bentuk dan susunan negara dan kenegaraan tidak lagi hanya bersifat sebagai instrumen penjarah hasil produksi koloni. Selain merasionalkan susunan birokrasinya, dengan memperkenalkan sistem gaji, negara di satu pihak, mulai menjalankan peran sebagai penyelengara dan pengatur berlangsungnya proses-proses produksi yang dimotori oleh modal swasta, dan soal bagaimana memperoleh alat-alat produksi, untuk tanah dengan mempermaklumkan Undang-Undang Agraria tahun 1870, di dalamnya, antara lain mengatur penyewaan tanah dan Undang-Undang Pajak Kepala 1882 yang merupakan salah satu kekuatan pendorong lahirnya pasar tenaga kerja bebas, sampai pasa soal bagaimana hasil produksi swasta, yang dari tahun ke tahun makin membesar volumenya, dapat dibawa ke pasar di Eropa, dengan jalan memperbaiki pelabuhan-pelabuhan utama dan membangun berbagai lintasan jalan kereta api di Pulau Jawa.

Di pihak lain, negara kolonial juga mulai memperhatikan nasih penduduk pribumi, meski tetap berada dalam logika ekonomi kolonial. Sejumlah program, seperti sistem pengajaran, mengupayakan agar penduduk pribumi bisa menyesuaikan diri dan ikut terlibat dalam proses modernisasi yang tengah berlangsung. Ini mengingat berlangsungnya kenyataan ironis; sementara ekonomi masyarakat kolonial berkembang pesat, perkembangan tersebut tak dapat disentuh oleh penduduk pribumi. Sebagaimana diperlihatkan dalam sebuah laporan yang dibuat oleh *Mindere Welvaart Commissie*, tingkat kemakmuran penduduk pribumi justru mengalami penurunan semenjak dasawarsa terakhir abad XIX. Langkah negara kolonial yang diandalkan dapat mengatasi soal kemiskinan ini dikenal sebagai program *Politik Etis*.

Kedua, adalah terbentuknya suatu kelas menengah pribumi Hindia Belanda yang jumlahnya dari waktu ke waktu makin besar. Kelas, yang kebanyakan berasal dari lapisan atas masyarakat prakapitalis yang menyandarkan penghidupannya dari gaji dan karena itu bersifat sangat mobil (tak terkungkung dalam batas-batas geografis dan bidang aktivitas sosial ekonomis), merupakan produk salah satu atau beberapa sekolah berikut : Tweede Klass Indlandsche Scholen (HIS); Eeuropeesche Lagere Schole (ELS); Hollandsche Burgerscholen (HBS), School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) dan Opleiding School van Indlansche Ambtenaren (OSVIA).

Meski fungsi awal penciptaan kelas menengah di dalam stuktur masyarakat kolonial Hindia Belanda adalah pengisi pasar tenaga kerja yang relatif mempunyai keahlian, tetapi tidak jarang, karena alasan-alasan tertentu, lambat laut secara sadar muncul kecenderungan yang menegasikannya. Daripada memenuhi maksud dasar permakluman pengajaran kolonial seperti itu, mereka malah memasuki bidang kegiatan yang sebelumnya jarang atau mungkin tidak pernah dilakukan kalangan penduduk pribumi; aktivitas dalam bidang jurnalistik dan pendirian organisasi-organisasi. (Swarsono, 2000 : 11 – 12)

Pada permulaan abad kedua puluh perluasan pola kepemimpinan masyarakat Indonesia hampir merupakan suatu perkembangan khusus di kalangan priyayi sendiri dan perasaan jarak sosial tetap merupakan suatu kekuatan yang ampuh di kalangan elit. Salah satu sumber yang menghasilan anggota-anggota elite baru adalah sekolah "Dokter Djawa" yang telah mengadakan reorganisasi (pada tahun 1900-1902) dan muncul sebagai sekolah untuk mendidik dolter pribumi (STOVIA)). Rangsangan perbaikan sekolah tersebut pada pertukaran abad ini berasal dari penguasa perkebunan di Deli (Sumatera Timur) yang terutama berminat untuk mendapatkan tenaga-tenaga medis yang lebih baik, tetapi lebih murah, Pekerja-pekerja di perkebunan-perkebunan Sumatera sebagian besar dimasukan ke Sumatera dari Jawa dengan perjanjian kontrak, oleh karena persediaan tenaga buruh setempat tidak dapat memenuhi kebutuhan. Karena persediaan dan pengurusan buruh merupakan masalah yang lebih susah daripada di Jawa, para pengusaha perkebunan pun menekankan sekali soal kesehatan pegawainya. Dokter-dokter Eropa sukar didapat dan mahal gajinya. Perusahaan-perusahaan perkebunan di Delf ini melihat, jalan keluar dari kesulitan mereka ialah mendidik orang Indonesia sampai pada batas kesanggupan menjalankan sebagian besar pekerjaan yang dilakukan oleh dokter yang berpendidikan lengkap. Di bawah pimpinan Dr. H.F, Rool dan disokong oleh Departemen Pendidikan, pendidikan kedokteran pun dikembangkan. Sekolah ini sekarang memberikan enam tahun pendidikan untuk menyambung tiga tahun tingkat persiapan bagi sebagaian besar mahasiswa.

Karena kedudukan dokter pribumi tidak mendapat penghargaan yang tinggi di masyarakat Indonesia, bermacam-macam daya penarik pun dipakai untuk menarik minat mahasiswa. Sudah sejak tahun 1891 diputuskan untuk mengizinkan semua pemuda yang menyatakan berminat pada pendidikan " Dokter Djawa" untuk mengikuti sekolah dasar Eropa tanpa dipungut bayaran. Daya tarik ini diikuti perjanjkian yang ditandatangani oleh orangtua, bahwa anak mereka akan bekerja pada pemerintah selama beberapa tahun setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Hal ini penting karena gaji dokter sebagai pegawai pemerintah agak rendah dan praktek swasta menggiurkan. Pada tahun 1904 daya tarik ditambah dengan menjanjikan pada mahasiswa yang berbakat gaji sejumlah f 150 sebulan begitu ia tamat dengan kesempatan dinaikkan secepatnya tiga kali jumlah tersebut. Tetapi ini pun tidaklah dianggap sebagai kompensasi yang besar dari jumlah usaha yang dijalankan selama proses pendidikan (Robert Van Niel : 1984 : 75 - 81)

Sekolah Dokter Jawa didirikan sejak permulaan tahun 1851. Ia membebaskan uang sekolah bahkan memberi biaya-biaya pemondokan bagi mereka yang bersedia dididik menjadi asisten-asisten kesehatan. Sekolah itu mulai dengan tiga tahun lama pendidikan, kemudian menjadi diperpanjang dan diperbaiki menjadi lima tahun, kemudian menjadi tujuh tahun dan akhirnya menjadi sembilan tahun pada tahun 1908. Sekolah Dokter Jawa menerima status akademis yang penuh sebagai STOVIA dalam tahun 1902, sementara lama pendidikannya masih tetap tujuh tahun.

Dalam dasawarsa pertama abad ini, meskipun profesi kedokteran menerima kehormatan akademis yang tinggi dari orang-orang Belanda malahan dari mereka yang diam di Negeri Belanda sendiri status sosialnya di kalangan masyarakat Jawa masih sangat rendah. Priyayi-priyayi Jawa, terutama priyayi birokratis dari pemerintahan, menerima pejabat-pejabat kesehatan dengan rasa permusuhan. Mereka kesal akan apa yang mereka lihat sebagai kedatangan priyayi baru. Seorang mahasiswa di sekolah kedokteran menerima delapan gulden sampai 20 gulden per bulan, hampir dua kali lipat dari yang diterima oleh seorang magang yang bekerja sebagai juru tulis.

Kemarahan terhadap perluasan golongan priyayi seperti itu, terutama terhadap priyayi berpendidikan Belanda yang menerima kedudukan di luar birokrasi administrasi Jawa, dalam profesi kesehatan atau guru umpamanya, sampai tingkat tertentu adalah disebabkan skala gaji yang diterima oleh priyayi progesional "baru" ini, bagi pelayanan-pelayanan yang mereka persembahkan kepada masyarakat. Umpamanya, begitu tamat seorang dokter kesehatan akan dipekerjakan atas skala gaji berkisar 75 gulden sampai 150 gulden per bulan. Skala gaji seperti itu adalah sama seperti skala gaji untuk asisten wedana kelas satu, kedudukan tertinggi yang dapat dicapai oleh priyayi bukan ningrat, itu pun hanya sesudah menjalankan dinas yang lamanya sampai 16 tahun. Tetapi walaupun sekolah kedokteran membebaskan para mahasiswanya dari kewajiban membayar uang sekolah, dan menerima gaji yang tinggi sesudah lulus, kedudukan-kedudukan yang menarik seperti itu tidak menyebabkan bertambah besarnya jumlah priyayi muda yang menuntut ilmu di bidang itu. Barangkali patokan-patokan penerimaan yang kaku dan pekerjaan belajar yang "kasar" merupakan penghalang bagi priyayi muda. Kecuali itu adalah merupakan sikap umum pada waktu itu di kalangan priyayi untuk menganggap Sekolah Dokter Jawa atau STOVIA sebagai suatu sekolah untuk orang miskin, dan bahkan priyayi bukan-ningrat yang berkedudukan rendah akan terus mengirimkan anak-anak mereka ke Sekolah Kepala atau OSVIA, jika mereka mampu menanggungnya.

Melihat Sekolah Kedokteran itu secara tersendiri, sambutan priyayi Jawa terhadap sekolah tersebut agak mengecewakan dan dilatarbelakangi oleh kekolotan. Sekolah itu bukan hanya memberikan pendidikan yang baik dengan cuma-cuma melainkan juga sejak tahun 1875, ketika lamanya belajar diperpanjang sampai enam tahun, para mahasiswa telah

mempelajari juga bahasa Belanda. Tidak seperti di Sekolah Guru dan di Sekolah Kepala, di mana bahasa pengantar adalah bahasa Melayu, karena alasan tersebut di atas penguasaan bahasa Belanda oleh para mahasiswa kedokteran sangat baik. Kecuali itu, setelah tahun 1902, ketika sekolah itu menerima status akademis yang penuh, begitu lulusan STOVIA telah menyelesaikan ikatan-dinasnya dengan pemerintah, mereka dapat melakukan praktek umum sebagai dokter-dokter pribumi. Mereka dapat membebaskan diri dari ketergantungan kepada pemerintah kolonial Belanda dalam suatu cara, dalam cara mana, seorang guru yang cakap atau seorang pejabat pemerintah yang cakap tidak dapat berbuat hal yang sama; dan tambahan juga para dokter pribumi itu masih dianggap sebagai bagian golongan priyayi. Mereka mampu memperoleh penghasilan dengan cara yang bebas seperti yang dilakukan oleh para pedagang santri Jawa atau pedagang-pedagang Cina, namun demikian di dalam bentuk masyarakat Jawa mereka dihormati sebagai priyayi. Ini merupakan kasus yang belum pernah terjadi, di mana sekelompok priyayi Jawa dididik berdasarkan profesi dalam pengertian Barat, dan mencapai kemampuaan-kemampuan profesi yang sama dengan Belanda, yang sama-sama dididik dalam bidang khusus ini, dan mereka sama luwesnya seperti Belanda dalam memilih bentuk pekerjaan mereka. (Prastiti Savitri Scherer : 1985 : 45 – 47)

Karena pelajar dan lulusan STOVIA mempunyai status yang belum pernah mapan dalam struktur masyarakat Jawa terkemuka, dan karena juga hanya merekalah dalam golongan priyayi yang berhasil dan mempunyai kesempatan untuk memperoleh kebebasan ekonomi dari kantor administrasi kolonial Belanda, karena itu adalah wajar kalau merekalah yang dapat mengutarakan kekesalan, terhadap bentuk dan nilai usang masyarakat tradisional, atau merekalah yang mempunyai keinginan untuk pembaruan sosial, atau bahkan mereka juga mempunyai kemauan-kemauan dinamis yang kelihatan luar biasa, untuk meningkatkan lebih jauh aspirasi-aspirasi pribadi mereka sendiri. Karena itu, unsur dinamika dari golongan priyayi dokter lebih terang dibandingkan derngan priyayi golongan guru-guru, karena pada saat ini, sebelum sistem pendidikan nasional berdiri, mereka yang disebut belakangan ini masih bergantung kepada administrasi kolonial Sedangkan mengenai para *regent*, wajarlah demi menjaga kepentingan sendiri, kalau mereka mempertahankan bentuk masyarakat yang sudah ada itu, yang hingga saat ini sangat menguntungkan mereka.

Tambahan pula kita harus menghitung besarnya pengaruh orang tua priyayi dokter ini dalam membentuk pendapat-pendapat radikal mereka. Umpamanya, banyak mahasiswa terkemuka dari STOVIA, seperti Tjipto dan Gunawan Mangunkusumo dan Soetomo, merupakan golongan priyayi professional angkatan kedua. Ayah-ayah mereka adalah guru-guru sekolah yang cakap, yang mendapat nama berkat pendidikan profesi mereka sebagai guru, dengan status sosial sebagai priyayi rendahan. Meskipun kemudian, para ayah ini sendiri mampu “memperbaiki” status sosial mereka (ayah Soetomo, Soewadji berhasil memasuki adminitrasi kolonial dan berkat kecakapannya mencapai kedudukan wedana, sedang ayah

Tjipto kemudian bekerja dalam pemerintahan adiministrasi kota Semarang sebagai pejabat tinggi), karena mereka hidup dalam zamannya dan karena macam pekerjaan dan kedudukan mereka, mereka belum mampu mengorganisasikan diri untuk mengungkapkan kemarahan-kemarahan dan kekecewaan-kekecewaan terhadap ketidakadilan sosial di mana mereka harus tunduk.

Keadaannya tidak demikian ketika Tjipto dan Soetomo menjadi dokter dan calon dokter. Mereka berada dalam suatu situasi, yang pada satu pihak telah mempunyai pendidikan intelektual yang memperkuat kepekaan mereka akan ketidakadilan di masyarakat, dan di lain pihak, sebagai akibat pengalaman getir orang tua mereka yang telah dipaksa tunduk dalam suatu susunan masyarakat yang timpang, mereka didorong menjadi aktivis dalam masalah-masalah pembaruan sosial. Karena itu sangat wajar kalau merekalah yang memainkan peranan utama dan mampu menyatakan pendapat-pendapat yang kuat mengernai keadaan sosial di Jawa pada kongres pertama Boedi Oetomo tahun 1908, dan bukan priyayi-priyayi lain yang lebih senior maupun dengan latar belakang kekeluargaan yang berbeda.

Boedi Oetomo

Tetapi sebelum ini berlangsung, sebelum Tjipto dan Soetomo mengambil peranan aktif mengorganisasikan priyayi Jawa ke dalam suatu persatuan, perkembangan-perkembangan lain yang penting telah berlangsung. Dalam tahun 1906 atau sekitarnya, ketika seorang dokter Jawa Wahidin Soedirohoesodo, sedang mengelilingi seluruh Pulau Jawa mengumpulkan bantuan keuangan bagi pembangunan suatu dana beasiswa untuk membantu para mahasiswa dalam pendidikan mereka, keadaan-keadaan priyayi professional Jawa dan priyayi bukan birokratis atau bahkan keadaan-keadaan masyarakat priyayi bukan-ningrat umumnya, sudah matang dan siap menerima dan melancarkan perubahan. Di kalangan inilah terutama pandangan perubahan itu diterima dengan penuh semangat. Dengan demikian dalam tahun 1908, dan bukan dasawarsa sebelumnya atau sesudahnya, sebuah persatuan dengan menerima pandangan yang diusulkan oleh Wahidin. Persatuan itu kemudian dinamakan Boedi Oetomo dan dimaksudkan untuk menghimbau seluruh priyayi. Sebagaimana ternyata kemudian hanya priyayi bukan ningrat, priyayi birokratis rendah, guru-guru dan dokter-dokter kesehatanlah yang mendukung persatuan itu, dan perkumpulan ini secara efektif hanya membatasi diri kepada peningkatan dan perlindungan kepentingan-kepentingan merreka saja.

Dalam tahun 1908, priyayi-priyayi ini, meskipun bukan ningrat atau bukan birokratis, atau berpendidikan Belanda dan terdidik berdasarkan profesi, telah bersatu dan muncul sebagai satu golongan yang secara resmi mengumumkan kepada seluruh masyarakat

penguasa Jawa lainnya tentang kemunculan mereka sebagai suatu kekuatan sosial. Priyayi-priyayi ini juga ingin melindungi kepentingan-kepentingan mereka dan meningkatkan mereka lebih tinggi dari semua anggota-anggota masyarakat lainnya. Dengan demikian, program utama Boedi Oetomo, berusaha meningkatkan dan membuat lebih banyak dan lebih baik pendidikan Belanda untuk priyayi suapaya priyayi-priyayi itu mampu untuk berlomba lebih baik dalam dunia modern.

Ketika Boedi Oetomo berada di ambang pintu pembentukannya, dan Wahidin sedang mengelilingi Jawa mengumpulkan dana beasiswa dan para mahasiswa di STOVIA sedang mengorganisasikan diri untuk mengambil alih pandangan Wahidin dan mengembangkannya menjadi suatu persatuan yang lebih konstruktif, pada saat yang sama, masyarakat priyayi Jawa sendiri, seperti telah diterangkan di atas, bukanlah merupakan satu golongan yang serba sama dengan kepentingan-kepentingan yang serba sama. Pada waktu itu, ketika Wahidin menghimbau dukungan dan dana-dana dari orang-orang Jawa yang berkedudukan tinggi dalam pemerintahan, para mahasiswa di STOVIA dipimpin oleh Soetomo, mulai mempersiapkan dasar persatuan secara konsepsional.(Savitri Prastiti Scherer, 1985 : 45 – 5 6)

Organisasi kaum muda Jawa ini didirikan oleh Soetomo pada hari Minggu rabnffal 20 Mei 1908 pukul sembilan pagi. Tepuk tangan gemuruh menyambut pernyataan kelahirannya. Para hadirin yang berkumpul di aula STOVIA tidak saja para siswa sekolah ini, tetapi juga siswa-siswa dai sekolah pertanian dan kehewanan di Bogor, sekolah pamoing praja bumiputra di Magelang dan Probolonggi, siswa-siswa sekolah menengah petang di Surabaya, dan sekolah-sekolah pendidikan guru bumiputra di Bandung, Yogyakarta, dan Probolinggi. Seruan kelompok STOVIA dengan cepat tersebar di seluruh Jawa. Walaupun sepanjang dasawarsa-dasawarsa kemudian tanggal 20 Mei ini selalu dirayakan oleh bangsa Indonesia sebagai hari kebangkitan nasional, tidak banyak informasi yang tersingkap mengenai apa yang sebenarnya telah terjadi di aula itu. Mungkin sekali sekadar merupakan rapat pendahuluan untuk membicarakan masdalah-masalah rganisasi pada masa mendatang. Namun bagaimanapun banyak hal penting dan mendasar dalam organisasi timbul pada hari ini. Nama Boedi Oetomo, antara lain, secara resmi ditetapkan dalam rapat ini.

Di dalam mengorganisasi Boedi Oetomo, Soetmo mempunyai banyak rekan cakap yang membantunya, antara lain Goenawan Mangoenkoesoemo(yang bertugas memberikan keterangan pers), Soewarno (yang kekuatannya terletak pada ketajaman pena yang bisa menggerakan hati lawan-lawannya, sehingga mereka pun secara sadar atau tak sadar mengikuti cita-cita Boedi Oetomo), Goemberg, Mohammad Saleh, Soelaiman dan Soeradji (yang mencurahkan seluruh kepandaiannya dengan kemahiran dalam bahasa Jawa kromo, menjelaskan tujuan organisasi kepada angkatan tua di Jawa Tengah).

Beda dengan kegiatan Wahidin mula pertama menghimbau kepada pejabat bumiputra

senior, para siswa ini mencurahkan isaha mereka untuk merebut hati rekan-rekan sesama mereka di sekolah-sekolah lanjutan lainnya. Dengan cepat organisasi semacam berdiri pada tiga dari delapan sekolah yang hadir pada rapat tanggal 20 Mei tersebut, yaitu di OSVIA Magelang, di sekolah pendidikan guru (normaalschool) di Yogyakarta, dan sekolah menengah petang (hogere-burgerschool) di Surabaya, sehingga pada bulan Juli 1908 jumlah seluruh anggota Boedi Oetomo mencapai 650 orang. Oleh karena jumlah murid STOVIA sedikit, maka jumlah anggota Boedi Oetomo dari sekolah ini pun hanya merupakan presentasi kecil dari seluruh anggota. Kendati demikian selama tahun-tahun pertama STOVIA tetap merupakan pusat kegiatan Boedi Oetomo. Namun semakin bertambah sulit oleh karena siswa-siswa ini harus memadu pekerjaan untuk organisasi dengan pelajaran mereka. Mereka sangat bersungguh-sungguh dalam cita-citanya mencapai pendidikan yang lebih tinggi, dan karier masa depan sebagai dokter. Maka selama tahun-tahun bergolak ini hanya seorang saja, yaitu Soelaiman, yang meninggalkan sekolahnya. Walaupun begitu beberapa guru STOVIA menjadi risau menghadapi kegiatan luar sekolah murid-murid mereka itu (Akira Nagazumi, 1989 : 62 – 65)

Suwarno yang mewakili mahasiswa-mahasiswa STOVIA mengeluarkan edaran menerangkan maksud dan tujuan persatuan, mengemukakan bahwa persatuan itu akan menjadi perintis terciptanya Persatuan Jawa Umum atau *Algemene Javansche Bond*, yang akan mempelajari segala cara bagi “ tercapainya suatu pembangunan negeri dan rakyat Hindia Belanda yang serasi.”

Suwarno berharap supaya Boedi Oetomo berkembang menjadi suatu persaudaraan ”nasional” tanpa perberdaan ras, jenis dan kepercayaan. Ia menekankan bahwa program ini perlu bagi kepentingan banyak golongan suku bangsa dan rakyat Hindia Belanda. Jadi paling sedikitnya segolongan muda yang akan menjadi pejabat-pejabat kesehatan dalam pemerintahan kolonial, dan bukan calon-calon birokrat, telah membayangkan Boedi Oetomo sebagai suatu sarana untuk membangun kesadaran bukan hanya untuk bangsa Jawa saja melainkan juga kesadaran seluruh rakyat Hindia Belanda.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, oleh karena sifat dasar dan komposisi golongan priyayi itu, yang digolongkan ke dalam beberapa golongan yang berbeda – priyayi ningrat dan bukan ningrat, priyayi birokratis dan bukan birokratis, guru-guru atau pejabat kesehatan, dan lain sebagainya, maka dokter-dokter kesehatan dan calon dokter itulah yang dapat menjadi bebas berdasarkan pekerjaan mereka yang kemudian menyita kesempatan untuk menggerakan perubahan, dan mulai mengorganisasikan priyayi itu ke dalam suatu persatuan. Begitulah situasi yang menuju ke pembentukan Budi Utomo yang diprakarsai oleh priyayi professional bukan ningrat, bukannya oleh priyayi ningrat birokratis. Sekalipun demikian, pada saat kongres pertama Boedi Oetomo dibuka, telah menjadi jelas bahwa ada perbedaan-perbedaan ideologi yang kuat di kalangan para pendiri Boedi Oetomo. sendiri.

Selama berlangsungnya kongres pertama di Yogyakarta, tanggal 3 – 5 Oktober 1908, perselisihan antara anggota-anggota priyayi professional angkatan tua yang diwakili oleh Wahidin Soedirohoesodo dan anggota-anggota angkatan muda yang berpikiran lebih maju yang diwakili oleh Tjipto Mangoenkoesoemo, pecah. Wahidin membuka kongres itu dengan sebuah pidato yang mengagungkan sejarah Jawa dan kemudian menekankan pentingnya pendidikan Barat bagi kemajuan Jawa. Yang dipikirkannya hanyalah pendidikan golongan priyayi itu, bukan pendidikan desa secara umum. Dwijosewaya, seorang guru bahasa Melayu pada sekolah guru di Yogya, menyatakan sekali golongan atas itu terdidik, seluruh masyarakat Jawa yang lain pasti akan menjadi terdidik di bawah bimbingan mereka. Mengungkapkan suatu pandangan yang berlawanan. Soetomo, salah seorang mahasiswa STOVIA berharap supaya Boedi Oetomo meningkatkan pendidikan di atas bentuk-bentuk pendidikan lainnya. (Savitri Prastiti Scherer : 1985 : 45 – 56).

Di samping itu terjadi perdebatan yang merupakan antagonisme antara konservatisme yang diwakili oleh Dokter Radjiman Wediodiningrat, seorang dokter Kraton Surakarta dan radikalisme yang diwakili oleh Tjipto Mangoenkoesoemo, seorang dokter yang bekerja di Demak, mengenai tujuan gerakan. Yang pertama menggunakan bahasa Jawa dan kedua memakai bahasa Melayu dalam mengemukakan buah pikirannya. Yang pertama menghendaki langkah secara bertahap dalam mencapai kemajuan dengan mengikuti jenjang yang ditetapkan oleh penguasa, sedang yang kedua tidak puas dengan gerakan yang hendak meningkatkan taraf pengajaran kaum bumiputra, tetapi mencita-citakan suatu pendobrakan masyarakat kolonial dan tradisional dengan segala kekolotan, statisme, diskriminasi, tradisi yang menekan. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan gerakan yang lebih bersifat politik radikal. Dalam konteks masa itu sudah sewajarnya dipakai istilah radikal, oleh karena dipandang membahayakan kedudukan penguasa kolonial. Perdebatan antara Radjiman Wediodiningrat dengan Tjipto Mangoenkoesoemo merupakan salah satu titik puncak kongres Boedi Oetomo oleh karena konfrontasi antara kedua pendiri itu mencerminkan orientasi yang berbeda dalam menghadapi Westernisasi. Muncullah di atas permukaan konflik antara dua sikap kultural yang sangat menarik antara dua tokoh golongan intelgensia modern. Kecuali faktoir kepribadian, perbedaan itu juga ditentukan oleh faktor pengalaman serta lokasi sosial tokoh-tokoh itu.

Meskipun Radjiman kelak (1909) mengenal peradaban Barat dan dekat dalam kunjungannya ke Negeri Belanda untuk studi, namun pada 1908 persepsi kulturalnya menunjukkan pada kenyataan bahwa pada hakikatnya peradaban Barat dan Timur itu berlainan. Ditegaskannya bahwa nasionalisme Jawa perlu dipertahankan, lagi pula pengetahuan Barat tidak sesuai dengan nasionalitas Jawa serta kebudayaannya sehingga tidak memberikan hasil. Dengan semboyannya “Bangsa Jawa tetap Jawa” itu Radjiman benar-benar menunjukkan indentitasnya yang masih sangat Javanosentris, suatu fakta yang hanya dapat dipahami apabila dia ditempatkan kembali dalam sosio-kulturalnya serta zamannya.

Tjipto Mangoenkoesoemo membantah kesemuanya itu dan mengutarakan bahwa bangsa Indonesia perlu memanfaatkan pengetahuan Barat dan unsur-unsur kultural lainnya, sehingga dapat memperbaiki tingkat lkehidupannya. Pendirian Tjipto ialah bahwa sebelum persoalan-persaoalan kebudayaan dapat dipecahkan terlebih dulu diselesaikan masalah politik. Kunci untuk mengatasi pelbagai kesukaran adalah aksi politik. Dalam hubungan ini dibayangkan terciptanya alam demokratis di Indonesia.

Pernyataan seperti itu bagi zamannya serta konteks sosialnya terasa amat ekstrem, radikal, kalau tidak boleh dikatakan revolusioner. Ide-ide itu menunjukkan rasionalitasnya yang tinggi serta analisis yang tajam, namun persepsi dengan jangkauan jauh ke masa depan itu belum dapat menarik tanggapan yang luas. Unsur-unsur dalam Boedi Oetomo pada umumnya dan pemimpin-pemimpin khususnya, meskipun mungkin tidak semuanya sekonservatif Radjiman, teralalu terikat pada lokasi sosial serta kebudayaannya. Tidak mengherankan apabila Tjipto menduduki tempat terpencil sehingga kemudian meninggalkan Boedi Oetomo, (Sarto Kartodirdjo, 1990 : 103 – 104)

Kongres pertama Boedi Oetomo sudah selesai, dan resolusi-resolusinya telah menjadi pernyataan resmi dari aspirasi-aspirasi Jawa. Keputusan yang telah disetujui para anggota secara konsensus menetapkan bahwa Budi Utomo pada tahap ini akan menolak pengembangan politik bagi golongan priyayi dan sebaliknya akan memiliki pengembangan kebudayaan. Kecuali itu, Boedi Oetomo menolak gagasan pembaruan-pembaruan sosial secara radikal pada semua tingkat masyarakat Jawa dan memilih untuk mempertahankan Boedi Oetomo sebagai suatu persatuan priyayi ekslusif, membela kepentingan priyayi di atas segalanya, sementara itu menggabungkan golongan priyayi professional baru secara serasi ke dalam golongan terkemuka yang selama ini lebih banyak diduduki oleh priyayi birokratis ningrat dan regent-regent mereka.

Dengan demikian, melalui pemikiran sekelompok priyayi professional, Boedi Oetomo menciptakan suatu golongan Jawa pada pintu gerbang yang akan mempunyai pengaruh kuat terhadap masyarakat Jawa tradisional, bukannya untuk bertindak untuk meningkatkan perubahan, melainkan mengambil kedudukan selaras dengan nilai-nilai sosial yang telah ada. Sifat radikalnya yang semula telah ditumpulkan dan timbul mempertahankan sistim yang lama dan bukannya memperbaruinya.

Sepanjang menyangkut sejarah priyayi, tahun 1908 merupakan tahun di mana priyayi professional, birokrat-birokrat bukan ningrat, dan mahasiswa-mahasiswa muda di STOVIA memutuskan bersama Boedi Oetomo menjadi pemimpin-pemimpin Jawa konformis daripada reformis di masa mendatang. Priyayi-priyayi lain, yang menghendaki pembaruan-pembaruan sosial secara radikal daripada melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan, harus membentuk dan mengembangkan organisasi-organisasi lain untuk mewujudkan gagasan

mereka memodernisasikan masyarakat Jawa. (Savitri Prastiti Scherer, 1985 : 60 – 61)

Sebagai tanda penghargaan, selama berlangsungnya kongres pertama, Tjipto dan Soerjodipuro yang dianggap mewakili anggota-anggota angkatan muda, dipilih sebagai anggota biasa untuk panitia kerja. Kedua mereka mencoba di hadapan kongres kedua bulan September 1909, membuat organisasi itu menjadi organisasi politik dan memperluas keanggotaannya selain orang Jawa dan Bali mencakup semua penduduk Hindia Belanda, termasuk masyarakat Indo-Eropa dan masyarakat Cina. Usul-usul mereka itu ditolak, dan mereka memutuskan untuk mengundurkan diri dari panitia itu. Mereka digantikan oleh Koesoemo Oetojo, yang pada waktu itu *regent* Jepara, dan Danusugondo*, regent* Magelang.

Pada waktu itu sudah jelas bahwa persatuan itu didominasi oleh priyayi-priyayi professional golongan tua, dipimpin oleh Dwijasewaya, Wahidin dan Radjiman, yang masih berusaha bekerja secara serasi dengan anggota-anggota yang berpengalaman dari golongan priyayi birokratis. Anggota-anggota muda seperti Tjipto Mangoenkoesoemo dan Suwardi Surjaningrat keluar dan masuk ke dalam organisasi lain seperti Sarikat Islam dan Indische Partij, Soetomo dan Goenawan Mangoenkoesoemo, begitu juga mahasiswa-mahasiswa STOVIA lainnya memutuskan untuk tetap bersama Boedi Oetomo, secara resmi setuju bekerja sama dengan priyayi professional angkatan tua yang lebih konservatif supaya dapat bergabung dengan selaras bersama masyarakat priyayi birokratis yang lebih berpengaruh.

Dengan demikian dampak berrdirinya Boedi Oetomo di tahun 1908 bagi masyarakat Jawa elite dapat dilihat pada beberapa tingkat. Boedi Oetomo, lebih daripada persatuan yang mana pun yang berkembang kemudian di Jawa, dengan tepat menggambarkan perubahan yang telah terjadi dalam golongan priyayi Jawa, Boedi Oetomo adalah forum dalam mana priyayi Jawa (yang intinya kemudian menghasilkan pemimpin-pemimpin Indonesia masa mendatang) membedakan dirinya sendiri.

Boedi Oetomo memaksa golongan-golongan yang berbeda-beda itu mengorganisasikan diri mereka, tidak hanya sebagai kelompok-kelompok yang terpisah satu dari yang lain, melainkan juga dalam pertentangan satu sama lain Dengan demikian Boedi Oetomo bukan hanya gagal dalam tujuannya meningkatkan kehidupan yang selaras di kalangan masyarakat Jawa, tetapi sesungguhnya mempercepat perubahan dan perselisihan di lingkungan priyayi Jawa, yang mulai saat itu meledak ke permukaan. Priyayi Jawa dipaksa membentuk pandangan-pandangan dan cita-cita mereka dalam cara-cara yang berlainan-lainan; seperti konservatif, radikal, progresif, tradisionalis, reformis, dan revisionis. (Savitri Prastiti Scherer, 1985 : 57 – 59)

Sikap luwes kaum priyayi Jawa dalam menghadapi kondisi sosial yang berubah cepat, terlihat jelas di sepanjang dasawarsa permulaamn sejarah Boedi Oetomo. Pada

mulanya secara samar-samar partai mencerminkan cita-cita kaum terpelajar Jawa untuk pembangunan bangsa dan budaya. Sebab itu, maka perhatian terpusat pada pendidikan Barat yang dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk mengangkat derajat priyayi rendahan dalam hirarki kolonial. Cita-cita pendidikan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari kebangkitan kelas menengah bumiputra dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi., yang dengan sendirinya menyertai gejala untuk mengejar pendidikan Barat tersebut. Usaha untuk perbaikan kesejahteraan sosial bumiputra di daerah-daerah, lambat laun meluas, dan lambat laun pula haluan yang bersifat ekonomis beralih ke haluan yang bersifat politis. Pada saat ancaman peperangan menggugah pimpinan Boedi Oetomo akan perkunya pembelaan terhadap negeri sendiri, kesadaran yang berarti mempertahankan sebuah negeri yang ada di bawah kekuasaan Belanda, maka tergugah pulalah keberanian partai untuk menuntut imbalan mendapatkan hak perwakilan bagi rakyat bumiputra sebagaimana msetinya. Watak Boedi Oetomo selama sepuluh tahun yang seakan tidak menentu itu, sesungguhnya harus dilihat sebagai suatu kemajuan priyayi Jawa yang relatif lurus walaupun perlahan, setelah mereka menjadi semakin sadar bahwa ada berbagai cara untuk mencapai cita-cita sosial.

Dalam menilai bobot Boedi Oetomo, orang hendaknya tidak menghakiminya terlampau keras karena ketidakberhasilannya memberikan sebuah program politik yang konkret. Konsep program politik seperti itu belum pernah ada di Jawa sepanjang masa sebelum lahirnya organisasi ini. Oleh sebab itu Boedi Oetomo harus berangkat dari awal sekali. Demikian juga jangan lupa pada kenyataan, bahwa di sepanjang hidupnya Boedi Oetomo tidak pernah mempunyai keterpaduan dan daya, yang berhasil ditiupkan ke dalam tubuhnya oleh seorang pemimpin yang berkharisma. Tidak adanya pimpinan yang dinamis ini sangat relevan, mengingat seringnya muncul tokoh kharisma seperti itu sepanjang sejarah Jawa. Selanjutnya sikap moderat Boedi Oetomo sampai saat Perang Dunia I pun tidak bisa dilihat semata-mata sebagai akibat dari naluri kelas priyayi yang gila kedudukan atau sikap menyelamatkan diri. Seperti pernah dikemuakan Dwidjosewojo pada Tjipto Mangoenkoesmoe: “bertindak tenang dan lunak adalah watak Boedi Oetomo”. Dengan kata lain, sikap moderat bukanlah suatu keahlian yang dididikkan bagi priyayi, tetapi suatu naluri yang mengakar dalam-dalam pada etos Jawa. Kemampuan priyayi yang peka itu memungkinkan mereka memadu tema-tema yang seolah-olah bertentangan ; menjadi seorang Jawa yang baik tidak berlawanan dengan hasrat untuk mencapai pendidikan Baratl demi meningkatkan kedudukan di dalam hirarki kolonial. Demikian pula halnya, penggalakan proses modernisasi bisa sepenuhnya sejalan dengan meneruskan praktek bersembah terhadap kerabat keluarga raja-raja. (Akira Nagazumi, 1989 : 255 – 256)

Dengan berdirinya Boedi Oetomo bulan Mei 1908 lahirlah organisasi pribumi pertama Indonesia menurut model Barat, yaitu sebuah perhimpunan yang pengurusnya secara periodik diganti, memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta program kegiatan, mengadakan rapat-rapat dan kongres-kongres, dan anggotanya memiliki suara.

Setelah Budi Utomo, banyak menyusul lahir organisasi-organisasi lain. Dasawarsa kedua abad yang lalu merupakan ledakan panjang semangat berorganisasi. Tentang bangkitnya nasionalisme Hindia Belanda banyak ditulis dan dijelaskan. Faktor-faktor internasional turut berperan, seperti “Kebangkitan Asia”, yaitu gelombang antusiasme di dunia Asia bahwa dunia Barat dapat dikalahkan dengan senjatanya sendiri. Tatkala Eropah dalam Perang Dunia I membiarkan terjadinya pembantaian manusia yang belum pernah dikenal sebelumnya, Barat yang tadinya dikagumi kini diragukan dan bahkan dilecehkan. Empat belas pasal Presiden Woodrow Wilson dari Amerika Serikat, khususnya hak menentukan nasib sendiri bangsa-bangsa telah memberikan kesan mendalam kepada kaum nasionalis di Hindia pada tahun 1918. Lebih-lebih mereka terinspirasi oleh gerakan pembebasan di bagian-bagian dunia yang lain, seperti di India, Afrika Utara, dan Irlandia.

Tetapi perkembangan di Hindia sendiri dengan sendirinya penting juga. Politik Etis merupakan kebijakan resmi pemerintah sejak tahun 1901” {Pengangkatan kaum bumiputra” lahir dan batin dijunjung tinggi oleh kaum Etis). Dengan perluasan pendidikan secara berangsur-angsur muncullah kaum elit pribumi terpelajar, yaitu priyayi baru. Sebagian dari mereka menarik kesimpulan yang tak terduga dari pelajaran sejarah tentang Perang 80 Tahun, dan amat mendambakan kemerdekaan Hindia. Mereka membicarakan keadaan di tanah jajahan di berbagai perkumpulan.

Inisiatif Boedi Oetomo diikuti oleh Indische Partij (didirikan tahun 1912), suatu organisasi multietnik kaum Indo-Eropa dan pribumi radikal yang langsung menuntut kemerdekaan Hindia. Indische Partij adalah perhimpunan modern pertama yang berbenturan dengan pemerintah. Tiga pemimpinnya yang terkemuka, E.F.E Douwes Dekker (cucu kemenakan Multatuli), Suwardi Surjaningrat, dan Tjipto Mangoenkoesoemo (salah seorang pendiri Boedi Oetomo) dibuang dari Hindia tahun 1913.

Sarekat Islam berdiri tahun 1912. Semula merupakan organisasi pedagang batik Solo yang secara terorganisasi bermaksud menghadapi persaingan orang Tionghoa. Beberapa tahun kemudian para pemimpin merumuskan juga tujuan-tujuan politiknya. Tahun 1918 anggotanya ada kira-kira setengah juta orang. Islam merupakan kriteria untuk membedakan anggota dari orang Tionghoa dan Belanda. Namun Sarekat Islam tidak boleh dipandang sebagai gerakan khas santri. Banyak penganut abangan yang menggabungkan diri dengan Sarekat Islam.

Di tahun 1914 didirikan Indische Social Democratische Vereeninging (ISDV), suatu perserikatan komunis Belanda dan Jawa. Sejak tahun 1918 kaum komunis Jawa semakin tampil ke depan, yaitu ketika beberapa pemimpin terkemuka Belanda dbuang ke luar negeri. Tahun 1920 nama organisasi diganti menjadi PKI (Perserikatan Komunis Indonesia). Selain perhimpunan-perhimpunan politik ini, muncul gerakan-gerakan serikat-serikat sekerja yang

luas keanggotaannya didirikan oleh orang-orang sosialis, komunis dan para pemimpin Sarekat Islam. Di samping Budi Utomo, didirikan berbagai perhimpunan etnis/geografis dan kaum muda pribumi dari Sekolah Menengah Pertama atau Menengah Atas berhimpun dalam klub-klub orang muda. Kaum muda Hindia yang belajar di Negeri Belanda berhimpun dalam Indische Vereeninging yang ditahun 1920-an menjadi radikal dengan nama Perhimpunan Indonesia.

Di berbagai organisasi berkembang konsep-konsep nasional alternatif. Sarekat Islam memanfaatkan agama sebagai sarana pengikat; kaum komunis menggunakan ideologi politik. Kedua perhimpunan ini melintasi batas-batas etnis, dan mendirikan cabang-cabang di luar Jawa. Lewat orientasinya yang luas kedua organisasi mengarahkan perhatian ke luar daerah jajahan dan dapat menggabungkan diri masing-masing dengan gerakan Islam dan komunis internasional. Organisasi pertama yang merupakan suatu ideologi nasional yang kuat dan bertolak dari perbatasan kolonial Hindia Belanda adalah Indisch Partij, terutama oleh Douwes Dekker. Citranya tentang kemerdekaan adalah "Nasion Hindia", suatu negara yang merdeka dan demokratis, di mana semua ras dan suku bangsa memiliki hak-hak yang sama. Di atas peta yang baru, hanya bagian pertama dari nama Nederlands-Indie harus dihapus, adapun perbatasan Hindia Belanda yang merdeka sama dengan perbatasan Hindia Belanda. (Hans van Miert, 2005 : 27 – 33)

Munculnya organisasi-organisasi semacam itu adalah pertumbuhan yang wajar sebagai tahap pertama dalam proses integrasi. Masih cukup banyak kekuatan sosial yang menghambat integrasi sehingga timbul segmdentasi-segmentasi menurut garis regional, subkultural, bahkan komunal pula. Meskipun seyap organisasi masih bercorak banyak sedikitnya difus (campuran) dalam orientasi tujuannya, namun pada umumnya tidak bertujuan politik. Akan tetapi, bagi pemerintah kolonial organisasi-organisasi ini sudah dianggap berfungsi untuk menyalurkan keinginan dan harapan anggota-anggotanya. Organisasi itu dapat dipandang pula menjadi wadah atau wahana untuk pendidikan politik bagi kaum priyayi dan kaum terpelajar, antara lain dengan mempupuk kesadaran politik, berpartisipasi dalam aksi kolektif, menghayati identitas golongan, dan lain sebagainya. Sekali kekuatan sosial bergerak, tidak mungkin penguasa kolonial menghentikannya. Dalam hubungan itu fungsi organisasi-organisasi tersebut telah mengandung benih-benih perkembangan politik di Indonesia.

Pertumbuhan organisasi-organisasi dalam lingkungan subkultural berfungsi juga sebagai sosialisasi politik, yaitu pada satu pihak memobilisasi rakyat untuk melaksanakan tujuan organisasi dan pada pihak lain memperbesar kesadaran kolektif dan dengan demikian memperkuat solidaritas golongan. Kesadaran koleltif yang mempertebal semangat perjuangan hanya diaktualisasikan bila ada rangsangan dari luar organisasi, khususnya pelbagai lekajdian dan tindakan dari pihak gubernemen Hindia Belanda Sikap reaktif itu dengan dukungan

solidaritas kelompok, memperkuat sosialisasi politik; tidak hanya menciptakan sensitivitas yang tinggi, tetapi juga kemauan politik yang kuat. Sudah barang tentu integrasi yang terjadi antarorganisasi sendiri juga mengakibatkan akselerasi kegiatan politik, antara lain dalam kaitannya dengan kejadian-kejadian yang berkisar tindakan gubernemen Hindia Belanda.

Perkembangan politik, sekali digerakkan, ternyata mengikuti jenjang dengan pola akselerasi pada satu pihak dan polarisasi antara yang konservatif dan radikal di pihak lain. Proses terakhir ini dieksploitasi oleh penguasa kolonial untuk menjalankan politik *devide et impera.* (Sartono Kartodirdjo, 1990 : 105 – 106)

Nasionalisme Kultural dan Politik

Nasionalisme Indonesia berlainan sifatnya dengan nasionalisme Jawa. Konsep Jawa tentang nasion berkisar pada kesamaan asal etnis, kesatuan budaya, kesamaan masa lalu, dan kesamaan pandangan tentang suku dan agama. Kesatuan itu dalam banyak hal lebih bersifat pengertian daripada kenyataan suatu gejala nasionalisme yang umum, namun ini tidak mengurangi arti perjuangannya. Kesatuan etnis dalam nasionalisme Indonesia tidak penting. Konsep ini tampil berdasarkan perjuangan bersama menuju kebebasan, keadilan, kesamaan, demokrasi. Dalam masyarakat kolonial abad ke-20 perjuangan menuntut pengakuan dan kesamaan hak itu biasanya mengambil bentuk nasionalisme. Ini wajar sekali, karena nasionalisme merupakan ideologi politik yang berkuasa di kalangan para penguasa. Peta bumi Eropa pasca Perang Dunia I menurut azas nasionalisme telah dipetakan kembali.

Tuntutan untuk menemukan nasib sendiri, menurut fatsun politik masa itu seharusnya disampaikan oleh bangsa, oleh nasion. Para intelektual bumiputra di Negeri Belanda menyampaikan tuntutan itu sebagai wakil-wakil “Nasion Indonesia“ Namun “Nasionalisme Wilson” yang dipakai untuk memetakan kembali peta Eropa setelah tahun 1918 itu didasarkan pada eratnya hubungan antara nasion di satu pihak dengan kesamaan lingguistik dan budaya di lain pihak ”Rakyat Indonesia“ tak memiliki keduanya itu. Oleh pihak Belanda maupun oleh pihak bumiputera, karena kaum nasionalis Indonesia dipersalahkan karena kesatuan mereka hanya ada di permukaan, hanya berdasarkan pola perluasaan kekuasan Belanda di Asia yang hanya kebetulan.

Dengan dua cara yang saling berlawanan ini mereka melawan tuduhan ini. Awalnya mereka sering mengutip dan mendukung Ernst Renan. Bukankah ilmuwan besar Perancis ini menyatakan bahwa yang penting bukan bahasa atau budaya, tetapi hanya kemauan ? Keyakinan akan cita-cita itu “desir de vibre ensemble“ (kemauan untuk hidup bersama) sering berkumandang dalam retorika nasionalis Indonesia. Kemauan itu sudah ada, paling

tidak di tengah kelompok intelektual terpenting di Hindia tahun 1920-an. Cara perlawanan kedua adalah mencari atau lebih tepat disebut membuat kesepakatan etnis/budaya dalam keanekaan Hindia itu, khususnya dalam bentuk kesamaan bahasa Indonesia dan masa lalu Indonesia.

Nasionalisme Jawa, Sumatera, dan Indonesia bersumber pada satu nasionalisme yang sama. Dalam kenyataan ketiganya dapat dikembalikan pada dua tipe dasar seperti dirumuskan oleh Smith, yaitu nasionalisme wilayah dan nasion etnis. Yang pertama adalah yang tertua, dan muncul di Eropa Barat. Dalam konsep ini nasion terutama merupakan kesatuan hukum, dengan hak dan kewajiban yang sama untuk seluruh warga, tanpa membedakan ras, umur, jenis kelamin, atau agama. Konsep ini di abad ke-20 ditiru dan diterapkan oleh kaum nasional di banyak tanah jajahan di Afrika dan Asia, begitu pun oleh kaum nasionalis Indonesia. “Nasion Etnis” yang didambakan oleh kaum nasionalis Jawa dan Sumatera, tetapi tidak terwujud, adalah berdasar pada ekslusifitas etnis, dengan kesamaan, masa lalu dimitologisasi atau tidak, dan menyimpang dari etnis lainnya. Kesamaan etnis dan kekhasan budaya membentuk ciri-ciri hakiki tipe nasional itu.

Berbagai bentuk nasionalisme menguasai pikiran kaum nasionalis di Hindia Belanda, mulai dari priyayi amtenar yang akrab dengan tradisi Jawa, sampai para intelektual Indonesia yang sesudah berpikiran Barat, yang mempunyai pekerjaan yang baik seperti dokter yang mandiri atau pengacara. (Hans van Miert , 2005 : 27 – 33)

Bulan Januari 1918 terbit edisi pertama *Wederopbouw*, majalah *Comite voor het Javanns Nationalisme*. Majalah itu diterbitkan oleh Raden Mas Sutatmo Suriokusumo, penulis beberapa pamflet tentang budaya Jawa. Dengan keluarnya *Wederophbouw* tiap bulan itu, maka Comite tersebut memperoleh corong tersendiri. Menurut judulnya, majalah itu dipersembahkan kepada gerakan pemuda Jawa dan kehidupan rohani orang Jawa. Sekalipun perhimpunan pelajar Jong Java sering tampil di dalam majalah itu, dan tokoh-tokoh priyayi gerakan tersebut secara teratur menyambung karangan, *Woderophbouw* bukanlah organ perhimpunan Jong Java. Kata “Jong” di sini harus dipahami secara luas. Yang dimaksudkan dengan “Jong” di sini bukan hanya anak-anak sekolah dan mahasiswa, melainkan juga kaum priyayi Jawa yang berpendidikan, yang ingin mendukung sepenuhnya kelahiran budaya Jawa. ”Jong” (muda) berarti juga adanya yang “Tua”. Dalam hal ini kaum “Tua” terdiri dari para priyayi yang sepenuhnya sejalan dengan gubermen, para pegawai pangeh praja tradisional yang melaksanakan tugas tanpa kritik, dan menentang kemajuan. Sebagai penentang kekakuan dan kekolotan itu lahirlah kaum “priyayi baru“. Kebanyakan mereka adalah orang muda dari kalangan priyayi yang memilih pekerjaan di luar korps pemerintahan, sebagai dokter, insinyur, guru, advokat, atau wartawan. Tapi dari kelompok ini, hanya priyayi moderat dan berorientasi budaya yang tergolong Jong Java, dalam subjudul itu. Jadi “Jong” di sini tidak sama dengan “radikal’. Perubahan-perubahan yang diusahakan oleh kelompok

ini oleh kaum nasionalis radikal sering dinilai konservatif dan tidak demokratis.

Comite itu langsung mendapat dukungan dari Soetomo yang di tahun 1918 sebagai pelajar STOVIA umur 18 tahun menjadi salah seorang pendiri Budi Utomo. Tahun 1917 ia menikahi seorang juru rawat Belanda di Blora, ketika betugas sebagai dokter di sana. Tahun 19919 ia berangkat ke Negeri Belanda untuk meneruskan pendidikannya. Sebelum berangkat, dengan teratur ia menulis karangan dalam *Wederophouw* dengan judul "Aan minjn vrienden" (Kepada kawan-kawanku), di mana ia menyatakan dukungannya terhadap cita-cita Comite. Walau baru berumur 29 tahun aa, di tahun 1918 Soetomo sudah memiliki status sebagai pelopor nasionalisme Jawa. Ia berbicara kepada pembaca sebagai guru terhadap muridnya. Dari tanganya tidak keluar pernyataan-pernyataan bernafsu bagi pemulihan Budaya Jawa, tidak ada protes-protes pahit terhadap tindakan-tindakan menyedihkan pemerintah. Dengan kata-kata yang berbunga-bunga ia menganjurkan perluasan pendidikan pemerintah dan pembentukan dana "Dr Wahidin" yang harus menghimpun uang untuk urusan nasional .

Kebangunan budaya Jawa menyibukkan sejumlah pelajar Jawa di Negeri Belanda. Sebagai contoh adalah Surjoputro yang berasal dari keluarga Pakualam. Ia mendalami musik Jawa. Sebelum kembali ke Jawa pada tahun 1921, di mana setahun kemudian ia menjadi guru musik pada Sekolah Taman Siswa Yogya, ia menumbang beberapa artikel tentang "Javaansche toonkusnt" (Seni musik Jawa) dalam majalah *Wederopbouw*. Bulan April 1920 ia pun duduk dalam redaksi majalah ini.

Adapun tokoh yang terpandang di Negeri Belanda adalah RM Noto Soeroto. Seperti hallya Soetomo dan Suriokusumo, cucu Pakualaman ini lahir tahun 1888. Ia memperoleh ijazah HBS di Semarang tahun 1906, kemudian berangkat ke Negeri Belanda untuk mempelajari hukum di Leiden Tahun 1911 ia menempuh ujian kandidat. Dari 1911 sampai 1914 ia menjadi ketua Indische Veeeninging. Tahun 1915 ia muncul sebagai penyair – di dalam bahasa Belanda. Ia menulis puisi yang diilhami oleh karya mistikus dan penyair India Rabindrath Tagore. Bundel *Melatiknoppen* (Kuntum Melati, 1915) memberikan ketenaran sastra tertentu kepada Noto Soeroto, dan ketenaran itu terus ia bangun tahun-tahun berikutnya. Tahun 1918 ia menikahi seorang wanita Belanda, tahun 1920 menghentikan studi hukumnya yang menemui jalan buntu, dan tahun itu juga di Amsterdam ia mendirikan. Boekhandel en Iutgevers-Mij (Perusahan Perdagangan Buku dan Penerbit) "Hadi Poestaka "

Sepanjang hidupnya Noto Soeroto tetap menjadi pembela politik asosiasi dan kerja sama yang tulus dengan orang Belanda. Sikap ini di tahun dua puluhan semakin banyak memperoleh kecaman, antara lain. dari Indische Vereeninging yang kini bernama Perhimpunan Indonesia. Klub pelajar itu memecatnya pada bulan Desember 1924, sesudah ia menulis nekrologi bernada simpati kepada " Pacificator van Atjeh" (Pacifikator Aceh) J.B. van Heutz dalam majalah asosiasinya "Oedaya". Bagi kaum nasionalis Noto Soeroto

merupakan contoh yang baik tentang orang Jawa yang sudah takluk. yang bersengkongkol dengan penjajah. Ia menjadi tokoh yang dihinakan.

Sebelum kejatuhannya di Hindia pun banyak tokoh nasionalis yang mendukung cita-cita asosiasi. Sebagai seorang penyair yang behasil dan pembela “Geest van het Oosten“ (Jawa Timur) ia banyak dihormati orang. Hampir tiap bulan ia menulis dalam *Wederophouw*; artikel-artikel tentang kebangunan Asia dan Tagore, dan sajak-sajak dengan gayanya yang terkenal, yang penuh dan patos dan mistik, dengan tema-tema agung seperti keindahan alam dan cinta ibu kepada anak. Juga di dalam *Wederephouw*, ia memperlihatkan diri sebagai seorang pendukung asosiasi pur penuh, yang yakin bahwa hanya perundingan dan kerja sama dengan kolonialisator dapat memajukan Jawa. Tahun 1919 ia menjadi anggota redaksi.

Jadi para anggota Comite voor het Javaans Nationalisme dan para pengarang *Wederophouw* itu mempunyai beberapa persamaan; mereka itu kebanyakan berasal dari keempat kraton Surakarta dan Yogyakarta. Mereka menikmati pendidikan Barat lanjut dan dapat mengekspresikan diri dengan baik sekali dalam bahasa Belanda. Mereka menaruh hormat kepada tradisi Jawa dan cinta kepada budaya Jawa. Mereka yakin bahwa budaya Jawa harus dipulihkan pada kebesarannya semula. Jadi Comite itu memiliki akar di kalangan kaum nasionalis Jawa. Ia mendapat dukungan dari keluarga raja-raja Solo (Prangwedana) dari berbagai tokoh Budi Utomo (Radjiman, Sutatmo Suriokusumo), dan kaum cendikiawan Jawa di Negeri Belanda (Noto Soeroto, Surjoputro), dan dari para pemimpin Jong Java (Abdul Rachman, Satiman, dan Sukiman). Selanjutnya Comite mendapat simpati dari banyak orang Belanda yang berlatar belakang etis dan dari gerakan teosofi di Hindia Belanda yang anggotanya banyak terdapat di kalangan kaum nasionalis terkemuka. Jadi Comite itu memiliki landasan yang kaya, terutama di Jawa Tengah, namun ia mendapat perlawanan dan lapisan lain gerakan nasionalis. Ia dicurigai oleh Sarekat Islam, ISDV, dan Insulinde karena pendirian-pendiriannya yang konservatif, karena hubungannya dengan keluarga-keluarga kerajaan, dan karena selalu ditentang oleh kaum etis Belanda. (Hans van Miert , 2003 : 118 – 126).

Tujuan *Comite voor het Javaans Nationalisme* tercermin dalam judul majalah *Wederophouw* (kebangunan krembali). Menurut pandangan para anggota, budaya Jawa yang pernah menduduki tempat yang paling luhur di Asia Tenggara harus dipulihkan kehormatannya. Waktu itu semua cabang seni berada pada tingkatan yang jauh lebih rendah dari dahulu. Melakukan pelatihan cabang-cabang seni, menyadarkan orang Jawa akan kebudayaannya, menyingkirkan unsur-unsur budaya yang tidak murni di Jawa-itulah butir-butir program Suriokusumo dan kawan-kawannya. Berlainan dengan banyak orang Belanda dan banyak orang Jawa yang mendapat pendidikan Eropa, mereka percaya bahwa budaya Jawa kuno dan norma-norma serta peraturan dari kerajaankerajaan jaman dahulu masih dapat memainkan peranan penting ketika Jawa kini memasuki jaman modern. Kaum nasionalis

radikal sebaliknya menentang kraton yang menurut mereka adalah lambang diktaktur dan penindasan di masa prakolonial. Mereka mengecam hirarki Jawa, otokrasi para raja, ekses kehidupan istana, dan penghisapan atas penduduk. Nilai-nilai moral Jawa kuno, terutama bentuk-bentuk pergaulan istana yang keterlaluan dan sikap tunduk membudak terhadap mereka yang lebih tinggi – baik orang Jawa maupun orang Belanda – menurut mereka hanya akan menghambat kemajuan negeri itu. Di luar gerbang kraton berkumandang slogan demokrasi: sama rasa sama rasa.

Para anggota dan simpatisan *Comite voor het Javaans Nationalisme* ingin menunjukkan bahwa tradisi yang dihinakan orang banyak itu masih mempunyai hak hidup – dan lebih dari itu, satu-satunya dasar yang benar adalah dasar Jawa baru di jaman baru. Kebangunan kembali untuik itu perlu, yaitu pemulihan kebesaran budaya Jawa dalam segala coraknya. Masa lalu Jawa yang kaya merupakan sumber ilham. Jaman Majapahit adalah apoteosis sejarah Hindu Jawa, Abad Keemasan Jawa abad keempat belas. Kebangunan kembali berarti kebangkitan kembali kerajaan Gajah Mada.

Nasionalisme Sutatmo Suriokusumo dan Comite-nya adalah nasionalisme budaya dengan warna politik. Para pendukungnya menikmati pendidikan Barat dan sering bekerja pada gubernemen, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka menerima dominasi Belanda dengan pasrah. Pada dasarnya Comite itu menyatakan menentang setiap bentuk penjajahan. Tahun 1918, Soewardi Surjaningrat memuji Comite karena perjuangannya menuju pemulihan kekayaan budaya Jawa, tetapi ia mengecam saudara sepupunya Surikusimo sebab tujuan-tujuan politik Suriokusumo tidak jelas. Suriokusumo baru membalas tokoh nasionalis Hindia itu dua tahun kemudian. Yang dimaksudkannya adalah perkembangan nasion Jawa (dengan perkataannya sendiri : kepribadian Jawa) yang hanya dapat terwujud dalam suatu "Staat van Javansche gemeenchappen " (Negara yang didirikan oleh masyarakat orang Jawa). Bangsa Jawa hanya dapat menjadi bangsa Jawa yang sesungguhnya di dalam suatu negara Jawa. Itulah politik yang dimaksudkan oleh *Comite voor het Javaans Nasionalisme*. Ini semakin menjadi alasan bagi kaum nasionalis dari pulau-pulau yang lain untuk membaca publikasi Comite dengan rasa curiga, di situ mereka mencari tanda-tanada imperialisme Jawa. Suriokusumo dan rekan-rekannya mengenal syak wasangka ini, karena itu mereka berusaha sama sekali tidak memperlihatkan rasa superioritasnya dan hasratnya untuk berkuasa. Namun hubungan dengan kaum nasionalis yang berpikiran lain di Jawa maupun di luar Jawa tidak pernah akrab (Hans van Miert : 2003 : 128 – 129)

Pada tahun 1918. terjadi debat antara Tjipto Mangunkusumo dan Sutatmo Suryokusumo mengenai masalah nasionalisme di Hindia atau Jawa dan masalah perkembangan Kebudayaan Jawa. Debat tersebut berlangsung dalam bahasa Belanda, bukan dalam bahasa Jawa atau Melayu, dan hal itu terjadi pada tahun 1918 ketika Volksraad didirikan. Tjipto dan Sutatmo berdebat menyambut pembukaan sidang Volksraad tersebut.

Pembaca dan pendengar yang dituju mereka ialah kalangan Budi Utomo yang dengan penuh gairah menyongsong pembukaan sidang Volksraad untuk orang bumiputra. Dalam suasana timbulnya suatu zaman baru berkat pembentukan Volksraad, relevansi tradisi politik dan budaya Jawa dengan "kemajuan" zaman merupakan persoalan yang paling dirasakan di lingkungan Budi Utomo itu.

Dalam debat itu Tjipto dan Sutatmo mengemukakan pandangannya masing-masing tentang persoalan tersebut dan bersaing untuk memenangkan ideologinya di kalangan para priyayi golongan bawah yang berpendidikan Belanda. Sebenarnya debat pertama telah diterbitkan dalam bulan Maret 1918, setelah Tjipto ditetapkan sebagai anggota Volksraad dan dua bulan sebelum Volksraad dibentuk secara resmi. Debat yang kedua berlangsung dalam Kongres Pengembangan Kebudayaan Jawa yang diadakan di Solo pada bulan Juli sehubungan dengan rapat tahunan Budi Utomo, (PGHB) Perserikatan Goeroe Hindia Belanda) dan persatuan bekas murid OSVIA, setelah sidang pertama Volksraad berakhir. Di samping itu, tema Kongres, yaitu Pengembangan Kebudayaan Jawa, mengingatkan orang pada pidato pembukaan Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum dalam sidang Volksraad. Dalam pidato itu ia menyatakan bahwa Volksraad akan mampu memenuhi tugasnya sebagai wadah untuk menyatakan keinginan rakyat seluruh Hindia Belanda, segera setelah peradaban menjadi semakin matang di seluruh bagian kepulauan.

Tetapi jika ditinjau kembali, debat itu sesungguhnya mempunyai jangkuan lebih luas daripada jangkauan debat pada waktu berdirinya Volksraad, terutama karena dalam perdebatan itu Tjipto dan Sutatmo membahas masalah bagaimana menempatkan pergerakan dalam sejarah dan kebudayaan Jawa dan bagaimana hidup di alam pergerakan, justru di masa pergerakan sedang bergejolak kembali. Memang, pada tahun 1918 pergerakan berada pada suatu titik yang menentukan. Tema yang menonjol pada waktu itu beralih dari kemajuan ke demokrasi dan sama rata sama rasa. Pengaruh ISDV (Indische Social Democratische Vereninging) yang sosialis itu telah jelas dan Tjokroaminoto, ketua CSI (Central Sarekat Islam) kini bicara tentang "Kapitalisme yang penuh dosa ". Sartekat Islam Semarang di bawah pimpinan Semaoen muncul sebagai pusat sayap kiri dari CSI. Di Yogyakarta PFB (Personeel Febrieke Bond) yang dipimpin oleh Suryapranoto sedang dalam pembentukan Gerakan Djawa Dipa yang makin memperoleh pengaruh, menganjurkan demokratisasi bahasa Jawa dengan cara menghilangkan bahasa kromo atau tinggi yang dianggap sisa-sisa kebudayaan Jawa feodal.

" Sama rata sama rasa " pertama-tama dicetuskan oleh Mas Marco, seorang anggota redaksi majalah SI Semarang, *Sinar Hindia*, pada tahun 1918, ketika ia mengubah sebuah pantun berjudul "Sama Rasa Sama Rata" selagi ia berada di penjara. Semboyan "sama rata sama rasa" ternyata langsung mekluas di dunia pergerakan. Pada tahun 1919. Kiai Haji Sirad dari Banyumas telah melukiskan zaman emas yang akan terwujud dengan datangnya sang

Ratu Adil sebagai pembawa “sama rata sama rasa“. Di tahun yang sama Haji Fachruddin, pemimpin Muhammadiyah dan Komisaris CSI yang berpihak pada kelompok Suryopranoto – Haji Agus Salim yang bertempat d Yogyakarta, juga telah menciptakan pandangan berjudul “ Sama rata sama rasa.”

Namun demikian, kebanyakan pemimpin pergerakan, terutama mereka dari Sarekat Islam. tidak mau berusaha merenungkan apa arti pergerakan; mereka juga tidak berusaha menempatkan diri dalam konteks tradisi budaya Jawa. Untuk mereka, arti pergerakan itu sudah terlalu jelas. SI sebagai pendoroing utama pegerakan benar-benar merupakan perwujudan semangat zaman. Di samping itu, para pemimpin SI memiliki pandangan internasional dan mereka tak melihat gunanya mencari arti pergerakan dalam konteks sejarah dan kebudayaan Jawa. Baik Tjipto maupun Sutatmo juga sangat terlibat dalam pergerakan, namun ketika Tjipto menjadi pemimpin Insulinde dan Sutatmo pemimpin BU mereka berada akan di ujung dunia pergerakan. Dan kini mereka mempunyai kesempatan untuk memikirkan dan berusaha mencari arti pergerakan dalam kontekls kebudayaan dan sejarah Jawa, agar dapat menghadapi orang BU yang sangat memperhatikan warisan Jawa.

Debat pertama antara Tjipto dan Sutatmo merngenai nasionalisme Hindia dan nasionalisme Jawa diterbitkan pafda tahun 1918 dalam bentuk seleberan berjudul “ Javaansche of Indische Nationalisme .” dan merupakan nomor ekstra dari *Wederopbouw*. Dalam debat ini, Sutatmo sudah tentu mengajukan nasionalisme Jawa. Menurut pandangannya, sesuatu bangsa seharusnya dapat dan dibangun atas landasan bahasa dan kebudayaan. Nasionalisme Jawa mempunyai landasan kebudayaan, bahasa serta sejarah yang sama dari suku Jawa, sedangkan nasionalisme Hindia sebenarnya tak mempunyai landasan kebudayaan, atau paling-paling merupakan produk pemerintah kolonial Belanda. Nasionalisme Jawa merupakan alat ekspresi diri bagi orang Jawa, sedangkan nasionalisme Hindia pada Indische Partij atau Islamisme pada Sarekat Islam, hanya merupakan reaksi terhadap penjajahan Belanda atas Hindia (Belanda). Oleh karena itu ia mengemukakan bahwa hanya nasionalisme Jawa yang memiliki landasan yang kuat, tempat orang Jawa dapat membangun masyarakat politiknya di masa depan.

Sebagai reaksi terhadap argumentasi Sutatmo, Tjipto menekankan nasionalisme Hindia. Menurut pandangan Tjipto, kekurangan utama dalam pandangan Sutatmo ialah unsur perkembangan sejarah dunia. Ia menyatakan sudah jelas Eropa lebih maju daripada Asia. Oleh sebab itu, orang Jawa dapat belajar dari pengalaman-pengalaman sejarah orang Eropa mengingat pembentukan bangsa di Hindia akan mengikuti arah itu. Memang, Hindia Belanda terdiri dari berbagai golongan etnis atau suku, dan setiap golongan mempunyai kebudayaan serta bahasa yang berbeda-beda, tapi biar bagaimanapun, golongan Jawa kini telah kehilangan kedaulatannya dan hanya merupakan bagian dari Hindia yang dijajah Belanda. Sekarang tanah air orang Jawa bukanlah Pulau Jawa semata tetapi seluruh

Hindia Belanda dan tugas yang dipikul oleh para pemimpin sekarang adalah bekerja untuk nasionalisme Hindia tersebut (Takashi Shiraishi, 1986 : 158 – 161)

Dunia pegerakan adalah dunia para satria, tetapi satria yang hidup dalam dunia pergerakan, tidaklah selalu seorang satria sejati, malah kadang-kadang ada satria maling, yaitu mereka yang didorong oleh keserakahannya sendiri. Jadi apa yang menurut Sutatmo sangat mendesak untuk dilakukan ialah + menerima peran seorang pandita yang dapat mendidik satria sejati. Lewat tulisannya tentang Wayang, Tjipto membicarakan tokoh Abimanyu yang digambarkan sebagai seorang satria sejati, selalu bersifat menonjolkan kemauan kuat dan pikiran bebas. Tjipto tidak hanya berbicara mengenai satria dalam wayang tetapi juga satria dalam dunia pergerakan.

Menurut pandangan Tjipto, kesulitan tidak boleh dilihat sebagai penghilang atau rintangan melainkan tantangan yang diberikan oleh Yang Illahi. Hanya dengan mengatasi kesulitan, seorang dapat memperoleh sifat-sifat satria. Dan memang, dunia pergeralan penuh kesulitan. Oleh karena itu, sekarang menjadi jelas, mengapa Tjipto melihat pergerakan sebagai awal kedatangan zaman emas. Dalam pergerakan terkandung harapan masa depan, karena mereka yang melawan penjajahan Belanda dan kaum priyayi feudal, sebenarnya menghadapi cobaan atas tantangan dan mereka baru bisa muncul sebagai penjelmaan satria hanya kalau mereka sudah melewati tantangan-tantangan itu. Dan mereka itulah yang disebutnya orang Hindia.

Menurut pandangan Sutatmo, masyarakat politis satu-satunya yang dapat dibayangkan untuk masa depan adalah Jawa, karena kebudayaan Jawa hanya mempunyai arti di Jawa. Menurut pandangan Tjipto, wilayah paling luas tempat rakyat mengalami penjajahan Belanda dan dengan demikian merupakan calon menjadi orang Hindia, dapat menjadi satu-satunya masyarakat yang dapat dibayangkan untuk masa depan. Dunia pergerakan adalah kancah tempat rakyat menghadapi tantangan-tantangan dan orang Hindia baru bisa lahir atau muncul kalau mereka sudah menghadapi tantangan itu, atau, dengan kata lain, kalau sudah mengadakan perlawanan tanpa kompromi terhadap Pemerintah Kolonial Belanda.

Dalam zaman pergerakan, Tjipto Mangunkusumo, seorang tokoh nasionalisme Hindia dan Sutatmo Suryokusumo, pemimpin nasionalis Jawa, telah merumuskan pandangan sama sekali berlawanan mengenai pergerakan dan zamannya. Sutatmo hanya melihat kekacauan di dalam pergerakan dan menganjurkan kebangkitan kembali kebudayaan Jawa sebagai satu-satunya jalan keluar dari zaman edan itu. Kebudayaan Jawa yang dimaksudkannya tidak lain dari pada penafsiran kembali dan, dengan demikian, bentuk konkret dari paham atau gap sebagai kunci untuk memimpin pergerakan ke masa kejayaan. Maka menurut pendapatnya, kebangkitan atau pembangunan kembali berarti menghidupkan kembali hubungan kawula-gusti yang dijadikan cita-cita. Mengenai tugas seorang pandita, ia menyatakan bahwa

menciptakan ketertiban di dalam kekacauan pergerakan hanya mungkin bila rakyat menjadi kawula sang *pandito-ratu.*

Sebaliknya Tjipto melihat bahwa dengan timbulnya pergerakan, telah berakhirlah zaman edan dan mulailah zaman terang. Menurut pendapatnya, evolusi dan pembebasan Jawa dapat terwujud hanya apabila rakyat dititisi jiwa satria sejati, yaitu keluhuran moral, melalui perlawanan tanmpa kompromi terhadap penindasan dan pemeras Belanda dan para priyayi terhadap rakyat. Pergerakan berarti cobaan, dan dengan mengatasi cobaan ini rakyat akan menjadi satria, orang Hindia. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan ialah menunjukkan kepada rakyat bagaimana orang Jawa dapat hidup sebagai satria dalam zaman edan dan berbuatdemikian menghidupkan kembali kekuatan moral orang Jawa. Tjipto sendiri hidup menurut tekad dan semangat Pangeran Diponogoro, karena ia adalah seorang satria sejati yang telah berusaha memerangi keruntuhan moral orang Jawa.(Takashi Shiraishi, 1986 : 184 – 187)

Perhimpunan Indonesia

Perhimpunan mahasiswa Indonesia di negeri Belanda terbentuk pada 1908 dengan nama Indische Vereeninging, dan merupakan pendahulu dari Perhimpunan Indonesia. Indische Vereeninging dibentuk bersamaan waktu dengan berdirinya Budi Utomo di Indonesia, dan ada banyak kesamaan dari kedua organisasi itu dalam prinsip yang moderat. Indische Vereeninging merupakan perkumpulan sosial tempat mahasiswa Indonesia dapat melewatkan waktu senggangnya untuk berbincang-bincang dan saling memberi informasi yang terbaru yang datang dari tanah air.

Indische Vereeninging memasuki suatu periode baru dalam perkembangannya setelah pemimpin Indische Partij, Tjipto Mangunkusumo, Douwes Dekker, dan Suwardi Suryaningrat dibuang dari Hindia Belanda pada tahun 1913, karena Gubernur Jenderal Idenburg takut kepada gagasan ”revolusioner” mereka. Bersama dengan kedatangan ketiga pemimpin Indische Partij itu ke negeri Belanda, masuk pula konsep “Hindia bebas dari Belanda“ (Indie los van Nederland) dan pembentukan sebuah negara Hindia yang diperintah oleh rakyatnya sendiri. Pengaruh pendatang baru itu, makin terasa dengan diterbitkannya jurnal Indische Vereeninging *Hindia Poetra*, pada tahun 1916 oleh Suwardi, dan pengaruh pribadi mereka terhadap para anggota Indische Vereeninging tercermin dalam keterlibatan Indische Vereeninging, meskli lambat, di bidang politik. Beberapa anggota I, misalnya, ikut dalam pemilihan untuk Majelis Rendah Parlemen Belanda pada tahun 1916 mewakili golongan sosialis.

Pada tahun 1917, Indische Vereninging dengan Chung Hwa Hui, sebuah organisasi mahasiswa Indonesia-Cina, dan sebuah perhimpunan mahasiswa Indo-Eropa dan Belanda yang berniat untuk bekerja di Indonesia kelak menjadi sebuah federasi yang bernama Indoneschie Verbound van Studeerebden (Persatuan Mahasiswa Indonesia). Penggabungan itu sendiri tidak begitu penting, kecuali bahwa untuk pertama kalinya istilah Indische diganti menjadi Indonesiche. Kata itu belum mendapat makna politik yang positif, tetapi merupakan refleksi dari semakin tingginya kesadaran sebagai bangsa Indonesia di kalangan mahasiswa yang berada di negeri Belanda. Bagaimana pun juga, pada akhir Perang Dunia Pertama, Indonesische Vereeninging pada hakikatnya masih tetap seperti saat didirikan dulu, semacam perkumpulan sosial tempat sebagian besar para anggotanya melontarkan ide-ide persatuan

Pada tahun-tahun setelah Perang Dunia Pertama berakhir, generasi baru mahasiswa Indonesia datang ke negeri Belanda dan jumlah mereka lebih banyak daripada jumlah semua mahasiswa Indonesia yang belajar di sana sampai saat itu. Dengan bernaung di bawah politik etis, pemerintah Hindia Belanda perlahan-lahan memperluas kesempatan bagi putra-putri Indonesia daroi golongan atas untuk masuk sekolah dasar dan menengah berbahasa Belanda. Sampai akhir perang dunia, kebijakan pendidikan baru itu mulai menghasilkan lulusan yang hanya sedikit, tapi makin lama makin meningkat jumlahnya. Bagaimana pun juga hanya ada sedikit fasilitas pendidikan akademis di Hindia Belanda, dan belum ada yang memberi status professional penuh.

Di antara generasi baru mahasiswa tersebut terdapat Soetomo, Hatta, Sartono, Ali Sastroamidjojo, Budiarto, Iwa Kusumasumantri, Iskaq dan lainp-lainnya, yang kemudian menjadi tokoh-tokoh politik nasional pada tahun 1920-an. Generasi baru yang datang ke negeri Belanda itu memiliki kesadaran politik yang jauh lebih tinggi daripada generasi mahasiswa yang sebelumnya. Banyak dari mereka telah ikut aktif dalam organisasi pemuda ketika masih berada di Indonesia dan dalam gerakan kebangsaan yang baru mulai itu. Soetomo ikut mendirikan Budi Utomo dan Hatta pernah menjadi ketua Jong Sumateranen pada tahun 1918-1921, sementara lainnya sebelumnya aktif dan Jong Java dan organisasi serupa.

Para mahasiswa yang bergabung dalam organisasi mahasiswa Indonesia itu membentuk komunitas kecil yang berhubungan erat satu sama lain, dan hanya merupakan sebagian kecil dari jumlah seluruh mahasiswa Indonesia di negeri Belanda. Namun bagi para pemuda Indonesia yang aktif di bidang politik ini, pengalaman hidup dan belajar di negeri Belanda mempunyai dampak yang mendalam. Mereka yang meninggalkan tanah air untuk jangka waktu tertentu, mendapat pengalaman yang semakin luas, tapi juga merasakan dampak lain karena pindah dari suatu masyarakat kolonial yang paternalistik dan banyak larangannya, ke masyarakat yang lebih terbuka. Di situlah untuk pertama kalinya mereka dianggap sederajat dengan orang Eropa dalam masyarakat maupun di hadapan hukum.

Bagi sebagian dari mereka yang merasa tercerabut dari kebudayaan desa atau kota kecil dan terlempar untuk pertama kalinya ke dalam kehidupan kota Bandung atau Batavia, dan kemudian ke kehidupan ramai di suatu negara di Eropa yang baru saja mengalami keguncangan mental akibat perang dunia, ini merupakan peluang untuk mengatasi krisis jati pribadi. Usaha pencarian jati diri ini pada taraf kelompok sejajar dengan usaha mencari jati diri sebagai bangsa Indonesia. Kedua usaha itu tersalur dalam kegiatan-kegiatan gerakan kebangsaan.

Para mahasiswa muda itu kebanyakan berusia 19 atau sekitar 20 tahun sewaktu tiba di negeri Belanda, dan kesepian serta suatu rasa keterasingan budaya pada hakekatnya merupakan masalah besar yang harus mereka tanggulangi. Mereka lalu menjalin persaudaran satu sama lain saling membantu dan hanya sedikit bergaul dengan mahasiswa Belanda. Mahasiswa yang membawa serta istri dan keluarganya ke negeri Belanda sering mengundang mahasiswa bujangan ke rumah mereka untuk makan malam dan mempererat persahabatan. Keadaan sama-sama terlempar ke dalam lingkungan yang asing membuat mereka lebih sadar untuk bangga kepada tanah air mereka. Perbedaan kedaerahan, kesukuan, dan kekhasan yang dulu dibesar-besarkan demi kepentingan orang Eropa, kini ditempatkan dalam perspektif yang berbeda.

Beberapa anggota dari generasi baru mahasiswa ini mengandalkan pengalaman mereka dalam organisasi pemuda ketika masih berada di Indonesia untuk terjun ke dalam kancah politik di negeri Belanda. Antusiasme mereka untuk terjun di bidang politik itu didorong oleh datangnya sejumlah tokoh politik Indonesia yang dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda ke negeri Belanda. Agitasi politik yang nampaknya dapat diselesaikan dengan begitu mudahnya oleh pemerintah Hindia Belanda itu, sekarang agaknya mulai menimbulkan masalah. Di samping para pemimpin Indische Partij yang dibuang pada tahun 1913 (Tjipto Mangunkusumo, Douwes Dekker, dan Suwardi Suryaningrat), pada awal tahun 1920 datang lagi tokoh-tokoh PKI yaitu Darsono, Semaun, dan Abdul Muis, semuanya lalu tinggal lama di negeri Belanda. Kehadiran mereka sangat mempengaruhi sesama teman seperjuangan yang lebih muda, apalagi Darsono dan Semaun mempunyai pengaruh yang istimewa kuat dalam Indonesiache Vereeninging.

Para pendatang baru itu dengan cepat mendominasi Indonesche Vereeninging dan menyalurkan anggota kedalam kegiatan aktif sehubungan dengan masalah masa depan politik Indonesia. Pada akhir tahun 1922, penguirus yang baru terpilih mulai mereorganisasi perkumpulan itu dan mengubah sifat dari cita-cita dan kegiatannya. Semua anggota pengurus itu terdri atas mahasiswa yang belum lama tiba di negeri Belanda. Pada awal 1925, Indnesiache Vereeninging telah mengubah diri dari suatu perkumpulan sosial menjadi organisasi politik yang aktif.

Dalam pidato yang diucapkan pada rapat umum yang diselenggarakan pada bulan Januari 1923. Ketua Baru IV, Iwa Kusumasumantri menjelaskan bahewa organisasi yang sudah dibenahi itu mempunyai tiga azas pokok yang harus diberi tekanan yang makin lama makin kuat. Pertama, Indonesia ingin menentukan nasib sendiri. Kedua, agar dapat menentukan nasib sendiri, bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Ketiga, dengan tujuan melawan Belanda, bangsa Indonesia harus bersatu. Ia menekankan agar para mahasiswa terus mengikuti perkembangan politik di Indonesia dan menyatakan bahwa cara tercepat untuk mencapai ketiga sasaran itu adalah jika semua kelompok Indonesia bersatu dalam perjuangan bersama melawan Belanda.

Kegiatan para mahasiswa yang secara radikal disalurkan ke dalam aktivitas politik itu lebih jauh tercermin dalam perubahan nama Perhimpunan Indonesia dan jurnalnya pada tahun 1924. Rapat umum yang diadakan pada bulan Januari menegaskan bahwa sejak itu Indische Vereeninging bernama Indonesche Vereeninging. Namanya yang lama masih diakui tapi namanya yang baru mengungkapkan sikap yang lebih kuat sebagai orang Indonesia dan bukan bagian dari Hindia Belanda. Pada bulan Maret 1924, jurnalnya, juga berganti nama menjadi Indonesia Merdeka dan Hindia Poetra. Kata pengantar edisi pertama ini mengemukakan kesamaan antara penjajahan Indonesia oleh Belanda dan pendudukan Belanda oleh bangsa Spanyol dan memberi argumentasi bahwa orang Indonesia sekarang juga idak lagi bersedia menyebut negaranya Hindia Belanda seperti halnya orang Belanda ketika itu tidak mau menyebut negaranya Nederland-Spanyol. Pelajaran yang telah mereka terima di sekolah tentang sejarah Belanda dan cerita tentang keberanian orang Belanda menentang Spanyol, sekarang menyalahkan semangat perlawan mereka terhadap pemerintahan asing.

Indonesche Vereeninging salah satu organisasi nasionalis Asia yang paling awal menuntut kemerdekaan yang segera dan tidak bersyarat. Radikalisme para pemuda nasionalis Indonesia itu terutama merupakan refleklsi dari gerakan nasionalis Indonesia yang sampai sekarang belum berhasil mengadakan dialog dengan pemerintah Belanda, apalagi memperoleh tanggapan konstruktif dari pemerintah Hinduia Belanda sendiri. Para anggota Indonesiche Veereninging marah dan jenglel menghadapi kerasnya pendirian Belanda dan mereka menghapus semua kebijakan sebelumnya,, dan mendukung tuntutan radikal untuk " Indonesia Merdeka Sekarang."

Pada tanggal 3 Febriari 1923, nama baru PI, Perhimpunan Indonesia, sudah dipakai. Indonesia Merdeka menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi selama tahun sebelumnya itu dimaksudkan untuk memurnikan oraganisasi tersebut dan mengajukan argumentasi bahwa karena prinsip-prinsip PI sejak dulu sudah jelas, maka tidak ada lagi tempat dalam organisasi tersebut bagi orang yang secara terang-terangan mengajukan prinsip sebaliknya.

Sebuah artikel dalam Indonesia Merdeka terbitan Februari 1925 kedengarannya

seperti bunyi terompet maju perang. Di bawah judul " Strijd aan Twee Front" ("Perjuangan di Dua Front"), artikel ini menyatakan bahwa perjuangan bakal lebih berat dan lebih pahit tapi pemuda Indonesia tidak dapat menghindarinya. Mereka harus bersedia mengorbankan semua daya dan kepandaian mereka jika ingin mencapai kemerdekaan. Perjuangan itu tidak hanya melawan Belanda, tapi juga melawan sesama orang Indonesia yang menentang kaum nasionalis. Pemuda Indonesia tidak boleh ragu berhadapan dengan saudara-saudaranya sendiri. (John Ingleson , 1993 : 1 – 11)

Selagi di Eropa Soetomo mengambil bagian aktif di Perhimpunan Indonesia dan menjadi pemimpin dan penuntun bagi mahasiswa-mahasiwa muda Indonesia. Idenya sebagian besar tercermin di dalam deklarasi yang menyertai perubahan di dalam nama menjadi Perhimpunan Indonesia di bagian akhir tahun 1922. Deklarasi itu berbunyi "

> Masa depan rakyat Indonesia secara ekslusif dan semata-mata terletak di dalam bentuk suatu pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat dalam arti yang sebenar-benarnya, karena hanya bentuk pemerintahan yang seperti itu saja yang bisa diterima oleh rakyat. Setiap orang Indonesia haruslah berjuang untuk tujuan ini sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya, dengan kekuatan dan usahanya sendiri, tanpa bantuan dari luar. Setiap pemecahbelaan kekuatan bangsa Indonesia dalam bentuk apa pun haruslah ditentang, karena hanya dengan persatuan yang erat di antara putra-putri Indonesia saja yang dapat menuju ke arah tercapainya tujuan bersama.

Di sini terlihat pernyataan yang jelas mengenai tujuan umum kaum terpelajar yang berkecenderungan politik dari elit Indonesia yang sedang tumbuh dalam mengarahkan pandangannya. Tuntutan bagi pemerintahan yang betul-betul mewakili rakyat Indonesia bukanlah hal baru. Apa yang baru ialah; pelimpahan tanggung jawab untuk mengadakan aksi kepada perorangan putera Indonesia. Rangsangan datang tidak lama kemudian dari pemerintah kolonial yang menganut Politik Etis itu. Program ini ditujukan kepada orang Indonesia sebagai manusia yang punya martabat dan integritas diri yang telah bangkit dengan kesadaran sendiri, dan bekerja untuk masa depan tanpa menggantungkan diri dari pihak luar. Hal ini tampaknya sesuai dengan konsep auto-aktivitas yang akan dibicarakan di bawah, suatu konsep baru yang sedang dikembangkan di kalangan dunia akademi Belanda.

Telah menjadi perdebatan, apakah prinsip pokok Perhimpunan Indonesia ini suatu pernyataan untuk non-kooperasi. Penolakan terhadap bantuan luar, tentu saja bernada non-kooperasi, tetapi mungkin merupakan pagar kawat yang ditujukan kepada Politik Etis dan campur tangan dalam kehidupan Indonesia yang menyertainya. Adapun masalahnya, Perhimpunan Indonesia menjelaskan pendiriannya dalam pernyataan terpisah yang

menerangkan, bahwa politik non-kooperasi dengan pemerintah kolonial akan dijalankan selama prinsip Presiden Wilson tentang hak menentukan nasib sendiri oleh rakyat tidak diperhatikan.

Pada tahun 1924, sesudah keberangkatan Soetomo, pemimpin-pemimpin Perhimpunan Indonesia berhubungan dengan Semaun dan Tan Malaka yang sedang dalam pembuangan. Pengaruh kedua orang ini diperlihatkan dengan keluarnya sebuah ketentuan yang menghimbau untuk "menyusun suatu aksi massa nasionalis yang didukung oleh kekuatan sendiri." Organisasi ini kemudian tumbuh dengan bersikap lebih keras lagi terhadap pemerintah dan menginginkan kemerdekaan dan kebebasan dengan segera (1925). Segala usaha harus ditujukan untuk menghancurkan kekuasaan kolonial. (Robert van Niel, 1984 : 292 – 296)

Perhimpunan Indonesia sebagai pelopor pemikiran mengenai nasionalisme Indonesia ditambah dengan menyebarnya para anggpta di wilayah dan daerah masing-masing, pikiran nasionalisme Indonesia juga semakin menyebar dan prinsip-prinsip yang beradadalam Perhimpuinan Indonesia menjadi suatu konteks di mana pergerakan-pegerakan yang lain bekerja.. Walaupun mereka dapat melawan prinsip non-kooperasi atau menerimanya, akan tetapi mengambil posisi demikian saja sudah membuktikan bahwa unsur non-kooperasi digunakan sebagai kerangka untuk diikuti maupun dilawan. Hal itu berarti bahwa pengaruh Perhimpunan Indonesia tidak bisa diremehkan. Pikiran dari kelompok itu sangat banyak mengarahkan pikiran partai-partai politik bumiputra lainnya. Kalau aktivitas Perhimpunan Indonesia bisa dikatakan sebagai pelopor dan pemikir masalah politik maupun alat propaganda, kelompok di Surabaya dan di Bandung selain ikut menjadi pemikir juga sekaligus menjadi eksekutor dari pikiran itu.

Kelompok Studi akhirnya sangat berpengaruh terhjadap masa depan pergerakan nasional karena mereka mempunyai suatu kekhususan. Perhimpunan Indonesia berhasil untuk membuat suatu kerangka pikiran mengenai nasionalisme Indonesia yang sebelumnya tidak atau belum tercapai, selanjutnya Kelompok Studi Umum Bandung dan Kelompoki Studi Indonesia Surabaya menjadi tempat di mana ide itu berkembang menjadi matang di wilayah Hindia-Belanda. Sebelum Kelompok Studi terwujud tidak ada partai yang mempunyai nasionalisme Indonesia. Nasionalisme di Hindia Belanda kecuali Indische Partij. selalu berdasarkan suku, wilayah atau agama. Nasionalisme berdasarkan golongan bumiputra di Hindia-Belanda baru terwujud akibat aktivitas Kelompok Studi. Boleh dikatakan bahwa Kelompok Studi sangat luar biasa penting untuk sejarah nasionalisme Indonesia di wilayah Hindia Belanda. Pikiran yang terwujud dalam Perhimpunan Indonesia dan melalui anggotanya dibawa ke Hindia Belanda merupakan faktor nasionalisme yang sangat penting dalam sejarah nasionalisme Indonesia. Faktor keberhasilan pembentukan pikiran nasionalisme terbukti ketika Sumpah Pemuda dilahirkan pada tahun 1928. Peristiwa

bersejarah itu itu sangat penting dalam sejarah Indonesia, karena hal itu terjadi di dalam wilayah Hindia Belanda sendiri dan oleh generasi pemuda berikutnya. Mereka menerima ide nasionalisme baru setelah penyebarannya di wilayah Hindia Belanda dilakukan oleh anggota Perhimpunan Indonesia.

Dengan pekerjaan Kelompok Studi sebagai eksekutor pikiran Perhimpunan Indonesia terjadoi suatu proses pematangan masyarakat bumiputra dalam wilayah Hindia-Belanda dengan pegeseran nasionalisme dari yang bercorak kesukuan ke nasionalisme Indonesia. Kemudian dengan Sumpah Pemuda, kendali atas proses pembentukan nasionalisme Indonesia diambil oleh [pemuda-pemuda di dalam wilayah Hindia-Belanda sendiri tidak hanya secara aktivitas tetapi juga secara mental dan secara teoritis dengan unsur baru kesatuan bahasa. Peran Perhimpunan Indonesia merupakan inisiatir nasionalisme Indonesia sedangkan Kelompok Studi di Surabaya dan Bandung merupakan penyebar kerangka nasionalisme Indonesia ke wilayah Hindia-Belanda.(Frank Dhont, 2005 : 99 – 103)

Sementara itu, Soetomo telah pulang ke Hindia Timur dan mulai mengatur diri sendiri sesuai dengan aktivitas orang Indonesia yang sadar akan politik Bulan Januari tahun 1924 ia menghadiri rapat Kongres Seluruh Hindia di Surabaya ketika Tjokroaminoto mengharapkan akan membawa persatuan untuk penduduk di kepulauan ini di bawah naungan Islam. Soetomo mendengarkan rangkuman kata-kata yang muluk-muluk serta rencana dan usul-usul biasa, kemudian bangkit menentang lawan bicaranya; bilakah akan ada kerja yang benar-benar konstruktif menuju kemerdekaan dengan lebih dahulu mengadakan sesuai yang berguna dan dapat dicapai – mempersiapkan rakyat baik sosial maupun ekonomi untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang bertanggung jawab? Catatan ini asing bagi pemimpin-pemimpin politik dari organisasi-organisasi Indonesia terdahulu. Ini merupakan suatu panggilan yang terbaik untuk kalangan intelektual baru. Mengherankan, bahwa ia telah benar-benar menghalangi konsep Kongres Seluruh Hindia.

Soetomo tidak hanya berusaha menghancurkan politik Indonesia yang tidak efektif, tetapi juga berusaha mendapatkan jalan untuk menerapkan ketentuan tahun 1922 yang baru sebagaimana khusus disusun oleh Perhimpunan Indonesia. Ia menjadi yakin, kepemimpinan itu harus tumbuh dari kaum intelektual, tetapi ini harus merupakan kepemimpinan yang meliputi bangsa Indonesia, tak satu pun dapat tertinggal di belakang. Kecenderungan dan pengalamannya dalam mengorganisasi kaum intelektual Indonesia tampaknya merupakan satu-satunya kelompok yang sanggup, melalui keyakinan dan pendidikan, untuk menggerakan gerakan organisasi Indonesia ke garis-garis yang baru dan bermanfaat. Rakyat Indonesia harus menolong dan harus mempersipkan diri sendiri. Di bulan Juli 1924, Soetomo melepaskan jabatannya di dewan kota dan mendirikan Indonesische Studieclub. (Robert Van Niel, 1984 : 292 – 296).

Kelompok Studi Indonesia

Kelompok Studi Indonesia merupakan kelompok studi yang pertama didirikan di Surabaya pada tanggal 11 Juli 1924. Pendiri dan penggerak utamanya ialah Soetomo, seorang dokter di Surabaya yang sebelumnya seorang anggota PI yang aktif di Amsterdam 1919 dan 1923. Soetomo mengharapkan bahwa kelompok studi tersebut dapat mempersatukan kaum terpelajar Jawa, mengembangkan kesadaran mereka tentang Indonesia sebagai suatu bangsa dan memberikan kepemimpinan kepada gerakan kebangsaan. Kelompok ini merupakan organisasi orang Jawa di kota-kota yang mendapat pendidikan barat yang banyak daripadanya menjadi anggota Budi Utomo terlalu berorientasi Jawa dan kurang berorientasi Indonesia. Mula-mula, kebanyakan anggotanya yang aktif adalah bekas anggota PI, tetapi setelah berkembang, organisasi tersebut menarik orang-orang Jawa yang mendapat pendidikan tingginya di Bandung dan Batavia. (John Ingleson, 1983 : 20)

Lewat wawancara dengan koran *Sin Jit Po* Soetomo menjelaskan tujuan dari Kelompok Studi Indonesia. Dalam wawancara itu Soetomo menjelaskan bahwa tujuan Kelompok Studi Indonesia adalah untuk memperkuat persatuan nasional, menumbuhkan suatu kesadaran mengenai arti-arti dari hal yang umum, memajukan perkembangan intelektual dan perkembangan moral dari golongan bumiputra, menciptakan suiatu hubungan intelektual antara golongan-golongan masyarakat dengan tujuan akhir mencapai kemerdekaan Indonesia. Karena itu kelompok Studi Indonesia mau memperkuat persatuan dan mencerdaskan golongan bumiputra dan menghubungkan kaum intelektual dengan kaum wong cilik.

Soetomo menginginkan kesejahteraan sosial dan kemakmuran untuk rakyat Hindia-Belanda. Sebagai seorang realis, Soetomo mencoba menerima sistem kolonial dan tradisional yang sudah ada dan berjuang agar rakyat bisa mencapai kemakmuran. Soetomo sadar bahwa kemajuan tidak bisa tercapai tanpa mengikutsertakan rakyat desa dalam proses modernisasi. Soetomo berpemdapat bahwa priyayi sebagai kelas elit mempunyai suatu tugas sosial untuk membantu rakyat sebagai guru dalam perkembangannya. Kelompok Studi Indonesia ingin menjadi suatu perhimpunan dari intelektual yang melalui kreasi mereka mendorong rakyat untuk ikut serta dan memandu mereka sampai ke peningkatan kebahagian dan kemamuran negerinya. Oleh karena itu, Kelompok Studi Indonesia ingin belajar mengenai masalah yang terkait dengan keperluan rakyat dan tanah air. Apabila sudah mendapat suatu cara untuk menyelesaikan masalah, selanjutnya kelompok Studi Indonesia akan terus mengusahakan sampai terselesaikannya masalah-masalah itu. * Frank Dhont, 2005 : 66 – 67)

Simbol Kelompok Studi Indonesia diwakili oleh kop surat dan publikasinya, terdiri dari gambar seluruh tangan memegang arit dan sebuah tangkai padi sementara tangan satunya memegang pena. Ia menyimbolkan keinginan agar baik masyarakat umum

maupun intelektual bekerja bahu-membahu dan adanya tanggung jawab kalangan terpelajar terhadap buruh dan petani. Kelompok Studi yang muncul di kota-kota utama di Jawa pada pertengahan 1920-an memiliki kesamaan komitmen rasa dan ideologi untuk meningkatkan keadaan sosial dan ekonomi dari masyarakat biasa. Kemerdekaan dilihat sebagai suatu isyarat penting bagi masyarakat baru yang makmur, tetapi anggota Kelompok Studi percaya bahwa perjuangan politik didukung oleh aktivitas politik dan ekonomi yang terencana. Peran dari kalangan intelektual menyediakan kepemimpinan terhadap anggota buruh dan petani yang tidak berpendidikan. Sementara anggota terkemuka dari mereka yang berpendidikan Barat sering berbicara secara kritis atas apa yang mereka lihat sebagai alam feudal masyarakat Indonesia, mereka yakin bahwa peran kepemimpinan mereka adalah penting untuk modernisasi. Banyak dari mereka menganggap adanya kontradiksi antara retorika demokrasi dan sikap paternalistik mereka bahwa kepemimpinan seharusnya disediakan oleh kelas yang berpendidikan Barat.

Soetomo memiliki kesamaan pandangan dunia dengan kelas intelektual berpendidikan Barat yang muncul di Indonesia dalam jumlah yang meningkat sejak 1920-an. Putra seorang pegawai rendah Pemerintah, ia mewarisi pikiran kuat akan tugasnya menolong mereka yang tidak memiliki tempat seperti dirinya. Sebagai seorang dokter, ia mengabdikan banyak waktunya melayani dan mengobati si miskin dan sangat mendalam terlibat dalam program meningkatkan taraf ekonomi pendudukan kebanyakan. Ia adalah seorang yang sangat konservatif, percaya perlunya ketertiban sosial. Kalangan intelektual baru yang berpendidikan Barat memiliki kewajiban menyediakan kepemimpinan kepada masyarakat dan masyarakat memiliki kewajiban untuk mentaati kepemimpinan mereka.

Dengan anggota-anggota perorangan dari Surabaya, Kelompok Studi Indonesia sejak semula sudah terlihat di dalam sarekat buruh. Kadangkala sebagai anggota eksekutif, seringkali sebagai penasihat, mereka adalah partisipasi aktif di dalam organisasi buruh perkotaan di Surabaya pada 1925 dan 1926. Sesungguhnya, Kelompok Studi terlibat di dalam operasi penyembuhan bagi kalangan pemogok dan keluarga mereka selama perluasan pemogokan di kota pada akhir 1925 dan awal 1926. Selama tahun 1926 Kelompok Studi Indonesia menghasilkan analisis lengkap pemogokan-pemogokan dengan informasi yang dikumpulkan atas wawancara mendalam dengan para pemogok. Laporan itu menekankan sebab-sebab ekonomi di belakang pemogokan tersebut, memperingatkan Pemerintah dan kalangan majikan untuk tidak melabelkan atau mencap pemimpin sarekat buruh sebagai semuanya komunis dan semua pemogokan yang diilhami komunisme. Kalangan majikan, menurutnya, harus meningkatkan kondisi upah kalangan buruh dan harus juga menaikan kondisi sosial mereka dengan perumahan yang lebih baik dan pelayanan kesehatan yang meningkat serta peraturan jam kerja yang tepat untuk memasuki kondisi kerja. (John Ingleson, 2013 : 329 – 330).

Kelompok-kelompok studi didirikan di tempat lain mengikuti model Kelompok Studi Surabaya; yang paling penting ialah Kelompok Studi Umum yang didirikan di Bandung pada tanggal 29 November 1925 atas inisiatif bersama bekas anggota PI, tokoh-tokoh nasionalis yang terkenal di Bandung dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik Bandung. Ide pembentukannya barangkali diprakarsai oleh Iskaq Tjokroadisurjo, seorang pengacara didikan Leiden yang kembali dari negeri Belanda pada bulan September 1925, tetapi usaha praktis untuk melahirkan kelompok ini dilakukan oleh para mahasiswa, khususnya oleh dua orang mahasiswa jurusan mesin dan arsitektur, Soekarno dan Anwari, Iskaq, bersama-sama dengan tokoh-tokoh nasionalis yang terkemuka di Bandung seperti Tjipto Mangunkusumo dan Sartono, mernyumbangkan pengalaman, dan juga keuangan, yang tak cukup dimiliki oleh para mahasiswa. Barangkali karena alasan inilah Iskaq menjadi Ketua Pertama Kelompok Studi Umum. Tetapi dalam pertengahan tahun 1926 ia telah menarik diri sebagai anggota pengurus barangkali karena kesibukannya membangun sebuah kantor pengacara di Bandung yang ia didirikan bersama-sama dengan Sartono, Sunarjo dan Budiarto, yang semuanya baru saja menyelesaikan studinya di Leiden dan menjadi anggota Kelompok Studi Umum.

Kelompok Studi Bandung dan Surabaya bagaikan menjadi magnet bagi bekas anggota PI dan bagi kaum muda di kota-kota yang mulai bangkit secara politik. Kedua kelompok studi tersebut mempunyai program-program yang aktif untuk malam ceramah dan diskusi mengenai masalah-masalah sosial ekonopmi dan politik. Bekas anggota PI mernjamin mantapnya peredaran bahan-bahan dari organisasi tersebut dan menjaga agar ideologi PI menjadi landasan bagi diskusi-diskusi politik.

Sementara kedua kelompok studi tersebut mempunyai banyak persamaan, terdapat pula perbedaan-perbedaan penting antara keduanya. Kelompok Studi Umum yang menggunakan sebagaian besar waktunya untuk masalah-masalah yang bersifat murni-politik mengenai Indonesia merdeka, lebih kuat berpegang kepada asas non-kooperasi sebagai suatu masalah prinsip dibandingkan dengan Kelompok Studi Indonesia. Kelompok Studi Indonesia yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai pandangan politik dengan spektrum yang lebih luas merupakan kelompok yang lebih heterogen dibandingkan dengan kelompok Bandung sebagai akibat harus ditempuh kebijaksanaan jalan-tengah yang dapat memuaskan semua pihak. Sebagian besar anggotanya bekerja di kantor-kantor pemerintah yang cenderung membuat mereka berhati-hati untuk bertentangan secara langsung dengannya, sedangkan di Bandung sebagian besar anggota adalah orang-orang professional yang menciptakan pekerjaan sendiri atau mahasiswa tektik atau sekolah tinggi yang bebas dari hambatan tersebut di atas. Kelompok Studi Indonesia bukannya tidak tertarik kepada masalah-masalah politik, tetapi mengenai keterikatannya kepada asas non-kooperasi ia tidaklah seketat Kelompok Studi Umum. Ia menggunakan asas non-kooperasi sekedar sebagai senjata taktis terhadap pemerintah tetapi menyesuaikan kebijaksanaannya dengan tanggapan pemerintah. Kelompok Studi Indonesia bukan sekedar suatu organisasi sosial

dan ekonomi – masalah-masalah politik dan diskusi tentangnya merupakan bagian penting dari kegiatannya – dan dibandingkan dengan Kelompok Studi Umum di Bandung ia juga menggunakan lebih banyak waktunya untuk kerja sosial dan ekonomi di daerah Surabaya. (John Ingleson, 2013 : 20 – 25)

Ada sebuah tafsiran yang tidak boleh dianggap mutlak mengenai berdirinya Kelompok Studi Indonesia dam Kelompok Studi Umum di Surabaya dan Bandung. Faktor pertama kenyataan bahwa Surabaya dan Bandung adalah dua kota industri baru dengan perguruan tinggi, maka banyak mahasiswa yangsebagian mempunyai idealisime tinggi, barangkali tinggal di sana. Faktor kedua Surabaya dan Bandung juga agak jauh dari kontrol pusat Jakarta, sehingga mungkin pergerakan bisa lebih gampang muncul di sana. Faktor ketiga bisa merupakan kualitas dan semangat pendirinya di kota-kota itu. Faktor-faktor itu barangkali bisa dikatakan cukup penting tetapi tidak mutlak , di Jakarta misalnya di mana juga ada perguruan tinggi dan kotanya cukup modern. Soejadi dari Budi Utomo menjadi Kelompok Studi Baravua pada tanggal 23 November 1925. Akan tetapi dalam sejarah Kelompok Studi itu tidak memberikan begitu banyak sumbangan yang dapat direkam, barangkali salah satu sebabnya adalah karena lokasinya di pusat kekuasaan ko0lonial. Tentu saja jawaban ini hanya merupakan suatu teori yang karena kekurangan sumber belum bisa dikonfirmasi secara mutlak (Frank Dhont , 2005 : 98 – 99)

Kehadiran orang-orang nasionalis radikal seperti Tjipto, keterlibatan yang mendalam dari Soekarno, Anwari dan mahasiswa-mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik dan besarnya daya tarik kota Bandung bagi anggota-anggota lama PI telah mendorong Kelompok Studi Umum untuk berpijak pada pendirian politik yang tidak kompromistis. Bandung, sebagai suatu pusat pendidikan yang dekat dengan pusat-pusat administrasi pemerintahan Batavia dan Bogor akhirnya mengambil alih peran Surabaya sebagai pusat pemikiran dan aktivitas politik yang radikal di Indonesia Kelompik Studi Umum membuktikan kelebihan ini dan mempunyai lebih banyak kemungkinan dibandingkan Kelompok Studi Indonesia untuk memainkan peranan utama dalam pembentukan suatu gerakan kebangsaan yang baru. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin Kelompok Studi Indonesia, semua pemimpin Kelompok Studi Umum bebas sama sekali dari keterikatan politik dengan partai-partai politik yang ada sehingga mempunyai keleluasaan yang lebih besar dalam usaha pembentukan suatu partai nasionalis yang baru.

Namun demikian, justru Kelompok Studi Indonesia-lah yang dalam bulan Agustus 1926 menyodorkan kepemimpinan dalam usaha menghidupkan kembali gerakan didasarkan kepada ideologi PI. Kelompok Studi Indonesia mengirimkan Sekretarisnya R.P. Singgih, seorang pengacaradidikan Leiden yang tinggal di Surabaya, agar melakukan suatu kunjungan yang luas di Jawa untuk menegaskan perlunya Persatuan Indonesia dan untuk mendorong kaum terpelajar membentuk kelompok-kelompok studi dan ikut serta dalam kebangunan

nasional. Singgih memperoleh hasil yang paling besar di Bandung, dimana selama beberapa waktu sejumlah organisasi sosial yang menonjol, antara lain Kelompok Studi Umum, Budi Utomo dan Pasundan, telah mengadakan pertemuan untuk membicarakan pembentukan suatu gerakan yang terpadu. Ia menjadi pembicara utama dalam suatu rapat yang disponsori oleh organisasi-organisasi di Bandung pada tanggal 21 Agustus di mana ia menguraikan pikiran-pikiran yang sudah berkembang dalam lingkungan mahasiswa Indonesia di negeri Belanda dan terutama perlunya persatuan.

Pertemuan tersebut yang dihadiri oleh 1.000 orang, menelorkan suatu misi yang menekankan agar organisasi-organisasi di Bandung bekerja bersama ke arah persatuan. Yang lebih penting lagi, dalam pertemuan tertutup yang diselenggarakan pada malam harinya dibentuk Komite Persatuan Indonesia yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil organisasi yang turut hadir. Anggota Pengurus Komite tersebut terdiri dari Sartono sebagai ketua, Suprodjo Wakil Ketua, Soekarno sebagai Sekretaris I, Sjahbudin Latif Sekrtetaris II dan Mas Usman sebagai Bendahara. Semua anggoita pengurus tersebut adalah anggota Kelompok Studi Umum dan Sartono, Suprodjo dan Sjahbudin Latif juga bekas anggota PI Pada akhir bulan September beredar laporan-laporan bahwa Komite Persatuan Indonesia bermaksud menyelenggarakan suatu Kongres Nasional yang diikuti oleh wakil-wakil dari organisasi-organisasi di seluruh Indonesia. Inisiatif Kongres Persatuan yang di Bandung tersebut mendorong terbentuknya komitem semacam itu di Surabaya dalam bulan September, di Yogyakarta dibawah pimpinan Sujudi dalam bulan November dan Di Batavia di bawah pimpinan Iskaq. Komite-komite tersebut mulai mengembangkan diskusi yang setelah 12 bulan kemudian memuncak dalam pembentukan suatu federasi partai-partai politik di Indonesia.

Dalam bulan Oktober 1926 Kelompok Studi Umum meningkatkan propagandanya dengan nomor pertama majalah bulanan *Indonesia Moeda* yang diterbitkan menurut model *Indonesia Merdeka*-nya PI dan rupanya segera menarik banyak pembaca di kota-kota Jawa dan Sumatera. Majalah tersebut dipimpin oleh Soekarno yang menyumbang artikel paling besar jumlahnya. Soekarno yang sebelumnya aktif dalam Kelompok Studi Umum kemudian bergabung dengan anggota-anggota lainnya yang dididik di negeri Belanda untuk membicarakan masa depan negerinya. Ideologi yang dibawa pulang oleh para bekas aktivis PI tersebut meneguhkan dan semakin memperkuat gagasan-gagasan yang ia kumpulkan dari bahan-bahan bacaan, dari hubungannya yang dekat dengan Pemimpin Sarekat Islam Tjokroaminoto sewaktu ia menjadi pelajar di Surabaya dalam permulaan tahun 1920-an, dan dari hubungan pribadinya dengan Ki Hajar Dewantara dan Tjipto Mangunkusumo. Sebagai seorang mahasiswa ia telah menyerap suasana politik yang radikal, mula-mula di Surabaya kemudian di Bandung, telah mengikuti pertemuan-pertemuan politik yang dipimpin oleh Tjokroaminoto dan memperoleh pengalaman sebagai seorang premimpin lokal Jong Java, organisasi pemuda Java yang paling penting dalam tahun 1920-an. Antusiasme politiknya

dan daya tarik pribadinya telah membuat dia menjadi orang yang paling menonjol dalam Kelompok Studi Umum dan menempatkannya dalam baris terdepan usaha pembentukan suatu gerakan nasionalis yang baru.

Penerbitan *Indonesia Moeda* yang pertama, kedua dan ketiga memuat artikel panjang yang ditulis oleh Soekarno berjudul "Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme ." Artikel ini merupakan uraian yang paling jelas tentang pokok-pokok pikiran Soekarno pada akhir 1926. Pokok pikiran Soekarno bahwa gerakan-gerakan Islam, marxis dan nasionalis di Indonesia berasal dari suatu dasar yang sama yaitu hasrat kebangssaan untuk melawan kapitalisme dan imperialisme Barat dan bahwasanya ketiga aliran gerakan politik tersebut harus bersatu dalam perjuangan melawan musuh bersama.

Oleh karena itu, pada akhir tahun 1926 muncul harapan di kalangan nasionalis-nasionalis muda dari berbagai golongan dan partai politik ketika merasakan ada jalan menuju kebijaksanaan baru dan arah baru dalam aktivitas mereka. Bekas anggota-anggota PI telah berhasil dalam mencangkokkan benih-benih ideologi nasionalis yang baru ke dalam bumi politik yang telah dipersiapkan oleh propaganda yang disusupkan kje Indonesia oleh PI lebih dari 3 tahun sebelumnya. Kelompok-kelompok studi di Bandung dan Surabaya mencari peran politik yang lebih luas, dan kebutuhan akan partai nasionalis yang baru semakin banyak diterima Langkah-langkah pertama yang disertai keraguan telah diambil menuju ke persatuan yang lebih luas antara berbagai-bagai kelompok. (John Ingleson, 1983 : 20 – 25).

Suara Rakyat dan Politik Kesenian

Sudah sejak awal abad kedua puluh, Surabaya menjadi pusat kegiatan politik Para pemimpin Indonesia (yang dikemudian hari menjadi bagian terbesar dari kelas priyayi) tidak ragu-ragu terlibat dalam persoalan-persoalan yang dihadapi oleh arek-arek Surabaya jika kesempatan itu ada, sekalipun mereka sangat dibebani isu-isu "nasional" yang luas. Namun polanya jelas, yaitu bahwa keresahan lahir dulu di kampung dan baru kemudian diperhatikan oleh orang-orang Indonesia di luarnya, yang lalu menumbuhkan, membantu dan kadang-kadang memanfaatkan gerakan-gerakan yang muncul secara spontan ini.

Hampir bisa dipastikan bahwa dengan landasan pemikiran seperti ini, sejak awal sekali Kelompok Studi Indonesia-nya Soetomo memusatkan perhatian kepada para penghuni kampung Surabaya. Harapannya ialah bahwa dengan membiasakan angggota-anggotanya terhadap kesusahan kampung akan bisa ditemukan pemecahan persoalan tersebut, yang kemudian dapat diterapkan secara lebih luas bagi kondisi seluruh orang Indonesia di bawah

pemerintahan jajahan. Soetomo sendiri tampaknya pertama sekali berpikir untuk mewakili kepentingan-kepentingan kampung dari dalam struktur yang ada, terutama di dalam dewan kota praja. Tetapi ia segera merasa bahwa badan ini diawasi secara ketat oleh para anggota Belanda-nya, sehingga ia dan beberapa rekan lain secara dramatis mengundurlkan diri dari dewan tersebut pada tahun 1925. Namun tanpa menyerah, dengan upayanya mereka justru memperbesar perhatian terhadap kampung dan berpikir untuk mendirikan semacam badan saingan bagi dewan kota praja yang dikuasai oleh orang-orang Belanda di Surabaya. Badan ini didasarkan pada sinoman dan disebut Sinoman Raad (Dewan Sinoman).

Percobaan tersebut hanya berhasil sebagian, dan kemudian lebih sebagai gagasan dibandingkan semacam lembaga sebagaimana dicanangkan kaum terpelajar Kelompok Studi Indonesia, Dewan Sinoman sendiri, setelah sebentar ramai diupayakan, segera layu dan kemudian sama sekali berhenti berfungsi dan tidak ada pemimpin baru atau program yang teratur yang muncul dari pengalaman tersebut. Tetapi, di kalangan arek Surabaya, gagasan tentang sinoman memainkan peran yang lebih penting di kampung dan di luar kehidupan kampung, diterima dengan baik, dan dasawarsa berikutnya menyaksikan berkembangnya sinoman dan dewan-dewan ketetanggaan sinoman (sebagai kelompok-kelompok pembuatan keputusan di setiap kampung, dan kadang kala persekutuan kampung jika diperlukan) Kegiatan-kegiatan kerjasama dilakukan antarkampung, seperti upacara khinatan yang dikerjakan bersama oleh gabungan beberapa sinoman, dan kadang-kadang kampung mengorganisasikan diri sendiri dengan cara seperti ini untuk mengajukan keluhan-keluhan tertentu terhadap pemerintahan kota praja. Dengan cara yang terbatas dan secara bertahap, dinding pemisah antarkampung mulai runtuh. Arek Surabaya melakukan upaya mereka sendiri untuk mempengaruhi arah pemerintahan kota, dan terjadi semacam kebangkitan kembali sinoman, dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan semacam itu mengungkapkan perasaan-perasaan antipenjajahan yang ada di kalangan para penghuni kampung selama beberapa tahun. Namun, kesenjangan antara pemerintahan kota praja dengan kampung tetap tidak terjembatani.

Kampung Surabaya pada awal 1930-an dicirikan dengan persaingan ketat untuk mencari pengaruh di kalangan arek Surabaya oleh kalangan terpelajar yang secara politis aktif. PBI (yang dibentuk dari para bekas anggota Kelompok Studi Indonesia), beberapa orang PNI yang saat itu dilarang, berbagai kelompok sempalan serta orang-orang tertentu, semuanya berlomba-lomba berusaha menarik perhatian. Sasarannya adalah dukungan suara di dalam proses pemilihan kolonial yang diperluas, yang menjanjikan keikutsertaan yang lebih besar dari orang-orang Indonesia di dewan kota praja. Kaum terpelajar memanfaatkan tawaran itu dengan penuh semangat, secara seragam menjalankan pengabdian kepada rakyat, dan mengingatkan para anggota mereka akan pentingnya massa, termasuk mereka yang ada diperkotaan. Kampung Surabaya dihujani oleh pesan persamaan dan pandangan kesetiakawanan untuk menentang pemerintah Belanda.

Tetapi kesulitan utama dalam semua hal ini ialah bahwa kaum terpelajar mencari kesempatan, di mata kelas menengah kampung sekalipun, yang setidaknya memberikan satu pijakan bagi mereka untuk duduk di dewan kota praja. Hal ini menyuilitkan, kalau bukan malah sama sekali tidak memungkinkan, mereka untuk melihat persoalan-persoalan sepenuhnya dari sudut pandang kampung. Kesulitan ini dihadapi oleh kalangan terpelajar dari semua kelompok, tetapi yang paling jelas bisa dilihat dari kasus PBI, yang mengalahkan saingan-saingan dan terus menguasai politik kota praja selama dasawarsa terakhir pemerintahan Belanda. Pada tahun 1931, misalnya, partai mengumpulkan dana dari rakyat kampung dengan tujuan untuk mendirikan Gedung Nasional Indonesia (GNI) di pusat kota Surabaya. Bangunan pertama semacam itu yang didirikan oleh semangat rakyat Indonesia, sehingga merupakan sumber kebanggaan besar. Tetapi sebagaimana kemudian terjadi, nilai gedung ini sebagian terkikis oleh kenyataan bahwa pembangunan GNI membutuhkan pemerintahan kota praja untuk secara paksa memindahkan para penghuni kampung yang bermukim di tanah pribadi, sehingga menyebabkan mereka kehilangan tempat tinggal.

Peristiwa lain mungkin bisa mengubah keadaan ini. Pada akhir tahun 1932 wilayah Kampung Dinoyo, yang terletak di daerah perkotaan, secara bertahap dibersihkan untuk perumahan orang-orang Eropa serta wilayah industri. Para penghuni kampung diberi tahu bahwa mereka harus menghentikan pemakaian kuburan kampung dan menguburkan jenazah di kuburan kota praja. Tetapi beberapa penghuni menolak, dan meminta pertolongan para pemimpin PBI. Para anggota sinoman Dinoyo segera dikumpulkan dan Dewan Sinoman seluruh kota dihidupkan, undang-undang dipelajari dan dibicarakan, serta pertemuan umum untuk membicarakan persoalan itu diselenggarakan di GNI. Soewongso, seorang kepala sinoman dari Kampung Keputeran, memimpin pertemuan tersebut dan mempertanyakan hak kota praja atas kuburan kampung, serta mengapa kasus Dinoyo harus diangkat sekarang, sekalipun peraturannya telah diundangkan oleh pemerintah kota sejak tahun 1916. Bagaimana mungkin rakyat kampung membayar biaya pemakaman kota praja, atau menyatakan diri melarat supaya dibebaskan dari biaya pemakaman? Para penghuni Kampung Dinoyo berbicara tentang sejarah perkuburan kampung, kesucian tempat ini, serta tanggung jawab seluruh arek Surabaya terhadap Islam. Suatu ketika seorang tua berteriak," Lihat Anak-anaku, matahari kita sedang terbit! Ingatlah akan kewajibanmu dan bangkitlah!" Ketika jelas bahwa pertikaian mengenai tanah perkuburan, bukanlah atas alasan pelanggaran hukum kota praja (karena dalam kenyataannya perkuburan semacam itu tetap digunakan di kampung lain di kota) tetapi lebih atas keinginan pihak pemerintah kota untuk menfaatkan tanah tersebut bagi pembangunan dan jalan beraspal, pertemuan tersebut menjadikan keresahan dan kemarahan.

Pada tahap ini kesulitan PBI menjadi kelihatan. Sebagian para pemimpinnya, termasuk Soetomo sendiri, telah sangat terlibat dalam upaya membantu para penghuni Dinoyo, mengungkapkan pandangan mereka. Meskipun demikian, selama pertemuan

tersebut mereka tidak bisa menghindarkan perasaan bahwa kritik-kritik terhadap pemerintah kota praja juga ditujukan kepada mereka karena para anggota PBI duduk dalam dewan kota praja. Selain itu, kalangan priyayi baru ini dalam PBI merasa “modern”, dan betapapun besar perhatian yang mereka tujukan terhadap arek Surabaya, mereka tetap tidak bisa menghindarkan diri dari sikap memandang kehidupan kampung sebagai suatu yang terbelakang dan perlu perubahan. Tidaklah mudah untuk mendukung kekuatan “tradisi” melawan ”kemajuan” sekalipun itu hanya berarti bersimpang jalan dengan pemerintah kota praja yang dijalankan Belanda. Akhirnya, juru bicara PBI mengambil sikap mendukung hak para penghuni Kampung Dinoyo untuk melakukan protes, sekaligus menyarankan bahwa kesepakatan bersama dengan pihak kota praja harus dijalankan. Pada kenyataannya, pihak kota praja semakin memberikan tekanan dan mulai melakukan denda terhadap orang-orang yang tetap melakukan penguburan di tanah itu. dan para penghuni Kampung Dinoyo sedikit demi sedikit mulai menyerahkan tanah perkuburan mereka serta hak pertanahan yang terkait atasnya. PBI tidak lagi menaruh perhatian atas kasus tersebut, dan tidak pernah terlibat lagi di dalam kasus serupa. Pengganti partai ini, yaitu Parindra, mengajukan berbagai persoalan kampung ke dewan kota praja – pajak-pajak yang tidak adil, kondisi kesehatan yang buruk, tuan-tuan tanah yang jahat,-tetapi semuanya dilakukan dari kejauhan Persekutuan kampung terbentuk secara bebas dari ikatan-ikatan politik dan di atas segala-galanya merupakan perwujudan dari kesetiakawanan ketetanggan Parindra, kalaupun memainkan peran, paling jauh hanyalah pengamat yang tettarik pada kegiatan-kegiatan.

Secara keseluruhan priyayi baru Surabaya gagal di dalam upaya mereka untuk membina hubungan politik baru dengan penduduk kampung perkitaan. Kegagalan itu mungkin lebih jelas dalam kasus PBI dan Parindra, yang berada pada titik pusat perhatian dan yang meninggalkan catatan historis lebih banyak dibandingkan kelompok terpelajar lain di kota, tetapi dalam kenyatannya, karena berbagai alasan, dikerjakan bersama-sama. Penjelasannya barangkali tidak terletak pada ketidaktulusan hati kaum priyayi baru dalam pengabdian mereka terhadap rakyat, yang selalu menjadi tema pokok melainkan terletak pada pandangan yang naïf dan sering dibuat sendu atas masyarakat, yang melandasi pengabdian tersebut. Ada sedikit upaya secara sungguh-sungguh untuk menelaah masyarakat Indonesia dengan menggunakan istilah-istilah yang lebih rumit daripada sekedar “ massa dan rakyat terdidik“ atau “massa, kelas menengah, dan aristokrat”. Kelas menengah dijabarkan oleh seorang penulis sebagai terdiri atas “orang-orang berpendidikan, para pegawai pemerintah, rakyat professional, pengrajin kulit, dan pembuat rokok” Rakyat, sekalipun merupakan hal pokok di dalam retorika terus-menerus dari kalangan terpelajar, secara serrupa digambarkan dengan rumusan yang tidak pas melalui istilah-istilah seperti kromo, murba dan marhaen. Istilah-istilah yang meskipun menyatakan keterikatan ideologis, tetapi pada pokoknya mengandung pengertian yang sama: massa yang tak terbedakan atau “orang awam”. Suatu bangunan sosial yang abstrak atau bahkan imajiner, yang diseputarnya terdapat sejumlah besar gambaran romantis.

Sebenarnya priyayi baru tidak berarti tidak sungguh-sungguh dalam hal perubahan sosial, tetapi hanya untuk menunjukkan bahwa apa yang mereka pikiran, betapapun seringnya kata “revolusi” muncul di dalam tulisan-tulisan mereka, dalam kenyataannya kurang revolusioner dalam pengertian umum. Mereka tidak membayangkan berlangsungnya perubahan sosial yang luas atau mendalam. Dan bisa dipastikan tidak berkeinginan untuk menarik picu yang dapat menimbulkan reaksi berantai yang tak terkontrol di seluruh masyarakat Indonesia. Apa yang dicari oleh kaum terpelajar adalah proses yang relatif sederhana dan lancar yang memungkinkan orang-orang lain bisa diangkat sampai statusnya sama dengan mereka dan sekaligus memasuki kedalam momentum pergerakan. (William H Frederick, 1989 : 66 – 73)

Sekitar tahun 1928, aktivis Kelompok Studi Indonesia minat yang bersungguh-sungguh terhadap persoalan-persoalan kampung. Soetomo diperkenalkan dengan karya dan gagasan dari seorang penggagas yang luar biasa dalam ludruk, yaitu Cak Gondo Durasim. Orang ini arek Surabaya asli, dilahirkan dan dibesarkan di pusat kota di Kampung Genteng Sidomukti. Dikabarkan sebagai seorang yang buta huruf, tetapi ia menikmati keberhasilan seni yang luar biasa melalui pertunjukan ludruknya. Ia terutama dikenal di seluruh kampung Surabaya dengan peran sebagai badut. Dan melalui peranannya ini melancarkan kritik-kritik sumbang terhadap pemerintahan kota praja dan terhadap penjajahan Belanda pada umumnya. Kritik-kritik ini dibawakan dengan cara halus dan dengan kejenakaan yang dikenal rakyat kampung, atau lelucon asli berdasar gaya pidato kampung, terpadu ke dalam format ludruk. Dalam hal ini, Soetomo melihat kemungkinan yang luar biasa. Ia tampak tak kenal lelah dalam memajukan hubungan yang lebih akrab antara rombongan Durasim dengan Kelompok Studi Indonesia, atau memajukan gagasan bahwa upaya mereka harus dipadukan. Sulit mengatakan sisi mana dalam hubungan ini yang lebih berubah selama proses tersebut berlangsung, tetapi pada tahun 1930 Cak Durasin mengumumkan pembentukan jenis ludruk yang sepenuhnya baru, yang dimainkan oleh kelompoknya sendiri yang sudah diubah di depan para anggota PBI yang baru terbentuk, sertta tidak main di kalangan kampung melainkan di panggung modern GNI.

Gaya baru yang dimainkan itu tajam dan progresif. Kelompok yang saat itu berjumlah tujuh atau delapan pemain, meningkatkan komentar-komentar tajam sebelumnya ke tingkat mendekati komentar sosial, yang dilakukan dengan humor dan isi yang serius. Sekurangnya sebagian karena saran Soetomo, yang banyak menunjukkan kepada Durasim akan perlambang yang lebih dalam yang dilihatnya dalam warna dan perangkat ludruk, kritik-kritik di dalam pertunjukan mereka mempunyai sisi yang lebih tajam. Meskipun demikian, hal itu masih tetap dilakukan dengan cara sebegitu rupa untuk menghindari kemarahan PID (yang segera menghadiri kebanyakan pertunjukan mereka) seta lebih menekankan kemandiran dibandingkan keluhan yang tanpa tujuan. Sebuah contoh peringatan yang khas misalnya,” Jika tidak cukup banyak sekolah (negeri), mengapa tidak maju dan mendirikan

sekolah sendiri?"Tetapi juga ada kalimat-kalimat yang lebih tajam, seperti yang menyatakan bahwa kemiskinan orang Indonesia di bawah pemerintahan Belanda pasti mempunyai beberapa sebab.

Dengan demikian tujuan ludruk dan tujuan pergerakan terkait. GNI menjadi tempat pertunjukan rombongan Durasim secara teratur, dan penemuan ini menghasilkan pemasukan (dibagi dua dengan rombongan itu) bagi PBI, serta juru bicara yang berbeda dan berhasil guna bagi beberapa gagasannya. Ludruk, dalam beberapa hal mendapatkan tempat tetap dan modern, penghasilan tetap yang memadai, serta populeritas yang lebih besar dibandingkan yang pernah dinikmatinya. (William H Frederick, 1989: 83 – 85)

Namun, kesulitan ludruk terletak pada dirinya sendiri. Ludruk menyorotkan bayangan yang ruwet sehingga mengundang penonton dengan rasa tertarik yang berbeda-beda. Jenis pertunjukan yang dipopulerkan oleh Durasim selama tahun-tahun 1930-an menunjukkan sifat ganda. Di satu pihak ia mengandung banyak nilai yang sudah lama dikenal arek Surabaya, keluwesan, spontanitas, dengan sifat yang anti-elites dan agak kasar. Berbagai kelompok bersaing keras dalam gerak dan nyanyian mereka dengan pendekatan kritis dan bebas yang dikagumi rakyat kampung, dan berharap dengan ini bisa berbicara kepada arek Surabaya.

Di lain pihak ludruk juga dikenal karena cirinya yang sangat berbeda; kemampuannya untuk menggambarkan, membicarakan, dan mendorong kemajuan, atau progresif dan modern. Beberapa penduduk kampung, terutama kelas menengahnya, merasa aspek ludruk inilah yang menarik, karena menyuarakan banyak pengertian ke dalam siuatu acuan yang dengan mudah dapat mereka pahami. Tetapi ciri yang sama sering mengaitkan ludruk dengan dunia di luar kampung, dan bagi banyak arek Surabaya hal ini tidak mengenakkan atau bahkan tidak bisa diterima. Kritik-kritik dalam ludruk sering ditujukan terhadap hal-hal yang terletak di luar wawasan kampung, dan inti cerita ludruk umumnya terletak di dalam suatu keadaan atau dengan orang-orang yang berada di luar lingkungan kampung yang normal. Jelas bahwa setelah tahun 1930 hampir semua rombongan ludruk Surabaya mengikiti jejak Durasim dan meninggalkan lingkungan kampung mereka. menjadi rombongan yang lebih mapan dan menetap di sebuah gedung pertunjukian hiburan jenis ini. Di sana mereka main di depan penonton yang datang dari seluruh kota dan dari berbagai jenjang sosial. Ludruk tidak lagi merupakan kesenian kampung yang terbatas, yang berbicara pada dataran kampung.

Dengan demikian, ludruk menyajikan dua wajah kepada penontonnya, wajah yang tidak sama sekali bertentangan maupun saling mengatup satu sama lain. Tidak mengherankan jika mereka yang menonton mempunyai perasaan baur tentang apa yang mereka lihat. Arek Surabaya memandang dengan rasa menghargai sekalipun benci akan keterlibatan yang jelas dari kaum priyayi baru dalam membentuk pesan dan gaya ludruk. Dengan gabungan antara

kekaguman dan kekecewaan, pada awal tahun 1930-an rakyat kampung mengatakan bahwa Cak Gondo Durasim menjadi "salah satu dari kaum terpelajar itu sendiri", dan mereka atau dianggap "kelas atas", sikap tersebut menvcerminkan keraguan yang sama yang menghinggapi arek Surabaya berkenaan dengan kaum priyayi baru dan pergerakan mereka pada umumnya. (William H Frederick, 1989 : 86 – 87)

Volksraad

Di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum (1916-1921), kepentingan dan aspirasi orang-orang bumiputra dalam banyak hal menjadi prioritas. Gubernur Jenderal baru tersebut bukanlah seorang kolonis gaya lama, melainkan seorang diplomat berpikiran liberal dan berpandangan bahwa Hindia tidak akan dapat seterusnya menjadi jajahan Belanda, dan otonomi yang lebih besar bagi Hindia akan melayani kepentingan negeri induk.

Pada bulan Desember 1916, parlemen di Negeri Belanda telah menyetujui pembentukan suatu Dewan Rakyat (Volksraad) di Hindia. Lembaga tersebut berfungsi sebagai badan penasihat tetapi tanpa kekuasaan legislatif, interpelasi maupun penyelidikan parlementer. Dengan demikian, dewan ini tidak dapat menjatuhkan pemerintahan. Anggotanya berjumlah 38 0rang, setengah darinya dipilih oleh dewan-dewan kotapraja (*gemeenteraad*) dan kresidenan, dan setengahnya diangkat oleh gubernur jenderal sebagai wakil golongan masyarakat Hindia.

Berbagai reaksi muncul sebagai akibat rencana pembentukan Volksraad. Bagi pendukung Politik Etis dan Asosiasi (yang menganjurkan kerja sama antara penduduk bumiputra dengan Eropa.), hal itu jelas merupakan suatu langkah maju. Juru bicara terpenting kelompok ini, Dirk van Hinloopen Labberton – seorang terkemuka di kalangan komunitas teosofi dan dikenal dekat dengan sejumlah tokoh pergerakan – yakin bahwa keberadaan Volksrrad akan mengikat lebih erat kaum Indo-Eropa dan bumiputra dengan pemerintah, khususnya berkaitan dengan isu pertahanan Hindia (*Indie Weerbaar*) yang sedang hangat dibicarakan.

Walaupun demikian, sejak awal telah terlihat pembentukan Volksraad tampak merupakan tindakan yang bersifat setengah-setengah dan bagaimanapun akan banyak menuai kritik. Kenyataan bahwa dewan tersebut hanya berfungsi sebagai lembaga konsultatif dan tidak memiliki hak parlementer, serta kenyataan bahwa anggota-anggotanya dapat diangkat pemerintah, menjadi cemoohan kaum nasionalis yang lebih radikal, dengan mengatakan bahwa Volksraad tidak lebih merupakan "komedi politik" belaka.

Sementara itu, bagi kaum nasionalis konservatif, pembentukan dewan tersebut bukan merupakan langkah tepat. Hal itu karena mereka yakin bahwa kaum bumiputra belum cukup matang untuk diberi pengakuan dalam hak-hak politik. Bagi kebanyakan orang Belanda yang memandang rendah potensi emansipasi orang Indonesia melalui lembaga semacam ini, pembentukan dewan ini tidak akan memiliki dampak apa pun sebagaimana kalangan ekspatriat yang menjuluki dewan itu sekadar ":tempat ngobrol " (praatbarak). Di lain pihak tetap saja terdapat kekhawatiran bahwa memberikan hak politik kepada rakyat jajahan dalam jangka panjang akan berarti likuidasi terhadap pemerintah dan negara kolonial.

Akan tetapi, adanya rencana pemebntukan dan kampanye untuk pemilihan anggota Volksraad bagaimanapun telah menciptakan akselerasi dalam perkembangan Pergerakan Hindia. Pada tahun 1917, Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Insulinde menyusun kembali program organisasi mereka dan secara resmi mengubah diri menjadi partai-partai politik. Dalam pada itu Budi Utomo merupakan organisasi yang paling antusias menyambut kampanye pemilihan Vilksraad. Pada akhir tahun itu, Budi Utomo mengadakan kerja nsama denagn NIVB, partai pendukung Politik Etis dan asosiasi, dalam menyusun daftar calon-calon untuk pemilihan anggota Volksraad. Walaupun demikian, Van Limburg Stirum tidak hanya akan melindungi kaum Pergerakan yang moderat dan asosiatif saja. Ia bahkan merasa khawatir jika Volksraad akan dikuasai kalangan birokrat atau pangreh praja kolonial. Oleh karenanya, ia bertekad akan menggunakan kekuasaannya untuk membuat lembaga tersebut representantif mungkin.

Pada bulan Januari 1918 pemilihan anggota Volksraad dilaksanakan dan berhasil memilih 10 orang wakil bumiputra. Kecuali Abdul Muis dari Sarekat Islam, wakil-wakil yang terpilih berasal dari kalangan priyayi dan pegawai pemerintah. Pada bulan berikutnya gubernur jenderal mengangkat lima tokoh bumiputra sebagai anggota dewan, beberapa di antaranya berasal dari kalangan "radikal;" Pergerakan seperti Tjokroaminoto dari Sarekat Islam dan Tjipto Mangunkusumo yang mewakili Insulinde. Pengangkatan tersebut terutama diharapkan akan menepis serangan terhadap dewan sebagai komedi. Akan tetapi, pengangkatan Tjokroaminoto juga menimbulkan pro-kontra yang selanjutnya mengakibatkan perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam. Kemudian pada tanggal 18 Mei 1918 dengan rapat pertama yang dibuka oleh gubernur jenderal barulah Volskraad secara resmi terbentuk.

Pembentukan Volksraad berlangsung dalam situasi krisis di Hindia Belanda, khususnya krisis akibat Perang Dunia I berupa gangguan terhadap hubungan antara koloni dan negara induk, di mana hal tersebut telah memunculkan persoalan mengenai pertahanan Hindia. Orang-orang Eropa (Belanda) di Hindia mulai mengkhawatirkan sejak terjang satu negara Asia yang sejak PD I tampak semakin jelas menjalankan politik ekspansionis, yaitu Jepang Jika Hindia terancam oleh kekuatan asing siapakah yang harus mempertahankannya? Tentunya tidak mungkin jika orang Eropa yang merupakan minoritas di tengah mayoritas

penduduk bumiputra itu harus menanggungnya sendiri. Dengan kata lain, orang bumiputra juga harus dilibatkan. Akan tetapi, sebagai konsekuensi dari pemikiran ini muncul masalah hak-hak kewarganegaraan. Dengan melibatkan kaum bumiputra, berarti pemerintah menempatkan mereka sebagai warga yang sah dari negara Hindia Belanda, sehingga sudah semestinya mereka juga memperoleh hak-hak yang setara dengan kelompok penduduk lainnya.

Di lain sisi perang tersebut juga mengubah perimbangan kekuatan dan konstelasi global. Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan baru. Sejak tahun 1916, dibukanya jalur pelayaran baru yang menghubungkan Amerika dan Asia Tenggara menyebabkan orang Eropa kehilangan monopolinya terhadap modernitas koloni. Bersamaan dengan hal itu, Amerikanisasi kehidupan di Hindia yang telah dimulai semenjak Perang Dunia I akan semakin terasa dalam dekade-dekade selanjutnya. Dalam wacana politik, pengaruh liberalisme dan pemikiran-pemikiran tentang pemerintahan demokratis – yang terutama diidentikan dengan AS – semakin tak terelakan menjadi simbol modernitas dan kemajuan. Kecuali segolongan minoritas yang berpikir progresif, sedemikian jauh kaum nasionalis telah terbiasa dengan stndard ganda dalam menyikapi fenomena tersebut. Mereka mengakui bahwa prinsip-prinsip itu berlaku di dunia Barat, tetapi mereka menyangkal prinsip-prinsip itu berlaku dalam hubungan kolonial. Banyak di antara orang Eropa di Hindia mulai sadar bahwa mereka ingin bertahan dan menunda kekalahan itu selama mungkin. (Pradipto Niwandhono, 2011 : 167 – 171)

Pemberontakan PKI yang gagal tersebut harus dihadapi oleh Gubernur Jenderal De Graeff hanya beberapa bulan setelah ia mengambil alih kekuasaan dalam bulan September 1926. Setelah pengetatan keuangan dan sikap keras pemerintahan Gubernur Jenderal Fock terhadap orang-orang nasionalis maka pengangkatan De Graeff dinilai oleh kebanyakan orang-orang nasionalis sebagai suatu perubahan kebijaksanaan yang baik dari pihak pemerintah Belanda. Sikap liberal dari De Graeff yang ditunggu-tunggu, berkat pengalamannya di Indonesia sebelumnya sebagai teman dan pendukung Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum yang liberal, ditegaskan kembali dalam pelantikannya di depan Volksraad pada tanggal 7 September 1926. Dalam pidato tersebut ia, mengungkapkan sikap hormatnya kepada nasionalisme yang dibedakan dari komunisme, dan menyatakan bahwa tujuan utama pemerintahannya ialah mengembalikan kepercayaan pemerintah.

Di samping itu, kedatangan De Graeff menumbuhkan harapan dalam lingkungan kaum nasionalis bahwa hubungan antara pemerintah dengan kaum nasionalis akan membaik. Pandangan yang tersebar luas ialah bahwa usahanya untuk mengembalikan kepercayaan di antara orang Indonesia akan berhasil apabila ia melakukan sejumlah perubahan kebijaksanaan. Yang paling sering disebut ialah pembinaan sistem pendidikan untuk orang-orang Indonesia, usaha menjadikan Volksraad lebih representatif dan mermberinya peranan yang lebih besar

dalam pemerintahan, meningkatkan kebebasan berpendapat dan berkumpul, mencabut pasal 153 bis dan ter dan 161 bis dari KUHP, dan mengurangi beban pajak bagi rakyat banyak.

Walaupun mendapat ketentuan untuk memelihara *rust en orde* (ketenangan dan ketertiban) dan menekan komunisme dengan segala kekuatan yang ada, De Graeff melihat bahwa orang-orang komunis hanya merupakan sebagian kecil dari nasionalisme Indonesia dan ia percaya bahwa mayoritas kaum nasionalis menolak penggunaan kekerasaan. Pemberontakan-pemberontakan tersebut hanya menegaskan keyakinan pada dirinya bahwa perlu diatasi kesenjangan antara pemerintah dan kaum nasionalis serta perlu diredakan polarisasi dalam masyarakat Indonesia. Ia benar-benar menyadari kuatnya nasionalisme di negeri-negeri jajahan dan bermaksud mengarahkan sedemikian rupa sehingga dapat disalurkan melalui cara-cara yang menurut anggapannya kontsruktif. Ia memandang perkembangan politik di Indonesia sebagai suatu pertumbuhan organis, dalam arti bahwa sekali pertumbuhan telah dimulai maka ia tidak dapat dihentikan atau diabaikan, tetapi harus dilanjutkan dengan langkah yang selaras dengan tuntutan masyarakat.

Pemberontakan-pemberontakan semakin memperkuat keyakinan De Graeff bahwa ia harus berusaha mengambil hati kaum nasionalis yang non-komunis agar tidak berkembang ke arah yang radikal. Bagian penting dari strateginya ialah memperbaharui komposisi Volksraad dan berusaha meyakinkan dua orang pemimpin nasionalis yang paling terkemuka pada waktu itu, Tjokroaminoto dari PSI dan Soetomo dari Kelompok Studi Indonesia, untuk mau menerima kursi di Volksraad. Tujuannya ialah untuk menunjukkan sikapnya yang liberal dalam lapangan politik dan dengan demikian membuka dialog dengan orang-orang Indonesia yang menuntut bagian yang lebih besar dalam pemerintahan jajahan dan menuntut suatu percepatan masa transisi menuju ke kemerdekaan.

Problem pertamanya ialah mempengaruhi seorang menteri jajahan yang konservatif dalam pemerintahan Belanda yang biasanya konservatif untuk mengubah keputusan tahun 1925. Dalam rangka revisi yang menyeluruh terhadap konsitusi Hindia Belanda dalam tahun 1925 itu pemerintah mengusulkan dimasukan mayoritas Indonesia dalam Volksraad dan dalam dewan propinsi di Jawa Barat yang baru saja diusulkan. Namun demikian dalam bulan Februari 1925 senat menerima amademen Feber yang menyatakan bahwa Volksraad harus terdiri dari 30 kursi orang Eropa, 25 kursi Indonesia, dan antara 3 sampai 5 kursi untuk kelompok ras yang lain. sehingga dengan demikian menghilangkan pasal yang mengusulkan mayoritas Indonesia. Untuk kepentingan konsistensi, pemerintah kemudian menarik kembali pasal mengenai mayorotas Indonesia dalam dewan propinsi di Jawa Barat. De Graeff menganggap amandemen ini merupakan penghalang utama bagi usaha-usahanya untuk menumbuhkan kepercayaan antara pemerintahnya dan kaum nasionalis dan sangat mudah membangkitkan kenangan pada janji-janji palsu pada 1918.

Itulah sebabnya dalam bulan November 1926, setelah pemberontakan PKI semakin memperkuat keyakinannya akan perlunya mengadakan dialog dengan kaum nasionalis. Ia mengusulkan kepada menteri jajahan suatu perubahan konsitusi untuk memulihkan kembali mayoritas Indonesia dalam Volksraad dan dewan propinsi di Jawa Barat, disertai perubahan-perubahan dalam sistem pemilihan. Ia menghendaki agar perubahan-perubahan tersebut mulai diadakan untuk pemilihan Volksraad yang baru dalam tahun 1931 sebab ia percaya bahwa perubahan perubahan tersebut akan melunakkan kritik-kritik terhadap Volksraad yang dilancarkan dari kubu-kubu nasionalis yaitu bahwa Volksraad bukan merupakan wakil bangsa Indonesia dan didominir oleh suara-suara oang Belanda yang konservatif. Serentak dengan itu tuntutan kaum nasionalis yang moderat untuk mempeeroleh peranan yang lebih besar dalam pemerintahan akan terpenuhi.

Dengan suatu langkah yang taktis dan jitu, De Graeff mengumumkan usul-usulnya dalam Volksraad, sehingga dengan demikian memberi tekanan yang sangat besar kepada pemerintah Hindia Belanda untuk menerimanya. Ia kini menegaskan bahwa penolakan terhadap usul-usulnya akan menyebabkan menurunnya secara serius kredibilitas dirinya dan gubernur-gubernur jenderal yang akan datang. Ia mendesak Menteri Utusan Jajahan untuk menggunakan pengaruh kabinet agar amandemen Feber dicabut.

Usul-usul tersebut tidak segera diterima oleh pemerintah Belanda, yang sikap konservatifnya didukung oleh oposisi yang lantang dari kelompok-kelompok masyarakat Eropa di Indonesia yang tidak menghendaki adanya konsesi sama sekali kepada kaum nasionalis karena takut konsensi tersebut akan meluncur tanpa kendali dan akhirnya mengarah kepada hilangnya kontrol Belanda di tanah jajahan. Pandangan-pandangan tentang akibat ini dikemukakan secara moderat pada bulan Mei 1927 oleh mayoritas Dewan Hindia Belanda, yaitu suatu badan penasehat gubernur jenderal yang terdiri dari anggota-anggota yang ditunjuk dan pejabat-pejabat tinggi. Kritik yang lebih tajam datang dari sebagian pers Eropa yang melancarkan serangan keras kepada kebijaksanaan De Graeff yang lunak terhadap kaum nasional dan memberikan tekanan agar ia mengundurkan diri atau digeser dari jabatannya.

De Graeff sangat terpukul oleh serangan-serangan yang bersifat pribadi dan oleh oposisi yang kuat dari kalangan masyarakat Eropa, tidak hanya kepada usul-usulnya mengenai mayoritas Indonesia dalam Volksraad, tetapi juga kepada seluruh kebijakannya terhadap kaum nasionalis. Sebagaimana yang dikhawatirkan oleh De Graeff, amandemen Feber dan reaksi masyarakat Eropa di Indonesia terhadap usul-usul perubahan dalam Volksraad menghidupkan kembali perasaan dalam kalangan nasionalis bahwa Belanda tidak dapat dipercaya untuk memenuhi janji-janjinya.

Sementara masalah tersebut belum dipecahkan oleh pemerintah Belanda, De Graeff

juga terlibat pada bulan Maret 1927 dalam usaha untuk mempengaruhi Tjokroaminoto dan Soetomo agar menerima penunjukan sebagai anggota Volksraad. Jika berhasil, akibatnya ialah ia akan mengubah haluan PSI dan politik non-kooperasi dan menjamin dominasi dari sayap yang bersifat kooperatif dalam Kelompok Studi Indonesia. Serentak dengan itu akan terpenuhi juga keinginannya untuk meningkatkan status Volksraad dengan cara mengambil wakil-wakil dari sebanyak mungkin kelompok-kelompok Indonesia. Sesuai dengan resolusi PSI dalam kongresnya di Pekalongan tahun 1924, Tjokroaminoto segera menolak tawaran tersebut.

Tetapi Soetomo memerlukan waktu yang lama sebelum sampai kepada suatu keputusan meskipun menurut saran pertama dari Kelompok Studi Indonesia ia juga seharusnya menolaknya. Soetomo sadar bahwa De Graeff sedang cemas untuk mendapatkan pembenaran bagi kebijaksanaannya dan melihat kesempatan ini sebagai suatu alat yang dapat digunakan untuk memberikan konsesi-konsesi kepada kaum nasionalis. Dengan demikian Soetomo terombang-ambing, tetapi setelah membicarakannya dengan Schrieke, pejabat pemerintah yang bertanggungjawab terhadap masalah-masalah umum dan Volksraad, dan dengan De Graeff sendiri, ia memutuskan untuk meminta restu dari Kelompok Studi Indonesia agar ia menerima tawaran tersebut. Soetomo menjelaskan bahwa Schrieke, dan lebih-lebih lagi De Graeff, telah menjanjikan konsesi-konsesi kepada tuntutan kaum nasiuonalis dan mendesaknya agar, dalam rangka konsesi-konsesi ini, menerima penunjukan sebagai anggota Volksraad. Soetomo diberitakan telah memberikan keterangan kepada Kelompok Studi Indonesia kalau gubernur jenderal telah mengatakan bahwa sistem pemilihan akan diubah, dan bahwa akan ada mayoritas Indonesia dengan komposisi 35 bernading 25 dalam Volksraad dan bahwa wakil-wakil Indonesia dalam dewan-dewan daerah akan ditambah. Tambahan lagi, pembatasan hak berkumpul orang-orang Indonesia dan pembatasan-pembatasan pers akan dikurangi. Akhirnya, guebernur jenderal berjanji untuk mengintrodusir peraturan-peraturan yang membuka kesempatan bagi orang-orang Indonesia untuk dapat bekerja dalam kantor-kantor pemerintah bila mereka memiliki kemampuan untuk itu. Berdasarkan laporan tersebut Kelompok Studi Indonesia memutuskan mengubah keputusan terdahulu dan dengan demikian Soetomo menerima penunjukan De Graeff.

Setelah Soetomo menerima suatu kursi dalam Volksraad tersiar desas-desus bahwa gubernur jenderal telah memberikan konsesi-konsesi besar kepadanya. Dalam konperensi pers pada tanggal 6 Mei 1927, De Graeff ditanya secara langsung apakah ia telah memberikan konsesi-konsesi kepada Soetomo untuk mempengaruhinya agar Soetomo mengubah keputusannya sehingga mau menerima penunjukkan sebagai anggota Volksraad. Bantahan De Graeff meredakan suasana dalam beberapa kalangan masyarakat Eropa, tetapi sungguh-sungguh mengecewakan Soetomo dan memaksanya untuk kembali ke posisi semula dan menolak duduk dalam Volksraad.

Meskipun demikian De Graeff menyangkal, namun benar kemungkinan bahwa ia telah menyatakan kepada Soetomo garis-garis besar rencananya untuk perkembangan politik di Indonesia dan bahwa perhitungan Soetomo tentang keadaan umum adalah tepat. Tetapi sebagai akibar dari oposisi sebagian besar masyarakat Eropa dan keenganan pemerintah Belanda untuk menerima kebijaksanaan ini, maka sejumlah usul De Graeff termasuk, usulnya mengenai mayoritas Indonesia dalam dewan propinsi di Jawa Barat dan Volksraad diperlemah atau ditinggalkan sama sekali. Hal ini, bersama-sama dengan laporan-laporan yang tersiar secara luas tentang pemberian konsesi-konsesi yang penting kepada kaum nasionalis, barangkali memaksa dirinya untuk secara terbuka menyangkal apa yang ia katakan dalam pembicaraan pribadi dengan Soetomo.

Pemerintah Belanda, di bawah tekanan yang terus-menerus dari De Graeff, akhirnya menerima usul-usulnya untuk mayoritas Indonesia dalam Volksraad. tahun 1941 terdiri dari 25 anggota orang Eropa, 30 anggota orang Indonesia dan 5 anggota dari golongan lain. Meskipun De Graeff mempunyai banyak harapan, namun perubahan-perubahan ini tidak cukup mengubah pendapat dari aliran yang paling kuat dalam gerakan nasionalis bahwa Volskraad tidak relevan bagi usaha-usaha mereka untuk memperoleh kemerdekaan. Keengganan pemerintah Belanda untuk meratakan jalan mnenuju ke perubahan-perubahan dan meredakan oposisi keras dari masyarakat Eropa hanya akan memperkuat keyakinan kaum nasionalis bahwa kerjasama dengan Belanda tidak akan memberikan hasil apa-apa.

De Graeff mengharapkan bahwa Volksraad yang diperbaharui akan membantu terbentuknya suatu dialog antara pemerintah dengan kaum nasionalis. Tetapi pertikaian tentang usul-usul perubahannya hanya menunjukkan bahwa pikiran-pikirannya mengenai perkembangan politik Indonesia terlalu maju dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan politik di negeri Belanda dan dalam lingkungan masyarakat Eropa di Indonesia. Kegagalannya untuk mempengaruhi PSI dan Kelompok Studi Indonesia tentang keuntungan-keuntungannya menerima kursi dalam Volksraad, bersama-sama dengan bertambah kuatnya keyakinan kaum nasionalis sekuler bahwa Volksraad tidak relevan, membawa akibat-akibat jangka panjang yang penting tidak hanya bagi hubungan antara pemerintah Hindia Belanda dan kaum nasionalis, tetapi juga bagi perkembangan partai-partai yang bersifat non-kooperasi. Karena telah menolak kerjasama dalam Volskraad dan Dewan-Dewan Propinsi, partai-partai ini menutup diri mereka sendiri satu daerah kegiatan yang masih mungkin yang, betapapun terbatasnya, sungguh-sungguh memberikan beberapa kesempatan untuk politik pemilihan dan untuk memusatkan tenaga para anggota. Hal ini tambah menyulitkan mereka untuk menyalurkan antusianisme politik para anggota ke dalam kegiatan yang konstruktif (John Ingleson, 1983 : 39 – 48)

Kaum Pergerakan Menuju Federasi

Pembentukan PNI hanya memenuhi sebagian dari ambisi mereka yang terlibat dalam peremajaan gerakan nasionalis setelah pemberontakan PKI. Bagian yang kedua ialah menyatukan semua partai politik ke dalam suatu front bersama melawan Belanda. Gerakan nasionalis telah diperlemah oleh banyaknya jumlah partai-partai yang masing-masing mengejar kepentingannya sendiri yang sering kali sempit, dan sedikit sekali perhatian terhadap pergerakan sebagai suatu keseluruhan. Hal yang banyak dibicarakan adalah taktik "pecah-belah" yang dipakai oleh Belanda, tetapi kaum nasionalis yang lebih perseptif menyadari bahwa fragmentasi gerakan dan perjuangan kepentingan dalam lingkungan kelompok elite memudahkan pemerintah Belanda untuk menjalankan taktik tersebut.

Konsentrasi radikal dalam tahun 1922 telah mencoba untuk menyatukan kaum nasionalis dari berbagai-bagai partai yang terwakili dalam Volksraad untuk tujuan-tujuan bersama yang terbatas, tetapi tanpa hasil. Namun demikian, bagian sentral dari prinsip dasar PI adalah perlunya kerjasama semua partai politik Indonesia bila kemerdekaan hendak dicapai. Sewaktu merumuskan rencana-rencananya untuk suatu gerakan baru dalam tahun 1926 Hatta dengan tegas menyatakan perlunya diciptakan suatu blok nasional, terdiri dari partai-partai komunis maupun nasionalis, untuk menghadapi pemerintah Hindia Belanda dengan memakai kekuatan. Dalam lingkungan kelompok-kelompok melalui pengaruh bekas-bekas anggotanya dalam lingkungan kelompok-kelompok studi di Bandung dan Surabaya, terdapat perasaan yang kuat bahwa gerakan nasionalis harus lebih bersatu dari waktu sebelumnya bila tujuannya adalah membangun suatu ancaman yang nyata terhadap Belanda. Kegagalan pemberontakan PKI yang membawa celaka dan reaksi yang menyusulnya dari banyak kelompok masyarakat Eropa terhadap semua kegiatan politik semakin memperkuat keinginan untuk bersatu dalam kalangan kaum nasionalis. Selama tahun 1927 suratkabar-suratkabar berbahasa Indonesia menarik perhatian terhadap perlunya diatasi saling perbedaan satu sama lain dan perlunya menyelenggarakan suatu Kongres Indonesia untuk semua partai-partai politik.

Soekarno sangat tersentuh oleh suasana ini dan dalam seri artikel-artikelnya pada akhir tahun 1926 tentang "Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme" dengan pandainya ia menegaskan bahwa ketiga aliran politik harus bekerja bersama-sama karena mereka memiliki asal-usul yang sama dalam gerakan nasionalisme. Sementara Hatta sedang tidak dalam keadaan yang memungkinkannya berbuat sesuatu sesuai dengan keyakinan-keyakinannya, maka Soekarnolah yang memiliki kesempatan itu dan dalam tahun 1927 ia berusaha menyatukan partai-partai politik yang telah mapan dengan PNI yang baru terbentuk. Dalam bulan Juni 1927, sewaktu diadakan persiapan terakhir untuk pembentuikan PNI maka ia memperluas artikel-artikel yang ia tulis sebelumnya, dan mendesak pembentukan suatu federasi partai-partai politik Indonesia. Federasi semacam itu harus mencerminkan situasi

sosial dan politik di Indonesia, di mana terdapat bermacam-macam aliran organisasi. Oleh karena itu, Soekarno berpendapat, federasi tersebut harus memiliki struktur yang longgar namun sekaligus merupakan suatu "front sawo matang" yang ketat melawan Belanda.

Inisiatif Soekarno ini belum tentu berhasil tanpa kerjasama Sukiman yang penuh semangat dari PSI, partai Islam yang paling besar. Tanpa dukungan PSI, federasi tersebut barangkali tidak akan pernah lahir, atau, paling tidak, tidak akan lebih dari PNI dengan nama lain. Usaha Sukiman untuk meyakinkan PSI agar bekerjasama dengan organisasi-organisasi yang lain sama sekali tidak memperoleh dukungan penuh dalam partai. Lawannya yang paling kuat ialah Salim yang pada awal tahun 1927 telah menjawab kritik pribadi yang tajam dari Kelompok Studi Indonesia dengan mengumumkan tulisan panjang menentang "kaum intelektual" dan gerakan kaum intelktual muda. Dikemukakannya bahwa gerakan ini dilahirkan di luar Indonesia. Ia menuduh bahwa kaum intelektual muda didikan Belanda semacam mereka itu hanya mempunyai sikap-sikap negatif – menekankan perasaan anti Belanda dan bukannya cinta dan pengorbanan diri untuk rakyatnya menekankan non-kooperasi bukannya *swadeshi*. Lebih jauh, ia menekankan terasingnya mereka itu dari rakyatnya sendiri dan mengeritik sikap mereka yang suka mengajukan dirinya sendiri sebagai pemimpin-pemimpin nasionalisme Indonesia.

Kritik Salim terhadap kelompok intelektual tersebut membuat semakin terbuka masalah kesenjangan yang semakin melebar antara pemuda-pemuda Indonesia yang terdidik secara Barat dan pimpinan PSI yang lebih tradisional. Baik kaum reformis Islam maupun kaum konservatif untuk beberapa lamanya sama-sama merasa gelisah terhadap meluasnya westernisasi dan terutama terhadap meningkatnya jumlah anak-anak muda Indonesia yang tamat dan sekolah-sekolah sekuler Barat. Serangan Salim tersebut merupakan sebagian dari keprihatinannya yang lebih dalam terhadap proses sekulerisasi ini, yang telah coba dibendungnya dengan membentuk Jong Islamitten Bond pada akhir tahun 1925 sebagai sebuah organisasi kaum muda Islam untuk mendidik mereka agar mereka dapat bersaing dengan lulusan sekolah-sekolah Barat.

Pada suatu tingkat politik tertentu, kaum nasionalis muda didikan Belanda tersebut sangat bersemangat dan lantang dalam menyebarkan ideologi nasionalis sekuler yang baru. Maka bukannya tidak masuk akal bahwa dalam pandangan mereka yang hanya tinggal di dalam negeri dan mendasarkan kedudukannya kepada kekuatan legitimasi tradisional, pemuda-pemuda nasionalis itu tampak sebagai saingan yang mengancam eksistensi politis mereka. Jurang antara generasi muda didikan Barat pendukung ideologi nasionalis sekuler dan pemimpin-pemimpin lama dari ideologi nasionalis keagamaan PSI terus melebar sampai keduanya tak bisa disatukan lagi pada tahun 1930. Meskipun ada kritik-kritik dari Salim, namun pada saat itu pandangan Sukiman terhadap perlunya kerjasama PSI dengan kaum nasionalis sekuler tetap tidak berubah.

Soekarno dan Sukiman telah mempersiapkan dasar bagi suatu federasi partai-partai politik sejak April, dan dalam bulan September pada Kongres PSI di Pekalongan mereka mengambil suatu langkah penting lebih lanjut untuk merealisir rencana-rencana mereka. Keikut-sertaan PNI dalam federasi sudah terjamin, oleh karena itu usaha-usaha Sukiman dan Soekarno ditujukan untuk memperoleh kerjasama dari PSI. Soekarno, sebagai seorang wakil PNI, diundang untuk mengikuti pertemuan kongres pada tanggal 30 September yang seluruh agendanya dipusatkan pada diskusi tentang persatuan dan kerjasama antara organisasi-organisasi nasionalis. Soekarno dan Sukiman mempersiapkan dan membagi-bagi kepada peserta kongres rencana anggaran dasar dari organisasi nasional yang diusulkan dengan nama Sarekat Partij-Partij Politiek Indonesia, sebagai bahan diskusi. Pasal-pasal pokok dari AD itu ialah bahwa organisasi tersebut merupakan suatu badan federasi, yang tidak membawahi partai-partai politik yang ada, yang akan terus bergerak secara bebas, dan bahwa badan federal tersebut hanya akan melakukan kegiatan-kegiatan dalam bidang-bidang yang disetujui bersama dan bahwa semua keputusan akan diambil secara aklamasi.

Sidang kongres pada tanggal 1 Oktober menyetujui PSI untuk masuk sebagai anggota federasi yang direncanakan, sehingga dengan demikian memberikan kepada Sukiman dan Soekarno dukungan yang mereka perlukan untuk mengatur pembentukannya secara resmi. Untuk tujuan tersebut diadakanlah sebuah rapat pada tanggal 17 – 18 Desember di Sekolah Taman Siswa di Bandung. Hadir dalam pertemuan tersebut wakil-wakil dari PSI, PNI, Budi Utomo, Pasundan, Sumateranenbond, Kaum Betawi dan Kelompok Studi Indonesia. Pertemuan tersebut menerima AD yang dipersiapkan oleh Soekarno dan Sukiman untuk pembentukan suatu federasi yang dikenal dengan nama Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) dan memilih sebuah panitia yang terdiri dari Sabiran sebagai ketua, Sunarjo sebagai Sekretaris dan Dr Samsi sebagai anggota ketiga untuk menyelenggarakan suatu konperensi dalam bulan Juli 1928. Sebuah dewan penasehat dibentuk untuk mengurus masalah-masalah yang dihadapi oleh badan federasi sampai terbentuknya pengurus tetap pada konperensi yang akan datang. Iskaq Tojokroadisuryo menjadi ketua, Dr Samsi menjadi sekretaris merangkap bendahara, dan Sukiman berserta Soekarno menjadi anggota dewan penasehat tersebut. Terakhir sekali, rapat tersebut memutuskan agar dibentuk sebuah suratkabar nasional dan menunjuk Sartono dan Parada Harahap untuk menjajagi dan melaporkan rencana tersebut.

Kaum nasionalis dari segala aliran politik dengan cepat menyambut pembentukan PPPKI, sebagai suatu kemajuan penting dalam perjuangannya melawan Belanda. Ada kecenderungan untuk melihat pembentukan PPPKI itu sendiri sebagai pergeseran penting dalam perimbangan kekuatan dalam wilayah jajahan, walaupun peringatan-peringatan terhadap sikap puas itu dikeluarkan oleh organ PNI dan oleh suratkabarnya Singgih *Timboel.* Problem utama ialah bahwa satu-satunya ikatan bersama yang kuat antara organisasi-organisasi nasionalis tersebut adalah suatu ikatan negatif, yaitu bahwa mereka

semua menentang musuh yang sama, yaitu Belanda. Dalam bentuknya yang positif, semua partai-partai anggota menyatakan dengan lantang dan berulang-ulang keinginan mereka untuk bersatu agar dapat menghidupkan kembali masyarakatnya dan memaksa Belanda menarik diri, tetapi masih terdapat hal-hal yang belum disetujui bersama yang menarik masing-masing partai ke arah yang berbeda-beda. Dua issu terpenting ialah prinsip koperasi dan non-kooperasi dan masalah peranan Islam dalam gerakan kebangsaan dan, akhirnya, peranan Islam dalam negara Indonesia yang direncanakan. Dalam merumuskan AD federasi Sukiman dan Soekarno berkeyakinan bahwa masalah-masalah ini telah dapat diselesaikan dengan menghindari pembahasan tentangnya dan menegaskan bahwa badan fedewrasi hanya menariuh perhatian kepada hal-hal yang disepakati semua anggota. Dengan berbuat begitu, mereka memberi kemungkinan bagi badan tersebut untuk mempersoalkan hal-hal sampingan saja – hal yang paling sedikit sangkut-pautnya dengan tujuan-tujuan dasar dari partai-partai anggota – sementara bidang-bidang yang paling utama dalam kegiatan politik diserahkan kepada masing-masing partai.

Numun demikian, pembentukan federasi tersebut merupakan sukses besar bagi Soekarno dan Sukiman. Pada saat isyu kooperasi/non-kooperasi menimbulkan emosi yang hebat dan di saat PSI merasa bahwa nasionalisme Islam terancam oleh ideologi sekuler PNI, maka terbentuknya suatu badan federasi merupakan suatu kemenangan bagi jerih payah dan keunggulan diplomatis dari kedua orang tersebut. Usaha keduanya bersifat saling mengisi dan tanpa salah satu dari keduanya maka PPPKI tak akan dapat terbentuk. Soekarno memberikan dorongan kepada persatuan dan menunjukkan komitmen pribadi yang mampu menyingkirkan semua rintangan dan yang menggairahkan sejumlah besar partai dan pemimpin-pemimpin dari berbagai keyakinan untuk percaya bahwa suatu badan persatuan dapat terbentuk, dan adalah kemenangan pribadi bagi pembela yang paling gigih dari prinsip non-kooperasi itu bahwa ia dapat melakukan tawar-menawar secara damai dengan penganut paham kooperasi. Tetapi untuk dapat berhasil, ia memerlukan kerjasama dari partai Islam yang paling benar.

Sumbangan Sukiman yang utama, selain kerjasama dengan Soekarno dalam merumuskan AD federasi, ialah keberhasilannya meyakinkan PSI untuk bekerjasama dengan PNI dan, kendati ada pertentangan-pertentangan sebelumnya, dengan Kelompok Studi Indonesia (John Inglesion, 1983 50 – 57).

Namun demikian, sebagaimana yang dikatakan Van der Plas yang mengamati jalannya kongres PPPKI Agustus-September 1928 di Surabaya bahwa kongres yang maunya menunjukkan kesatuan itu membuat dia terkesan betapa tidak bersatunya mereka. Persatuan Minahasa bahkan tidak berkenan bergabung dengan PPPKI, sebagian karena kecewa dengan apa yang dilihat sebagai sikap yang sok mewakili kepentingan lokal sekepulauan; Sarekat Ambon juga menolak bergabung dengan PPPKI karena PPPKI tidak bersedia bersikap

netral mengenai agama dan tidak memperbolehkan organisasi berbasis agama seperti Partai Sarekat Islam (PSI), kelak berubah menjadi PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia). Haji Agus Salim dari PSI curiga terhadap organisasi-organisasi lain yang bergabung dalam PPPKI, menganggap kesatuan PPPKI bohong belaka, dan berupa menjamin PSI terus melakukan kegiatan dakwahnya. PSI juga bereaksi keras terhadap kenyataan bahwa aliran nasionalis-sekuler telah menjadi ujung tombak politik bumiputra pada akhir tahun 1920-an, dan berusaha, dengan memperbaiki dan memperjelas visi, merebut kembali posisi yang lepas itu. (RE Elson, 2008 : 112)

Mengorganisasi Buruh

Kelompok Studi Indonesia di Surabaya adalah organisasi kaum nasionalis yang paling berhasil dalam mengorganisasikan para pekerja di sektor swasta. Pada paruh terakhir 1929, Soetomo merumuskan pemikirannya mengenai sarekat buruh pada pidato-pidato utama di sejumlah pertemuan-pertemuan umum. Sebagai contoh, pada suatu pertemuan umum Oktober 1929, diselenggarakan oleh OJS Bond Indonesia, pemimpin yang secara dekat berhubungan dengan cabang Surabaya dari PNI, Soetomo mensurvei perkembangan Sarekat perburuhan di Belanda. Tigapuluh tahun yang lalu tidak ada Sarekat perburuhan dan merupakan kondisi terjelek untuk buruh.semua ini kemudian diubah oleh *Nederlandsch Vakverbond* yang mendidik buruh untuk sadar kondisi mereka dan menuntut untuk gaji yang lebih memadai dan kondisi yang baik dari majikan. Perbaikan-perbaikan yang terjadi dalam upah dan kondisi perburuhan terhadap Belanda telah mengalir melalui buruh-buruh di Indonesia.

Jika pada 1925 buruh lebih banyak memperlihatkan semangat bersama yang tidak beraturan dan tidak adanya kekurangan pada pemimpinnya karena Pemerintah melindungi aturan-aturan yang dibuat oleh majikan, maka pembicara memberi semangat kepada buruh untuk dapat mendirikan/menyatakan bahwa pemutusan sebuah sidang/perkara sangat tergantung pada hasutan terus-menerus, juga tergantung pada rasa solidaritas satu sama lain, disiplin partai dan dukungan tanpa syarat dari semua organisasi yang ditentukan juga dari segi-segi pribadi/orang-orang dan kepentingan yang berkaitan.

Adalah pandangan Soetomo bahwa sarekat buruh harus bekerja dari dua arah. *Pertama,* untuk menuntut Pemerintah undang-undang sosial dan regulasi yang mendukung pekerja dalam menghadapi majikannya. *Kedua,* untuk berjuang demi kondisi kerja yang lebih baik. Semua sarekat harus memiliki program kerja. Soetomo sangat menentang usaha mencampur agama dengan politik dan ini dasar dari perseteruan pahit yang berkelanjutan dengan pemimpin dari Sarekat Islam dan kemudian Partai Sarekat Islam. Ia juga secara

tegas anti-Komunis, terutama sekali atas rasa kecurigaan seorang karena perjuangan kelas telah melukai pemikiran atas keinginan agar perubahan masyarakat dapat berlaku teratur. Tidak mengherankan, kemudian, ia memperingatkan untuk melawan usaha mencapur agama dan politik dalam sarekat buruh, mengakibatkan persatuan buruh akan tercerai-berai jika perbedaan dalam kepercayaan atas agama atau ideologi tertentu diizinkan masuk. Jatuhnya SKBI untuknya adalah satu contoh teladan dari apa yang harus dihindari. Soetomo berrsekutu sendiri dengan kuat dengan mereka yang percaya bahwa seharusnya tidak hubungan langsung antara organisasi politik nasionalis dengan sarekat buruh.

Pada pertemuan yang lain, ia menunjukkan isu mengenai pemberontakan. Sikapnya, ambivalen. Pada satu sisi, dia tidak mengesampingkan mereka. Ia banyak membaca sejarah Eropa untuk belajar bahwa pemogokan merupakan suatu alat penting usaha kaum buruh Eropa menuntut peningkatan upah dan kondisi kerja dan ia menyadari bahwa buruh tidak memiliki hak mogok. Dengan menakut-nakuti majikan mengenai hak mereka dari waktu ke waktu, mereka sesungguhnya hanya memiliki pengaruh yang kecil terhadap majikan mereka.

Dia berbagai dengan kalangan nasionalis Indonesia yang gigih lainnya dalam melawan kekuatan represif di koloni untuk menekan pemogokan. Pada sisi lain, ia menyatakan bahwa pemogokan harusnya tidak dianggap kecuali suatu sarekat buruh kuat, dengan kepemimpinan yang bagus, anggota yang teguh dan disiplin serta dana pemogokan yang memadai. Pemogokan di Eropa yang sukses, menurutnya, tidak hanya karena kerangka hukum dimana buruh dioperasikan secara kurang (lebih) manusiawi ketimbang di Indonesia, tetapi juga karena sarekat buruh di Eropa telah mempunyai dana pemogokan yang besar untuk dapat mendukung buruh yang mogok maupun keluarga mereka. Jika suatu sarekat dari orang Indonesia ingin mengorganisasikan suatu pemogokan, ia percaya bahwa pertanyaan pertama yang seharusnya ditanyakan adalah ya atau tidaknya ia memiliki kesempatan dapat berhasil.

Memasuki pemogokan yang hanya mengarah pada kegagalan dari permulaannya hanya akan melemahkan posisi buruh kolonial. Dalam pandangannya, ada banyak pelajaran berharga yang dapat dipelajari atas gagalnya pemogokan utama yang terjadi di koloni. Yang terpenting adalah mengenai besarnya dana pemogokan. Tanpa dana pemogokan yang besar, sebuah sarekat buruh tidak akan memiliki kekuatan. Semakin kuat dana itu, maka perhatian majikan terhadap buruh akan semakin tampak. Jadi, dia berpendapat bahwa pemogokan terbesar masih belum tampak di koloni di Indonesia. Pemogokan buruh kereta api tahun 1923 tidak pernah memperoleh kesempatan berhasil karena kurangnya dana pemogokan dari VSTP.

Sementara Soetomo seringkali berbicara mengenai hak buruh untuk mogok dan

kebutuhan pentingnya dana kuat pemogokan buruh, adalah jelas bahwa ia percaya kondisi utama pemogokan yang berhasil jarang terjadi di Indonesia di masa kolonial. Kapanpun pemogokan tertentu terjadi, atau direncanakan, Soetomo jelas-jelas menunjukkan ketidaksetujuannya. Misalnya, ia mengecam perawat di rumah sakit Pemerintah Surabaya untuk berunjuk rasa pada 1924 dan menyarankan untuk mempertimbangkan juga untuk tiga unjuk rasa terbesar lainnya di koloni, termasuk dari buruh atau pekerja kereta api, rumah gadai dan pabrik gula, adalah kurang direncanakan, kurang matang, dan malapetaka. Dalam pandangannya, tujuan jangka pendek dana pemogokan yang kuat adalah bukan untuk menyatakan suatu pemogokan, tetapi untuk menggunakannya sebagai senjata taktis.

Soetomo adalah satu dari pembicatra utama di dalam pertemuan umum yang diorganisasi selama berlangsungnya kongres kedua Federasi politik PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) bulan Desember 1929, hanya beberapa minggu sebelum Pemerintahan Hindia menumpas PNI. Soetomo membandingkan kebanyakan buruh Indonesia terhadap pekerja di negara Barat 40 atau 50-tahun sebelumnya. Mereka tidak memiliki dasar hukum, pekerjaan yang terjaga dan regulasi dari jam kerja dan buruh anak, serta menderita atas upah rendah dan lainnya Kalangan kapitalis dapat memperoleh keuntungan luarbiasa karena buruh Indonesia tidak berpendidikan dan tidak terorganisasi. Baik kalangan kapitalis maupun Pemerintah Kolonial, keduanya tidak akan meningkatkan nasib pekerja karena rasa keadilan, namun mereka melakukannya hanya karena ketakutan akan adanya pemogokan. Hanya dengan membentuk organisasi yang kuat, penduduk Indonesia bisa memperoleh keadilan. Ia diputuskan bersalah atas usahanya membentuk sarekat petani untuk bekerja bersama-sama dengan sarekat buruh perkotaan.

Soetomo meneruskan usaha mengkaji sejarah sarekat buruh di Indonesia secara umum dan terutama sekali pemogokan tahun 1925 di pabrik logam di Surabaya. Itu adalah cerita kegagalan dalam bagian terbesarnya kurangnya kepemimpinan intelektual. Terhadap pendengarnya yang termasuk aktivis politik berpendidikan Barat, ia menerangkan dalam pandangannya peran dari kalangan intelektual atau terdidik di koloni. “Kewajibannya kaum intelektual kita yaitu menjaga supaya rakyat menaruh kepercayaan pada kita, sehingga dengan kepercayaan ini mereka lalu berdiri dibelakang kita.”

Pada suatu pertemuan selanjutnya pada bulan Desember di Surabaya Soetomo berbicara mengenai gerakan buruh secara umum. Lagi-lagi ia menggunakan sejarah gerakan buruh di Eropa sebagai contoh untuk diikuti orang Indonesia. Gerakan buruh di Eropa telah mencapai kesuksesan melalui buruh yang tidak kenal dan organisasi perburuhan yang kuat. Ia mengharapkan pekerja Indonesia mengorganisasi diri mereka, dengan mengatakan “Orang-orang menganggap bahwa yang utama dari sebuah biro untuk suatu gerakan buruh. Orang selalu mempunyai suatu pendirian perkumpulan untuk memperoleh advis dan dukungan.”

Pada sebuah pertemuan khusus anggota sarekat yang berhubungan dengan Kelompok Studi Indonesia, sebagaimana anggota PNI Surabaya dan anggota OJSBI, Soetomo menyeruhkan pembentukan badan terpusat untuk sarekat buruh secepat mungkin dan untuk segera bekerja dengan organisasi sarekat buruh di luar negeri agar aksi internasional dapat diperkuat. Soetomo adalah anggota Majelis Pertimbangan PPPKI, bersama-sama dengan Anwari. Pada April 1930 ia dan Anwari bertemu dengan Soetomo, pemimpin dari PVPN, untuk mendiskusikan usaha-usaha PPPKI mendirikan federasi sarekat buruh yang selama ini tidak kunjung membuahkan hasil. Soetomo dan Anwari memutuskan menulis kepada Otto Subroto dan Thamrin, masing-masing ketua dan sekretaris komisi PPPKI untuk mendirikan suatu federasi sarekat buruh, menyeruhkan kepada mereka untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk membentuk suatu vakcentrale. Mereka juga memutuskan untuk menyeruhkan kepada komisi mendirikan asosiasi petani dan Soetomo percaya sebagai bagian yang sungguh penting dari gerakan nasionalis (John Ingleson, 2013 : 331 – 336) .

Menjelang 1930, organisasi ini mendirikan sarekat yang mengurusi masalah kerja untuk para sopir taksi dan para pekerja percetakan serta sebuah sarekat umum untuk seluruh pekerja di Surabaya. Pada bulan Mei di tahun tersebut, organisasi ini mendirikan Federasi Sarekat Buruh, PSSI (Persatuan Sarekat Sekerja Indonesia), untuk delapan sarekat buruh yang bertempat di Surabaya yang para ketuanya berhubungan erat dengan organisasi ini dan yang merekut para pekerja di sektor swasta di Surabaya dan daerah-daerah sekitar di Jawa Timur. Sarekat buruh tersebut menarik para pekerja dan menawarkan keuntungan kesejahteraan sosial bagi para anggota dan keluarganya, mulai dari dana bantuan kematian dan kerlompok simpanan untuk kooperasi konsumsi dan kooperasi produksi untuk sarekat penjahit. Sarekat yang dimiliki PSSI relatif berhasil, tetapi para ketua organisasi ini mengeluh bahwa terlalu banyak orang yang bergabung hanya mengharapkan bantuan dan tidak memiliki keinginan untuk bekerja keras atau berkorban apa-apa bagi tujuan mereka yang lebih luas lagi. Harapan pekerja dari sarekat mereka adalah seperti bahwa "…Dari itu mana-mana anggota yang tidak dapat pertolongan atau tidak dapat ditolong, kebanyakan mengabarkan ke sana sini perkumpulannya tidak baik, itulah yang menjadi lawan kita ."

Sarekat sopir taksi yang berada di Surabaya adalah contoh yang baik dari sebuah sarekat yang mengandalkan penyediaan kesejahteraan sosial dan keuntungan kooperasi untuk menarik anggota. Sarekat ini memiliki pengelolaan dengan Kelompok Studi Indonesia Surabaya yang dimiliki Bank Nasional Indonesia bagi para anggota untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah yang digunakan untuk membeli mesin-mesin sehingga mereka dapat menjadi sopir untuk diri sendiri. Sarekat ini juga menawarkan nasihat resmi gratis dan pinjaman kecil bagi para anggota untuk menutupi kebutuhan yang mendadak. Pada 1930, cabang koperasi yang dimiliki oleh sarekat ini menyediakan pinjaman sebesar 268 Gulden, sebagian besar untuk menutupi denda yang dikenakan pada sopir taksi oleh

pengadilan negeri. Ketetapan layannan keuangan melihat sarekat ini tumbuh pesat sampai memiliki 250 sopir taksi di Surabaya, dengan ratusan lebih yang mendaftar di cabang-cabang di daerah-daerah di Jawa Timur. Namun, di saat pinjaman yang lebih besar tersimpan dengan aman oleh sarana-sarana yang ada, pinjaman yang lebih kecil yang dibentuk untuk menutupi denda dan kebutuhan-kebutuhan mendadak lainnya menjadi jauh lebih sulit untuk diperoleh. Sepertinya karena mereka yang dipaksa untuk meminjam dalam jumlah kecil adalah para sopir taksi yang paling miskin, bukan para sopir taksi yang bekerja untuk diri sendiri dan meminjam karena terdorong rasa putus asa. Dalam beberapa kasus, Kelompok Studi Indonesia terpaksa mengambil jalur hukum untuk menentukan pembayaran kembali, tetapi di dalam kasus-kasus lainnya kelompok ini terpaksa menghapuskan pinjaman. (John Ingleson, 2013 : 285 – 286) .

Dampak Depresi pada sarekat buruh Surabaya yang berhubungan dengan Kelompok Studi Indonesia sebesar seperti pada sarekat buruh lain. Keanggotaan merosot, keterlibatan menurun dan sarekat buruh dipaksa mengurangi jumlah pengurus yang digaji Mereka tetap sebagai bagian penting kehidupan buruh Surabaya hingga 1930-an, menyokong mereka dalam mencapai keadilan bagi keluhan-keluhan perorangan dan menyediakan suatu variasi luas atas keuntungan sosial dan ekonomi. Model ciptaan Soetomo dan Kelompok Studi Indonesia – sarekat buruh yang berpusat pada isu ekonomi dan sosial serta isu industrial, agak terpisah dari partai politik dan isu politis – menjadi norma tahun 1930-an. Pemimpin sarekat buruh menyempitkan ruang bagi gerakan. Di dalam tempat yang terbatas mereka meneruskan usaha pencarian upaya pengorganisasian pekerja atau buruh perkotaan dan meningkatkan upah mereka serta kondisi kerja dan kehidupan mereka. (John Ingleson, 2013 : 337 – 338).

Perbedaan hubungan antara sarekat buruh dan partai politik telah memecah belah kaum elit Indonesia. Ada orang-orang merasa bahwa sarekat buruh harusnya ikut dilibatkan dalam politik nasional. Lebih baik lagi jika mereka memiliki hubungan langsung dengan partai politik yang ada. Kelompok inilah yang mengeritik cara pandang Soetomo. Mereka berpendapat bahwa pemisahan tersebut telah menyebabkan perjuangan nasional semakin lemah. Jika saja mereka dapat melihat surat yang dikirimkan Soetomo kepada Thamrin dimana ia menyarankan untuk menggerakan masa "tidak dalam artian politik", maka orang-orang tersebut akan semakin yakin dengan pendapat mereka. Namun, sangat jelas bahwa Soetomo tidak menganggap remeh aktivitas politik yang ada. Ia justru menegaskan bahwa organisasi buruh perkotaan itu sendiri memang memiliki arti yang sangat penting dan bisa menjadi jauh lebih efektif jika terlepas dari ideologi pecah belah yang dianut partai-partai politik. Ia percaya bahwa sebuah pergerakan sarekat buruh yang kukuh, lebih terfokus pada masalah-masalah kerja, pada bagaimana cara meningkatkan kondisi sosio-ekonomi para buruh dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka dimana semuanya itu dapat melengkapi dan memperkuat perjuangan politik demi menuju kebebasan bangsa. Ia juga

yakin bahwa pergerakan sarekat buruh yang kukuh juga sangat penting untuk menciptakan sebuah bangsa pascakolonial yang adil dan sejahtera.

Baik pemimpin PNI maupun Partindo yang terlibat jauh dalam kegiatan sarekat buruh-orang-orang seperti Gatot Mangkupradja, Anwari dan Sartono – memiliki pandangan yang sama. Sebagai contoh, pada Januari 1932, Sartono menyampaikan pada Konfrensi Partindo bahwa walaupun penting bagi kaum nasionalis untuk terlibat dalam aktivitas sarekat buruh, penting juga untuk tidak mencampuradukkan kepentingan sarekat buruh dari partai politik. Ia menjadikan apa yang terjadi dengan PKI dan sarekat buruh yang terkait dengannya sebagai contoh bahwa sangat berbahaya mencampuradukkan antara pergerakan buruh dengan pergerakan politik. Seorang pembicara pada sebuah Kongres federasi guru-guru tahun 1932 berpendapat bahwa meski di negara bebas tidak ada perbedaan antara sarekat buruh dengan partai politik, dimana yang satu mendukung pihak yang lain, hal tersebut tidak sama dengan yang ada dalam masyarakat kolonial seperti Indonesia dimana para buruh takut pada hukuman yang akan mereka terima jika mereka terlibat dalam pergerakan politik. (John Ingleson, 2013 : 360 – 361)

Para anggota Kelompok Studi Indonesia menjadi sangat resah melihat bahwa sarekat buruh yang mereka dirikan semakin lama semakin bersifat politik. Pada Januari 1932, Ruslan Wongsokusumo, salah seorang anggota Kelompok Studi Indonesia yang paling aktif dalam kegiatan sarekat buruh di Surabaya, menyatakan bahwa ia keluar dari Sarekat Sekerja Indonesia disebabkan karena SSI telah memutuskan keluar dari PSSI. Hal itu dilakukan karena penting bagi sarekat itu untuk memisahkan segala kegiatan politik dari sekedar buruh, namun ia tahu perlunya batasan pembeda keduanya. Menurut pandangannya, pemimpin SSI yang baru, dimana seluruhnya juga merupakan anggota PNI Baru, saat itu mencampuradukan kedua hal tersebut yang pada akhirnya akan merugikan sarekat buruh itu sendiri.

Mula awal 1932, PSSI berada di bawah pengaruh PNI Baru dan Partindo. Kedua kelompok tersebut memandang sarekat buruh bagi para pekerja swasta sebagai hal yang penting untuk menggerakan agenda politik yang mereka miliki. Pengaruh mereka dapat terlihat jelas pada Kongres Buruh Indonesia yang diselenggarakan PSSI di Surbaya pada awal Mei 1933. Selama kongres yang berjalan selama empat hari tersebut, banyak kritikan tajam dilontarkan mengenai kolonialisme dan kapitalisme. Banyak pembicara mengaitkan gerakan buruh dengan gerakan politik. Kongres ini diadakan saat Pemerintah telah memberikan teguran keras kepada para permimpin PNI Baru dan Partindo mengenai tindakan politik yang menyimpang dan semakin sering menangkapi para jurnalis yang berani mengeritik hukum tangan besi yang dijalankan Pemerintah dalam bentuk tulisan, Salahsatu pembicara utama di kongres tersebut adalah Soekarno yang menekankan bahwa “bahwa gerakan buruh tidak boleh terlepas dari unsur politik”. Soetomo adalah satu-satunya pembicara yang

menyampaikan pandangan mereka. Ia tetap berpegang pada keyakinannya bahwa geralkan buruh haruslah tetap terpisah dari perjuangan politik.” Dominasi PNIBaru/Partindo dapat terlihat jelas dari keputusan Kongres untuk membentuk sebuah federasi sarekat baru, Central Perhimpunan Buruh Indonesia (CPBI) dan juga melebur PSSI ke dalam federasi baru tersebut. Ketetapan dasar CPBI menyatakan bahwa serikat buruh akan mrelibatkan diri dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik, serta federasi tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah model produksi sosialis.

J.D. Syranamual, editor suratkabar *Soeara Oemoen* milik PBI cukup, menuliskan serangkaian artikel yang diterbitkan pada bulan Mei. Artikel tersebut menceritakan tentang peringatan Soetomo dan Kelompok Studi Indonesia/PBI mengenai bahaya mencampuradukkan aktifitas politik dengan kegiatan serikat buruh. Ia sendiri setuju dengan pandangan Soekarno bahwa kapitalisme harus disingkirkan. Namun, pada saat yang sama ia mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah tanggung jawab gerakan sarekat buruh. Hal itu lebih merupakan bagian dari perjuangan politik. Ia kembali menegaskan pandangan yang menyatakan bahwa jika suatu sarekat buruh terlibat dalam kegiatan politik, dengan banyaknya aliran politik di Indonesia yang saling bertikai di antara mereka sendiri, maka hal tersebut akan melemahkan perjuangan kaum buruh melawan majikan mereka. Soetomo dan pemimpin PBI lainnya secara dratis mengurangi keterlibatan mereka di PSSI sebagai tanggapan atas penggabungan PSSI ke dalam CPBI. (John Ingleson, 2013 : 375 – 377)

Perpecahan dalam PPPKI

Yang jauh lebih penting dari pada kemenonjolan sementara dari sayap kooperator gerakan nasionalis tahun 1930 adalah perpecahan yang terbuka antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis Islam. Perbedaan paham antara kedua kelompok itu melebar secara nyata pada tahun tahun 1928 dan 1929 ketika pemimpin-pemimpin PSI semakin khawatir atas dominasi {PNI dalam gelanggang politik dan atas kemerosotan dirinya yang berjalan terus. Usaha untuk mengorganisasi kembali dan meremajakan PSI tidak mampu mencegah merosotnya partai ini. Desas-desus tentang korupsi dalam partai hanya mempercepat proses kemunduran tersebut.

Sementara kemerosotan terus berlangsung pemimpin-pemimpin PSI melampiaskan rasa frustasinya dengan serangan-serangan yang semakin tajam terhadap kaum nasionalis sekuler pada umumnya dan PNI pada khususnya. PPPKI telah jauh dari berhasil sejak ia didirikan pada bulan Desember 1927 tetapi setidak-tidaknya sejauh ini ia telah berusaha mencegah tumbuhnya hubungan buruk antara partai besar Islam itu dan golongan nasionalis sekuler. Begitu serangan-serangan PSI terhadap golongan nasionalis sekuler semakin

meningkat, maka peranan kontruktifnya dalam PPPKI menurun dan eksistensi PPPKI seterusnya sebagai forum bagi golongan koperator dan non-kooperator ataupun anatara nasionalis Islam dan nasionalis sekuler semakin terancam. Putusnya sama sekali hubungan PSI dengan golongan nasionalis sekuler erat hubungannya dengan perkembangan PPPKI pada tahun 1930.

Tumbuhnya ketidak-senangan PSI terhadap PPPKI muncul secara terbuka pada sebuah rapat tertutup dari kongres yang diadakan pada tanggal 26 Desember ketika Husni Thamrin, wakil kaum Betawi memprotes sikap PSI terhadap federasi pada tahun sebelumnya. Sesudah penangkapan yang terjadi pada bulan Desember Husni Thamrin tampaknya lebih banyak mencurahkan waktunya untuk kehiatan PPPKI dan membentuk dana nasionalnya bersama-sama dengan Soetomo dan pada tahun 1932 menjadi ketuanya. Dalam pertemuan kongres tersebut dia sangat berkeberatan terhadap PSI vabang Batavia yang menolak ikut serta dalam rapat-rapat protes PPPKI terhadap poenale sanctie, yang diorganisir di seluruh Jawa pada bulan September. Mereka bukan saja tidak bagian bagian tetapi juga melancarkan serangan dengan mengadakan rapat umum sendiri pada hari yang sama. Thamrin lalu meminta wakil-wakil PSI untuk menjelaskan masalah ini dan sikap kritis surat kabar partai *Fajar Asia* terhadap federasi.

Pada pertemuan hari berikutnya Sukiman dan Driijoeongsi dengan tugas memutuskan bahwa jalan terbaik untuk mencegah kritik yang tidak dapat diterima ini adalah dengan melancarkan serangan balasan yang lebih keras. Mereka mengulangi kritik PSI terdahulu tentang cara bagaimana Soetomo menggunakan kekuasaan yang digunakan baik oleh ketua maupun oleh sekretaris dewan itu bertentangan dengan anggaran dasar federasi yang menetapkan bahwa kedua dan sekretaris hanya menjadi adiministrator yang bahkan tidak memiliki hak suara dalam rapat-rapat dewan. Sukiman mengingatkan bahwa bila keadaan inmi tidak diperbaiki dan kritik terhadap PSI tidak dihentikan, maka partainya mungkin benar-benar akan menarik diri.

Sukiman dan Drijowongso melaporkan adanya serangan-serangan terhadap PSI ini pada kongres partai di Yogyakarta tanggal 24-27 Januari 1930 sambil mengajukan usul agar partai itu segera menarik diri dari federasi. Sukiman adalah juga salah seorang pendiri PPPKI bersama Soekarno dan penganjur paling gigih untuk masuknya PSI dalam PPPKI. Pada saat itu, dia tidak lagi selalu mendapat dukungan dari Tjokroaminoto. Tetapi sekarang peranan itu menjadi terbalik karena Tjokroaminoto berusaha mempengaruhi partai tentang manfaat PPPKI dalam situasi di mana Sukiman menghendakinya untuk keluar. Tjokroaminoto yang lebih berpengalaman mungkin menyadari apa akibat keluarnya PSI dan masa depan golongan nasionalis sekuler. Dalam keadaan PSI yang sulit seperti sekarang ini, terjepit antara pembaru Muhamdiyah dan Nahdlatul Ulama yang tradisional dan kehilangan momentum dalam hubungan dengan golongan nasionalis sekuler, maka langka PSI semacam itu hanyalah

mempercepat kematian partai. Mungkin juga posisi Tjokroaminoto itu dipengaruhi oleh hubungan pribadinya yang dingin dengan Sukiman yang menjadi pimpinan unsur-unsur pembaharu golongan muda dalam partai serta merupakan saingan dalam kepemimpinan partai. Apapun alasannya Tjokroaminoto menyarankan agar PSI berkompromi dengan pengritik-pengritik golongan nasionalis sekuler karena, dia mengingatkan, PSI memang tidak selalu taat pada tanggungjawabnya sebagai anggota PPPKI dan karenanya tidak terlalu suci dari tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepadanya.

Atas dasar itu, maka segera sesudah kongres, Tjokroaminoto pergi ke Surabaya untuk berunding dengan ketua PPPKI, Soetomo. Tidak banyak petunjuk tentang apa yang terjadi dalam pembicaraan itu, tetapi jelas Tjokroaminoto menyampaikan kepada Soetomo ketidakpuasan PSI terhadap cara kerja PPPKI baru-baru ini. Tampaknya Tjokroaminoto membicarakan masalah sekitar salah satu pasal dalan Anggaran Dasar PPPKI yang mengatakan bahwa federasi itu hanya terbuka untuk partai yang dalam Anggaran dasarnya menerima anggota bangsa Indonesia saja. Pasal ini bertentangan dengan Anggaran Dasar PSI yang memperbolehkan semua orang Islam untuk menjadi anggota. Pertentangan ini merupakan pertentangan lama yang sudah dilupakan buat sementara pada tahun 1927 yaitu dalam diskusi-diskusi menuju pembentukan PPPKI. Dalam hal ini, sebagaiamana juga dalam hal-hal lain, diharapkan agar waktu dan itikad baik akan memberikan pemecahan. Dalam mengungkapkan pertentangan itu sekarang serta ketika menyatakan bahwa PSI sedang mempertimbangkan untuk menarik diri dari PPPKI kalau masalahnya tidak terpecahkan, Tjokroaminoto hanya berpegang pada sebuah isyu resmi untuk membenarkan suatu keputusan yang diambil atas dasar sama sekali lain. Hasilnya adalah janji Soetomo untuk membicarakan masalah itu dengan partai-partai anggota yang lain dalam PPPKI untuk meenjajagi apakah pasal yang menjadi pokok pertentangan itu atas persetujuan bersama dapat diubah. Situasi tetap terus tegang selama beberapa bulan tatkala PSI tidak berlangkah lebih jauh untuk menarik diri sedangkan PPKI masih belum menyetujui perubahan Anggaran Dasarnya.

Salah satu keputusan kongres PSI I yang diadakan pada tahun 1930 setelah mengubah nama partai menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSSI). Di saat partai itu sedang dikecam maka yang barangkali terniat adalah mrenunjukkan bahwa partai itu, seperti juga partai-partai lainnya, sama berbaktinya kepada pembentukan Negeri Kesatuan Indonesia. Akan tetapi rujuk dengan golongan nasionalis sekuler bukannya semakin lebih dekat . Pada bulan Juli dan Agustus hubungan ini malah memburuk akibat serangkaian karangan dalam surat kabar *Soeara Oemoen*, kora baru dari Kelompok Studi Indonesia, yaitu karangan-karangan yang ileh banyak anggota PSII ditafsirkan sebagai penghinaan secara sengaja terhadap keyakinan mereka. Karangan-karangan yang dimuat selama hampir dua bulan mempertanyakan manfaatnya perjalanan naik haji ke Mekah yang dibandingkan dengan pembuangan para pemimpin nasionalis ke Boven Digul. Yang tersebut belakangan ini dianggap sebagai lebih berhak memperoleh penghargaan.

Organisasi-organisasi Islam baik yang politis maupun yang non-politis menjadi gusar dan mulai menyerang bukan saja pengarangnya tetapi juga Soetomo dan Kelompok Studi Indonesia karena menerbitkannya dan karena tajuk rencana yang secara diam-diam menyetujui artikel itu. PSSI cabang Surabaya yang sejak tahun 1926 hampir terus-menerus dalam posisi konfrontasi dengan Kelompok Studi Indonesia gigih bertahan dengan bantuan seluruh partai. Di Yogyakarta, Sukiman ditunjuk menjadi anggota panitia untuk mencari dukungan dari organisasi-organisasi Islam setempat untuk berjuang melawan *Soeara Oemoen* dan golomgan nasionalis yang mendukungnya. Di Surabaya dan Bandung berbagai panitia dibentuk untuk mengarahkan opini orang Islam untuk melawan golongan nasionalis sekuler.

Adalah sulit dipercaya bahwa redaksi *Soeara Oemoen* tidak menyadari kemungkinan reaksi terhadap pemuatan karangan-karangan yang secara menyakitkan membandingkan perjalanan naik haji ke Mekah dengan pembuangan orang-orang nasionalis ke Boven Digul. Karangan-karangan itu merupakan suatu contoh kesemberonoan dan tidak pekanya kebanyakan pemimpin nasionalis sekuler terhadap perasaan keagamaan orang-orang muslim. Nampaknya tak ada keuntungan apa pun yang diperoleh dari tulisan itu, kecuali hanyalah memperkuat semangat-tempur pemimpin PSI dan kemudian meyakinkan mereka akan bahayanya bekerjasama dengan golongan nasionalis yang menyebut dirinya sekuler tetapi pada hakekatnya memperlihatkan diri anti-Islam.

Ketegangan antara golongan nasionalis sekuler dengan PSI mendekati titik perpecahan ketika dalam pengadilan terhadap Soekarno pada bulan Agustus diungkapkan sepucuk surat Tjipto Mangunkusumo kepada Soekarno tertanggal Maret 1928, di mana Tjipto memperingatkan bahaya Pan -Islamisme dan kemungkinan usaha-usaha Tjoktoaminoto dan Salim untuk menguasai PPPKI. Kalau mereka berhasil, menurut Tjipto, akibatnya akan hancurlah gerakan nasionalis. Dia memperingatkan Soekarno terhadap " ulah pengkhianat " yang dilakukan oleh Tjokroaminoto dengan PSII. Surat ini membangkitkan badai protes dari PSII, yang semakin menjadi-jadi karena kegagalan orang-orang nasionalis sekuler untuk menyangkal pandangan-pandangan Tjipto.

Pimpinan PSI tidak menunggu sampai berlangsungnya kongrers. Pada tanggal 28 Desember, yaitu sesudah menerima laporan dari Sukiman dan Sam, mereka mengumumkan keluarnya partai itu dari PPPKI. Alasan yang dikemukakan bahwa pasal 1 dari Anggaran Dasar Federasi itu berlawanan dengan Anggaran Dasar PSII yang memperbolehkan keanggotaan bagi semua orang Islam apa-pun kebangsaaannya. Sudah ada usaha-usaha agar PSII mengurungkan penarikan dirinya, tetapi tanpa hasil. Pada tanggal 5 Januari, Muhammad Jusuf yang mewakili pengurus Pusat PNI dan Singgih, wakil Budi Utomo menjumpai Sukiman di Yogyakarta dalam usaha nya untuk menghimbau agar PSSI mengubah keputusannya. Menurut laporan, mereka berjanji bahwa bila PSI bergabung

kembali maka Budi Utomo dan PNI akan memperjuangkan agar Anggaran Dasar yang menimbulkan pertentangan itu akan diubah. Sukiman pun kemudian menjelaskan bahwa pada hakekatnya itu bukanlah alasan satu-satunya bagi keluarnya PSII, melainkan karena Soetomo sudah terlampau banyak melukai perasaan pimpinan PSII. Di desas-desuskan pula bahwa Muhammad Jusuf – meskipun menurut laporan polisi ditegaskan bahwa ini hanya desas-desus belaka – menjanjikan kepenmimpinan federasi pada PSII, bila PSII mau kembali tetapi bahkan hal itu pun ditolak oleh Sukiman.

Sekali mereka telah mengumumkan keluarnya PSII dari PPPKI maka hanya demi menghindari kehilangan muka, hampir tidak mungkin bagi pemimpin PSII untuk mengubah keputusan tentang keadaan sebenarnya dan hubungan PSSI dengan golongan nasionalis sekuler, yang apa pun maksud dan tujuannya telah terputus sejak 12 bulan sebelumnya. Salah satu akibatnya adalah bahwa organisasi-organisasi Islam lainnya, yang dengan demikian mempertegas pemisahan antara kelompok-kelompok nasionalis, baik yang politis maupun non politis. Menurut garis keagamaan dan garis sekuler. Ini semua tidak disukai oleh kebanyakan kaum nasionalis. Ada perasaan yang tersebar luas baik di kalangan golongan nasionalis sekuler maupun di kalangan PSII bahwa ketegangan antara kedua golongan itu sudah berkembang ke taraf di mana hanya pemisahanlah yang akan mampu menjerrmnihkan suasana. Tetapi keluarnya PSII juga mengakibatkan PNI menjadi satu-satunya partai non-kooperatif dalam PPPKI sehingga dengan demikian memperkuat posisi partai-partai kooperatif dalam PPKI. Hal ini tentu tidak akan menyenangkan PNI dan dapat membantu menjelaskan desas-desus tentang tawaran Muhammad Jusuf kepada Sukiman. Tentu saja hal ini membuat kelanjutan eksistensi federasi itu, setidak-tidaknya dalam bentuknya yang sekarang, menjadi semakin sulit. (John Ingleson, 1983 : 142 – 149)

Reorganisasi PPPKI

Pada awal Januari 1930 PPKI mempertimbangkan usul untuk mengadakan kongres bagi semua oprganisasi politik dan non-politik Indonesia. Kongres ini akan merupakan lambang kekuatan dan kesatuan nasionalis dalam menghadapi campur tangan pemerintah terhadap PNI. Mulanya direncanakan untuk mengadakan kongres tersebut pada bulan Desember 1930, tetapi karena kesulitan keuangan diundurkan sampai suatu waktu di tahun 1931 di Solo akhirnya menetapkan bahwa sebuah Kongres Indonesia Raya akan diadakan di Surabaya pada 25-27 Desember. Pengumuman Gubernur Jenderal De Graeff bahwa Soekarno akan dibebaskan pada tanggal 31 Desmber mendorong Dewan Penasehat PPPKI menguindurkan kongres tersebut sampai tanggal 1 Januari 1932. Kongres itu kini berubah menjadi suatu pertunjukan besar-besaran tentang kesatuan Indonesia dan perayaan kembalinya Soekarno ke dalam perjuangan politik.

Dalam pidato penyambutannya, Soetomo, ketua PPPKI dan ketua Kongres Indonesia Raya, menggemakan kembali perasaan beribu-ribu orang Indonesia yang kesadaran politiknya telah ditumbuhkan oleh pidato-pidato Soekarno. Bahkan mereka yang tidak sependapat dengannya dalam masalah –masalah ideologi dan taktik, terpesona oleh kepribadiannya dan sangat mengagumi penampilannya di depan politik. Saat ini semua perdebatan pribadi dan politik dikesampungkan ketika Soetomo menyalami Soekarno sebagai seorang martir nasional. Dalam jawaban yang singkat, Soekarno mengatakan kepada pendengarnya bahwa ia akan menyampaikan sebuah pidato penting mengenai gerakan kebangsaan pada malam berikutnya bila mereka ingin mendengarkan amanat yang telah dibawanya bagi mereka dari Sukamiskin.

Pada malam berikutnya Soekarno berpidato dengan dihadiri masa yang meluap. Tema yang dikemukakannya, sebagaimana yang telah seringkali dikemukakan sebelumnya adalah perlunya persatuan dalam gerakan nasionalis untuk dapat melawan Belanda. Ia menekankan bahwa, ia, Gatot, Maskun, dan Supriadinata telah menderita bukan sebagai orang-orang pribadi, tetapi sebagai bagian dari rakyat dan ia mengulangi tekadnya untuk terus memperjuangkan kemerdekaan bagi kepentingan bangsanya selama hayat masih dikandung badan. Kepada pendengarnya dinyatakannya bahwa ia merasa sedih karena rakyat yang dalam tahun 1928 bersatu dalam pikiran dan prinsip kini terpecah dalam gua golongan. Ia berjanji bahwa ia tidak akan masuk baik kedalam Partindo maupun PNI Baru, tetapi akan berusaha menyatukan kedua-duanya kembali ke dalam satu partai yang bersatu.

Ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat antara Partindo dan PNI Baru, hanyalah karena “salah paham”. Ia yakin bahwa ia mampu membuat kedua pihak melihat salah paham tersebut dan menyatukan lagi keduanya ke dalam satu partai. Untuk itu ia meminta para pemuda Indonesia untuk membantunya. Seperti kebanyakan kaum nasiolais ia menyadari kekuatan laten dari para pemuda idealis yang tidak terikat oleh pikiran-pikiran. tradisional “ Berianlah saya seribu orang tua, saya bersama mereka kiranya dapat memindahkan gunung semeru. Tetapi apabila saya diberi sepuluh pemuda yang bersemangat dan berapi-api kecintaannya terhadap bangsa dan tanah air tanah tumpah darahnya, saya akan dapat menggemparkan dunia. “ Penampilan Soekarno merupakan acara yang paling mengesankan dari sebuah kongres yang gagal mengimbangi harapan-harapan dari kebanyakan kaum nasionalis.

Suatu penampilan kesatuan nasional dan *good will* bersama tetap dijaga, tetapi suasana dalam pertemuan-pertemuan tertutup selalu diliputi kesulitan dan kadang-kadang disertai kekerasaan. Ada dua gelombang pertemuan-pertemuan tertutup yang terpisah, yang satu mengundang semua organisasi peserta kongres dan yang lain hanya teruntuk anggota PPPKI. Hal ini membenarkan kembali tuduhan Sukiman dari PSII dan tuduhan Golongan Merdeka (kedua-duanya sama sekali tidak tidak turut serta dalam kongres), bahwa apa

yang disebut dengan nama besar sebagai Kongres Indonesia Raya itu sebenarnya hanyalah suatu Kongres PPPKI yang lain. Kongres tersebut jelas dikuasai sepenuhnya oleh Dewan Penasehat PPPKI, yang dalam kenyataannya persis seperti yang dikehendaki oleh Soetomo. Baik Partindo maupun PNI Baru tidak masuk ke dalam federasi itu, dan dengan penarikan PSII, maka hanya partai-partai kooperasi saja yang menjadi anggota. Tetapi sementara PSII dan PNI Baru mengabaikan Kongres Indonesia Raya tersebut, Partindo mengirimkan utusannya ke Surabaya. Kenyataan bahwa kongres ini diselenggarakan sebagaiannya sebagai acara untuk menyambut Soekarno jelas mempengaruhi keputusan tersebut.

Namun demikian, Sartono, yang memimpin utusan Partindo, tidak berusaha menutupi permusuhannya terhadap kepemimpinan Soetomo dalanm federasi dan kongres. Perasaan permusuhan antara kedua orang itu menjadi nampak dalam rapat terakhir tanggal 2 Januari setelah Soetomo melaporkan keputusan-keputusan yang dibuat dalam rapat tertutup dari PPPKI pada malam sebelumnya. Sartono kemudian melancarkan serangan atas kepemimpinan PPPKI pada umumnya, terutama mengenai perubahan agenda kongres yang diadakan oleh Soetomo secara sepihak untuk membatalkan pembahasan mengenai makalah Thamrin yang akan menguraikan struktur dan peraturan-peraturan kongres, sebagaimana yang telah diumumkan sebelumnya. Makalah Thamrin tersebut telah disiarkan oleh pers dan membangkitkan minat yang cukup luas. Soetomo membela diri dengan alasan bahwa adalah sempit waktu yang tekah memaksa dirinya untuk mencoret sejumlah acara dalam agenda. Tetapi hal ini tidak memuaskan Sartono. Memang benar bahwa ada terlalu banyak acara dalam agenda, namun Soetomo barangkali merasa sangat puas karena dapat mrmbatalkan pembahasan makalah Thamrin. Usulan Thamrin agar Kongres Indonesia Raya menjadi sebuah badan independen yang mewakili kelompok-kelompok organisasi politik Indonesia yang lebih luas daripada PPPKI, hampir tidak mungkin sesuai denga selera Soetomo. Sebuah badan terpisah yang memiliki badan pengurus tersendri, akan mengancam PPPKI yang sedang merana. Soetomo melihat Kongres Indonesia Raya sebagai suatu badan pembantu untuk PPPKI, yang akan mengawasinya secara ketat. Mungkin benar dugaannya bahwa usul-usul Thamrin bertujuan melemahkan kedudukannya dalam federasi sebagai tindak-lanjut dari kritiknya terhadap Soetomo. Sartono kemudian membina kerjasama yang erat Thamrin dalam 12 bulan berikutnya dalam usaha mereka untuk mengadakan restukturisasi {PPPKI.

Dalam rapat tertutup dari PPPKI yang diikuti oleh wakil-wakil Budi Utomo, Kaum Betawi, Pasundan, Sarekat Sumatera dan PBI maka masalah terpenting yang dibahas ialah sebuah laporan bersama oleh Pasundan dan Buri Utomo tentang hak pemungutan suara dalam federasi.

Laporan tersebut ditulis atas perintah Kongres PPPKI sebelumnya di Solo yang sertuju untuk memperkenalkan sistem mayoritas dalam federasi sebagai ganti sistem aklamasi yang sedang berlaku. Laporan tersebut mengusulkan agar setiap partai anggota mmiliki hak pilih

yang sebanding dengan jumlah total anggotanya, dengan batasan sebanyak-banyaknya 5 suara. Namun demikian, untuk sejumlah masalah-masalah yang fundamental, antara lain yang menyangkut perubahan AD, peraturan-preraturan dan program-program federasi yang bersifat intern, serta penerimaaan anggota-anggota baru dan urusan-urusan keuangan diusulkan adanya jaminan bahwa setiap partai anggota lainnya hanya akan memiliki suatu suara. Akhirnya, laporan tersebut menyarankan agar ijin untuk menjadi anggota hanya diberikan kepada organisasi-organisasi yang mempunyai anggota lebih dari 100 orang. Usul-usul tersebut diterima sepenuhnya oleh rapat yang pasti percaya bahwa laporan tersebut akan membawa angin baru ke dalam PPPKI. Tetapi perubahan-perubahan di atas kertas tidak akan dengan sendirinya memecahkan persoalan-persoalan federasi; dari antaranya masalah yang terpenting ialah bahwa tak satupun dari 3 buah partai non-kooperasi menjadi anggota dan lebih celaka lagi, ketiganya semakin memusuhi PPPKI.

Soekarno secara terbuka telah melibatkan dirinya dengan Kongres Indonesia Raya sebagai usaha untuk menghidupkan kembali PPPKI. Ia menggunakan sebagian besar waktunya pada permulaan 1932 untuk berbicara dengan pemimpin-pemimpin baik dari partai-partai anggota PPPKI, maupun dari organisasi-organisasi yang kooperatif dan non-kooperatif yang berada di luar federasi. Usaha-usahanya ini bukannya tanpa hasil. Dewan Penasehat PPPKI mengundangnya untuk mengikuti konperensi kwartalan pada bulan April agar ia menyusun garis-garis besar rencananya untuk mengadakan reorganisasi federasi. Mesikipun mereka belum yakin bahwa PPPKI memerlukan reorganisasi secara radikal, namun semua utusan mengatakan bahwa mereka menginginkan agar paling tidak Partindo dan PNI Baru diyakinkan untuk menjadi anggota. Harapan samar-samar ini telah menambah semangat Soekarno untuk memberikan argumen-argumen yang lebih kuat tentang mengapa gagasan-gagasannya harus diteerima.

Soekarno berpidato atas nama pribadinya sendiri, tetapi semua utusan tahu benar bahwa ia sangat dekat dengan dengan Badan Pengurus Partindo dan tak mungkin ia mengajukan perubahan-perubahan yang tidak disertujui oleh Partindo. Kekuatan argumentasinya terletak dalam pernyataan bahwa federasi itu kini nampaknya bertentangan dengan badan yang ia dirikan pada tahun1927 dan harus diorganisir kembali sedemikian rupa sehingga memungkinkan semua partai nasionalis untuk berpartisipasi. Ia berpendapat bahwa federasi itu kurang memiliki solidaritas ke dalam dan telah berada pada titik krisis karena tidak lagi memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari partai politik besar.

Kritik Soekarno tersebut merupakan penegasan kembali secara keras terhadap argumen-argumen yang telah ia kemukakan dalam 5 bulan sebelumnya. Banyak hal yang ia kemukakan adalah suatu penilaian blak-blakan tetapi tampaknya tepat mengenai posisi PPPKI saat itu.

Namun demikian ia mempunyai suatu gambaran yang ideal tentang federasi yauitu suatu gambaran yang sangat dalam tertanam dalam ingatannya karena kekacauan dan kericuhan dan yang demikian nyata dalam gerakan nasionalis pada pertengahan tahun 1932 PPPKI yang menurut katanya hendak diciptakannya kembali sebetulnya belum pernah mempunyai eksistensi yang sesungguhnya selain sebagai suatu ideal dalam pikirannya dan barangkali dalam pikiran satu dua orang lainnya.

Kritik Soekarno yang demikian tajam merupakan pukulan yang menentukan bagi Soetomo. Karena semakin merasa jengkel atas nada serangan kepada PPPKI dan juga kepada dirinya sendiri, dia kemudian mulai membela kepemimpinannya dengan sangat emosional. Sambil mengakui bahwa diteruskannya kepemimpinannya akan merupakan halangan bagi Partindo dan bagi PSII yang bergabung dengan federasi ia kemudian dengan rasa amarah menawarkan pengunduran dirinya sebagai ketua. Pada titik ini Soekarno ikut di dalam perdebatan itu sambil menyatakan bahwa ada tiga alasan utama mengapa Partindo, PNI Baru dan PSII tidak menjadi anggota. Diakuinya, asalan pertama adalah Soetomo pribadi. Kedua, anggaran dasar federasi. Ketiga, sejauh menyangkut Partindo, adalah cara-cara dan organisasi pengumutan suara dalam federasi. Alasan terakhir ini sudah keterlaluan untuk Soetomo yang sedang marah dan menurut laporan ia kemudian berteriak dengan keras. Justru PNI yang menghendaki peraturan pemungutan suara yang sekarang, suatu komentar yang tepat yang tidak diketahui Soekarno.

Setelah mengeritik federasi dan setelah mengemukakan tiga alasan mengapa partai-partai non kooperatif tidak menjadi anggota. Soekarno akhirnya menganjurkan agar dia diberi kuasa untuk menyiapkan anggaran dasar yang baru dan juga rencana-rencana untuk suatu reorganisasi. Sementara itu ia mendesak Soetomo agar tetap tinggal sebagai ketua hingga konperensi yang berikut pada waktu mana ia boleh mengundurkan diri jika ia masih menghendaki demikian. Soetomo menerima usul Soekarno yang menganjurkan kepada rapat agar Soekarno diberikan wewenang yang dimintanya. Akan tetapi ia tetap bertahan untuk mengundurkan diri dengan segera. Kekacauan kemudian timbul di dalam rapat ketika Thamrin mendukung Soekarno dan menganjurkan agarSoetomo tetap tinggal sebagai ketua sampai akhir tahun sementara utusan lainnya berpendapat bahwa Soetomo harus mengundurkan diri dan harus menyerahkan pimpinan rapat kepada Soekarno. Pada akhirnya Soetomo mengundurkan diri. Di tengah kekacauan yang penuh dengan pertentangan tentang siapa yang harus turun. Singgih merebut palu rapat dan mendesak Soekarno dan Thamrin agar mengambil alih pimpinan fedrrasi. Setelah suatu perdebatan yang seru Tahrim terpilih untuk menggantikan Soetomo sebagai ketua hingga kongres yang berikut pada akhir tahun.

Soekarno kemudian menhusulkan kembali agar ia diberi wewenang untuk menyiapkan rencana reorganisasi PPPKI secepat mungkin, menyiarkannya dalam pers dan menyusun sebuah brosur yang akan diedarkan kepada partai-partai anggota. Setelah satu

debat yang panjang, dimana Soetomo menganjurkan agar usul-usul tersebut dibagi-bagikan kepada anggota-anggota partai PPPKI tetapi tidak diterbitkan secara publik, maka rapat menerima rencananya dan memberinya waktu empat bulan untuk melaksanakannya. Pada akhurnya Thamrin mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana perubahan-perubahan akan dapat diumumkan. Ia yakin bahwa dunia luar tidak perlu tentang perdebatan yang telah mengakibatkan pengunduran diri Soetomo sambil mengusulkan agar konperemsi menyatakan bahwa perubahan komposisi dalam badan pengurus dilaksanakan dengan memindahkan kedudukan dewan penasehat dari Surabaya ke Batavia. Melihat perdebatan yang demikian seru yang telah terjadi maka tidaklah mengherankan kalau ada kesepakatan agar dikeluarkan suatu pernyataan yang srjalan derngan garis-garis tersebut.

Begitulah berakhirnya konperessi yang demikian gaduh dalam sejarah PPPI yang singkat. Pertentangan-pertentangan pribadi yang timbul tetapi yang sebagian besarnya telah ada secara diam-diam semenjak 1927 akhirnya meletus juga. Suasana politik sekurang-kurangnya telah dijernihkan tetapi tetap menjadi pertanyaan apakah ada sesuatu yang positif yang telah tercapai. Semenjak 1930 PPPKI dengan satu cara yang sangat terbatas senantiasa dipimpin oleh Soetomo dan PBI tetapi kini dukungan mereka diragukan. Masa depan federasi tergantung seluruhnya dan kemampuan Soekarno untuk menyus8n anggaran dasar dan peraturan-peraturan yang dapat diterima sekurang-kurangnya oleh salah satu dari kedua partai sekuler non-kooperatif (John Ingleson, 1983 : 177 – 185). Dengan ditangkapnya Soekarno pada 1 Agustus 1933 sebenarnya PPPKI sudah tidak memberi harapan lagi .” Sebenarnya PPPKI mati tetapi tidak pernah secara resmi dfikubur.” Meskipun demikian hal itu tidak berarti bahwa gagasan tentang persatuan serta pemersatu organisasi sudah mati, sama sekali tidak. Dalam tahun-tahun berikutnya secara terus-menerus ada usaha untuk mewujudkan badan pemersatu itu.

Periode antara awal 1932 sampai dengan pertengahan 1933 tidak hanya ditandai oleh perpecahan gerakan nasionalis serta kegagalan usaha perngintegrasian organisasi-organisasi nasionalis, tetapi juga aksi politik yang semakin meningkat terutama sebagai dampak politik agitasi yang dijalankan oleh Soekarno. Di sini dijumpai kekuatan-kekuatan sosial yang antagonistik sehingga gerakan nasionalis sebagai totalitas menjadi kontra produktif, bahkan dalam rangka kondisi ekonomis serta situasi politik menuju ke perbenturan kekuatan nasionalis dengan kerkuatan kolonial. Akselerasi aktivitas pada satu pihak hanya memancing politik serta tindakan yang semakin reaksioner pada pihak lain. Lebih-lebih dalam hal ini pemerintahan Gubernur Jenderal de Jonge tidak tanggung-tanggung secara konsekuen menjalankan politik “purifikasi” atau “pemurnian “ , artinya menumpas segala kecenderungan ke arah radikalisme dengan agitasi massa dan semua bentuk nonkooperasi . Maka dari itu gerak-gerik Partindo dan PNI Baru senantiasa diawasi secara ketat.

Akasi massa danm politik agitasi Soekarno selama lebih kurang satu tahun dari

pertengahan 1932 sampai pertengahan 1933 merupakan titik puncak perkembangan Partindo. Selama periode itu frekuensi rapat-rapat meningkat pula, antara lain sehubungan dengan perjalanan keliling Soekarno ke pelbagai tempat cabang-cabang di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam bulan Agustus dan September 1932 Soekarno berpidato di muka tidak kurang dari 30.000 orang. Kemudian dalam bulan Februari 1933 bersama Gatot Mangkoepradja dan Alamsyah, Soekarno bersafari ke Jawa Tengah dan mengunjungi 17 cabang di mana mereka berbicara di muka rapat-rapat yang penuh sesak.

Dalam suasana yang semakin panas dapat diduga bahwa penguasa sudah siap untuk bertindak. Tindakan pertama uialah pemberangusan surat kabar Fikiran Rakyat pada 19 Juli 1933 yang memuat sebuah cartoon. Pada 1 Agustus semua rapat Partindo dan PNI Baru dilarang dan hari itu juga Soekarno ditahan. Sehari kemudian dikeluarkan larangan bagi semua pegawai negeri masuk menjadi anggota partai tersebut. Tindakan-tindakan itu kesemuanya dilegitimasikan oleh pemerintah Hindia Belanda semata-mata untuk menjamin rust en orde dan dilandaskan pada artikel 153 bis dan ter.

Bagi PNI Baru, akhir yang tragis dan politik agitasi memang dalam kritiknya selalu dibayangkan akan terjadil maka kejadian-kejadian itu memberi pembenaran bagi strateginya. Meskipun demikian, politiik ketat sejak 1 Agustus itu tidak memberi ruang bergerak lagi kepada PNI Baru. Politik Gubernur Jenderal de Jonge tidak bersifat setengah-setengah, maka dalam bulan Desember 1933 PNI Baru yang menjadi sasaran Moh Hatta dan Sjahrir, ditangkap, dan PNI Baru dilarang.

Dengan tangan besinya Gubernur Jenderal de Jonge hendak mempertahankan otoritasnya, sehingga setiap gerakan yang bernada radikal atau revolusioner tanpa ampun ditindasnya dengan alasan bahwa pemerintah kolonial bertanggung jawab atas keadaan di Hindia Belanda, dan baginya dibayangi bahwa dalam masa 300 tahun berikutnya pemerintah itu masih tetap tegak berdiri. Politik represifnya berhasil menghentikan gerakan politik nonkooperasi sama sekali. (Sartono Kartodirdjo, 1990 : 176 – 178)

Kaum Miskin dan Ruang Kota

Sejak Surabaya perlahan-lahan menjadi kota yang modern pada awal abad ke-20, pada saat itulah keinginan orang-orang desa untuk menggapai perubahan hidup yang lebih baik meningkat tajam. Migrasi orang-orang dari pedesaan ini dalam beberapa hal menguntungkan Surabaya, terutama dalam pemenuhan tenaga kerja kasar. Berbagai sektor yang pemenuhan tenaga kerjanya dari kaum migran antara lain sektor transportasi, industri, pembangunan kota, rumah tangga, dll. Namun, kaum migran ini juga menjadi masalah baru,

karena banyak yang tidak terserap tenaga di dunia kerja.

Tidak sedikit dari mereka, akhirnya menjadi pengemis dan gelandangan. Siang hari mereka berkeliaran di jalan-jalan kota dan pada malam hari tidur di tempat itu juga. Jalan kota seharusnya berfungsi sebagai urat nadi transportasi, di mata pengemis, gelandangan, dan para pedagang di sektor informal berubah menjadi area mencari makan dan area untuk tinggal. Para pengemis berjalan berkeliling kota, atau bagi yang tidak kuat berjalan mereka hanya duduk di tempat tertentu sambil menunggu pemberian orang. Mereka meminta-minta kepada siapa saja yang bertemu di jalan, kadang mengetuk pintu rumah orang untuk meminta sesuap nasi. Tidak sedikit pengemis yang meninggal dunia di jalanan karena menderita kelaparan yang hebat. Kematian pengemis di jalanan telah mengubah jalan dari urat nadi transportasi menjadi area untuk hidup sekaligus untuk mati.

Keberadaan pengemis dan gelandangan ini sudah mulai menggangu keyamanan warga kota sejak dekade-dekade awal abad ke-20. Pemerintah kota, melalui surat kabar *Perwata Soerabaia* yang terbit pada 1920, membuat pengumuman agar masyarakat kota Surabaya tidak menghiraukan pengemis. Mereka dihimbau agar tidak memberikan sesuatu kepada pengemis, sebab pemberian tersebut telah menyebabkan para pengemis merasa enak hidup di jalanan. Mereka tidak bekerja tetapi mendapatkan pendapatan dengan mudah. Masyarakat juga dihimbau jika sewaktu-waktu menjumpai pengemis yang menggelandang dari satu tempat ke tempat lain agar melaporkannya ke agen polisi. Agen inilah yang akan menangkap para pengemis dan menyerahkan kepada *Schippersfonds*, yaitu panti-panti untuk menampung para gelandangan dan pengemis yang didirikan oleh *gemeente* dan ada pula yang didirikan oleh gereja. Banyak pengemis yang sudah ditangkap dan dipelihara di *Schippeersfonds* lari dan kembali ke jalanan. Mereka lebih suka mengemis di jalanan karena hidupnya tidak terkekang dan pendapatannya cukup banyak.

Banyaknya pengemis dan gelandangan di jalanan kota Surabaya menyebabkan *Proletar,* koran milik Partai Komunis yang terbit di kota ini, pernah menjuluki Surabaya sebagai kota pengemis. Menurut harian *Proletar* yang mewakili pandangan kaum komunis kota Surabaya, keberadaan pengemis dan gelandangan bukan disebabkan karena mereka adalah orang-orang malas sebagaimana dituduhkan kaum *burgelijk*, tetapi semata-mata karena mereka adalah korban kapitalisme.

Sementara bagi para gelandangan, jalanan adalah ruang terbuka paling nyaman untuk hidup. Mereka menguasai banyak ruas jalan di kota Surabaya, dan menjadikan jalan tersebut seolah-olah ruang milik mereka sendiri. Tidak ada data pasti kapan sebenarnya orang mulai memanfaatkan jalan sebagai tempat tinggal. H.F. Tillema yang banyak mengeksplorasi kehidupan orang miskin kota dalam bukunya yang terbit antara 1913 – 1023 telah menampilkan foto-foto gubuk liar yang didirikan di gang-gang kota Surabaya.

Menurut Tillema, yang dikuatkan oleh kesaksian seorang pelancong dari kota Semarang yang mengaku bernama Si Tjerdik, penguasan jalanan oleh orang miskin, baik gelandangan maupun pengemis pada periode itu masih sebatas di jalan-jalan kecil atau di gang-gang Mereka tidak berani mendirikan gubuk untuk tempat tinggal di tepi-tepi jalan besar karena akan diusir oleh polisi kota yang selalu berkeliling di jalan-jalan besar setiap hari.

Sebagian besar gubuk baru berdiri jika para penghuninya akan berangkat tidur atau ketika senja mulai turun, dan akan dibongkar setelah bangun tidur. Bentuknya amat kecil dan biasanya hanya cukup untuk tidur satu orang saja. Gubuk tersebut dibuat dengan model bongkar pasang (knock down) untuk dibawa lari bila ada razia. Keberadaan mereka di jalan-jalan di kota Surabaya menurut Si Tjerdik menciptakan kontras di sebuah kota yang gemerlap karena

> Jika malam gantikan sang raja siang. Soerabaia tertabur penerangan listrik,orang-orang bersliweran puaskan mata dengan rupa-rupa tontotan atau puter kayun, tapi kaum kromo punya keadaan ada menyedihkan. Ia orang masing-masing pasang terop dari tiker robek atau karung goni, di belakang mana ia orang rebahkan badannya jang sehari digunakan buat angkat barang berat.

Pernyataan di atas membuktikan bahwa orang-orang yang tinggal di jalan bukan hanya pengemis dan gelndangan, tapi juga orang-orang yang memiliki pekerjaan namun tidak memiliki tempat tinggal. Sebagian besarnya adalah pendatang dari berbagai daerah di seputar Surabaya terutama Madura. Kesaksian tersebut memperkuat hasil studi John Ingleson. Ia menyatakan bahwa sebagian besar buruh pendatang dari Madura yang bekerja di pelabuhan Surabaya tidak memiliki rumah dan tidak mampu menyewa kamar secara periodik. Sedangkan yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali, ada pula yang membuat gubuk untuk tidur, tetapi banyak pula yang tidur dengan tanpa pelindung apapun di tepi-tepi jalan (Purnawan Basundoro, 2013 : 201 – 205)

Dalam tahun 1929 suatu depresi ekonomi melanda negara-negara industri yang menyebabkan ditutupnya pabrik-pabrik dan merosotnya standar kehidupan. Dengan cepat depresi meluas ke negara-negara bukan industri Di seluruh dunia, lembaga-lembaga perekonomian ambruk. Perdagangan merosot secara dramatis. Bank-bank tutup. Pabrik-pabrik berhenti bekerja Mereka yang menganggur antre di jalan untuk memperoleh catu makanan. Di Indonesia depresi membawa lebih banyak lagi penderitaan dan kesengsaraan ke suatu negeri yang sudah miskin.

Pada umumnya mereka yang pindah ke pusat-pusat perkotaan untuk bekerja di bidang pembangunan, pengakutan, dan di pabrik-pabrik, kehidupan mereka cukup lumayan di masa-masa baik, karena mereka mendapat pekerjaan yang lebih baik dan menghasilkan

lebih banyak uang daripada jika mereka bekerja sebagai petani. Akan tetapi di tahun 1930-an, para majikan tidak mau bertanggung jawab atas mereka, dan mereka kehilangan pekerjaan sehingga terpaksa memilih antara dua pilihan yang memalukan. Mereka dapat tetap tinggal di kota dalam keadaan bingung, mencari pocokan kerja apa saja dengan bayaran rendah, dengan keluarga mereka menderita kesengsaraan hidup miskin di kota. Atau mereka dapat kembali ke desa, dengan harapan akan ada pekerjaan dan makanan yang tersedia untuk mengobati rasa malu yang mereka derita, kembali pulang dalam kemiskinan.

Masa depresi yang hebat itu menunjukkan bahwa di mata pemerintah kepetingan dunia usahalah yang lebih penting daripada kepentingan rakyat, dan bahwa perekonomian Belandalah yang harus didahulukan daripada perekonomian Indonesia. Situasi seperti itu adalah tanah subur bagi bibit-bibit nasionalisme yang revolusioner. Akan tetapi tahun 1930-an bukanlah masa yang mudah bagi orang-orang politik revolusioner. Polisi pada waktu itu aktif dan bersikap curiga. Pemerintah punya banyak mata-mata. Pertemuan-pertemuan sering dibubarkan. Surat-surat kabar dengan mudah diberangus. Dalam keadaan-keadaan srperti itu, kaum nasionalis radikal tidak akan memperoleh banyak kemajuan dalam mencoba menerangkan kepada rakyat bahwa kolonialismelah yang bertanggung jawab atas segala ketidakberesan yang mereka alami. Pemimpin-pemimpin penting - Soekarno, Hatta, Sjahrir, Iwa Kusumasumantri – semua telah dikirim ke pembuangan, dan partai-partai seperti PNI, Partindo, dan Pendidikan dikekang. Akan tetapi kaum politik nasionalis dan partai-partai yang tidak secara terus terang menentang Belanda – orang-orang seperti Soetomo dan Husni Thamrin dan partai-partai seperti Parindra dan Pasundan – dapat meneruskan kegiatan mereka dan berbicara atas nama sejumlah besar rakyat Indonesia biasa. Melalui orang-orang dan partai-partai seperti ini, dicoba untuk memperbaiki keadaan rakyat. Koperasi-koperasi dan gabungan-gabungan kaum tani dibentuk. Sistem-sistem kredit dan proyek gotong royong diadakan. Dan orang-orang terpelajar mulai melihatnya sebagai kewajiban untuk membantu orang-orang yang buta huruf apabila mereka berhubungan atau bentrok dengan pemerintah. Di Yogyakarta, Pangeran Soerjodiningrat, seorang saudara lelaki Sultan, mendirikan PKN, sebuah partai politik rakyat, yang mencoba mengusahakan penurunan pajak-pajak, untuk menentang para pengusaha penanam tebu dan mempersatukan kaum tani agar mereka dapat memperbaiki pasaran hasil-hasil mereka. Organisasi--organisasi seperti itu tidak selalu sepenuhnya sependapat dengan partai-partai yang lebih radikal, akan tetapi inti dari pesan mereka adalah sama" " Kita harus mengandalkan diri kita sendiri". Sebab akhirnya inilah pelajaran yang dapat dipetik oleh banyak orang Indonesia dari masa depresi itu, yaitu bahwa di masa-masa sulit mereka tidak dapat menggantungkan harapan pada majikan-majikan Eropa, atau pada para pejabat Eropa, atau pada politik pemerintah kolonial untuk melindungi mereka. Sebaliknya orang-orang Indonesia harus berdiri di atas kaki senfdiri, bekerja sama dan saling membantu.

Hampir tak ada orang di daerah kepulauan Indonesia yang terhindar dari akibat

depresi. Petani lada di Aceh, penanam padi di Lombok, serta juga para petani kelapa di Halmahera, orang-orang desa di Maluku, para pemburu dan petani di hulu sungai di Kalimantan – kehidupan mereka semua terpengaruh. Orang-orang yang lebuh tua terpaksa menggadaikan harta -benda mereka yang berguna untuk dapat bertahan hidup. Rakyat pekerja kehilangan pekerjaan dan harga diri. Anak-anak terpaksa mengorbankan kesempatan untuk belajar. Dalam kesengsaraan dan keadaan tidak berdaya yang mereka alami, depresi itu mungkinlah merupakan pengalaman pertama dalam serjarah yang sama-sama dirasakan oleh semua orang Indonesia. (W O"Malley, 1986 : 72 – 78)

Sewaktu resesi ekonomi 1930, Surabaya adalah salah satu kota yang terimbas paling telak. Di mana-mana terjadi pemutusan hubungan kerja. Kehidupan mantan pekerja dan buruh rendahan yang kehilangan pekerjaannya menjadi amat sulit. Mereka yang tidak mampu lagi membayar sewa kamar akhirnya bertahan di jalan menjadi gelandangan. Kolong-kolong jembatan dipakai sebagai tempat tidur dan beraktivitas, dan banyak juga yang tidur di emper-emper toko jika malam tiba. Banyak pula yang mendirikan gubuk seadanya di tanah-tanah kosong dekat rel kereta api.

Berdasarkan temuan "Pemberantas Penganggoeran Indonesia (PPI)", sebuah organisasi sosial yang didirikan oleh Soetomo, di sepanjang rel kereta api *Staatspoor* (SS) di kota Surabaya terdapat kira-kira tujuh puluh orang korban pemutusan kerja. Mereka tinggal dalam gubuk-gubuk kecil yang dibuat dari bahan seadanya, beratapkan kertas atau rumput-rumput, berdinding kertas karton atau bahan-bahan lain. Masyarakat menamai kompleks itu," Kampung Melarat,"

PPI yang didirikan untuk mendorong korban krisis ekonomi mengumpulkan orang-orang yang tinggal di tepi rel kereta api tersebut di gedung Persatuan Bangsa Indonesia (PBI), organisasi politik yang juga didirikan oleh Soetomo, di Bubutan. Usaha PPI ini ternyata didengar oleh orang miskin lainnya, sehingga banyak orang dari mereka yang datang ke gedung PBI minta agar diberi tempat tinggal. Karena makin lama makin penuh sesak, akhirnya PBI menyewa lapangan milik *gemente* di Griseescheweg. Di tempat itu dibangun los-los untuk menampung orang-orang miskin yang tidak bertempat tinggal. Agar tidak lagi mengemis, PPI mengusahakan tanah pertanian yang akan dijadikan lahan penanaman sayur-sayuran garapan orang-orang tampungan tersebut. Pada 1932 jumlah orang yang tinggal di Pondok PPI berjumlah 182 orang, dan dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat sehingga pada 1936 menjadi 331 orang. Kemampuan PPI yang terbatas menyebabkan tidak semua gelandangan ditampung.

Polisi kota Surabaya pada waktu itu cukup ketat dalam mengontrol gubuk-gubuk liar yang berdiri di tempat-tempat yang tidak semestinya, sehingga tidak ada gubuk yang bisa berdiri secara permanen. Jika ada tanda-tanda akan ada gubuk yang dibangun permanen maka

dengan segera akan dirubuhkan oleh polisi juga. Ketatnya pengawasan polisi menyebabkan banyak penghuni jalan baru bisa mendirikan gubuk dan merebahkan badannya jika malam telah larut.

Tidak jarang polisi harus berkejar-kejaran dengan para penghuni jalan yang membandel dan tidak mau pindah dari jalan raya. Contohnya peristiwa di Jalan Songoyudan. Beberapa gang di jalan ini terkenal sebagai tempat nongkrong para gelandangan, serta tempat para penghisap candu berpesta barang haram. Mereka tidak memiliki pekerjaan tetap. Keberadaan mereka sangat meresahkan masyarakat setempat karena menghalangi jalan serta sering membuat onar karena mabok. Para jembel sudah menganggap bahwa kawasan Songoyudan yang mereka duduki sebagai "pesanggarahan". Beberapa kali mereka diusir oleh polisi, tetapi selalu kembali lagi.

Hal ini membuat penghuni kampung Songoyudan yang rata-rata adalah pedagang Cina resah. Mereka juga jijik dengan perilaku para gelandangan itu, yang banyak bergeletakan di jalan sambil menghisap candu, mabok, ada yang tidur-tuduran telanjang, ada pula yang berhari-hari mengadu kucing dengan kirik (anak anjing) sehingga membuatsuara amat gaduh. Mereka juga berjudi kecil-kecilan. Begitu tikar digelar perkjudian pun dimulai. Jika sewaktu-waktu polisi datang, bubarlah mereka sambil lari tunggang-langgang dan berteriak-teriak memberitahu teman-teman lain agar lari dari kejaran polisi.

Banyak gelandangan memilih bertahan di jalan-jalan daripada tinggal di penampungan yang dibangun oleh *gemeente* atau penampungan yang dikelola oleh yayasan-yayasan swasta dan gereja. Hidup di jalanan terasa lebih bebas dan merdeka, dengan leluasa bisa mencari makan dengan cara meminta-minta, dan tidur di mana saja. Upaya untuk melokasi kaum gelandangan dan pengemis di penampungan kurang membawa hasil karena banyak yang lari dan kembali turun ke jalan lagi.

Bagi orang-orang miskin yang sudah terbiasa menguasai jalanan, tempat tersebut adalah tempat untuk memulai hidup sekaligus menemui ajal. Banyak sekali kasus gelandangan yang melahirkan dan meninggal dunia di jalan. Kasus-kasus semacam ini menunjukkan bahwa bagi sebagian orang miskin yang terperangkap pada situasi sulit, jalan adalah tempat yang paling nyaman untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kota.

Sulitnya mengiring orang-orang itu agar mau menetap di tempat yang disediakan kadang-kadang membuat pihak *geemente* kehabisan akal. Menghadapi sikap semacam itu, pihak *gemeente* akhirnya seringkali melakukan pembiaran, seperti kasus di Kalimati. Pada suatu hari di Kalimati ditemukan seorang gelandangan yang sakit keras oleh orang Eropa. Orang Eropa tersebut kemudian menelpon polisi, namun dijawab : " Semoea toch tiada bisa dioeroes bersama-sama". Ada nada kesal dari jawatan polisi. Polisi beralasan bahwa jumlah

personil terbatas, sementara perkara yang harus diurus banyak. Polisi akhirnya datang juga ke tempat kejadian, namun pada saat itu pula nafas terakhir dari si gelandangan lepas. Maka polisi hanya datang untuk mengurus mayat.

Pada 1939 *gemeente* membentuk *stadswacht,* semacam polisi kota yang bertugas menjaga ketentraman masyarakat. *Stadswacht* dibentuk sebagai imbas perang di Eropah. Jerman yang mulai bergerak menyerang negara-negara tetangga telah membuat Belanda kalang kabut, sehingga dengan buru-buru membuat berbagai persiapan di negara jajahannya. *Stadswacht* dibentuk untuk menjaga ketentraman dan keterrtiban umum di dalam kota, atau dengan kata lain untuk melakukan ronda di kota.

Tiap hari *stadswacht* berpatroli ke berbagai sudut kota. Akibatnya, orang-orang miskin yang semula berkeliaran di jalan-jalan ketakutan, karena mereka bisa dibawa oleh *stadswacht* dan dimasukan ke penjara dengan tudunan mengganggu ketentraman. Pada waktu-waktu tertentu pemerintah mengadakan latihan mendadak tentang penyerangan kota oleh musuh yang diawasi dengan ketat oleh *stadswacht.* Orang-orang yang berada di jalan harus segera mencari perlindungan jika sewaktu-waktu sirine dibunyikan, seolah-olah kota sedang diserang musuh. Orang-orang miskin yang berkeliaran di jalanan dan tidak tahu-menahu tentang latihan itu seringkali menjadi korban kedisiplinan *stadswacht.* Mereka dianggap telah melanggar aturan dengan tidak mau berlindung ketika sirene dibunyikan. Mereka pun digelandang ke kantor polisi dadakan tersebut. Keberadaan *stadswacht* telah menciptakan kontrol yang semakin ketat terhadap orang-orang miskin yang berkeliaran di jalan-jalan. (Purnawan Basundoro, 2013: 205 – 210)

Salah satu problem yang dihadapi *gemeente* dalam rangka mengontrol rakyat miskin yang mengambil alih ruang secara illegal adalah adanya dualisme pengelolan wilayah. Dualisme itu menyulitkan *gemeente* untuk mengontrol seluruh wilayah kota. Banyak kawasan yang tidak layak dari segi estetis dan syarat kesehatan tidak bisa diperbaiki oleh pihak *gemeente* karena wilayah tersebut secara adminstratif masuk dalam wilayah kampung dan desa berada di bawah kekuasaan bupati. Sementara itu, jarang ada upaya dari bupati untuk memperbaiki kondisi perkampungan di Surabaya.

Untuk menghentikan dualisme kepemimpinan ini, maka 1930 pemerintah pusat berencana menyatukan semua wilayah di kota Surabaya dalam satu otoritas, yaitu *gemeente*. Pertimbangannya adalah karena hampir semua wilayah di kota tersebut sudah berubah menjadi kawasan perkotaan. Langkah tersebut diharapkan dapat memaksimalkan lingkungan yang kurang sehat serta dapat mengontrol orang-orang miskin yang berkeliaran di jalan-jalan.

Pada saat gagasan penyatuan pemerintahan kota itu diluncurkan, ide tersebut

langsung menjadi kontroversi dan bahan perdebatan yang berkepanjangan di Volksraad yang berkedudukan di Jakarta. Perdebatan berkisar pada masalah apakah kampung-kampung yang semula berada dalam penguasaan bupati sudah seharusnya dimasukkan dalam pengurusan *gemmente* ataukah tetap dalam posisi semula. Debat berkepanjangan di Volksraad ternyata tidak mengehasilkan kesepakatan apapun.

Rencana pemerintah untuk mengambilalih pengelolaan kampung, atau dalam istilah masyarakat Surabaya akan menghapus kampung, mendapat reaksi hebat dan masyarakat setempat. Mereka mrenganggap *gemennte* telah melakukan upaya licik untuk mengambilalih kampung-kampung tempat tinggal masyarakat bumiputra. *Swara Oemoen*, surat kabar yang dikelola oleh rakyat bumiputra dengan sinis menuliskan bahwa upaya "pengoperan kampung," isitilah yang dibuat oleh mereka merupakan upaya *gemeente* agar bisa memperlihatkan cara kerja (pamer) lembaga tersebut kepada rakyat bumiputra.

Masyarakat bumiputra yang tinggal di kampung-kampung yang mencurigai, bahwa pengoperan kampung bermotif finansial yaitu berkenan dengan penarikan pajak kepada penduduk bumiputra, sebagaimana ditulis oleh *Swara Oemoen*. Pajak menjadi sumber utama ketakutan warga terhadap rencana pengambilalihan pengelolaan kampung. Hal ini menjadi pikiran tersendiri bagi sebagian besar warga kampung yang miskin. Mereka telah membayangkan bahwa hidup di bawah kekuasaan *gemeente* akan sangat membebani karena *gemeente* akan menarik banyak pajak. Mereka bahkan membayangkan hal-hal ekstrem berkait dengan pajak, seperti pajak penyelenggaraan acara hajatan penduduk kampung.

Penduduk kampung merasa bahwa pengambilalihan pengelolaan wilayah yang menjadi tempat tinggal mereka memang bermotif ekonomi, dan hal inilah yang membuat mereka trauma. Kondisi mereka yang miskin dengan penghasilan pas-pasan atau tanpa penghasilan tetap, tentu saja sangat berat. Bagi sebagaian masyarakat yang masih tinggal di tanah yang dikuasai oleh tuan tanah, yaitu di tanah-tanah partikelir; penarikan pajak membuat mereka semakin bertambah berat, karena selain harus membayar berbagai kewajiban kepada tuan tanah juga membayar pajak insidental kepada *gemeente* .

Rekasi keras dari penghuni kampung menjadi bukti bahwa telah tumbuh kesadaran baru pada masyarakat kampung bahwa area mereka menjadi incaran kelompok lain, dalam hal ini *gemeente.* Secara sadar masyarakat kampung mulai memahami bahwa ruang mereka menjadi ruang yang diperebutkan, oleh karena itu mereka juga berusaha mempertahankannya. Pada titik yang paling krusial ini tumbuhlah kesadaran kolektif yang tinggi antar sesama kampung. Jika dalam kasus-kasus perebutan ruang antara individu atau antar kelompok kesadaran kolektif yang muncul berskala kecil, maka dalam kasus ini kesadaran kolegial mereka muncul dalam spektrum yang lebih luas. Mereka sadar bahwa yang dihadapi bukan lagi induvidu atau kelompok, melainkan kekuatan terstuktur yang mengatasnamakan diri

sebagai lembaga yang memiliki otoritas paling sah dalam penyelenggaraan komunitas besar yang disebut komunitas kota. Kelompok yang mereka hadapi adalah Gemeente Surabaya, sebuah lembaga yang memiliki legitimasi paling kuat mewakili kekuasaan negara.

Menghadapi tekanan pemerintah, penduduk kampung-kampung Surabaya kemudian bersatu membentuk organisasi "Perasaan Pendoedoek Soerabaja." Organisasi ini menjadi wadah dari penduduk kampung yang tidak setuju dengan rencana pengambialihan pengelolan kampung oleh *gemeente.* Setiap minggu sekali perwakilan-perwakilan dari berbagai kampung berkumpul untuk membahas masalah yang mereka hadapi. Agar posisi mereka lebih kuat, sejak awal Desember 1930 organisasi tersebut menjalin komunikasi dengan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) yang dipimpin oleh Soetomo.

Pada 1 Desember PBI menerima surat-surat dari perwakilan kampung yang menghendaki agar dilakukan "begandring" (vergadering) rakyat kota Surabaya untuk membahas rencana pemerintah pusat yang akan segera mengambil alih pengelolaan kampung ke pihak Gemeente Surabaya. Pada tanggal yang sana tidak kurang dari lima surat yang masuk ke pengurus PBI yang menghendaki agar PBI segera mengandakan :begandring" untuk tujuan yang sama. Beberapa surat yang dikutip oleh harian *Swara Oemoen* bahkan terkesan sangat emosional yang mencerminkan kekhawatiran luar biasa dari penduduk kampung bahwa mereka akan kehilangan "tanah tumpah darah " yang selama ini menjadi area komunitas mereka yang dikelola secara mandiri.

Kekhawariran dan ketakutan penduduk kampung terhadap rencana pengambilalihan oleh *gemeente* merupakan imbas dari besarnya rasa curiga terhadap *gemeente*. *Gemeente* selama ini dipandang sebagai sebuah lembaga mandiri pengelola kota yang secara terbatas hanya mengurusi komunitas Eropa. Sebagai lembaga yang mandiri dan otonom, *gemeente* diberi hak untuk mengelola keuangan secara mandiri pula. Salah satu sumber keuangan yang mata penting bagi *gemeente* adalah pajak warga.

Perebutan otoritas pengelolaan kampung antara penghuni kampung dengan *gemeente* harus dilihat dalam konteks yang luas antara keinginan untuk menata lingkungan kota dan kepentingan untuk memperoleh sumber pendapatan kota yang cukup besar. Konteks yang pertama tidak bisa dijadikan alasan yang cukup strategis mengingat selama ini kampung merupakan sebuah area yang hampir tidak diperhatikan oleh *gemeente* sejak Gemeente Surabaya berdiri pada 1906. Dengan demikian, maka konteks kedualah yang paling memungkinkan dijadikan pijakan untuk melihat alasan pengambialihan tersebut. Sejak *gemeente* berdiri dan dinyatakan sebagai sebuah lembaga yang secara otonom harus mencari dana untuk dirinya sendiri, maka sejak itu pula kebutuhan akan anggaran menjadi hal yang subtansial. Jika anggaran tersebut hanya dibebankan kepada komunitas Eropah yang tinggal di Surabaya, hanya 26.463 orang. Masyarakat kampung lebih melihat aspek pembiayaan

kotalah yang dijadikan alasan utama pengoperan tersebut. Pandangan masyarakat kampung tersebut mengemuka pada *begandring openbaar*, rapat terbuka warga kampung yang diadakan pada 20 Desember 1930 oleh PBI.

Secara umum, pandangan warga yang mengemuka dalam "bergading" tersebut terbelah menjadi dua. Pertama adalah pandangan yang mewakili pemikiran bahwa pengambilialihan pengelolaan kampung-kampung adalah jalan terbaik menuju perbaikan kampung-kampung miskin tersebut. Pandangan ini diwakili oleh anggota-anggota gemeenteraad perwakilan rakyat bumiputra kota Surabaya yang hadir dalam "bedraging". Pandangan ini juga dianut oleh tokoh terkemuka kota Surabaya, Soetomo. Kedua adalah pandangan yang menolak ide pengambialihan pengelolahan kampiung, yang mayoritas disuarakan oleh para penghuni kampung.

Mula-mula, Soetomo yang sebagai ketua PIB dan tokoh yang amat disegani oleh masyarakat Surabaya memberi pengarahan sambil memimpin pertemuan. Ia mengemukakan bahwa setiap tindakan baru yang semula asing bagi masyarakat biasanya akan menggagetkan. Soetomo menganalogikan apa yang sedang dilakukan oleh *gemeente* di kota Surabaya ini dengan tindakan Raffles ketika melakukan berbagai perombakan di Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Raffles mengagetkan banyak pihak karena ia memasukkan hal-hal baru dengan tiba-tiba. Soetomo nampaknya ingin mengambil hati masyarakat kampung, ia meposisikan diri sebagai perantara antara masyarakat dengan pihak *gemeente*. Menurut pandangan Soetomo, pengambilialihan kampung bukanlah semata-mata soal bagaimana *gemeente* nantinya memperoleh penasukan dalam bentuk pajak, tetapi yang lebih penting adalah agar ada yang menangani kampung-kampung miskin yang selama ini tidak diperhatikan, yaitu *gemeente.* Kampung yang teratur serta penghuninya sejahtera merupakan cita-cita Soetomo sejak menetap di Sirabaya. Bahkan ia rela mengundurkan diri dari keanggotaan Gemeenteraad Surabaya pada 1925 juga demi perjuangan agar kampung-kampung miskin di Surabaya ditangani dengan serius oleh *gemeente.*

Apa yang disampaikan oleh Soetomo dalam "begandring" tersebut tidak diperhatikan dengan baik oleh perwakilan-perwakilan kampung yang hadir. Mereka tetap mencurigai tindakan pengambilalihan pengelolan kampung adalah penyerobotan atas dasar kesewenang-wenangan. Ada perbedaan pandangan antara Soetomo dengan perwakilan penduduk kampung yang hadir dalam begandring tersebut. Soetomo yang seorang dokter lebih menekankan aspek kesehatan. Jika kampung-kampung berada dalam kendali *gemeente*, maka kondisi lingkungannya akan lebih diperhatikan dibandingkan jika kampung-kampung tetap mandiri di bawah kekuasaan bupati, karena bupati tidak pernah secara langsung memperhatikan kampung-kampung bumiputra. Ia menekankan supaya rakyat mengikuti kemampuan *gemeente* jika perubahan yang akan dilakukan terhadap kampung-kampung miskin cocok dengan kehendak rakyat. Berkali-kali ia menekankan bahwa masuknya *gemente* ke dalam

kehidupan rakyat bumiputra bukan berarti pertama kemunduran, melainkan kemajuan.

Pendapat Soetomo didukung oleh anggota *Gemeenteraad* Surabaya dari golongan bumiiputra lainnya, yaitu Rooslan Wongsokoesomo, Lengkong, dan Soendjoto. Mereka menekankan bahwa jalan terbaik adalah melepas pengeloalan kampung kepada *gemeente.* Mereka berpendapat bahwa dari 176 kampung di Surabaya, sangat sedikit yang sudah diperbaiki, dan kondisi tersebut tentu saja merugikan penghumi kampung-kampung yang belum diperbaiki. Menurut Lengkong, yang membayar pajak ke pemerintah bukan hanya warga kampung yang sudah diperbaiki, tetapi warga kampung lain yang belum diperbaiki. Soendjoto menandaskan bahwa pengambialialihan pengelolaan kampung cukup penting agar rakyat bisa menerima kembali pajak yang telah diberikan kepada negara dalam bentuk fasilitas yang akan dibangun oleh *gemeente* jika kampung di bawah penguasaan lembaga tersebut.

Masyarakat kampung sendiri sadar betul bahwa upaya mereka menghalangi pengambialihan pengelolan kampung ini sia-sia belaka. Hal ini disebabkan karena lembaga formal yang mestinya melindungi mereka, yaitu kabupaten, ternyata tidak bertindak apa-apa. Pada satu sisi, dualisme kekuasaan di Surabaya yang secara definitif berlangsung sejak *gemeente* berdiri secara tidak langsung merugikan warga kampung. Mereka membayar berbagai jenis pajak yang disetor kepada atasan mereka, namun tidak mendapatkan imbalan yang sepadan. Kampung-kampung dibiarkan rusak tanpa fasilitas apapun, kondisi warga juga dibiarkan miskin tanpa jalan keluar. Pada sisi lain, kekuatan tradisional menciptakan suasana tentram karena mereka merasa dalam lindungan bangsa sendiri yang sederajat, bukan oleh bangsa asing yang kadang-kadang tidak menciptakan komunikasi yang intensif, Bagi penghuninya, kampung menciptakan romantisme akan hubungan intim antar warga dengan kepala-kepala mereka. Di dalam kampung, kepala kampung, lurah dan bupati adalah "ayah" bagi setiap orang kampung yang memerankan diri sebagai "anak". Oleh karena itu pengambilalihan pengelolahan kampung oleh *gemeente* menimbulkan kegoncangan luar biasa. Berhadapan dengan *gemeente* yang notabene adalah kekuasan asing timbul jarak sosial-politik yang amat jauh. Kesenjangan terjadi antara dua lembaga yang berada dalam kekuasaan etnik yang berbeda. Kondisi ekonomi warga yang rata-rata miskin dengan rumah-rumah yang sangat tidak layak telah menciptakan jurang pemisah yang luar biasa, baik secara riil maupun simbolik.

Pada akhirnya penduduk menyadari bahwa pengambilalihan kampung tidak bisa dielakkan lagi karena sudah menjadi kemauan pemerintah. Berbagai usulan, saran, dan masukan yang diajukan oleh perwakilan langsung yang hadir dianggap sebagai ekspresi yang wajar dari kekesalan penghuni kampung di Surabaya. "Begrading" malam itu memang tidak menghasilkan keputusan yang pasti. Para anggota *gemmenteraad* hanya berjanji akan membawa aspirasi masyarakat ke *gemeente*. Bahkan Rooslan Wongsokoesoemo menyatakan

ia cukup bingung dengan suasana yang berkembang dalam “begrading” tersebut. Ia merasa usulan penduduk kampung akan sulit direalisasikan karena keputusan pengambilihan pengelolaan kampung adalah keputusan Gubernur Jenderal yang akan segera diberlakukan dalam beberapa hari mendatang. Ia juga khawatir akan terjadi protes keras warga mengenai hal tersebut. Para anggota *Gemeente* sadar bahwa persoalan yang sedang dihadapi terkait erat dengan kultur masyarakat agraris yang sudah menyatu sedemikin rupa dengan tanah tempat tinggalnya. Jika persoalan ini tidak dihadapi dengan baik, bukan tidak mungkin akan meledak gerakan protes seperti yang terjadi pada awal abad ke 20 di kota Surabaya.

Berbagai upaya warga untuk menghalangi pengambialihan pengelolahan kampung ternyata tidak berhasil. Pemerintah kolonial Belanda, dalam hal ini Gubernur Jenderal, bersikukuh bahwa satu-satunya cara untuk memperbaiki kondisi kampung adalah dengan mengambil alih pengelolalannya dari kekuasaan bumiputra kepada kekuasaan Eropa. Pada 1 Januari 1931, keluarlah Undang-Undang Penghapusan Inlandsch-Gemeenten Surabaya yanhg dimuat dalam Staatblad Nop 373 Tahun 1931. Sejak itu maka seluruh wilayah kota Surabaya berada dalam satu kendali Gemeente Surabaya. (Purnawan Basundoro, 2013 : 256 – 270)

PBI dan PARINDRA

Campur tangan pemerintah dan sebagai akibatnya bukamnya partai yang selama dua tahun menjadi barisan terdepan dalam gerakan kaum nasionalis menumbuhkan rasa prihatin terhadap hilangnya momentum terhadap gerakan. Saat itu sekaligus juga merupakan kesempatan yang baik bagi kelompok-kelompok yang selama itu hanya jadi bayangan PNI untuk mencoba mengisi kekosongan politik dan, dengan bertumpu pada kekuatan politik yang telah dibina PNI, mengambil alih kedudukan dominan dari PNI. Dua usaha semacam itu dilakukan oleh sayap kooperasi dalam gerakan nasionalis, pertama dari Soetomo dan Kelompok Studi Indonesia, sedangkan yang lainnya dari Tabrani Dari dua kelompok itu kelompok Soetomo ternyata jauh lebih penting.

Sebagai bagian dari pemikiran kembali secara menyeluruh yang terpaksa dilakukan oleh golongan nasionalis, diadakan diskusi panjang antara kelompok kooperator dengan non-kooperator tentang cara terbaik untuk mencapai tujuan bersama di bidang sosial, politik dan ekonomi. Salah satu pertemuan semacam itu diadakan pada 8 Maret di rumah Soetomo di Surabaya. Di antara mereka yang hadir adalah Sartono yang sengaja datang dari Batavia, Samsi, Sastrowidagdo dan Iskaq dari Pengurus Pusat PNI bersama-sama dengan Soetomo serta sejumlah Kelompok Studi Indonesia Menyusul kemudian diskusi tentang masa depan gerakan kaum nasionalis di mana Soetomo mengusulkan pembubaran PNI dan pembentukan

partai baru. Partai baru ini, sambil berpura-pura bekerja untuk perbaikan ekonomi dan sosial, dan bukan untuk kemerdekaan, agar dapat terhindar dari perhatian pemerintah, pada prakteknya akan meneruskan perjuangan PNI. Meskipun usul; ini sangat menarik namun Sartono menentangnya dengan alasan bahwa partai apa pun, tak peduli apapun namanya akan segera dibubarkan oleh pemerintah jika mencoba berjuang seperti PNI. Namun demikian pimpinan PNI sangat setuju untuk mengajukan masalah itu untuk dibahas dalam kongres PNI yang direncanakan akhir tahun.

Sebelum mengundang pertemuan tersebut Soetomo pastilah telah mendiskusikan usulnya itu panjang lebar dengan kawan dekatnya dari cabang PNI Surabaya. Dia dan Anwari, ketua cabang PNI Surabaya, selama beberapa waktu tidak sepenuh hati setuju dengan arah akibat dari aktivitas PNI pada tahun 1929, dan ia pernah mengusulkan kepada Soekarno untuk mengambil langkah-langkah moderat dalam agitasi politiknya dan sebagai gantinya lebih mengutamakan itu jelas tambah memperkuat keyakinannya. Pada awal Februari dalam pertemuan pengurus cabang di Surabaya, Anwari menyatakan untuk masa-masa yang akan datang partai haruslah bekerja sedemikian rupa sehingga dapat terhindar dari campurtangan pemerintah lagi.

Pendekatan Soetomo kepada Pengurus Pusat PNI bukanlah tanpa unsur ambisi politik pribadi. Dia pernah dikecewakan ketika pada tahun 1926 dan 1927 ia mengimpikan untuk Kelompok Studi Indonesia sebagai wahana utama bagi gerakan nasionalis yang terpadu dan usaha-usahanya dalam PPPKI yang ia lakukan dengan maksud sampingan untuk memperkuat posisinya sendiri ternyata juga tak banyak berhasil. Ketenangan dalam PNI yang lebih banyak bersifat terpaksa, memberinya peluang lain untuk merebut kepemimpinan politik dalam gerakan nasionalis dan membawanya kepada saluran-saluran yang menurut pertimbangannya lebih aman dan lebih pragmatis.

Meskipun Sartono menolak Soetomo, ini tidaklah berarti ia berkeberatan terhadap adanya kerja-sama yang lebih erat antara kelompok kooperator dengan non-kooperator dari gerakan nasionalis. Pertimbangannya memang baik. Dalam kerangka peringatan jaksa agung, pemerintah saat ini kiranya sangat tidak mungkin membiarkan adanya partai baru untuk meneruskan apa yang oleh PNI telah ditinggalkan. Diskusi antara Sartono dan Soetomo berlangsung selama beberapa bulan untuk mencari kemungkinan kerja-sama antara PNI dan Kelompok Studi Indonesia, namun akhirnya terhenti tatkala mulai muncul desas-desus dalam pers Indonesia tentang kemungkinan pembubaran PNI. Sangkalan keras kemudian dikeluarkan oleh pengurus pusat pada bulan Juni.

Bisa dipertanyakan seberapa jauh Sartono sungguh-sungguh memperhatikan usul Soetomo. Betapun kecilnya bukti yang ada, nampaknya pembicaraan mereka tidak pernah lebih jauh dari hal-hal yang umum saja. Namun yang penting ialah desas-desus tentang

peleburan yang diusulkan itu telah beredar dan seakan-akan dibenarkan bukan saja oleh pers Indonesia yang getol menyiarkan desas-desus yang paling baru, tetapi juga oleh beberapa anggota PNI sendiri dan, sebagaimana yang akan kita lihat nanti, oleh beberapa orang nasionalis di Negeri Belanda. Desas-desus tentang pembubaran PNI memperbesar fruatasi dan kejengelan di antara kelompok-kelompok anggota PNI, baik anggota sungguhan maupun anggota-daftar, yang telah merasa terpukul oleh penangkapan dan kelesuan yang diakibatkannya dalam partai. Hal ini, yang memuncak dengan instruksi Sartono dalam bulan Januari dan Juni yang melarang kegiatan politik atas nama partai, setahun kemudian dianggap sebagai faktor penting yang mendorong beberapa anggota PNI untuk memisahkan diri dari dari partai penggantinya yaitu Partindo.

Karena tidak berhasil dalam pembicarannya dengan Sartono mengenai pembubaran PNI dan pembentukan partai baru, Soetomo memutuskan suatu arah tindakan alternatif. Ia mengusulkan Kelompok Studi Indonesia diubah menjadi sebuah partai politik yang memiliki dasar yang lebih luas. Penunjukkan Ali Sastroamidjojo sebagai redaktur *Soeloeh Ra"jat Indonesia* dalam bulan Juli merupakan bagian dari usahanya untuk memperoleh dukungan dari bekas anggota PNI. Soetomo mengumumkan niatnya itu pada perayaan ulang Kelompok Studi Indonesia keempat tanggal 12 Juli di mana ia menekankan bahwa Kelompok Studi Indonesia dan PPPKI sedang melaksanakan perjuangan nasional yang telah dibina oleh PNI. Ia mengatakan, kalau pada masa lalu Kelompok Studi Indonesia menarik keanggotaan hampir secara eksklusif dari kalangan pegawai negeri, maka sekarang dikandung maksud untuk secara aktif mencari anggotanya dari kalangan masyarakat yang lebih luas.

Dasar bagi usaha Kelompok Studi Indonesia untuk memainkan peranan yang lebih menonjol dalam pergerakan kebangsaaan disiapkan dalam karangan-karangan yang terbit dalam *Soeoleh Ra"jat Indonesia* pada pertengahan tahun 1930. Mereka berusaha mengaburkan garis pemisah antara kaum kooperator dan non-kooperator dan antara kegiatan politik dan kegiatan-kegiatan sosial serta ekonomi. Pembedahan semacam itu dikatakan sebagai tidak benar dan merusak gerakan nasionalis yang perlu merapatkan barisan untuk menghadapi teknan pemerintah. Karangan penting dalam bulan Agustus membahas keyakinan yang tersebar luas bahwa keterlibatan kaum nasionalis dalam bidang ekonomi dan sosial hanya memperlemah aksi politik. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Soetomo, maka dikemukakan bahwa sejak berdirinya Kelompok Studi Indonresia tahun 1924, keyakinan semacam itu memperlihatkan dangkalnya pengertian tentang politik kolonial. Tujuan satu-satunya gerakan nasionalis adalah menghapuskan penderitaan rakyat, melalui kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, maupun politik.

Pada pertengahan bulan September kelompok studi membentuk sebuah komisi yang meiikirkan perubahan-perubahan mengenai tujuan dan program kelompok. Langkah terakhir menuju peralihannya menjadi sebuah partai dengan basis yang lebih luas diambil

pada tanggal 11 November ketika pengurus mengubah nama kelompok studi ini menjadi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) dan secara resmi memutuskan akan mendirikan organisasi partai dan akan merekut anggota-anggotanya dari kalangan yang lebih luas.

PBI lehih dari sekedar lanjutan Kelompok Studi Indonesia dengan nama baru. Ia mengungkapkan keyakinan dari orang-orang yang mengelompok diri sekitar Soetomo yaitu keyakinan bahwa orang-orang elite Indonesia yang berpendidikan Barat memiliki kewajiban moral untuk memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat, tidak hanya dalam bidang politik tapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial. Soetomo sudah lama menolak pembedaan ketiga bidang itu (politik, ekonomi dan sosial) karena ketiganya dipandang sama pentingnya bagi kemajuan Indonesia. Partai baru itu bertujuan untuk belajar dari sikap PNI yang mengutamakan agitasi politik, dan bermaksud untuk lebih hati-hati dalam front politik.

Seperti halnya kelompok studi, politik PBI mencerminkan juga dominasi Soetomo. Pada pokoknya partai ini bukanlah partai kooperatif atau non-kooperatif, karena ia lebih menyesuaikan politiknya dengan kebutuhan mendesak pada waktu itu. Di mata kaum non-kooperator tentu saja hal itu membuatnya nampak sebagai partai koopeartif. PBI memulai hidupnya sebagai sebuah partai Surabaya dan sekalipun ia berusaha mengembangkan dirinya ke Jawa Tengah dan Jawa Barat, namun tetap saja menjadi partai daerah Jawa Timur. Semboyannya - “Bekerja doeloe, nanti bitjara, dan djangan sebaliknya” - dimaksudkan untuk menolak partai-partai seperti PNI dan PSI. Masanya sudah berlalu tatkala pidato saja sudah memadai bagi kegiatan nasionalis yang positif; kini di mata kelompok Soetomo pun nasionalis harus membuktikan pengabdiannya kepada negara dan rakyat, bukan saja dengan berusaha mencapai tujuan politik yaitu kemerdekaan – karena dengan sikap Belanda yang tak kenal kompromi, tujuan politik ini merupakan tujuan jangka panjang – tetapi dengan mengutamakan masalah-masalah yang lebih mendesak dalam bidang ekonomi dan sosial yang secara langsung mempengaruhi kondisi hidup rakyat.

Meskipun PBI memusatkan perjuanganya pada masalah-masalah sosial dan ekonomi, sebagai akibat dari depresi ekonomi dunia yang mulai dirasakan oleh para petani kecil di Jawa Timur khususnya di daerah perkebunan tebu, kegiatan-kegiatan yang mengatas-namakan kepentingan petani kecil ini tak layak lagi secara tidak langsung mempunyai akibat politik yang kuat. Sungguh, Rukun Tani PBI berkembang pesat selama tahun-tahun depresi ekonomi ini dengan terdaftarnya puluhan ribu petani kecil ke dalam organisasi yang bertujuan memperbaiki taraf hidup itu. Oleh karena itu, hanya karena organisasi ini meluas ke desa-desa maka akitivitas PBI diawasi secara ketat oleh pemerintah karena dianggap memiliki potensi mengganggu “keamanan dan ketertiban”. Meskipun demikian, sementara ia berhasil sebagai organisasi ekonomi dan sosial, PBI tidak pernah mampu untuk secara serius menentang kepemimpinan politik kaum non-koopearor sekuler di Jawa Tengah dan Jawa Barat, walaupun Soetomo menghendakinya.

Usaha kedua yang dilakukan oleh kaum nasionalis kooperatif oleh kaum nasionalis kooperatif untuk menarik beberapa anggota PNI dilancarkan oleh Tabrani hanya dua hari menjelang dimulainya pengadilan terhadap pimpinan PNI di Bandung tanggal 18 Agustus. Tetapi usaha ini juga gagal memenuhi harapan pendirinya terutama karena timbulnya ketidak-percayaan sementara golongan elite yang sadar politik Tabrani dan kawan-kawan. Tabrani tidak dipercayai terutama karena ia seorang anggota masyarakat Teosofis," kacung Hindia Belanda" yang dianggap anti nasionalis. Dia dan pemimpin lainnya dituduh menganut ide asosianis dan menentang PI waktu ia belajar di Negeri Belanda.

Meskipun partai-partai kooperator bangkit kembali pada tahun 1930, menyoloknya penampilan mereka secara mendadak dalam gerakan kaum nasionalis tampaknya hanya semu saja. Karena meskipun PNI secara politis tidak aktif, perhatian orang-orang tertuju pada pengadilan terhadap Soekarno yang semakin dekat, bukan saja dari kalangan anggota PNI sendiri tetapi juga dari sebagian besar orang-orang Indonesia yang memiliki kesadaran politik dalam berbagai organisasi. Begitu pengadilan itu selesai golongan non-kooperator sekuler kembali aktif dalam politik dan langsung berusaha menempati kembali kedudukan dominan sebagaimana yang pernah mereka pegang pada tahun 1929. Sedangkan partai-partai non kooperatif itu dari kehidupan politik sebelum mereka bisa menguasai arus utama dalam gerakan nasionalis.

Politik De Graeff tahun 1930 dan 1931 adalah mencoba untuk membujuk golongan kooperator – kaum nasionalis moderat atau evolusuioner – agar tidak terpesona oleh, dan meninggalkan dukungan yang acapkali mereka berikan secara diam-diam, kepada PNI. Sebagian bagian dari strategi ini pada awal tahun 1981 De Graeff menawarkan kepada Soetomo kursi dalam Volksraad untuk kedua kalinya. Soetomo mula-mula tergoda menerima tawaran itu, seperti yang pernah dilakukannya pada tahun 1927 tetapi akhirnya tidak menerimanya melihat keyakinan permimpin-prmimpin PNI dan perasaan anti Belanda yang sudah tumbuh di kalangan kaum nasionalis. Menerima kursi Volksraad berarti membiarkan diri terkena tuduhan menjual diri kepada pemerintah di saat pemerintah sedang menyerang sebagian dari kelompok pergerakan. Walaupun ada kemunduran ini, politik De Graeff sampai ia meninggalkan Indonesia pada tahun 1931 adalah berusaha meyakinkan pimpinan nasionalis bahwa tindakan yang paling realistis yang terbuka bagi mereka adalah menerima kursi dalam Volksraad dan membatasi kegiatan-kegiatan mereka pada mengenai sosial dan ekonomi masyarakat mereka (John Ingleson, 1983 : 136 – 142).

Meskipun rakyat memberikan kehormatan yang tinggi kepadanya sebagai seorang pemimpin nasionalis, ia menunggu enam tahun sebelum mengubah Kelompok Studi Indonesia menjadi sebuah partai politik. Partai Bangsa Indonesia, pada tanggal 16 Oktober 1930. Ini dilakukan hanya setelah lama didesak oleh anggota-anggotanya. Dengan demikian, sebagaimana kita lihat, Soetomo melaksanakan gagasan politiknya sangat hati-

hati dalam hubungan dengan pengembangan gerakan nasionalis di Indonesia. Ini cukup menarik untuk dicatat jika kita perhatikan bahwa Soetomo telah lama sangat aktif bekerja bagi kepentingan umum dalam masalah-masalah sosial, kebudayaan dan ekonomi selama lebih dari 20 tahun. Lagipula, ketika pada akhirnya ia benar-benar melakukan suatu kegiatan politik, ia juga memilih garis "ko-operasi" ketimbang "non-kooperasi" yang dianut oleh mayoritas pemimpin nasionalis yang aktif mulai tahun 1920 sampai seterusnya. Kenyataan bahwa ia membuat tindakan politiknya dengan bertahap dalam hidupnya yang aktif dapat juga menunjukkan kepada kita bahwa pada hakikatnya ia tidak cenderung untuk berpolitik atau bahwa ia menunggu panggilan masyarakatnya untuk membuat dirinya siap dan matang memasuki gelanggang politik. Sebenarnya itulah alasannya mendirikan Kelompok Studi Indonesia karena dengan kelompok studi itu ia berharap dapat memberi bimbingan tentang masalah-masalah politik dan persoalan-persoalan yang sedang terjadi kepada pemuda Indonesia untuk meningkatkan kesadaran nasional mereka.

Di sinilah tampak berbedanya dari Tjipto dan Suwardi. Kedua pemimpin ini sejak permulaan kegiatan-kegiatan mereka percaya bahwa keadaan orang-orang Indonesia yang bertindak hanya dapat diubah melalui sarana politik. Walaupun Suwardi dalam hal ini, kemudian mengalihkan kegiatan-kegiatan dari politik ke masalah-masalah kebudayaan. Tetapi meskipun demikian, baik Soewardi maupun Tjipto (yang memutuskan tetap berpolitik), keduanya secara sadar melaksanakan pendiriannya terhadap masyarakat yang mereka pimpin. Keputusan-keputusan yang dibuat berdasarkan penilaian dan pemikiran mereka sendiri mengenai keadaan waktu itu. Tidak demikian halnya dengan Soetomo yang menunggu lebih 20 tahun untuk melihat ke jurusan mana masyarakat itu harus diarahkan sebelum ia memutuskan untuk berjuang menurut garis politik. Apabila suatu keadaan tidak terelakan lagi, ketika rakyat sendiri sudah ingin memperjuangkan kemerdekaannya melalui sarana politik, barulah ia memutuskan konsep-konsep dan tindakan-tindakannya untuk dilaksanakan menurut kegiatan berpolitik.

Mari kita lihat di sini, meskipun Soetomo menunggu cukup lama untuk memprakarsai sesuatu, sekali hal itu terjadi, ia melaksanakannya dengan seluruh tenaga dan pikirannya. Sementara itu, Tjipto karena kegiatan-kegiatan politiknya, telah disingkirkan oleh Belanda dan telah lumpuh dalam arena politik. Maka Soetomolah, yang dalam tahun tiga puluhan, berada di pusat gerakan-gerakan politik dan yang sebenarnya menjadi salah seorang pemimpin yang paling berpengaruh di tengah-tengah golongan umum priyayi Jawa, suatu kedudukan yang tidak pernah Tjipto pegang.

Sasaran akhir karirnya, seperti diakuinya sendiri, adalah penggabungan partai politiknya Partai Bangsa Indonesia (PBI) dan persatuannya yang lama Budi Utomo ke dalam satu barisan politik Parindra (Partai Indonesia Raya) pada tahun 1935. Dalam Parindralah golongan cerdik-cendikiawan priyayi yang diwakili dalam Partai Bangsa Indonesia dan

golongan birokratis konservatif priyayi yang diwakili dalam Budi Utomo dapat digabungkan dengan serasi ke dalam satu barusan dan mampu bekerja sama secara politik.

Tetapi pada tahun 1935, tidak seperti dalam tahun 1908, ketika Budi Utomo dikuasai oleh priyayi golongan konservatif, Parindra secara pasti dikuasai oleh priyayi golongan muda intelek. Kepada golongan muda inilah, paling banyak pandangan-pandangan dan tulisan-tulisannya ditujukan Dalam banyak tulisan dan pidato-pidatonya ia mengungkapkan harapan dan keyakinannya bahwa golongan muda yang berpendidikan inilah yang akan menyediakan pimpinan dalam pembangunan masyarakat dan dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Hanya golongan berpendidikan inilah yang cocok menjadi pemimpin atau penuntun bagi masyarakat selebihnya, karena golongan inilah yang lebih memenuhi syarat.

Dengan demikian kita melihat ada jarak 27 tahun dari Budi Utomo sampai Parindra. Ini memakan waktu lebih seperempat abad untuk meredakan perlombaan perebutan keunggulan sosial antara priyayi birokratis dan priyayi professional intelek. Dan memakan waktu yang sama mempersiapkan golongan priyayi itu memasuki tindakan politik sebagai suatu golongan yang bersatu padu. Lagi pula, meskipun waktu 27 tahun itu sudah lalu, pandangan dan persepsi golongan priyayi dalam pendekatan mereka untuk menyediakan pimpinan bagi masyarakat pada dasarnya tidak berubah. Tahun 1935, seperti tahun 1908, golongan priyayi itu menganggap adalah hak mereka memberikan penerangan dan memimpin masyarakat selebihnya serta membawa penbangunan ke negara ini secara bertahap, secara berangsur dari golongan priyayi sampai kepada masyarakat selebihnya.

Satu-satunya perubahan yang nampak jelas dan telah berkembang dari persatuan tahun 1908 itu adalah bahwa pada waktu itu golongan priyayi setuju berjuang dalam garis-garis politik. Dengan demikian kegiatan mereka telah berubah, tetapi konsep-konsep dan keyakinan-keyakinan mereka tetap sama. Mereka dibatasi oleh kepriyayiannya dahulu dan sekarang. Karena itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa jika Budi Utomo didirikan ketika ketegangan dirasakan dengan kuat antara kelompok-kelompok priyayi progresif dan konservatif, antara yang birokratis dan yang professional, maka perjuangan mereka untuk pimpinan dalam masyarakat Jawa telah dapat diubah menjadi suatu hubungan seimbang yang serasi dengan berdirinya Parindra di mana masing-masing golongan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan dan bukan untuk bertentangan (Savitri Prastiti Scherer, 1985 : 221 – 223).

Mengenai berdirinya Parindra, JC Van Leur mempunyai pendapat yang berbeda.. JC Van Leur memandang partai baru Parindra tidak akan lama, karena menurut pendapatnya ideologi di antara Budi Utomo dengan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) terlalu besar. Budi Utomo merupakan partai priyayi Jawa pegawai negeri, sejak pertama bersifat moderat dan

kooperatif, yang belakangan menjadi agak radikal karena pengaruh kelompok nasionalis baru non-kooperator. Bagi Van Leur partai ini pada dasarnya tetap merupakan organisasi priyayi. Menurutnya prinsip-prinsip PBI lebih demokratis, menuju aksi massa dan gotong royong menolong diri sendiri di antara kaum proletar kampung dan intelektual masyarakat urban. Tetapi aspirasi PBI ini diarahkan pada kelompok untuk menjadi organisasi otentik kaum abangan Jawa. Dalam komunitas kaum abangan kelompok ini dipimpin oleh tokoh lokal atau regional yang secara lokal ataupun wilayah tidak menggunakan bentuk basis organisasi baru. Merurut Van Leur mereka sangat puas dengan *status quo*. Dengan demikian maka demokrasi radikal PBI bertabrakan dengan kepercayaan birokratis patrimonial Budi Utomo. Persatuan Bangsa Indonesia dan Budi Utomo menemukan daya tarik pedalaman seperti sebelumnya. Arah tersebut melemah karena tindakan melumpuhkan dari pejabat setempat, sementara fusi dianggap merupakan sebagai menciptakan "persatuan palsu."

Jacques de Kadt membantah pernyataan Van Leur tersebut, dan membuktikan hal itu sebagai prediksi kelabu yang keliru. Menurut pengamatannya, Soetomo segera dapat mempersatukan bagian terbesar kaum nasionalis moderat ke dalam Parindra. Sementara itu pertumbuhan partai baru itu terbantu juga oleh kegiatannya dalam bidang sosio-ekonomi, pendidikan, dan politik. Bekerja sama dengan sekolah-sekolah Taman Siswa, mereka juga mendirikan koperasi gotong royong, perserikatan tani, insitusi perbankan, dan gerakan perempuan Parindra. Semua ini membuat Parindra berekspansi. Selanjutnya yang memberikan pengaruh besar ialah kegiatannya di Volksraad, di situ Mohammad Husni Thmarin segera menjadi tokoh Parindra yang menonjol dan penting. Kapasitas yang begitu luar biasa melampui anggota lain di Volksraad, sehingga dengan mudah ia mendominasi perdebatan (Bob Hering, 2003 : 257 – 258).

Inti dari Parindra paling sedikit pada massa awal, adalah aliansi antara pengikut Soetomo di Surabaya dan politikus keraton di Solo. Parindra secara resmi berkedudukan di Surabaya yang juga tempat pengurus hariannya. Tetapi Solo yang biasanya masih dianggap orang Jawa sebagai pusat politik yang terpenting di Jawa berperan sebagai "pusat pendamping". Alinasi antara Surakarta dan Surabaya ini mengingatkan kita kepada masa awal Sarekat Islam, dan seperti halnya dengan aliansi yang lebih awal ini, ternyata menjadi tegang beberapa waktu sesudahnya. Pada kongres peleburan tersebut, bulan Desember 1935, tujuh dari tiga puluh anggota yang dipilih sebagai pengurus pusat berasal dari Solo. Tetapi pada kongres breguler yang pertama yang diadakan dalam bulan Mei 1937 Woerjaningrat adalah satu-satunya yang dipertahankan dalam pengurus pusat baru yang terdiri dari 11 orang. Pada waktu Soetomo meninggal dalam bulan Mei 1938 ia diganti oleh Woerjaningrat sebagai ketua, tetapi pengurus harian tetap berada di Surabaya di bawah R Soedirman. Pada Kongres Parindra yang kedua diselenggarakan dalam bulan Desember 1938 Woerjaningrat diupilih kembali sebagai ketua dan seorang anggota lain dari Parindra cabang Solo, M. Soetedjo, diangkat dalam pengurus pusat. Sekarang Parindra secara formal berkedudukan di

Solo, tetapi lima dari sebelas anggota pusat berasal dari Surabaya dan pengurus hariannya menetap di Surabaya di bawah R Soedirman, wakil ketua yang baru.

Dalam bulan Juni 1941, Parindra menyelenggarakan kongresnya yang ketiga yang diwarnai oleh suasana pertentangan. Banyak pendapat yang menyatakan agar supaya ditempuh politik non-kooperasi (yaitu pengunduran diri dari Volskraad), akan tetapi hal ini tak disetujui. Sebuah pengurus pusat yang baru dipilih yang terdiri dari 15 orang yang tetap dikuasai oleh orang Surabaya dan yang mendapat kuasa penuh. Di pihak beberapa anggota ada rasa ketidakpuasan yang besarterhadap keputusan yang diambil pada kongres tersebut dan beberapa bulan kemudian – dalam bulan September 1941 – sejumlah anggota terkemuka keluardari partai . Diantaranya terdapat Mr Singgih, RMH Pringgowinoto, dan RN Soetamsi Prodjohoesoedo di Solo, Mr Soenarjo di Yogya, dan Mr Mohammad Sjah di Batavia. Tindakan keluar ini rupanya tidak hanya disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap partai politik tetapi juga karena permusuhan kedaerahan .

Mula-mula suatua peran ideologis yang penting diberi kepada elite Solo tatkala partai baru ini berusaha mempersatukan semua lapisan masyarakat bumiputra di bawah bimbingannya, mulai dari kaum petani pada tingkat dasar sampai kaum bangsawan pada tingkat puncaknya. Salah satu sumber inspirasi yang utama adalah Jepang yang menjunjung tinggi Kaisarnya, tempat sekelompok samurai – kelas prajurit penguasa tradisional – telah merebut kekuasaan pada tahun 1868 dan membawa negerinya ke arah modernisasi yang pesat dengan status sebagai kekuatan dunia. Pada beberapa kesempatan Soetomo sendiri datang ke Solo untuk berpidato di hadapan kaum bangsawan dan mengajak mereka dalam kedudukannya sebagai ksatria (prajurit, aristokrasi) Indonesia untuk berusaha menandingi samurai merupakan "obor" bagi bangsa Jepang. Kata-kata ini sudah tentu tidak diperhitungkan untuk menentramkan kecemasan Belanda, yang sepanjang dasawarsa 1930-an, makin menjadi gelisah karena rencana-rencana Jepang terhadap kepulauan Hindia Belanda khususnya mengkhawatirkan pengaruh Jepang terhadap Parindra, terutama terhadap permimpin-pemimpinnya di Surabaya. Tetapi mereka juga mengkhawatirkan pengaruh Jepang terhadap aristokrasi Solo. Terlebih dengan adanya kerjasama perdagangan Jepang dengan kraton Solo. (George D Larson, 1990 : 278 – 280)

Ada indikasi lain bahwa hubungan antara orang Jepang dan priyayi Solo jauh lebih luas daripada hanya persoalan keuangan saja. Pada bulan Juni 1939 polisi secara diam-diam nememukan sejumlah dokumen di rumah seorang wartawan Jepang di Batavia. Termasuk diantaranya adalah sebuah laporan oleh seseorang Jepang yang rupanya tidak banyak mengetahui tentang pergerakan kebangsaan di tanah Hindia. Tetapi yang menarik perhatian adalah disebutkan suatu " konprensi rahasia dari para pemimpin " yang misterius tatkala Pangeran Soerjohamidjojo disebut sebagai orang yang mereka lihat sebagai "Raja Indonesia" yang akan datang. Tidak lama sesudahnya, dalam bulan Juli 1939, untuk

memenuhi undangan Jepang. Narpowandowo mensponsori delegasi ke sebuah kapal penunpang Jepang, Nichiran Maru, yang sedang berlabuh di Semarang. Delegasi ini yang berada selama dua jam di kapal, terdiri dari sejumlah pegawai rendahan kraton dan juga beberapa pegawai bumiputra pensiunan, dan dikepalai oleh seseorang yang bernama RMN Wiroatmodjo yang bekerja serbagai wartawan, pegawai kraton tingkat rendah (mantri) dan komisaris dari Narpowandono. Dan pada pertengahan Februari 1941, seorang Jepang setempat yang tidak waspada telah mengatakan kepada seorang mata-mata (pada pihak Belanda) bahwa jika waktu tepatnya sudah tiba maka Jepang bisa mengandalkan beberapa bangsawan kranton tertentu (termasuk pula seorang saudara dari Pakubuwono XI), dan juga bangsawan istana Mangkunegaraan. Pendeknya, kencan antara Jepang dan priyayi beberapa di antaranya adalah politikus terkemuka, memberi kepada Belanda lebih banyak alasan untuk tetap waspada terhadap pergerakan kebangsaan di Solo.

Selain dengan Jepang, partai Parindra juga menimba dari sumber-sumber yang lebih tradisional untuk insipirasi ideologinya - sesuatu yang menyentuh kegemaran orang Indonesia akan simbolisme ganda. Umpanya, partai ini, sering disebut sebagai "Par-indra" – partai dari Indra. Di dalam Mahabharata Indra muncul sebagai Raja dari Dewa-Dewa. Barangkali mula-mula ia seorang dewa perang bangsa Arya yang menyerbu ke India pada zaman prasejarah. Di dalam Rig-Veda, karya Veda yang tertua, ia adalah dewa angkasa yang seringkali dihubungkan dengan petir dan menggunakan senjata yang disebut vajra (halilintar). Dalam kedudukan ini ia memusnahkan jim kemarau dan kelam dan menandai kedatangan hujan yang dilepaskannya dari awan. Romila Thapar menambahkan: "Indra adalah superman bangsa Arya, dewa kekuatan, unggul di pertempuran, selalu siap siaga untuk menghantam naga dan setan, dan menghancurkan kota. Ia adalah dewa halilintar, pencipta hujan, dan jaya atas segala kekuatan yang tidak dapat ditundukkan oleh orang Arya." Di Jawa, Indra juga merupakan sinonim dari kraton. Dan sangat menarik adalah bahwa Mr Singgih pada suatu saat ketika ia berterus terang, melukiskan tujuan kahir dari Parindra sebagai pembentukan sebuah " Kraton Indonesia."

Mulai dari masa awal pembentukan Parindra, Belanda sangat cemas karena tokoh-tokoh kraton yang berpengaruh memberi dukungan terang-terangan terhadap organisasi yang secara implisit berjuang untuk kemerdekaan tanah Hindia di kemudian hari. Kecemasan ini mulai pada kongres peleburan dalam bulan Desember 1935 tatkala kegembiraan kraton diperlihatkan secara mencolok. Yang hadir pada kongres itu bukan hanya salah seorang pangeran senior yang bertindak sebagai wakil resmi dari Susuhunan, tetapi juga tiga putra Raja yang paling terkenal – Pangeran Hadiwidjojo, Koesoemojoedo, dan Soejohamidjojo. Dan hari kedua kongres para utusan semuanya diundang untuk mengadakan kunjungan khusus ke kraton, tempat pasukan tentara pengawal Susuhunan dikerahkan untuk menghormati mereka. Pada akhir bulan Januari 1936 kecemasan ditambah lagi ketika diterima berita bahwa Koesoemojoedo dan Soejohamidjojo keduanya bergabung dengan

cabang Solo dari Parindra dan bahwa yang terakhir juga diangkat dalam komite politik. Pada bulan pertama tahun 1936 Belanda juga digelisahkan oleh desas-desus yang bertahan bahwa Narpowandono dan PKS, yang masih beranggotakan 22.000 orang pada akhir tahun 1935, akan bergabung dengan cabang Solo secara keseluruhannya, jadi memberi kepada Parindra pengaruh besar di pedesaan. Desas-desus ini barangkali dumulai karena pidato pada kira-kira bulan Januari oleh ketua cabang Solo, Dr Soeratman Erwin, yang mengumumkan bahwa cabang Solo menempati kedudukan yang khusus karena kehadiran Narpowandono dan PKS di Solo. Ia menyuarakan harapan bahwadi kemudian hari kedua organisasinya akan mengkonsolidasikan dirinya dengan Parindra, dan dalam hal demikian maka cabang Solo akan jauh lebih unggul daripada semua cabang lainnya. Desas-desus ini juga didukung oleh kenyataan bahwa dua pemimpin tertinggi dari PKS, Mr Singgih dan Soetopo Wonobojo, telah bergabung dengan Parindra Sebagaimana akan ternyata baik Narpowandono maupun PKS tidak pernah meleburkan diri dengan Parindra, namun mereka memang berperan sebagai sekutu sepanjang sisa zaman kolonial – yang sangat menggelisahkan bagi Belanda dan istana Mangkunegaraan.

Hanyalah Koesoemojoedo dan Soerjohamidjojo di antara para pengeran yang berani bergabung dengan Parindra. Akan tetapi ada seorang keturunan penting dari keluarga raja yang juga menggabungkan diri – dan dengan konsekuensi yang merugikan dalam hubungan dengan keputusan pergantian tahta di Kasunanan. Putra sulung dari Pangeran Koesoemojodo, RMH Mr Kartodipoero (kemudian bernama BPH Mr Sumodiningrat), lulus dari Universitas Leiden sebagai sarjana hukum pada awal 1935, dan tidak lama kemudian kembali ke Surakarta tempat ia menjadi bupati Anom dalam bagian kehakiman dan kepatihan dan dan segera terjun dalam kehidupan politik lokal. Ia memegang peran aktif dalam Narpowandono, akhirnya menjadi ketuanya, dan juga menjadi penasihat hukum bagi PKS. Ia bergabung dengan Parindra dan menjadi wakil ketua dari cabang Solo pada bulan Agustus 1939. Selain itu ia menjadi ketua redaksi (bersama Soetopo Wonobpjo dan Soetedjo) dari Sara Moerti (Panah Wisnu), jurnal pengganti dari Timboel yang terbit untuk pertama kalinya pada bulan Juli 1936. Kritiknya yang pedas dalam majalah ini (setahun kemudian diganti nama sebagai Bangoen) membangkitkan amarah Belanda, dan Gubernur Orie pernah memanggilnya untuk diberi peringatan keras selama tiga jam. Bahwa seorang penghasut demikian suatu hari kelak akan menjadi Susuhunan bukanlah prospek yang menggembirkan bagi Oerie dan pegawai Belanda yang berpengaruh lainnya, dan mereka berusaha sukuat mungkin untuk mencegah agar hal ini tidak pernah akan terjadi. (George D Larson, 1990 : 286 – 288)

Di samping Parindra, ada Gerindo yang lebih radikal, di bawah pimpinan Amir Syarifuddin, yang bertujuan untuk mencapai revolsi sosial dan nasional. Gerindo pada prinsipnya secara lebih konsisten bersifat anti-kolonial dibandingkan Parindra, yang sampai batas-batas tetentu dipersiapkan untuk secara loyal bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Sebagai gerakan nasionalisme borjuis, kata sarjana marxis WI Wertheim,

Parindra kurang antagonistik terhadap Jepang. Tujuan nasionalis borjuis terutama untuk menggantikan kelompok penguasa lama dalam bidang politik dan ekonomi. Pendudukan sementara Jepang dapat sedikit membantu tercapainya tujuan ini, sementara gerakan yang kedua dapat diharapkan memberikan dukungan dalam upaya mempertahankan struktur sosial semi feudal, yang menurut pandangan kelas atas Indonesia akan memberi manfaat dalam mengendalikan rakyat jika mereka sudah mencapai kekuasaan itu. Demikianlah, dapat dicatat bahwa tidak lama sebelum Perang Dunia II, nasionalis saya kiri menunjukkan kesiapan yang lebih tinggi untuk bekerjasama dengan pemerintah kolonial dibandingkan dengan kelompok borjuis. Mereka tentu saja lebih takut terhadap fasisme Jepang dan Jerman dibandingkan terhadap rezim kolonial demokrasi Barat (WI Wertheim, 1999, 263)

Dalam tahun 1934 para penguasa kolonial bertindak terhadap organisasi-organisasi politik nasionalis di Indonesia. Gabungan dari depresi ekonomi dan tindakan penindasan pemerintah mempunyai akibat yang melumpuhkan kehidupan politik Indonesia suatu akibat yang berketerusan sepanjang tahun 1930-an. Pada umumnya penduduk Indonesia menerima segala kesusahan yang dibawa oleh tahun-tahun krisis itu dengan cara yang sangat pasrah. Tidak ada terjadi pemberontakan. Penasehat Belanda untuk Urusan-Urusan Bumiputra melaporkan dalam tahun 1935. "Di kalangan kaum tani, bertambahnya penderitaan menyebabkan mereka semakin pasrah". Hampir-hampir tak ada yang merasa sanggup terlibat dalam politik, apalagi tindakan keras pemerintah terhadap partai-partai Indonesia membuat kegiatan politik menjadi begitu berbahaya. Setelah 1934, kewaspadaan polisi yang lebih ketat dan pembatasan-pembatasan hukum terhadap hak untuk mengadakan persatuan dan berkumpul tidak memungkinkan partai-partai Indonesia untuk menarik pengikut dalam jumlah banyak. Sepanjang masa itu, politik adalah urusan mereka yang berpendidikan baik, golongan ningrat dan kalangan yang secara relatif berada. Partai politik yang terbesar, PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) hanya mempunyai kira-kira 12.000 orang anggota pada tahun 1940, dan sebagian besar partai lainnya mempunyai anggota jauh lebih sedikit. Banyak di antara mereka yang sebelum aktif di bidang politik beralih ke bidang sosial, ekonomi, atau pendidikan. Protes yang terbesar dan yang paling berhasil dari pihak Indonesia di tahun-tahun depresi hanyalah kampanye menentang keharusan adanya izin bagi sekolah-sekolah swasta, yang di tahun 1930-an lebih banyak memenuhi keperluan anak-anak Indonesia daripada sekolah-sekolah negara yang diberi subsidi.

Dalam masa dari tahun 1935 sampai 1942, partai-partai Indonesia menjalankan taktik-taktik parlementer yang moderat. Hanya organisasi-organisasi non-politik dan partai-partai yang betsedia bekerja sama dan setuju punya wakil dalam dewan-dewan perwakilan ciptaan Belanda yang terjamin mendapat sedikit kekebalan dari ganguan polisi. Dan satu-satunya forum yang secara relatif bebas untuk menyatakan pendapat politik adalah dewan perwakilan itu. Dengan demikian satu-satunya cara bagi gerakan nasionalis untuk mengusahakan perubahan ialah dengan jalan mempengaruhi Belanda secara langsung tidak

dengan mengatur dukungan massa.

Sebagian dari para pemimpin politik masa antara tahun 1935 dan 1942 sungguh-sungguh yakin bahwa akan dapat dicapai dengan cara-cara yang moderat. Mohammad Husni Thamrin, pemimpin golongan nasionalis dalam Volksraad, adalah seorang anggota parlemen yang ahli yang percaya dapat dilakukannya sesuatu yang berguna di dewan perwakilan itu. Sebagian besar anggota Parindra, pada dasarnya setuju dengan cara-cara non-politis yang moderat. Mereka terutama terdiri dari orang-orang Jawa ningrat yang bekerja di bidang kesejahteraan guna memperbaiki kedudukan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia biasa. Yang menjembatani kegiatan-kegiatan sosial dan politik partai itu adalah ketuanya yang termashur Soetomo. Selama ia memimpin Parindra, tekadnya tidak pernah beranjak, bahkan semakin kuat, mulai pembentukan partai itu pada tahun 1935 sampai ia meninggal dalam tahun 1938. Soetomo tampaknya tidak begitu tertarik terhadap kegiatan politik yang sifatnya langsung. Ia merasa lebih berkepentingan untuk mendorong adanya kesatuan organisasi di kalangan kaum nasionalis dan melibatkan golongan elit dalam pembangunan negara (Susan Abeyasekere, 1986 : 61 – 67)

Haluan kooperatif dilakukan oleh bermacam kelompok nasionalis pada tahun 1930-an dan permulaan 1940-an tidak dapat dipandang secara sederhana dengan mengatakan bahwa faktor yang menentukan hanyalah keputusan apakah akan atau tidak menginginkan kursi di dewan perwakilan yang didirikan Belanda. Susan Abeyesekere memperkirakan dengan tepat bahwa area nasionalisme kooperatif Indonesia tidak akan membiarkan dirinya disingkirkan secara langsung. Ideologi ini juga sangat berhubungan dengan sejumlah faktor lain. Pertimbangan pertama ialah tiadanya kekuatan tantangan menghadapi superioritas pendapat hampir seluruh kaum elite sana di Hindia Belanda. Lebih jauh lagi apakah peran perantara yang dimainkan kaum nasionalis di dewan-dewan dalam menandingi posisi pihak sana cukup berguna. Secara internasional terdapat indikasinya seperti bangkitnya fasisme Asia dan Eropa dan sikap sinis terhadap demokrasi yang pada saat itu bahkan membuat teka-teki di negeri Belanda dan masyarakat kolonial (Bob Hering 2003 : 262)

Segala harapan akan kemajuan politik pada waktu itu dilancarkan oleh bayang-bayang fasisme yang semakin meluas. Pada tahun 1931 Jepang menyerbu Manchuria, dua tahun kemudian Hilter menjadi Kanselir Jerman ; pada tahun 1936 berkobar Perang Saudara Spanyol dan pada bulan Juli 1937 meletus perang Cina – Jepang; pada bulan Maret tahun berikutnya Hitler mencaplok Austria dan pada bulan September Konferensi Munich membagi-bagi Czechoslovakia; dan pada bulan Maret 1939 Hitler meyerbu sisa-sisa wilayah negara ini. Persepsi bangsa Belanda dan Indonesia terpolarisasi ketika perorangan semakin mendekat di Eropa dan Pasifik. Bangsa Indonesia menduga bahwa kesedian mereka bekerja sama melawan fasisme dan akan terkurasnya kekuatan Belanda sebagai akibat perang seharusnya mengilhami Belanda untuk memberi semacam otonomi kepada Indonesia.

Belanda beranggapan bahwa saat itu bukanlah waktunya untuk melakukan percobaan-percobaan politik baru yang hanya akan meningkatkan ketidakstabilan dan ketidaktentuan, dan yang, bagaimanapun juga, pada saat itu ditentang keras oleh sebagian besar rakyat Belanda. Rapat-rapat dibubarkan dan pemimpin-pemimpin lokal ditangkap, Parindra, yang bersimpati kepada Jepang, merupakan sasaran khusus. (MC Ricklefs, 1991 : 281)

Parindra dan Petisi Soetardjo

Dalam kerangka politik kooperatif arena politik memang sudah tertutup terhadap massa akasi, namun ruang gerak masih leluasa untuk membangkitan kesadaran nasional serta gerakan-gerakan dan aksi-aksi yang dapat mengkonlidasi solidaritas dalam dan antar partai. Salah satu titik pengerahan gerakan itu ialah apa yang kemudian dikenal sebagai Petisi Soetardjo.

Pada tanggal 15 Juli 1936, Soetardjo Kartohadikoesoemo selaku wakil PPBB dalam Volksraad mengajukan usul petisi kepada pemerintah Hindia Belanda agar diselenggarakan suatu Konperensi Kerajaan Belanda, di mana dibahas status politik Hindia Belanda dalam sepuluh tahun mendatang, yaitu status otonomi di dalam batasan artikel 1 dari UUD Negeri Belanda. Doterangkan bahwa suatu kerja sama antara Belanda dan Indonesia sangat dibutuhkan agar tidak merugikan kedua belah pihak. Pelbagai pengalaman dalam tahun-tahun sebelumnya dalam tahun-tahun sebelumnya banyak menimbulkan kekecewaan, kegelisahan, dan sikap acuh tak acuh, yang kesemuanya itu tidak mendorong semangat rakyat untuk turut serta membangun negeri. Semangat itu dapat dihidupkan dengan suatu penyusunan rencana yang matang untuk menentukan hubungan natara Belanda dan Hindia Belanda dalam bidang ekonomi, sosial, kultural, dan politik sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.

Petisi itu juga ditandatangani I.J. Kasimo, Ratulangi, Datoek Toemenggoeng, dan Kwo Kwat Tiong. Rumusan petisi itu bernada sangat moderat, yang sungguh mencerminkan tidak hanya jiwa kooperatif tetapi juga sikap hati-hati dengan memakai langkah yang legal, lagi pula tidak keluar dari kerangka konstitusional yang berlaku. Jelaslah bahwa petisi itu tidak revolusioner sifatnya. Kalaupun hasilnya belum kongkret namun konperensi itu sangat bermanfaat untuk penjajagan pendirian pihak masing-masing. Sudah barang tentu petisi itu banyak menimbulkan reaksi baik di kalangan resmi maupun yang tidak resmi, yang keseluruhannya menunjukkan keanekaragaman corak partai dan pendirian politik tertentu. (Sartono Kartodirdjo , 1990 “ 181 – 182)

Petisi Soetardjo kemudian dibicarakan dalam sidang sidang khusus Volksraad yang dimulai tanggal 17 September 1936. Kemudian berlanjut dengan dibicarakan Petisi Soetardjo di dalam Staten Generaal pada bulan Februari 1937. Tetapi keputusan apakah petisi akan diterima atau ditolak masih menunggu saran-saran dari Gubernur Jenderal di Indonesia. Dan pada bulan Mei 1937 di Jakarta dibentuklah Komite Petisi Soetardjo (CPS) yang akan memperjuangkan petisi, pada persidangan Volskraad bulan Juli 1937 Soetardjo kembali memajukan usul rencana apa yang sebaiknya dijalankan oleh pemerintah Belanda dalam usaha menuju Indoneisa berdiri sendiri. Rencana tersebut dibagi dalam dua tahap, masing-masing untuk lima tahun. Atas usul tersebut wakil pemerintah Hindia Belanda dalam sidang Volksraad menjawab bahwa pemerintah juga mempiunyai perhatian ke arah perbaikan pemerintahan di Indonesia, tetapi karena usul itu amat luas sekali maka penyelesaiannya berada di tangan pemerintah di negeri Belanda dan Staten General.

Sementara itu di negeri Belanda, petisi juga dipropagandakan, antara lain oleh Perhimpunan Indonesia dengan menerbitkan brosur-brosur mengenai petisi. Atas sokongan Perhimpunan Indonesia, majalah Toejoen Rakyat (Jakarta) menuduh Perhimpunan Indonesia telah menyalahi anggaran dasarnya. Atas tuduhan ini, Perhimpunan Indonesia berpendapat bahwa untuk menghadapi ancaman fasisme terhadap negeri Belanda dan Indonesia maka adalah dipandang perlu untuk memperbaiki hubungan yang telah ada di antara kedua belah pihak. Antara lain ialah agar pemerrintah Belanda memenuhi maksud yang terkandung dalam petisi yaitu mengadakan suatu konferensi antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda. Juga Roekoen Pelajar Indonesia memperkenalkan petisi tersebut ke khalayak ramai di sana.

Di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1937 dibentuk Central Comite Petisi Soetardjo (CCPS) dan di daerah-daerah dibentuk cabang Comite Petisi Soetardjo. Dalam CCPS tidak terdapat anggota-anggota Parindra dan orang Indono-=Belanda yang menyokong Petisi Soetardjo. Gerindo pada tanggal 5 Oktober 1937 menyatakan bahwa Gerindo hanya menyokong diadakannya konferensi dari wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda, tetapi tidak menyetujui isi petisi. Gerindo berkeyakinan bahwa CCPS akan lebih berhasil apabila terdiri dari wakil-wakil resmi perkumpulan-perkumpulan dan partai-partai di Indonesia.

PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) menuduh gerakan yang sedang dijalankan oleh CCPS sebagai suatu gerakan yang naïf, yang menuntut perubahan politik tanpa mempunyai sandaran dan sendi organisasi rakyat yang kuat dan sentosa, PSII melarang dengan keras semua anggota dan oreganisasi massanya untuk mencampuri gerakan CCPS. Parindra agak berbeda sikapnya dengan PSII. Keputusan rapat Parindra di Solo tanggal 12 Desembert 1937 berpendapat bahwa walaupun Parindra menolak prtisi, karena maksud petisi berlawanan dengan tujuan yang dicita-citakan oleh partai-partai politik bangsa Indonesia terutama yang dicita-citakan Parindra, tetapi maskud untuk mengadakan konperensi antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda, disokong oleh Parindra Sebelum ini yaitu pada

bulan November 1936, Parindra menyeruhkan supaya kaum pergerakan menyokong petisi. Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru) berpendapat karena tujuan PNI-Baru adalah Indonesia Merdeka jadi bukan berdiri sendiri dalam lingkungan kerajaan Belanda, maka PNI-Baru menolak dan melarang anggota-anggotanya membantu petisi dengan jalan apa pun.

Walaupun petisi tidak diseujui oleh empat partai, yang pada waktu itu cukup mempounyai pengaruh besar dalam pergerakan kebangsaan Indonesia, petisi juga disokong oleh banyak organisasi, seperti PBBB, Chung Hua Hui, Groep IEV, PEB, Penyadar, Pasoendan, PPKI, PAI , Perserikatan Indonesia, Sarekat Ambon dan Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia. Haji Agus Salim dan Mr Sartono juga mendukung Petisi Soetardjo tersebut. (Marwati Djoened Poesponegoro, 1990 : 224 – 227)

Selama 2 tahun sejak Petisi Soetardjo diterima baik oleh Volksraad pada tanggal 29 Septmber 1936, sampai jatuhnya putusan ratu pada tanggal 16 November 1938, menilik suara-suara yang didengar dari Negeri Belanda, baik dari kalangan Staten Gneraal maupun dari kalangan pemerintah, rakyat di Hindia Belanda memang sudah menduga, bahwa Petisi Soetardjo itu akan ditolak Ratu Belanda. (Setiadi Kartohadikusumo, 1990 : 135) Akhirnya dengan keputusan Kerajaan Belanda No 40 tanggal 16 November 1938, petisi yang diajukan atas nama Volksraad ditolah oleh Ratu Belanda. (Marwati Djoened Poesponegoro, 1990 : 229).

Dalam pada itu jawaban formal mencakup alasan-alasan sebagai berikut : (1) berdasarkan tingkat perkembangan politik di Indonesia petiusi sangat premature dalam hubungan itu; (2) dipersoalkan bagaimana kedudukan minoritas di dalam stuktur politik baru itu; (3) siapakah yang akan memegang kekuasaan nanti; (4) tuntutan otonomi dipandang sebagai hal yang tidak awajar alamiah, karena pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik belum memadai. Alasan terakhir merupakan bukti nyata bahwa pihak kolonial senantiasa menghendaki status quo, setiap perubahan dianggapnya sebagai ancaman sehingga petisi dianggap terlalu prematur. Perkembangan di bawah pimpinan Belandalah yang dianggap wajar alamiah.

Waktu mengajukan petisi itu juga dianggap tidak tepat oleh karena sedang direncanakan reformasi struktur politik administrative sebagai pel;aksanaan rencana Colijn, ialah terbentuknya “Negara-negara Pulau“, seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Konsep Colijn yang merupakan konsep antikecenderungan mauk tak mau merupakan antagonisme terhadap ide persatuan yang secara mati-matian diperjuangkan oleh kaum nasionalis. Heteroginitas dipakai sebagai prinsip legitimasi pembagian itu, namun secara terselubung tampak ;pula politik devide et impera. Kecuali prinsip “pecah belah” itu, ideologi politik kolonial senantiasa menganggap bahwa status otonomi atau kemerdekaan

adalah hal yang premature bagi bangsa Indonesia yang memerlukan perkembangan "alamiah " untuk mencapai kemasakan. Dengan demikian, penguasa kolonial hendak memberi dasar penglegitimasian kekuasaannya untuk menjajah di masa mendatang . Meskipun politik etis sudah bangkrut, namun paternalisme masih berpengaruh sekali. (Sartono Kartodirdjo , 1990 : 183 – 184)

Penolakan terhadap permintaan Petisi Soetardjo menyebabkan kaum nasionalis Indonesia sekali lagi bersatu di bawah bendera bersama. Begitulah, pemerintah mendapatkan persis kebalikan dari dari yang ingin mereka capai. Pada Mei 1939, Parindra, Gerindo, Partai Islam Indonesia, Persatuan Minahasa dan Pasundan bersatu membentuk Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Gabungan politik baru ini tidak mernuntut suatu Indonesia Merdeka. Ada alasan bagus untuk tidak menyebutkan kata 'merdeka", karena sampai 27 November 1940 – lebih dari enam bulan setelah perndudukan Belanda oleh pasukan Jerman dan hanya satu satu tahun sebelum bencana pemuncak – juru bicara pemerintah di Volksraad mengatakan " bahwa bila tuntutan akan suatu Parlemen Indonesia dengan kekuasaan parlementer penuh dipakai sebagai cara untuk mewujudkan konsep Indonesia merdeka, setiap kesepakatan dengan oposisi nasionalis akan jadi mustahil dan dalam hal itu . Pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang perlu." Sesaat sebelum pernyataan ini dikeluarkan, pemerintah kolonial telah membentuk suatu komisi " untuk orientasi (tentang pembahasan pemerintah atass pokok bahasan itu) dan untuk mengumpulkan bahan, yang akan diperlukan oleh pemerintah untuk merumuskan pandangannya, apabila saatnya telah tiba bagi pemerintah untuk berbuat demikian.

Pada bulan November 1940, pemerintah menyatakan diri sama sekali menentang suatu Indonesia Merdeka, kendati demikian ia mengakui bahwa orang Indonesia berhak atas pangsa yang makin lama makin besar dalam pemerintahan dan administrasi koloni, tapi bahwa pangsa yang lebih besar dari orang Indonesia tersebut tidak boleh mengurangi hak orang Belanda dan Eropa lain serta Asia Asing, yang pengaruhnya pada urusan publik harus " sesuai dengan keandalan sosial dan ekonomi merrka."

Kaum nasionalis Indonesia mermuskan lagi tuntutan mereka pada kongres Gabungan Politik Indonesia, yang diselenggarakan pada 31 Januari 1941. Tuntutan itu adalah (1) Penunjukan seorang Indonesia sebagai Letnan Gubernur Jenderal;(2) Penunjukan orang-orang Indonesia sebagai Asisten Direktur dari Departemen-Departemen Pemerintahan; (3) Penunjukan beberapa orang Indonesia untuk duduk di Dewan Hindia; (4) Penciptaan" Dewan Perwakilan Rakyat ", yang akan berfungsi sebagai " Parlemen Orang Banyak " sementara " Dewan Rakyat " akan berfungsi sebagai " Senat" ; dan (5) Hak pilih universal aktif dan pasif untuk laki-laki dan perempuan; pemilih buta huruf akan melaksanakan hak pilih mereka dengan mewakilkannya kepada para wakil pemilih.

Pemerintah Batavia hampir pasti tidak akan menerima usulan tersebut, tapi setidaknya itu satu langkah maju. Sesaat sebelum pecah perang di Eropa, seorang Indonesia anggota Volksraad, Mr Wiwoho, mengusulkan bahwa pemerintah Belanda harus mengambil langkah untu mengganti nama : Hindia Belanda“ dengan nama “Indonesia“ dan istilah “Inlander“ (penduduk bumiputra) harus digantikan dengan “orang Indonesia“. Pemerintah menganggap perubahan itu suatu inovasi yang agak berbahaya. Tapi pada 16 Juni 1941, pemerintah menyatakan bahwa ia bersedia menyiapkan suatu: ”konperensi orang-orang ternama, mewakili keempat bagian kerajaan Belanda untuk mempelajari masalah adaptasi struktur Kerajaan sesuai kebutuhan zaman pascaperang. Enam bulan setelah “ konsesi” terakgir itu, bencana besar terjadi di komunitas kolonial kuno Kepulauan Hindia Timur (Bernhard HM Velkke, 2008 : 444 – 446) .

Parindra dan Fasisme

Masalah fasisme di Indonesia tampaknya tidak begitu jelas bagi semua orang. Ada yang melihatnya dari sisi “fasis baik” dan “fasis jahat“ atau yang “pro-fasis Jepang “. Ada pula yang melihat fasisme Jepang, Italia, dan Jerman sama sekali tidak berguna bagi perjuangan menumbangkan kolonialisme. Partai-partai yang diisi oleh intelektual Barat radikal seperti PNI dan Partindo merupakan penyuara keras terhadap bahasa fasisme bagi demokrasi. Kemunculan fasisme ternyata mendorong para anggota partai ini untuk tidak menaruh harapan kepada sejarah masyarakat kapitalis Eropa yang selalu penuh krisis.

Seperti dicatat Ali Sastroamdjojo, di kalangan pergerakan terjadi perbedaan cara pandang dalam melihat fasisme Jepang. Bila fasisme Jerman dan Italia hidup subur di kalangan Indo-Eropa, maka fasisme Jepang ternyata mendapat tanggapan positif dari sebagaian kaum pergerakan. Hidupnya ramalan Jayabaya sering kali dianggap sebagai pengetahuan yang berhasil menyembunyikan watak militer pemerintah Jepang.

Bagi orang Jawa, kedatangan Jepang ke Indonesia sudah diramalkan dalam buku *Jangka Jayabaya*. Menurut tradisi Jawa, Jayabaya ialah seorang raja di Jawa yang memerintah di Kerajaan Daha dari 1051 – 1062. Selain sebagai raja, ia juga dianggap sebagai filsof dan pujangga. Ia meninggalkan sajak berisi ramalan tentang pula dan bangsa Jawa di kemudian hari. Salah satu ramalannya bahwa “ Kalau Pulau Jawa telah sekecil daum kelor, maka ia akan diperintah bangsa kulit putih. Kemudian akan datang dari Utara bangsa kulit kuning. Pemerintah kulit kuning ini tidak akan lebih dari umur jagung. Sesuidah itu Jawa akan merdeka, tetapi akan mengalami perang saudara. Sesudah perang saudara ini berakhir, barulah menyingsing zaman keemasan bagi Pulau Jawa.”

Gerindo memandang fasisme Jepang jauh lebih berbahaya bagi Hindia Belanda. Sementara Sjahrir sangat kecewa karena kaum pergerakan kurang perhatian terhadap bahaya fasisme" Kita di Timur …..mempunyai suatu supra nasionalisme fasisme Jepang" Di sisi lain, Soekarno dalam surat kabar *Fikiran Ra"jat* menulis tentang "bom" barang murah dari Jepang yang telah mengelabuhi rakyat tentang watak imperialisme Jepang. "Awaslah, awas sekarang barang Japan itu murah, sekarang barang-barang Japan itu seakan-akan meringankan nasibmu, tetapi nanti, kalau imperialisme Japan itu sudah menang, persaingannya dengan imperialisme Belanda, nanti kalau ia sudah mengagahi sendiri seluruh pasar di benua Timur itu "

Jepang berbahaya bagi Hindia Belanda karena militerismenya. Bagi pemilik modal Eropa sendiri Jepang pun mengancam kelangsungan ekonomi mereka. Pada Desember 1931 Jepang melakukan devaluasi nilai mata uang yen mereka. Tanah Hindia dibanjiri barang-barang Jepang yang sangat llaku karena lebih murah dan lebih baik dari barang pesaingnya. Lagi pula orang-orang Jepang mulai membuka toko di seluiruh pelosok Hindia dam memperkerjakan orang-orang bumiputera. Pada akhir 1932, Belanda cemas menyaksikan ekspnasi Jepang di segala bidang di Hindia Belanda. Pada Juni 1933, Dr H. Colijn, Menteri Urusan Tanah Jajahan, memerintahkan kepada Gubernur Jenderal de Jonge untuk melaksanakan sistem pelaporan intelijen yang sempurna, sistematis, dan sangat rahasia mengenai orang Jepang yang tinggal di Hindia Belanda. Belanda bukan hanya cemas terhadap penetrasi ekonomi Jepang, tetapi juga mewaspadai ancaman mata-mata mereka dan pengaruhnya terhadap pers bumiputra, pergerakan, dan raja-raja negeri jajahan.

Usaha-usaha Jepang mendekati kaum pergerakan demi propaganda mereka telah dilakukan melalui pendekatan terhadap penerbitan pergerakan. Pada 1933, pemimpin redaksi *Bintang Timoer* bersama beberapa jurnalis lain diundang seorang pengusaha pelayaran bernama Koichiro Ishikara ke Jepang. Di Jepang, mereka diterima dengan segala kebesaran agar merasa berhutang budi. Sebuah surat kabar lain di Jakarta diberi kontrak-kontrak iklan cukup besar dengan syarat memuar artikel-artikel yang isinya pro Jepang. Namun, pihak Jepang tampaknya berpikir bahwa memiliki penerbitan sendiri merupakan jalan yang lebih baik.

Kebutuhan terhadap informasi dari Hindia Belanda menjadi pemicu bagi penyebaran agen-agen Jepang. Kegiatan ini mulai dilakukan sejak 1930-an. Salah satu pihak yang sangat aktif dalam kegiatan mata-mata Jepang adalah Nanyo Warehousing Company. Salah seorang karyawannya di Batavia, Naojo Aratame, perwira Angkatan Laut, khusus ditugasi sebagai mata-mata. Ia ditempatkan sebagai pegawai di Konsulat Jenderal Jepang di Batavia Sesudah 1939 hampir semua karyawan perusahaan Jepang di Hindia Belanda dilibatkan dalam kegiatan mata-mata dalam hal pengumpulan dana militer, organisasi sabotase, percobaan menyuap orang sipil dan militer. Hotel dan tempat pelaburan dijadikan sebagai pusat pertukaran dan perputaran informasi. (Wilson, 2008 : 128 – 137)

Di samping itu, ada bukti perhatian berbagai orang Jepang terhadap kraton Solo, antara lain, kunjungan-kunjungannya ke istana Solo. Juga eksplorasi yang seharusnya tidak diperpanjang dan yang memakan biaya besar untuk suatu tambang tembaga di Wonogiri (Mangkunegaraan) oleh kelompok Ishihara dapat dilihat sebagai suatu upaya untuk mencviptakan sebuah wilayah pengaruh Jepang di daerah swatantra di Jawa jadi yang di mata Jepang merupakan bagian yang paling lemah daerah kewibawaan Belanda.

Usaha tambang tembaga ini khususnya menimbulkan banyak kecurigaan di kalangan Belanda. Dalam bulan April 1932 Pangeran Mangkunegoro telah memberi kepada Ishihara Mining Company hak eksplorasi di Wonogori Selatan, sautu daerah yang menurut kesimpulan dari sebuah eksplorasi lain sebelumnya tidak akan menghasilkan pertambangan temaga yang menguntungkan. Tentu saja Belanda sangat curiga terhadap usaha ini, khususnya terhadap kemungkinan adanya aspek-aspek politik. Lagi pula karena perusahaan tersebut merencanakan untuk mengirimkan bijinya melalui Teluk Pacitan yang terletak di dekatnya, maka ada kekhawatiran bahwa Jepang akan mengadakan secara diam-diam pengumpulan data topografi yang strataegis. Namun demikian dalam bulan April 1937 Maengkunegaraan memberikan kepada perusahan Ishihara ini konsesi pertambangan yang disetujui gubernemen dalam bulan Agustus 1938. Beberapa tahun kemudian, pada awal 1941, Belanda mulai gelisah terhadap perhatian yang nyata-nyata dari beberapa orang Jepang yang berdiam di Solo terhadap puri Mangkunegaraan.

Akan tetap[I Jepang lebih-lebih lagi menaruh perhatiannya terhadap keraton Susuhunan. Pada tanggal 1 Oktober 1935 sebuah kelompok yang terdiri dari pegawai tinggi Kementerian Luar Negeri Jepang di Tokyo, diketuai oleh Dutabesar K Debuchi, tiba di Surabaya dalam tangka suatu kunjungan delapan hari di pulau Jawa. Sebelum kedatangan mereka, Konsul Jenderal Jepang di Batavia telah memberitahukan kepada gubernemen bahwa Debuchi dan rombongannya menghendaki suatu audiensi dengan Gubernur jenderal dan juga, jika waktu mengizinkan, dengan Susuhunan. Mula-mula Susuhunan setuju untuk menerima orang Jepang tersebut di Solo pada tanggal 5 Oktober, tetapi pada hari kedatangan mereka di Jawa, ia memberitahukan kepada gubernemen bahwa kesehatannya agak terganggu dan tidak dapat menerima para tetamu seperti yang direncanakan. Ia bersedia menerima sehari sesudahnya – pada tanggal 6 – tetapi di Paras, tempat peristirahatannya di pegunungan, bukan di Solo. Penyakit Susuhunan mungkin merupakan suatu jenis varietas diplomatis. Gubernur K.J.A. Orie * Februari 1937 – Maret 1942 (melaporkan bahwa Pakubuwono X selalu menolak mengadakan hubungan apa pun dengan orang Jepang. Betapapun juga, Dutabesar Debuchi berkeberatan untuk mengadakan perjalanan ke pegunungan – yang tidak begitu jauh letaknya – dengan dalih kekurangan waktu. Tetapi pada tahun-tahun berikutnya ada banyak orang Jepang lainnya, baik pengunjung mapupun pemukim di Solo, yang mempunyai cukup waktu maupun hadiah untuk diberikan kepada kraton.

Sekitar bulan September 1936 di Surakarta ada 57 pria dewasa bangsa Jepang serta wanita dan anak-anaknya yang tidak ditentukan jumlahnya, kebanyakan di antaranya berdiam di ibukota sedangkan beberapa orang bermukim di Klaten, Boyolali, Sragen, Wonogiri dan Tawamangu. Baik di ibukota maupun di kota lainnya, orang Jepang ini sebagian besar adalah pemilik atau pekerja toko dari beberapa perusahaan kecil lainnya. Dalam sebuah laporan yang dibuat dalam bulan Februari 1940 terdaftar 27 toko dan perusahan kecil di seluruh Surakarta. Di pedesaan, di samping perusahaan tambang tembaga di Wonogiri, orang Jepang membiakan ulat sutra dan memiliki sebuah perkebunan kapas dan perkebunan karet. Mereka juga kemudian memperoleh dua perusahan perkebunan dan penggilingan gula Organisasi mereka yang utama, klub bisnis yang dinamakan " The Japanese Association " agaknya tidak aktif, tetapi menjalin hubungan dengan beberapa cendikiawan dan pembesar setempat. Anggota-anggota mereka seringkali muncul sebagai tamu, misalnya, di lapangan tennis milik Pangeran Soerjohamidjojo, anggota Parindra. Dalam bulan Juli 1939 Gubernur Orie beranggapan bahwa kepetingan Hadiwidjojo terhadap Jepang lebih berkaitan dengan masalah keuangan daripada politik, sebab ia berhutang kepada berbagai orang Jepang sejumlah yang diperkirakan f 70.000 sampai f 80.000. Betapa pun juga polisi meningkatkan pengawasan mereka terhadap orang Jepang setempat dan akhir 1940 dan awal 1941 mereka mengamati sejumlah kunjungan ke toko-toko Jepang lokal oleh toiko-toko terkemuka dari kedua istana.

Orang Jepang lokal yang paling rajin memelihara koneksi dengan kedua istana adalah pemilik toko Fujiyoko Store, seorang yang bernama Sawahe (Hirosada?) yang memberi hadiah kepada Susuhunan maupun Mangkunegoro. Dalam bulan Desember 1940 dilaporkan bahwa Pangeran Poerbonegori, pada saat itu Komandan pasukan pengawal kraton, adalah pengunjung yang sering di Toko Fujiyoko dan selalu diterima di kantor pribadi Sawabe. Dalam bulan Februari 1941 Sawabe menerima pula kunjungan dari Koesoemojoedo dan putranya yang sulung, kedua-keduanya anggota Pari8ndra, dan dalam bulan beri8kutnya ia menerima proyayi toinggi lainnya dari Kasunanan. Dalam bulan Maret 1941 ia juga menerima berbagai pegawai tinggi dari Mangkunegaraan termasuk regent patih, dan pada awa; bulan April Mangkunegoro, istrinya, putriinya, seorang putra dan orang-orang lainnya juga diterima di kantor pribadi Sawabe.

Dalam laporannya pada pertengahan April 1941 Orie menandaskan bahwa sejumlah besardari kontak yang diketahuinya antara orang Jepang dan aristokrasi Solo tidak disebabkan oleh peningkatan kunjungan tersebut, melainkan oleh karena usaha pengawasannya ditingkatkan. Ia juga tetap merasa bahwa sebab utama dari kunjungan tersebut adalah untuk membicarakan hutang mereka. Poerbonagoro, umpamanya, berhitang kepada Sawabe sejumlah f 700. Tetapi ada kemungkinan bahwa paling sedikit dalam hal beberapa kunjungan – misalnya, dari Mangkunegoro dan keluarganya – pokok pembicaraannya bukanlah uang . Juga tatkala putra suklung dari Koesoemojoedo berkunjung kepada Sawabe dalam bulan

Februari 1941, mereka berbicara selama 45 menit secara berbisik, yang tenru saja tidak diperlukan jika pembicaraannya hanya mengenai soal keuangan biasa. (George D Larson, 1990 : 280 – 284).

Tidak semua orang pergerakan nasionalis 1930-an sepakat memandang Jepang sebagai bahaya bagi Hindia Belanda dan demokrasi secara keseluruhan. Debat antara Soetomo dan Liem Koen Hian dapat dilihat sebagai dua sudut pandangan kaum pergerakan melihat Jepang. Ketika Soetomo baru pulang dari lawatannya ke Jepang. Ia membuat tulisan bersambung dalam *Soeara Oemoem*, yang dengan antusias memuji kemajuan ekonomi dan teknnologi Jepang. Liem Koen Hian seorang Tionghoa peranakan dan pendukung nasionalisme Indonesia mengeritik pandangan Soetomo itu di *Kebangoenan.* Bagi Liem, Soetomo tidak melukiskan Jepang sebagai negeri imperialis dan tidak menggambarkan susunan masyarakat dan ekonomi politik negeri sakura itu, susunan yang imperialistis, atau sekurang-kurangnya kapitalis yang sudah matang, yang menjadi sumber tingkah laku agresif Jepang di Asia. Soetomo kemudian berbalik menyerang Liem dengan mengatakan bahwa Liem berbicara sebagai seorang Tionghoa dan bukan sebagai bangsa Indonesia. Bagi Soetomo, konflik antara Cina dan Jepang merupakan suatu konflik antarnegara yang tidak ada sangkut paut dengan Indonesia. Ia pun menulis artikel yang beisi bantahan : "Janganlah kiranya tuan bicarakan perasaan-perasaan kebencian tuan terhadap Jepang, juga sentimen tuan jangan tuan lepaskan dengan sesukanya, kalau tuan hendak menolong Tiongkok terlepas dari genggaman Jepang yang kecil tetapi kuat itu."

Liem tidak kalah keras menjawab tudingan Soetomo itu. Ia menganggap dirinya tidak menulis sebagai orang Tionghoa, melainkan sebagai orang Indonesia yang sama Indonesianya seperti Soetomo. Liem menyesal bahwa Soetomo telah menjadi propaganda imperialis, dan ia menolak dicap sebagai " budak Jepang". Tijpto Mangunkusumo membela Liem dan meanggapnya sebagai orang Indonesia karena ia sadar tentang kepentingan dan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. "Liem Koen Hian adalah seorang Indonesiener, dengan atau zonder pici. … karena Indonesier adalah paham politis". Masuknya Tjipto dalam debat itu, akhirnya menutup perdebatan antara Soetomo dan Liem Koen Hian.

Pada 1932 Liem mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) untuk mempersatukan seluruh Tionghoa peranakan dalam perjuangan nasional Indonesia. Soetomo setuju dengan PTI dengan catatan bahwa orang-orang Tionghoa itu harus ditempatkan sebagai "pembantu" dari gerakan nasionalis Indonesia. Ia tetap tidak memandang perjuangan PTI setara dengan perjuangan nasionalis bumiptrra untuk Indonesia merdeka.

Namun pandangan Soetomo mengalami perubahan pada 1936, ketika Tjipto memberi pengakuan kepada gerakan nasionalisme yang muncul dari kalangan Tionghoa peranakan. Malahan ia kemudian memperjuangkan keanggotaan mereka di Parindra, meskipun

gagal. Walaupun berbeda pandangan, Liem tetap menghormati Soetomo. Ketika Soetomo meninggal, Liem menulis sebuah artikel yang mengatakan bahwa orang Tionghoa di Jawa berutang budi kepada Soetomo attas segala upayanya itu. Ia pun turut mengantar jenazah Soetomo yang dihormatinya ke pemakaman.

Dalam melihat Jepang, Parindra berpendapat bahwa kekuatan Jepang dapat dipakai untuk menghapuskan penjajahan Belanda, tanpa memperhitungkan baahwa antara imperialisme Jepang dan imperialisme Belanda tidak ada perbedaan. Atas dasar itulah Parindra tidak ingin menentang imperialisme Jepang yang makin hari makin jelas mengincar kepulauan Indonesia. Sedangkan Sjahrir justru prihatin melihat ketertarikan orang Indonesia terhadap bala penolong dari Timur itu. Simpati kaum nasionalis di Indonesia sangat besar kepada Jepang dan hal itu tidak mengherankan karena masa-masa itu hal-hal yang tidak menyenangkan yang berkaitan dengan kekuasaan orang kulit putih kjan subur. Tingkat represi pemerintah kolonial tidak makin melunak saat menghadapi krisis ekonomi dan politik di Pasifik. Jepang justru memperlihatkan wajah manisnya dengan memberi Korea hak pemerintahan otonomi. Tindakan Jepang itu seolah memberi dukungan moral kepada sebagian orang di Indonesia bahwa sebentar lagi akan datang pasukan pembebas dari Jepang. (Wilson, 2008 : 128 – 137)

Ekspansionisme Jepang menyebabkan perang dengan Cina dan mengancam jajahan Barat di Timur Jauh. Pada 1939 perang pecah di Eropa. Pada 10 Mei 1940 Belanda diserbu pasukan Hitler. Empat hari kemudian negeri itu diduduki. Pemerintahannya mengungsi ke London, tapi tidak ada jaminan Sama sekali bahwa Inggris akan sanggup menahan serangan Jerman yang akan datang. Pemerintah Belanda tahu bahwa rencana untuk penaklukan Kepulauan Indonesia sedang dipersiapkan di Tokyo.

Nasib Hindia Belanda bergantung pada kemampuan angkatan darat dan angkatan laut Inggris mempertahankan posisi mereka di benteng Singapura. Pemerintah Batavia tidak siap untuk perang skala besar. Tentaranya berjumlah kira-kira 35.000 serdadu professional, dilatih untuk pertempuran skala kecil dan sama sekali tidak sanggup berhadapan dengan tentara Jepang

Yang berpengalaman di medan tempur. Angkatan laut tersebut terdiri atas dua kapal penjelajah yang masing-masing sekitar 7.000 ton, dan sedikit kapal yang lebih kecil. Angkatan udara terdiri dari tidak lebih daripada 100 pesawat terbang, sebagian besar sudah kadulawarsa dan kalah dalam kecepatan dan persenjataan dari Jepang, musuh mereka.

Pemerintah kolonial berusaha sedapat mungkin membantu sekutu Belanda di Eropa dan Amerika dengan menyediakan bagi mereka bahan mentah penting tertentu. Timah, kina, dan terutama karet, sangat dibutuhkan untuk perlengkapan angkatan bersenjata

Amerika. Dalam satu tahun, Hindia Belanda meningkat produksi karet merreka sampai menjadi 600.000 ton. Suatu usaha besar dilakukan di ladang produksi, dan melihat berbagai peristiwa yang terjadi pada 1940 dan 1941 tersebut, kejengkelan kelompok penduduk Belanda yang makin bertambah terhadap tuntutan politik nasionalis gampang dimengerti. Jika penguasa Belanda bijaksana dan patriotik , mungkin mereka sudah mencoba mencapai saling pengertian dengan nasionalis sayap kiri yang anti-Jepang , karena mereka anti fasis dan antikolonial. Tapi waktu tinggal sedikit. Sebelum terjun dalam perang, Jepang mencoba merayu pemerintah Hindia Belanda , dengan menawarkan "kesepakatan ekonomi " yang akan membuat Indonesia tunduk pada kepetingan ekonomi Jepang. Setelah perang pecah, Tokyo (lewat jalur diplomatic netral) menyarankan netralisasi " de facyo " Hindia. Tawaran itu ditolak . Begitu Sungapura jatuh, nasib Jawa pun terkunci. Pertempuran di Laut Jawa hanyalah epilog dari drama Malaya. Ia adalah upaya perlawanan bersenjata yang heroik namun mungkin agak romantik yangmemungkinkan sejarawan mencatat bahwa penerus-penerus Jan Pieterszoon Coen gugur, dengan pedang di tangan, dalam perjuangan membela warisan Coen melawan kekuatan musuh yang teerlalu besar. (Bernhard HM Vlekke, 446 – 448)

Penutup

Sebenarnya golongan priyayi professional itulah. lulusan-lulusan pertama dari sekolah kedokteran (STOVIA), yang – melalui pendidikan profesionalnya – mencapai kebebasan ekonomi dan mobilitas di zaman kolonial sampai suatu tingkat yang tak pernah diperoleh golongan priyayi birokratis mana pun, yang ningrat atau bukan. Juga bukan oleh regent. Setelah pengakuan STOVIA sesudah 1902, setiap lulusan kedokteran bumiputra dapat melakukan praktek umum setelah mereka menyelesaikan ikatan dinas. Dalam pengertian ini, golongan priyayi professional dapat dengan sendirinya menjadi bebas dari pemerintah Belanda, suatu kebebasan yang sebelumnya hanya diperoleh oleh masyarakat pedagang dari golongan santri atau oleh masyarakat pedagang Asia asing lainnya di Jawa dan oleh para wartawan di pusat-pusat kota, namun demikian, dokter-dokter kesehatan ini masih merupakan bagian dari golongan priyayi itu.

Dari golongan priyayi itu para dokter kesehatan inilah yang juga bekerja sebagai wartawan, bersama wartawan-wartawan priyayi bumiputra bebas lainnya seperti Tirtoadisuryo, Abdul Muis dan Tjokroaminoto yang pertama sekali menjadi paling terkemuka secara politik dalam gerakan nasionalis. Dengan demikian, kita melihat bahwa golongan priyayi professional itu dan bukan priyayi birokratis, yang mengambil prakarsa dalam pembentukan persatuan priyayi pertama, Budi Utomo. Dalam masa mendirikan Budi Utomo ketegangan-ketegangan sosial dan perjuangan untuk keunggulan sosial itu timbul.

Pada waktu yang sama kita melihat, pertentangan antara beberapa anggota golongan priyayi professional dan priyayi birokratis rendah bukan-ningrat, dapat diselesaikan pada waktunya, tetapi hanya dengan memecah golongan priyayi professional itu sendiri dari orang-orang yang menghendaki perubahan radikal dan orang-orang yang lebih suka kepada pembaruan secara bertahap.

Dengan demikian untuk pertama kali dengan Budi Utomo, golongan priyayi mempunyai variasi bukan hanya dalam status sosial, kedudukan professional, dan kesempatan di bidang ekonomi, tetapi juga dalam ideologi. Pada saat inilah kita dapat berbicara tentang keyakinan politik dan pengembangan idealisme politik di tengah golongan priyayi itu, tepatnya di tengah-tengah priyayi professional. Budi Utomo adalah persatuan priyayi. Orang-orang yang menolak nilai-nilai priyayi harus mencari saluran-saluran lain untuk pernyataan-pernyataan politik mereka. Beberapa pergi ke Sarekat Islam atau Indische Partij, dan para regent yang bersifat bermusuhan itu pada waktu yang sama mempunyai persatuan mereka sendiri yang ekslusif, Sedya Mulya. Golongan priyayi professional yang moderat dan golongan priyayi birokratis bukan ningrat berhasil bergabung dan menyingkirkan perbedan-perbedaan mereka dan mempersatukan segala kekuatan dalam meningkatkan kepentingan golongan mereka sebagai seorang yang berkelas sosial priyayi (Savitri Prastiti Scherer, 1985 : 265 – 266).

Soetomo berkembang menjadi salah seorang tokoh nasionalis yang paling terkenal di tahun dua puliuhan dan tiga puluhan, walaupun tidak sebagai pemimpin Budi Utomo. Ia mengkhususkan diri pada Kelompok Studi Indonesia dengan mempropagandakan otoaktivitas, *self help* penduduk Bumiputra. Bulan Januari 1925 ia terpilih menjadi anggota gemeenteraad Surabaya, bukan sebagai calon PEB seperti dituntut semula, melainkan dukungan *Soerabajasache Neutrale Kiesvereninging*. Bulan itu juga ia keluar dari kemandekan. Ia cepat melihat bahwa Budi Utomo tidak merupakan alat untuk melakukan perubahan. Perhimpunan itu terkait dengan Surakarta dan Yogyakarta yang untuk sementara tetap tidak terusik oleh semangat baru yang dibawa serta oleh para pelajar dari Negeri Belanda.

Pandangan dunia para anggota di Jawa Tengah itu merupakan himpunan tradisi Jawa yang dipoles dengan pernis Barat yang seringkali sangat tipis. Soetomo ingin menghembuskan hidup baru ke dalam pergerakan itu, tetapi Budi Utomo, hampir tidak dapat digerakkan. Soetomo, pendiri Budi Utomo tahun 1908 itu, dapat kiranya menjadi pemimpin yang kuat dari Budi Utomo yang diperbaharaui. Tetapi partai orang Jawa itu baginya hanya sebuah statiun perhentian. Ia memutuskan untuk mencurahkan segala energinya pada kelompok studinya sendiri, yang tidak terdiri dari para amtenar yang moderat, melainkan dari para cendikiawan muda yang wawasannya terbuka ke dunia.

Soetomo bagi Budi Utomo ibarat tokoh yang hilang, tetapi di Surabaya Soetomo berkembang menjadi tokoh nasionalis terpenting pada waktu itu. Bulan Maret 1925 berita tentang tindakannya dalam gemeenteraad Surabaya dibicarakan orang di seluruh Hindia. Dalam sidang hari Jumat tanggal 13 Maret 1925 dalam kesempatan mengajukan pertanyaan, ia membacakan sepucuk surat berisi permintaan berhenti. Sebelumnya, hari itu juga, anggota dewan kotapraja, Mr A van Gennep diangkat menjadi *wethouder* (anggota Majelis Amanat Dewan Kota) untuk Technische Bedriojven (Jawatan-Jawatan Teknik). Soetomo berkeberatan sama sekali dengan pencalonan ahli hukum tersebut, tidak hanya karena Van Genep tidak memiliki pengetahuan apa pun tentang masalah teknik, melainkan terutama karena yang bersangkutan dikenal sebagai tokoh yang sangat anti-inlander. Hal itu terbukti ketika Van Gennep sebagai wakil PEB dalam sidang Volksraad pada 16 Juni 1921 mengucapkan pidato yang panjang dan berisikan penghinaan terhadap watak dan moral inlander.

Tiga orang anggota dewan kotapraja bumiputra mengikuti tauladan Soetomo, yaitu M Soendjoto, M Sastrowinangoen, dan R.M.A. Soejono. Mereka bertiga dari Kelompok Studi Indonesia. Aksi nonkooperasi pertama di Hindia di tingkat lokal itu memperoleh perhatian sangat luas. Kebanyakan koran bumiputra menjuluki Soetomo sebagai “jagoan Bumiputra“. Koran-koran lain menyangsikan apakah bijaksana melepaskan kerjasama di dalam dewan-dewan, walau dewan-dewan tersebut tidak memuaskan. Budi Utomo menunjukkan simpatinya, tetapi bersikap tidak memihak. Pers Eropa yang ekstrim mencemooh Soetomo dan kawan-kawan. Dikatannya, bahwa mereka sebenarnya malu dan tidak mengikuti aturan main demokrasi. Soetomo menbantah. Kawan-kawannya yang telah menasehatkan kepadanya untik tidak duduk dalam Volksraad ternyata benar. Lewat tulisannya, Soetomo mengatakan bahwa untuk sementara mereka tidak masuk Dewan karena disepelehkan. Usul-usul mereka yang disertai penjelasan, selalu dikalah oleh suara mayoritas tipis. Ternyata gagasan tentang kerjasama itu oleh pemerintahan kolonial dianggap sebagai pemanis bibir.

Penolakan dari sebagian besar anggota dewan berbangsa Eropa dan Indo-Eropa telah menyebabkan Soetomo mengambil keputusan tersebut. Dengan duduk dalam dewan tidak mungkin membela kepentingan pendunduk kampung. Sebagai contoh, untuk perbaikan kondisi kesehatan dan kebersihan di kampung-kampung tidak disediakan dana, sedangkan pos pengeluaran untuk kebun binatang dinaikkan secara menyolok. Dengan pengangkatan Van Genep itu kekecewaan Soetomo mencapai batas akhir.

Langkah anggota dewan kotrapraja bumiputra di kota pelabuhan terbesar Hindia itu menyebabkan terjadinya pergolakan. Insiden itu memperoleh banyak perhatian daripada aksi nonkooperasi yang terjadi sebelumnya. NIP yang sudah kehilangan sebagian besar anggotanya yang masuk IEV, ketika ia membubarkan diri tahun 1923. Sikap Partai Sarekat Islam mendua : anggota-anggota PSI dalam Volksraad tidak diakui oleh partai tersebut, tetapi mereka tampil sebagai juru bicara pendirian-pendirian PSI. Langkah Soetomo meyakinkan

dan tidak dapat disalahartikan. Aksi Soetomo itu dibicarakan orang di beranda dan sositet-sositet, di kampung-kampung dan di pasar-pasar. Non-kooperasi dari teori kini menjadi taktik terapan, Dwidjosewojo ternyata benar; elemen-elemen moderat ikut melepaskan kerja sama juga.

Dengan tindakannya itu Soetomo menjadi pahlawan Jawa nasionalis, dan Surabaya bahkan menjadi pusat nasionalis terpenting. Sementara itu *Nationaal Indisch Congres* terus aktif. Kelompok Studi Indonesia milik Soetomo cukup kecil tetapi penting karena gagasan-gagasan pembaharuannya. Sebuah pertemuan yang diselenggarakan untuk mendukung aksi para anggota dewan kotapraja bumiputra pada 5 April 1925 dihadiri oleh sekitar 5.000 orang peminat. Pemerintah membentuk komisi penasehat untuk meniliti bagaimana gerakan "ekstremis" di Surabaya itu dapat dilawan. Walau Tjokroaminoto tinggal juga di kota pelabuhan terpenting Jawa Timur namun Soetomolah tokoh besar di Surabaya. Peranannya dalam mengembangkan nasionalisme paruh kedua tahun dua puluhan tetap masih kurang disoroti. Karena perhatian para sejarawan tertuju pada Soekarno yang dianggap merupakan fenomena sejarah, maka Soetomo yang lebih moderat berangsur-angsur terlupakan (Hans van Miert : 2003 : 373 – 77)

Kelompok Studi Indonesia merupakan kelompok pelajar pertama yang muncul di kota-kota besar yang terdapat di Pulau Jawa antara 1924-1926. Perhimpunan siswa besar lainnya adalah Kelompok Studi Umum di Bandung, yang didirikan pada November 1925 oleh sekelompok pemuda yang memiliki latar belakang pendidikan di Belanda. Mereka juga pernah menjadi anggota Perhimpunan Indonesia bersama dengan para kaum nasionalis Bandung yang cukup terpandang dan para mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik Bandung. Kelompok Studi merupakan tempat perdebatan politik utama pada masa perkembangan pesat dalam sejarah nasionalisme Indonesia. Kekuatan utama dari Partai Komunis Indonesia dan ideologinya tampaknya bertentangan dengan Sarekat Islam, sebuah partai nasionalis Islam besar, gelombang pemogokan terjadi antara 1825-1926 dan meningkatnya tekanan Pemerintah Kolonial terhadap partai ini merupakan inti perdebatan para pemuda Indonesia dalam menentukan masa depan politik mereka. Semua kelompok pelajar yang ada memusatkan pergerakan mereka pada politik antikolonialisme. Mereka banyak mengadakan kegiatan yang mendidik seperti memberikan ceramah dan kursus. Baik Kelompok Studi di Surabaya maupun Bandung sama-sama menerbitkan majalah yang membahas isu-isu yang sedang hangat dibicarakan saat itu. Bukan hanya isu yang berkembang di Indonesia, tetapi juga pemogokan antipenjajah yang sedang berkembang di Asia. Perbedaan yang paling mencolok antara Kelompok Studi Indonesia di Surabaya dengan Kelompok Studi Umum di Bandung adalah bahwa Kelompok Studi Indonesia juga menaruh perhatian mereka pada isu-isu sosial dan ekonomi dan tidak hanya pada isu politik, dengan alasan bahwa isu-isu tersebut memiliki nilai yang sama pentingnya dalam menciptakan bangsa Indonesia yang merdeka dan modern.

Soetomo memiliki pengaruh intelektual yang sangat besar bagi Kelompok Studi Indonesia. Ia mempunyai pandangan yang luas mengenai kaum intelektual yang berlatar belakang pendidikan Barat yanhg baru saja muncul dan jumlah terus bertambah di Indonesia sejak 1910. Sebagai anak pejabat Pemerintah tingkat rendah, Soetomo merasa perlu membela orang-orang yang tidak beruntung dibandingkan dengan dirinya. Dari usaha keras yang ia berikan untuk Kelompok Studi Indonesia dan hal-hal yang berhubungan dengan kelompok tersebut, kita dapat melihat sesosok pria yang nilai moral tinggi, rasa komitmen yang kuat menentukan sebuah cara praktis untuk meningkat standard hidup orang-orang yang jauh lebih kurang beruntung dari dirinya, seseorang yang rela untuk mengorbankan waktu dan energinya bagi pekerjaan-pekerjaan yang memiliki arti besar bagi masyarakat. Dengan tingkat intelektual serta kemampuan organisasi tinggi juga didukung oleh jaringan sosial pribadi dan professional yang baik, ia bisa memperoleh bantuan dana dari Pemerintah dan sektor swasta (John Ingleson, 2013 : 344 – 346)

Pembentukan sarekat buruh adalah bagian dari upaya Kelompok Studi Indonesia untuk menciptakan sebuah hubungan yang kuat antara kaum terpelajar elite dengan dengan latar belakang pendidikan Barat yang ada di Surabaya dengan kaum buruh Surabaya. Kelompok ini menyadari bahwa tidak mudah untuk membujuk para pengusaha agar mau berususan dengan sarekat buruh, apalagi menerima mereka sebagai perwakilan kaum buruh. Mereka juga menyadari bahwa Pemerintah Kolonial memiliki pandangan yang semakin jilka menyangkut peranan sarekat buruh. Pilihan yang merreka miliki sangatlah terbatas. Menurut mereka, strategi menyesuaikan diri adalah satu-satunya pilihan yang mereka miliki.

Strategi yang dikembangkan Kelompok Studi Indonesia adalah jika sebuah sarekat buruh menfokuskan usaha mereka untuk menyediakan jaminan sosial dan tabungan bersama untuk para pekerja, maka mereka akan lebih memiliki kesempatan mempertahankan kesetiaan para buruh dan seiring berjalannya waktu dapat menciptakan sebuah struktur yang kuat dalam komunitas pekerja itu sendiri. Sarekat buruh yang dibentuk oleh Kelompok Studi Indonesia memberikan banyak keuntungan nyata bagi banyak buruh di Surabaya dan karena alasan inilah sarekat buruh yang mereka bentuk dapat bertahan di bawah tekanan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kolonial. Namun, ternyata mereka tidak berkembang menjadi sebuah sarekat buruh berkesinambungan dengan jumlah anggota setia yang cukup besar. Masa Depresi yang melanda telah mengakhiri cita-cita tersebut.

Sarekat buruh selalu mengalami kesulitan menggalang dana sebesar jumlah yang dibutuhkan oleh anggota mereka. Seiring dengan semakin memburuknya masa Depresi, hal tersebut semakin sulit dicapai. Jumlah buruh yang dipekerjakan pada sektor umum dan swasta semakin sedikit dan mereka masih memiliki pekerjaan akan berpikir panjang untuk bergabung dengan sarekat buruh karena mereka takut akan kehilangan mata pencarian mereka jika bergabung. Lebih lanjut lagi, selama masa Depresi, banyak sarekat buruh yang

terbukti tidak bisa memberikan bantuan sosial yang mrreka janjikan. Sarekat buruh yang dibentuk oleh Kelompok Studi Indonesia di Surabaya juga menghadapi masalah yang sama seperti halnya sarekat buruh lain. Keanggotaan mereka dengan cepat menyusut. (John Ingleson, 2013 : 384 – 385)

Soetomo dan kolega-koleganya berhadap bahwa Kelompok Studi Indonesia dapat menjadi landasan bagi partai nasionalis Indonesia yang baru saja dibentuk dari pengembangan prinsip yang dimiliki Perhimpunan Indonesia. Namun ternyata hal ini tidak terwujud. Karena ternyata hal yang mendorong terbentuknya partai nasionalis baru justru berasal dari Kelompok Studi Umum di tangan para pemimpinnya yang berada di Bandung dan Batavia, dengan Soekarno di Bandung dan Sartono di Batavia. Kasus penangkapan Soekarno dan tiga pemimpin PNI lainnya pada Desember 1929 merupakan hal yang mendorong Soetomo untuk berusaha kembali menciptakan sebuah organisasi yang dapat menyatukan pergerakan nasional. Pada Maret 1930, ia mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin pusat PNI – Sartono, Iskaq, dan Samsi Sastrowidagdo – dimana ia menyampaikan perlunya pembubaran PNI dan pembentukan sebuah partai baru sementara terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan berpura-pura berupaya meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat meskipun pada kenyataan terus melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai oleh PNI. PNI pun kemudian dibubarkan dan diubah menjadi Partai Indonesia (Partindo), sedangkan para anggota PNI lama pun membentuk PNI Baru dan hasilnya pada November 1930, Soetomo pun turut berperan dalam pengubahan Kelompok Studi Indonesia menjadi Persatuan Bangsa Indonesia. (John Ingleson, 2013 : 369 – 370)

Pada bulan Desember 1936 di Solo, terjadi kongres fusi yang terkenal antara Persatuan Bangsa Indonesia dan Budi Utomo. Pada waktu itu pada waktu itu partai politik yang paling besar dan paling penting dari zaman ini – Partai Indonesia Raya atau Parindra – dibentuk dengan Dr Soetomo sebagai ketua dan Woejaningrat sebagai wakil-ketua. Tujuan yang ditentukan oleh partai adalah “ Indonesia Moelia” yang, seperti diketahui benar-benar oleh Belanda yang kesal, mengandung arti kemerdekaan. Tidak lama setelah kongres, semua kelompok lainnya yang masih berada dalam PPKI, kecuali Pansudan, melebur dalam partai baru ini yang pada akhir Februari 1936 mempunyai 54 cabang dan 3445 anggota. Sebagian besar dari kekuatannya terdapat di Jawa Tengah dan Timur, tetapi pengaruhnya juga menyebar ke daerah seberang dan pada akhir zaman kolonial partai ini paling sedikit mempunyai 121 cabang dan anggotanya mungkin melebihi 20.000 orang. Jadi partai ini adalaha dua kali daripada PNI Soekarno yang berjumlah kurang daripada 10.000 anggota pada masa puncaknya. (George D Larson, 1990 : 277 – 278).

Di bawah pimpinan Soetomo, Moehamad Hoesni Thamrin, Mr Susanto Tirtoprodjo, Soekardjo Wirjopranoto dan Woerjaningrat, partai ini menjadi kelompok Indonesia yang paling berpengaruh dio Volksraad. Meskipun hanya dapat memenuhi sedikit dari kebutuhan

badan itu atau lingkungan politik pada umumnya, partai ini telah melakukan sesuatu yang sangat berharga bagi masyarakat Indonesia dalam bidang-bidang lainnya . Partai tersebut membentuk koperasi pengecer dan koperasi petani, sebuah bank yang syarat-syarat kreditnya memadai untuk memerangi buta aksara , dan sejumlah kegiatan sosial yang bermanfaat. (George McTurnan Kahin, 1995 : 121 – 122)

Penguatan tiba-tiba sayap kanan gerakan itu juga merangsang kalangan sayap kiri untuk bertindak. Berbagai kelompok dan individu nasionalis yang menjadi anggota partai seperti Partindo, yang sudah dibubarkan, membentuk Gerindo, Gerakan Rakyat Indonesia. Pemisahan gerakan itu ke dalam kelompok sayap kiri dan sayap kanan membuktikan betapa dekat nasionalisme Indonesia terkait dengan kecenderungan politik internasional Sekitar 1936 terjadi kemenangan fasisme atas nasional-sosialisme di beberapa negeri Eropa dan pembentukan pemerintahan front popular di negeri lain. Soetomo dan teman-temanya bukanlah fasis tapi mereka terang-terangan anti-komunis. Bagi Gerindo, pembelaan terhadap lembaga demokratik di seluruh dunia tidak kurang penting daripada penghancuran kolonialisme Belanda. Jelas mereka lebih takut pada pemajuan kolonialisme daripada imperialisme Jepang (Bernhard HM Vlekke, 2008 : 440)

Di tahun dua puluhan terjadi interaksi antara berbagai konsepsi tentang nation. Nasionalisme Jawa berasal dari Jawa Tengah berakar pada ciri-ciri etnik dan budaya yang khas. Itu adalah tipe nasion yang oleh AD Smith dinamakan tipe *etnik*. Dari istana-istana Jawa Tengah ada usaha untuk memberdayakan rakyat dengan memperkokoh nilai-nilai Jawa. Jong Java, Budi Utomo, dan *Comite voor Javaans Nationalisme* merupakan eksponen-eksponen gerakan ini. Keseimbangan dalam masyarakat Jawa dan hirarki sosial yang dibela oleh kaum priyayi terancam oleh kaum nasionalis tipe lain. Di antara mereka adalah perjuangan bersama melawan penjajah Belanda. Mereka mendukung hak-hak demokrasi dan keadilan sosial. Perbedaan etnik dalam hal ini kurang penting; inilah sebabnya Ernst Renan popular sekali di kalangan nasionalis Indonesia. Renan yang selalu dibicarakan oleh para pengajar Belanda di sekolah-sekolah kolonial memang telah menyatakan bahwa nasion hanya dapat dibentuk oleh “kemauan” untuk hidup bersama. Smith merumuskan nasion seperti nasiona Indonesia itu sebagai nasion territorial.

Tidak mengejutkan bahwa konsepsi Jawa mengenai nasion bertentangan dengan konsepsi Indonesia. Bukankah perjuangan melawan penjajah kolonial merupakan juga perjuangan demi hak-hak demokratis, demi keadilan sosial, demi persamaan hak semua peserta nasion. Inilah penjelasannya yang terakhir mengapa Budi Utomo tidak memperoleh sukses politik. Partai itu, sebagai wakil politik nasionalisme Jawa, terlalu didasarkan pada konsepsi otokratis Jawa Tengah mengenai kekuasaan, terlalu terikat pada tatanan sosial Jawa yang hirarkis. Cabang-cabang pembakang di luar Surakarta dan Yogyakarta tidak dapat mengubah konsepsi ini. Namun semangat di kalangan pemuda terpelajar mengalami

perubahan di tahun dua puluhan. Mereka berpihak pada masa depan yang yang demokratis, dan mereka membuat pendirian Jawa yang sempit yang dianggapnya otoriter dan kuno. Bagi orang Jawanisme bukanlah landasan bagi kemajuan Hindia, melainkan ciri hakiki masyarakat feudal yang justru ingin mereka bentuk kembali. Banyak di antara mereka mendukung cita-cita Indonesia, yaitu suatu nasion merdeka dengan hak-hak yang sama bagi semua pendukungnya, tanpa pandang latar belakang etniknya. Generasi inilah yang di tahun dua puluhan dan tiga puluhan semakin menguasai dunia nasionalisme (Hans van Miert, 2003 : 532 – 533)

Seratus tahun lebih ketika kelahiran Budi Utomo terjadi. Zaman kolonial, yang merupakan wadah dari kelahiran organisasi modern pertama, yang bernama Budi Utomo telah berlalu, kini telah berlalu. Nasionalisme kultural adalah bagian dari proses pematangan kebangkitan nasional. Kecenderungan ini adalah bagian dalam usaha menemukan indentitas diri, ketika di satu pihak, tarikan kolonial menjanjikan modernitas dan sekaligus penindasan, dan di laii pihak, keprihatinan terhadap kebanggan kultural etnis sendiri, dan yang kini harus bernegoisasi dengan berbagai komunitas etnis lain, yang senasib. Bisa dimengerti, kalau kaum terpelajar yang bergabung dalam berbagai perkumpulan pemuda yang bersifat insuler itu - dengan sengaja – mempelajari dan berusaha menemukan unsur-unsur persamaan yang memungkinkan kesemuanya bisa bersatu menjadi sebuah bangsa.

Kemudian para pendukung nasionalisme kultural yang emansipatoris dan reformis, menyadari keterbatasan orientasi ini dalam masyarakat yang multi etnis yang berada di bawah kekuasaan kolonialisme. Mereka melihat bahwa nasionalimse politik yang dibimbing oleh cita-cita dan visi, sebagai suatu keharusan yang tak terelakan. Nasionalisme politik adalah hasrat modern yang didorong oleh cita-cita untuk merintis masa depan, bukan untuk menggali-gali pusaka lama. Soekarno mengutip dengan nada persetujuan pendapat Ernst Renan tentang bangsa sebagai perwujudan dari “le desir d”etre ensemble “. Bangsa bukanlah sesuatu telah begitu saja, tetapi bertolak dari pengakuan dan perjanjian hasil dari sebuah pergolakan intelektual yang disengaja. Tanah Hindia lepas dari Belanda dan Indonesia Merdeka dan sebagainya adalah rumusan baru dari kegelisahan agraris, yang memupuk tradisi perlawanan terhadap kekuasaan yang dipaksakan. (Taufik Abdullah, 20001 : 26 – 34). Lewat STOVIA, Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Kelompok Studi Indonesia, Persatuan Bangsa Indonesia dan Partai Indonesia Raya, Soetomo terlibat dalam menentukan masa depan Indonesia.

Bibliografi

Abdullah, Taufik. 2001. *Nasionalisme & Sejarah*. Bandung : Satya Historika

Abdulgani, Roeslan. 1976. *Alm. Dr Soetomo yang Saya Kenal*. Jakarta. Yayasan Idayu.

Abeyasekere, Susan." Kooperator dan Non-Kooperator. Kegiatan Politik Nasionalis di Tahun 1930-an," dalam Colin Wild dan Peter Carey (ed) 1986. *Gelora Api Revolusi. Sebuah Antologi Sejarah* . Jakarta PT Gramedia, Hlm. 61 – 67.

Anderson, Benedict O"Gorman," Perubahan Pemikiran Kaum Nasionalis Indonesia di Masa Awal," dalam Anthony Reid & David Marrr (ed) *Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka. Indonesia dan Masa Lalunya.* Jakarta : Grafiti Pers, Hlm. 1 - 35 .

Basundoro, Purnawan. 2913. Merebut Ruang Kota. Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900 – 1960. Jakarta : Marjin Kiri.

Blackburn, Susan. 2011. *Jakarta . Sejarah 400 Tahun*. Jakarta : Masup Jakarta.

Dhakidae, Daniel," Nasionalisme dalam Proses Mencari Arti," dalam M Sastrapratedja, J Riberu dan Frans M Parera. 1986. *Menguak Mitos-Mitos Pembangunan. Telah Etis dan Kritis*. Jakarta : PT Gramedia, Hlm. 59 – 72 .

Dhont, Frank. 2005 . *Nasionalisme Baru Intelektual Indonesia Tahun 1920-an*. Yogyakarta; Gadjah Mada Universuty Press.

Djojohadikusumo, Soemitro. 1989. *Kredit Rakyat di Masa Depresi.* Jakarta : LP3ES.

Elson, RE. *The Idea of Indonesia. Sejarah Pemikiran dan Gagasan*. Jakarta; Serambi.

Frederick, William H. 1989. *Pandangan dan Gejolak. Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia* (Surabaya 1926 – 1946). Jakarta : PT Gramedia.

Hanifah, Bahder Djohan dan Surono (ed). 1976. *125 Tahun Pendidikan Dokter di Indonesia 1851 – 1976* . Jakarta : Pantia Peringatan 125 Tahun Pendidikan Dokter di Indonesia.

Hering, Bob. 2003. *Mohammad Husni Thamrin . Membangun Nasionalisme Indonesia*. Jakarta : Hasta Mitra.

Ingleson, John. 1983. *Jalan Ke Pengasingan. Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1927*

– *1934*. Jakarta : LP3ES.

Ingleson, John. 1993. *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan.* Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti.

Ingleson, John. 2004. *Tangan dan Kaki Terikat. Dinamika Buruh, Sarekat Kerja dan Perkotaan Masa Kolonial*. Jakarta : Komunitas Bambu.

Ingleson, John. 2013. *Perkotaan, Masalah Sosial & Perburuhan di Jawa Masa Kolonial*. Jakarta : Komunitas Bambu.

Kahin, George McTurnan. 1995. *Reflkesi Pergumulan Lahirnya Republik. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Surakarta – Jakarta : Universitas Sebelas Maret dan Pustaka Sinar Harapan.

Kartodirdjo, Sartono, " Pengantar," dalam Anthony Reid & David Marr(ed) 1983. *Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka.Indonesia dan Masa Lalunya.* Jakarta, Grafiti Pers, Hlm. III – XIII.

Kartodirdjo, Sartono. 1990. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional . Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jilid2 , Jakarta : PT Gramaedia.

Khozin, Nur. 2011. *Soetomo dan Perjuangannya*. Jakarta : Musium Kebangkitan Nasional.

Larson, George D . 1990. *Masa Menjelang Revolusi. Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912 – 1842*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Leiressa, RZ. 1985. *Terwujudnya Suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia*. Jakarta : CV Akademika Pressindo.

Nagazumi, Akira," Masa Awal Pembentukan "Perhimpunan Indonesia", Kegiatan Mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda, 1916-1917," dalam Akira Nagazumi (ed) 1986. *Indonesia Dalam Kajian Satjana Jepang. Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indoneisa, Hlm. 133 – 158.

Nagazumi, Akira. 1989. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia : Budi Utomo 1908 – 1918*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.

Niwandhono, Pradipto. 2011. *Yang Ter(di)lupakan. Kaum Indo dan benih Nasionalisme*

Indonesia. Penerbit Djaman Baroe

O'Malley, W." Depresi Besar," dalam Colin Wild dan Peter Carey (ed) 1986 *Gelora Api Revolusi. Sebuah Antologi Sejarah*. Jakarta : PT Gramedia. Hlm. 72 - 78.

Panuju, Redi. 2002. *Dr Soetomo. Pahlawan Bangsaku*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Ricklefs, MC. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyajarta : Gadjah Mada University Press.

Scherer, Savitri Prastiti. 1985. *Keselaran dan Kejanggalan. Pemikiran- Pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*. Jakarta : Penerbit Pustaka Harapan.

Shiraishi, Takashi," "Satria" vs " Pandita". Sebuah Debat Dalam Mencari Identitas, " dalam Akira Nagazumi (ed) 1986. *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang* (Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia). Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 158 – 187 .

Soewarsono. 2000. *Berbareng Bergerak. Sepenggal Riwayat dan Pemikiran Semaoen*. Yogyakarta : LKIS.

Sutherland, Heather. 1993. *Terberntuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta : Penerbit Sinar Harapan.

Van Miert, Hans. 2003. *Dengan Semangat Berkobar. Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1918 – 1930*. Jakarta : KTLV dan Hasta Mitra.

Van Niel, Robert. 1984. *Munculnya Elite Modern*. Jakarta, Pustaka Jaya

Van der Veur, Paul W (Editor) 1984. *Kenang-Kenangan Dokter Soetomo*, Jakarta : Penerbit Sinar Harapan.

Vickers, Adrian. 2011. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta : Insan Mandani.

Vlekke, Benhard HM. 2008. *Nusantara Sejarah Indonesia*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia .

Wilson. 2008. *Orang dan Partai Nazi di Indonesia*. Jakarta : Kaum *Pergerakan Menyambut Fasisme.* Jakarta : Komunitas Bambu.

116

Dr. Yudha Tangkilisan

INDONESIA MULIA:

BUTIR-BUTIR TERSEBAR PEMIKIRAN DR. SOETOMO MENGENAI MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PEREKONOMIAN INDONESIA

> "Tiga puluh satu tahun yang lalu dr. Soetomo telah wafat……Akan tetapi satu hal yang masih hidup dan terus akan hidup, ialah semangat dan cita-cita dr. Soetomo. Kita dapat jelas melihat, bahwa cita-cita dr. Soetomo telah tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945."
> (Presiden Republik Indonesia Soeharto, 30 Mei 1969)[1]

Pengantar

Menuliskan tentang seorang tokoh terasa menjadi biasa. Mengapa tidak, dewasa ini berbagai karya biografi, otobiografi dan memoar disajikan ke kalangan publik, mulai dari yang digarap secara ilmiah, popular hingga hanya ditujukan untuk kalangan keluarga. Tentunya segera timbul pertanyaan mengapa gejala ini terjadi. Tampaknya jawabannya dapat diawali dari sebuah pandangan yang mengatakan bahwa manusia adalah mahluk sejarah *(historical animal)*. Hanya manusia yang membuat dan menyadari tentang masa lalunya. Tentu saja, masa lampau menjadi berarti untuk kehidupannya dan selanjutnya untuk masyarakatnya.

Pada hal inilah, persoalan penulisan tokoh memperlihatkan relevansi dan signifikansinya. Banyak pendapat yang terkadang terasa klise dan tidak jarang juga satiris berkenan dengan pentingnya sejarah, dalam arti tidak hanya sebagai masa lalu tetapi juga kajian tentang masa lampau. Namun renungan dan refleksi sebagai makhluk yang berakal dan memahami simbol *(animale symbolicum)*, tentunya kesadaran ini tidak dapat dihindari karena nurani manusiawi akan tetap mengejar dan membayangi kemanapun pergi. Manusia meniti masa kini dalam melangkah ke masa depan seraya meninggalkan jejak-jejak perbuatan, memahami, memaknai dan berinteraksi dengan perkembangan sekitarnya berbekal pengalaman dari masa lampau.

Persoalan berikutnya yang terkait erat dengan mempelajari masa lalu adalah memahami peristiwa, bukan tentang diri kita sendiri, melainkan mengenai orang lain. Namun, persoalan ini tidak dapat dihindari, karena kehidupan sosial berkembang dalam lingkup dan konteks masyarakat, etnik, bangsa, hingga negara. Berbagai pemikiran dan teori politik menjelaskan

1 Dr. Soetomo berpulang pada tanggal 30 Mei 1938 dan dimakamkan di Gedung Nasional, Bubutan, Surabaya. Pada tahun 1961, Soetomo dikukuhkan sebagai pahlawan pergerakan nasional (Anshory & Tjakrawerdaya 2008: 22).

mulai dari latar belakang, awal mula, hakekat hingga tata cara penyelenggaraan kekuasaan terutama di sekitar bangsa dan negara. Walau sejumlah teori politik meramalkan memupus hingga menghilangnya negara, gejala mutakhir memperlihatkan negara semakin menguat atau setidaknya selalu diperkuat.

Signifikansi penulisan sejarah, terutama yang bertalian dengan tokoh sebagai jejak kaki orang besar *(the great men)*, tampak jelas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, sejarah sering dijadikan sebagai alat legitimasi untuk kelanggengan suatu kekuasaan. Tentunya tidak harus selalu bercuriga tentang alat legitimasi ini, karena untuk suatu kekuasaan yang adil, demokratis dan berketuhanan mengapa tidak. Namun, umumnya sebagai pembenaran, pemahaman sejarah menjadi sempit, searah dan menjadi doktrin yang tidak dapat dikritik apalagi dibantah.

Membaca dan memahami Soetomo, tokoh pergerakan nasional dan pendiri Budi Utomo serta beberapa lainnya, bukan suatu hal yang mudah.[2] Masa hidup dan perjuangannya relatif terbatas, yang dalam perspektif Sejarah Nasional Indonesia berada pada kurun waktu masa pergerakan nasional atau masa akhir Hindia Belanda, memperlihatkan dinamika dan kompleksitas yang membutuhkan kejelian, ketajaman dan keluasan wawasan. Ketidakmudahan itu menjadi daya tarik untuk mengungkapkan sosok, pemikiran dan perjuangannya sesuai dengan perubahan, pengaruh dan kebutuhan zaman. Oleh karena Soetomo termasuk ke dalam peletak dasar pembentukan dan kemerdekaan bangsa Indonesia.[3] Gagasan, pemikiran dan makna perjuangannya masih relevan dengan perkembangan Indonesia saat ini.

Sisi sosok dan perjuangan Soetomo yang relatif belum diberi perhatian khusus adalah pengamatan, keprihatinan, gagasan dan perjuangannya di bidang perekonomian. Berbagai penulisan lebih menempatkan struktur politik sebagai faktor penjelasan mengenai tokoh ini, yang memang tidak dipungkiri sangat relevan dan signifikan. Gagasan dan kiprah ekonominya tidak lebih menjadi bagian dalam upaya memahami struktur politik tersebut. Padahal, struktur ekonomi Soetomo menjadi sangat menarik dan penting ketika ditempatkan

2 Simak kutipan berikut, " Boedi Oetomo *werd op 20 mei 1908 opgericht door STOVIA-studenten samen met leerlingen van opleidingsscholen elders op Java, op initiatief van de twintigjarige student Soetomo. Ter herinnering hieraan geldt de datum van 20 mei in het huidige Indonesië als Dag van het Nationale Ontwaken"* (Burgers 2001: 159)

3 Roeslan Abdulgani (1976: 61) mengenang dan menghargai jasa-jasa Dr. Soetomo dalam ungkapan: "Beliau tidak 'menangi' Zaman Jepang dan Zaman Kemerdekaan. Namun alam kemerdekaan tak mungkin melupakan sumbangan beliau dalam barisan Perdjoangan Pergerakan Kemerdekaan Indonesia, yang menurut Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945; 'telah dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur."

pada nilai-nilai budaya dan mentalitas di sekelilingnya yang tidak memprioritaskan masalah ekonomi apalagi dalam memperjuangkan perbaikan taraf kehidupan untuk masyarakat luas. Soetomo berasal dari kalangan dan adalah seorang priyayi yang memliki kewajiban dan tanggung jawab dalam ikatan tradisional, yang mencerminkan alam tradisional dan kolonial yang menerapkan prinsip-prinsip modern. Soetomo hidup pada masa proses peralihan itu sedang gencar berlangsung. Dalam gerak zaman yang dinamis itu, butir-butir gagasan memajukan perekonomiannya muncul dan berkembang, yang bersemai tidak cukup lama seiring perjalanan usianya. Namun, relevansi dan siginifikansinya sebagai sumber ilham dan pedoman dalam memperjuangkan perekonomian bangsa Indonesia dewasa ini kian memperlihatkan taji dan tajamnya.

Masa Pergerakan Nasional

Kemerdekaan yang dinikmati oleh bangsa Indonesia hingga saat ini tidak terlepas dari perjuangan para perintis kemerdekaan masa pergerakan nasional. Ketika itu, mereka berada di bawah cakrawala penjajahan Hindia Belanda. Dalam perjalanan sebuah negara kolonial yang tidak dapat menghindar dari pengaruh dan tuntutan global, kebijakan yang menyentuh keadaan dan perkembangan masyarakat jajahan mulai dirambah dan dicanangkan. Perluasan kekuasaan jajahan, yang merupakan hasil ekspansi kolonial pada abad ke-19 melalui peperangan, menuntut struktur dan jajaran pemerintahan yang memadai terutama dalam jumlah yang tidak dapat diatasi dengan pengiriman aparat dari negeri Induk.

Strategi penjajahan Hindia Belanda dalam bidang pemerintahan bertumpu pada pola langsung dan tidak langsung *(direct rule)*, yang keduanya tetap mengandalkan keterlibatan pejabat setempat (lokal). Struktur pemerintahan memainkan peranan penting dalam mencapai dan menjaga perkembangan ekonomi negeri jajahan untuk menopang kehidupan negeri induk yang dilakukan melalui introduksi kapitalisme, monetisasi dan perpajakan. Kedua pihak, para birokrat dan pengusaha, saling berkolusi untuk menopang pilar kekuasaan penjajahan yang menghasilkan keuntungan melimpah.

Kedua proses itu bermula sejak abad ke-19, setelah perusahaan dagang VOC bubar dan muncul Negara Hindia Belanda. Penyelenggaraan negara, tidak hanya dalam politik melainkan juga ekonomi dan sosial, memerlukan aparat yang dapat diandalkan, tidak hanya yang berasal dari negeri Induk. [4] Perkembangan birokrasi pemerintahan, yang tampak pada struktur dan jumlah jabatan yang semakin meluas dan meningkat, memerlukan sumber daya

4 Suatu hal yang menarik adalah salah satu penyebab VOC dibubarkan adalah karena kualitas sumber daya yang dikirim dari kantor pusat di Negeri Belanda menurun dan (oleh karena itu timbul) korupsi. C.R. Boxer. *Jan Kompeni Sejarah VOC dalam Perang dan Damai.* Jakarta: Sinar Harapan, 1983

manusia yang berkemampuan sesuai untuk tugas-tugas yang diberikan dan memiliki kesetiaan, Untuk itu, Sekolah Raja (*Hoofdenscholen*) didirikan dan hanya diperuntukkan para putera elit politik pribumi. Selanjutnya, sekolah-sekolah pemerintahan yang berkurikulum Barat didirikan yang menerima pelajar dari kalangan terkemuka, seperti OSVIA dan MOSVIA (Leirissa 1985: 28). Mereka menjadi jajaran elit birokrasi pribumi, *Inlandsche Besturen*, yang berada di bawah jajaran pemerintahan Eropa (Belanda), *Europesche Besturen*. Di jajaran pemerintahan kolonial pulau Jawa, mereka umumnya datang dari kalangan Priyayi.

Pendidikan lainnya yang diperkenalkan dan dibuka oleh pemerintah kolonial adalah sekolah profesi, dan yang paling awal dan terkenal adalah sekolah kedokteran. Pada tahun 1851 berdiri Sekolah Dokter Jawa, yang juga direkrut dari kalangan Priyayi (Leirissa 1985: 27). Kelompok profesional lainnya adalah seperti kerani swasta, militer, pelaut dan wartawan yang terkadang tidak harus berasal dari pendidikan yang terkait. Mereka dapat dikatakan sebagai lapisan elite baru atau modern, menurut Robert van Niel (1984), dan Priyayi Baru dari Wiliam Frederick (1989), serta kelas menengah penerima gaji dari Takashi Shiraisi (1997: 36).

Berbagai profesi intelektual ini, menurut istilah Edward Shils (Legge 1993/ 2003: 24), memberikan tokoh-tokoh yang berperanan besar dalam pergerakan kebangsaan, mulai dari prakarsa pendirian perkumpulan modern hingga mengkultivasi kemerdekaan. Dalam dualisme kehidupan atau masyarakat kolonial, mereka membayangkan, memimpikan dan memperjuangkan suatu gagasan politik masa mendatang yang bebas dari kolonialisme, yang berkembang semakin jelas menjadi cita-cita membangun suatu bangsa yang merdeka (*free nation*). Sumber kesadaran dan gagasan itu tidak dapat tidak merupakan hasil dari introduksi pendidikan kolonial, yang berjalin dengan kenyataan yang dihadapi.

Sumber kesadaran, gagasan dan pemikiran mereka tentunya berikaitan dengan latar belakang sosial dan budaya asal, di pulau Jawa dari kehidupan masyarakat Jawa. Polemik kebudayaan yang muncul pada tahun 1930-an merupakan refleksi dari dampak pengaruh modernisasi di kalangan elit modern itu terutama menyangkut pandangan dan pemikiran mereka. Secara garis besar, pemikiran yang timbul dan saling berdebat adalah orientasi modern Barat dan Tradisionalisme Timur (Indonesia). Di antara spektrum-spektrum itu, kedudukan seseorang dari kalangan itu dapat ditemui, difahami dan dipelajari.Benang merah pengikat perbedaan-perbedaan itu adalah kebangsaan dan cita-cita kemerdekaan. Di antara spektrum itu pula, pemikiran-pemikiran tokoh pergerakan nasional muncul, berkembang, berdialog dan diterapkan dalam semangat perjuangan yang menggelora di tengah-tengah dinamika kepentingan kolonialisme.

Pemikiran-pemikiran kebangsaan dan kemerdekaan yang berasal dari zaman baru ini, seperti yang disebut oleh Takashi Shiraisi (1997 :36), lebih dikenal dari sejumlah tokoh yang

memang popular,yakni Sukarno, Sutan Syahrir dan Mohammad Hatta. Upaya mutakhir di sekitar mengangkat pemikiran tokoh adalah tentang Tan Malaka. [5] Namun, di balik mereka, masih banyak tokoh-tokoh lainnya yang tidak kalah penting dan berperanan besar pada masa pergerakan nasional. Salah seorangnya adalah Soetomo, seorang dokter lulusan STOVIA yang merupakan pendiri Budi Utomo yang diakui sebagai perintis kebangkitan nasional.[6] Ben Anderson (1983: 6) menyatakan "Budi Utomo didirikan oleh para mahasiswa STOVIA sekolah kedokteran di Batavia, yang dipimpin oleh seorang pemuda dari Jawa Timur bernama Soetomo, yang pada akhirnya menjadi salah satu pemimpin nasionalis yang paling terkemuka dari generasinya." Pada tahun 1963, hari lahir Boedi Oetomo ditetapkan pemerintah sebagai hari nasional (Djojohadikusumo 1969: 44).

Dalam kenangan P.P.A. Djajadiningrat, terdapat penggalan kisah: "Sebagai sudah saya ceritakan, maka di dalam tahun 1906 saya telah berkenalan dengan Dokter Wahidin Sudiro Husodo (sic), semasa ia berjalan mengelilingi seluruh tanah Jawa akan berikhtiar hendak mendirikan suatu national studiefonds. Dokter Wahidin bercerita kepada saya, bahwa cita-cita itu bukanlah lahir dari pikirannya sendiri, melainkan dari pikiran beberapa orang murid sekolah Dokter Jawa. Dekat akhir tahun 1908, maka beberapa orang murid sekolah itu (pada masa itu sekolahnya telah dinamakan School tot Opleiding van Inlandsche Artsen), telah mengambil keputusan buat mendirikan suatu perkumpulan orang Jawa. Maka perkumpulan itu akan dipandang sebagai biji dari pada suatu bond bangsa Jawa seumumnya, yang hendak didirikan di masa datang. Bestuur perkumpulan yang disusun buat sementara, telah menyiarkan surat edaran kepada sekalian kaum terpelajar di Indonesia. yang dimaksud dengan mendirikan perkumpulan itu dan yang menjadi cita-citanya, adalah nyata dari pada tutur kata salah seorang pembangunnya, yaitu tuan Sutomo, yaitu Dokter Sutomo di Surabaya, yang kemudian sangat termasyhur namanya itu." (Frederick & Suroto 1982: 140-141).

---

5 Tentang Sukarno lihat karya Bernhard Dahm, J.D. Legge dan Bob Hering. Lalu, Mavis Rose (1991). Indonesia Merdeka, dan Deliar Noer. Biografi Politik Mohammad Hatta. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990 tenang M. Hatta; serta Tan Malaka oleh Harry J. Poeze. Tokoh-tokoh pergerakan lainnya meliputi R.M. Tirtoadhisurjo, Setiabudi Danudirja (E. Douwes Dekker), Tjipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), H.O.S. Tjokroaminoto, Agus Salim, Suryopranoto, I.J. Kasimo dan lainnya.

6 Sebagai bandingan dan rujukan mengenai citra sosok Soetomo, lihat *"Like Cruz, Tan Malaka held views on Rizal that were both admiring and cirtical. Tellingly, he compares Rizal to Dr. Sutomo, "the late Pak Tom". In Indonesian history the moderate Sutomo is credited, among others, with the founding of Budi Utomo, from which date Sukarno traces the start of national awakening; Tan Malaka thought Sukarno's views on history were fundamentally in error, Rizal'comparison with Sutomo is only to emphasize Rizal's reformist agenda."*(Nery 2011: 134)

Pembahasan awal tentang tokoh ini justru berasal dari penulisannya tentang riwayat hidupnya sendiri. Dalam karya itu, yang digolongkan sebagai jenis otobiografi modern sebagai sumber penulisan sejarah (Frederick & Soeroto 1982/ 1984) ia bercerita tentang lingkungan masa kecil dan sosialnya. Hampir seluruh kesan yang diberikannya mengangkat sisi positif pada setiap sosok yang dikenalnya. Tentunya, pola penulisan seperti ini untuk sebuah sumber sejarah menjadi sangat dapat diperdebatkan. Namun, pola seperti itu memperlihatkan alam pemikiran dan cara berpikir seorang insan dalam suatu kebudayaan yang sedang bertarung dengan pengaruh budaya hegemoni. [7]

Ia juga menulis berbagai masalah yang menjadi perhatian dan keprihatinannya tentang keadaan dan perkembangan sekitarnya, mulai dari politik, sosial hingga budaya. Dari tulisan-tulisan itu, gagasan dan pemikirannya tampak jelas yang telah dieksplorasi dan dikembangkan dalam berbagai karya, seperti oleh Savitri Scherer (1982), BRO'G Anderson (1983), Paul W. van der Veur (1984) dan Frank Dhont (2005). Pemikirannya m(erentang dari gagasan Hindia mulia (Budi Utomo), Kebangsaan, Kemerdekaan, Politik kooperatif, Gerakan buruh, Pendidikan, Kebudayaan, Pers, Pemberantasan penyakit, Indonesia raya, Kesejahteraan rakyat, dan yang tidak kalah signifikannya adalah Indonesia mulia. Di antara butir-butir pemikiran ini, persoalan ekonomi, baik dalam arti dunia usaha maupun kesejahteraan tampak yang menjadi landasan dan cita-cita perjuangannya. Pokok-pokok pemikirannya itu berkembang selaras dengan konteks zaman, wadah kegiatan dan interaksi sosial intelektualnya dengan lingkungan pergerakan nasional.

Gagasannya tentang menggapai kesejahteraan rakyat tampak jelas di tengah-tengah deru pergerakan nasional yang sedang berkembang dan mencari bentuk di bawah pengawasan dan kekuasaan kolonial. John Ingelson (1983: 138) menyatakan: "Pada kesempatan pertemuan dengan sejumlah tokoh pergerakan , dari kelompok koperator dan non, termasuk dari PNI dan peningkatan pengawasan pemerintah kolonial, membicarakan tentang cara untuk mencapai tujuan bersama, Soetomo mengusulkan pembubaran PNI dan pembentukan partai yang baru. Dalam gagasan itu, keprihatinan dan perhatiannya terhadap kesejahteraan rakyat tampak, pada tujuan bukan untuk menggapai kemerdekaan yang dikamuflase dengan tujuan untuk perbaikan ekonomi dan sosial. Tentunya, tujuan itu bukan hanya sekedar pengaburan untuk mengelabui pengawasan colonial tetapi memang niatnya untuk meningkatkan taraf penghidupan rakyat.

7 Ben Anderson (1983: 6) mengulas karya itu, sebagai "Secara kebetulan, Soetomo juga merupakan tokoh Indonesia pertama yang menulis sesuatu seperti otobiografi, yang amat terkenal yaitu Kenang-kenangan, suatu judul yang bisa diterjemahkan sebagai 'Memoir', tetapi lebih baik diartikan 'Memori'. Oleh sebab itu, agaknya masuk akal bahwa studi terhadap otobiografi ini dapat memberikan kunci yang akan mengungkap apa arti menjadi anggota suatu generasi yang 'telah sadar', dan lebih umum sebagai bagian dari cara berpikir yang di dalamnya masa lampau, masa kini, dan masa mendatang dipahami dan dihubungkan bersama dalam jiwa pribadi politik yang paling punya daya tahan dari generasi tersebut."

Gagasan dan pemikirannya berkembang di tengah-tengah dinamika pergerakan nasional dan tanggapan politik pemerintah kolonial. Panggung politik pergerakan nasional menggiring dan membawanya ke ranah-ranah sosial dan perjuangan yang beragam, mulai dari membentuk Budi Utomo sampai Partai Indonesia Raya (Parindra). Kancah itu pula menempa pemikiran-pemikirannya. Pada wadah perkumpulan itu perhatian dan nalarnya mencari dan menemukan bentuk hingga menjadi mosaik intelektual yang utuh, tajam dan bernas, bahkan relevan untuk masa setelahnya. Dari sudut pandang yang berbeda, di balik keterlibatannya dalam wadah-wadah itu, termasuk rintisan dan pembentukan sejumlah lembaga, terdapat gagasan dan pemikiran yang tidak hanya untuk kepentingan masa itu melainkan juga jauh ke masa mendatang. [8]

Genealogi Pemikiran dr. Soetomo

Sebagai salah seorang perintis pergerakan nasional, sosok dr. Soetomo kerap dipahami dan dijelaskan dalam kapasitasnya sebagai tokoh politik.[9] Di tengah-tengah suasana

8 Pandangan berikut memperkuat citra tokoh ini, yaitu “Sejak itu saya tidak pernah berjumpa dengan Dr. Soetomo. Tetapi walaupun demikian saya tetap menghormati beliau sebagai seorang pemimpin nasionalis yang besar jasa-jasanya pada tanah-air dan bangsa. Sayang, pada hari wafat dan pemakaman beliau di Gedung Nasional, Bubutan, Sutabaya, saya tidak bisa hadir. Saya hanya bisa mengirim tilgram pada pengurus besar PBI untuk menyatakan penghormatan terakhir saya pada pemimpin nasionalis yang tangguh dan besar pengaruhnya itu. (Sastroamidjojo 1974: 99).

9 Makna Budi Utomo dan gagasan dr. Soetomo untuk masa kini dapat dicermati dari kutipan ini: “Andaikata Budi Utomo tidak dilahirkan pada tanggal 20 Mei 1908, barangkali sejarah tidak akan pernah mencatat tentang mahalnya nilai sebuah ‘kesadaran’. Tanpa kesadaran, kita berkeyakinan, tidak aka nada kekuatan untuk bangkit. Kesadaran bisa membangunkan harapan. Ide, dan kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri. Ia melahirkan ketahanan yang pada gilirannya dapat membuahkan sebongkah kemakmuran, berkat kesadaran pula, harkat, martabat, prestasi, dan bahkan harga diri dapat ditingkatkan…Bisa saja sekiranya dr. Soetomo tidak jadi memimpin rapat di sebuah ruang anatomi Stovia, maka sampai kini mungkin kita tidak akan mengenal apa artinya sebuah persatuan dan kesetiakawanan nasional, apalagi Kebangkitan Nasional. Boleh jadi, apa yang disebut ketahanan ipoleksosbudhankamnas yang mengacu pada demokrasi Pancasila tidak akan tercata dalam kamus perjuangan..Sampainya kita pada masa kemerdekaan dan pembangunan serta munculnya Orde Reformasi, tentunya berkat kesadaran terhadap pentingnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kesadaran ini pula yang membawa kita ke depan pintu gerbang era reformasi pmbangunan.” (Departemen Penerangan RI 1999: 1). Juga dalam publikasi ini muncul pernyataan: “Kita yakini bahwa pergerakan Boedi Oetomo 91 tahun yang lalu dinilai sebagai suatu tonggak perjuangan bangsa yang terjajah, terbelenggu, terbelakang, miskin dan bodoh. Para tokoh pejuang ketika itu, terutama dr. Soetomo dan dr. Wahidin Soedirohoesodo menyadari, untuk terhindar dari belenggu keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan itu hanya mungkin jika dilakukan oleh bangsa kita sendiri, bukan oleh penjajah. Untuk itu langkah besar ke depan harus diambil demi terwujudnya persatuan bangsa.” (hal. i). Terdengar terlalu berlebihan, kutipan ini menyiratkan sudut pandang, masalah dan kerisauan zamannya, setelah terjadi

perubahan sosial, melalui penerapan pendidikan Barat, ia mengenal alam pemikiran yang rasional, dan terlebih penting lagi adalah tentang emansipasi. Keprihatinannya terhadap ketidakadilan dan ketidaksetaraan, yang telah tampak sejak masa sekolah ketika melawan penghinaan siswa Belanda terhadap siswa bumiputera walau sebenarnya ia diperlakukan dengan baik, merupakan wujud rasa kepedulian itu. Dalam perkembangan psikologi dan daya pikirnya, rasa seperti itu memainkan peranan penting membentuk arah dan perhatiannya, sehingga pemikiran politiknya berwujud azas kesetaraan dan percaya pada kemampuan sendiri, atau dalam bahasa umumnya adalah *equality* dan *self determination*. Ketika mulai mengenal pemikiran dan perjuangan tokoh India, Mahatma Gandi yang terkenal dengan pemikiran dan sikap swadeshi, ia kian mantap dalam gerakan dan kiprah mengangkat harkat masyarakatnya yang sudah dibayangkan sebagai suatu komunitas bangsa, yang berkembang dari etnis Jawa hingga ke etnis lainnya.

Taufik Abdullah (2009) menggambarkan awal mula dan perkembangan kesadaran politik pada intelektual anak jajahan dari hasrat kemajuan hingga mewujudkan demokrasi. Dalam pertumbuhan kesadaran yang berlangsung di bawah perkembangan pendidikan Barat, jalinan pers menjadi sarana dalam persebaran gagasan dan inspirasi yang melintasi batasan spasial dan identitas etnis. Tercerabut dari akar primordial dan upaya mewujudkan impian dan gagasan mewarnai dinamika pergerakan mereka di bawah cakrawala kepentingan politik dan ekonomi kolonial. Dalam pandangannya (2009: 9), Soetomo dan Boedi Oetomo (BO) antara lain adalah *"with the sole aim of liberating the people from the tyranny of poverty and backwardness, the* BO *was to be remembered as the first modern voluntary association in Indonesian history.*"

Syamsuddin Haris (1994: 34) menyatakan bahwa Budi Utomo telah mengenal azas-azas demokrasi. Ia menyatakan: "Walaupun demikian, tidak berarti Budi Utomo sendiri bukan suatu organisasi yang demokratis. Secara internal, wadah pergerakan orang Jawa ini bisa disebut organisasi pertama yang menerapkan prinsip-prinsip organisasi secara demokratis. Hal ini tercermin di dalam rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Budi Utomo yang terdiri atas 55 pasal dan 6 ayat aturan tambahan. Di dalam rancangan ini tidak saja diatur pembagian tugas dan wewenang pengurus dan anggota BU, melainkan juga sudah memberlakukan cara pemilihan pengurus melalui pemungutan suara."

Nurcholish Madjid menggambarkan Soetomo sebagai salah seorang tokoh yang

---

perubahan politik yang sempat mengguncangkan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Pandangan yang berbeda dan menempatkan Budi Utomo dan Soetomo pada konteks yang lebih luas sehingga terkesan tidak istimewa lihat Yudi Latief (2011), misalnya: "…Perkembangan ini disusul oleh kehadiran pelbagai organisasi modern berorientasi kemjauan, salah satunya adalah Budi Utomo" (hal. 144), juga lihat latar belakang pendirian BU pada halaman 289 yang tidak memberikan penekanan pada peranan Soetomo, bahkan dalam indeks karya ini nama tersebut tidak tercantum walau disebut pada beberapa halaman isinya terutama yang berkaitan dengan Budi Utomo dan STOVIA.

mendorong gerakan kepemudaan yang masih primordial menjadi bibit nasionalisme sebagai landasan untuk kemudian menuju "Indonesia". Ia menyatakan (2004: 33, 34): "…dari STOVIA dan NIAS muncul bibit-bibit nasionalisme modern di kalangan masyarakat Hindia Belanda, berkat kepeloporan Dokter Wahidin Sudirohusodo dan Dokter Soetomo. Bibit-bibit dalam persemaian STOVIA dan NIAS itu kemudian bersemi dan tumbuh subur. Mula-mula sebagai dorongan berkembangnya perkumpulan kepemudaan dalam batas kesukuan atau kepulauan dan kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatra, Jong Ambon, Jong Celebes, saat kata pengenal 'Indonesia' yang lebih menyeluruh belum digunakan." Ketika mendirikan dan bergiat dalam Studi Klub Indonesia *(Indonesische Studieclub)*, Soetomo menghimpun anggota dari perkumpulan kedaerahan, seperti Sarekat Madura, Sarekat Ambon, Perserikatan Minahassa, Pasoendan, Jong Sumatranen Bond hingga Sarekat Islam (Dhont 2005: 40).

Savitri Scherer menggambarkan sikap, tekad dan kiprah politik Soetomo, secara ringkas, sebagai sebuah harmonisasi orkestra tradisional gamelan. Ia berbeda dengan dr. Tjipto Mangunkusumo yang begitu berapi-api dan kerap mengambil cara konfrontasi, tidak hanya terhadap kekuasaan kolonial melainkan juga kepada sesama tokoh pergerakan nasional lainnya. Dari tulisan Soetomo mencuat pernyataan bahwa: "Sudah kami kemukakan betapa baiknya kalau masing-masing orang bekerja di bidangnya sendiri-sendiri, untuk kepentingan umum dan untuk mencapai kemerdekaan dan kejayaan bangsa. Kita mengumpamakan sebagai para penabuh gamelan *(niyaga)*. Setiap penabuh gamelan harus paham benar, lebih baik lagi kalau ia seorang ahli. Mereka melakukan tugas secara teratur, menurut aturan yang sudah ditentukan, berdisiplin sehingga dapat bekerja sama tanpa yang satu menunggu yang lain atau membiarkan pekerjaannya sendiri terbelengkalai. Supaya timbul keadaan yang rapi dan harmonis tidak sumbang (van der Veur 1984: 99).

Gambaran berikutnya tentang sosok tokoh ini terdapat pada pandangan Susan Abeyesekere (1972: 263), yang menuliskan:

"Soetomo's life and thought blended foreign and Javanese aspects. He himself was far from provincial, having worked in Sumatra as well as Java, studied medicine at Amsterdam and married a Dutch-woman. His aim was a united, glorious Indonesia, Indonesia Moelia (which in his view subsumed independence), and to this end he drew inspiration from the Japanese samurai, from Gandhi, and in fact from all strong nationalist leaders from Kemal Ataturk to Hitler. A strong humanitarian streak in him coincided with a Javanese sense of dharma ksatria. Although he objected to Western class divisions, he saw Indonesian society as consisting of groups which had distinct duties. If each group obeyed its dharma, society would prosper and function harmoniously. As he did at the fusion congress, Soetomo generally addressed himself to the educated and noble groups, urging them to fulfil their duties of leadership towards the weak masses. To label Soetomo a bourgeois nationalist, as Pluvier does, is too simplistic and misleading; his aims and methods can be interpreted in

both Western and Javanese terms, and generally his eclecticism defies pigeon-holing."

Pemikiran dr. Soetomo, yang tersebar di berbagai karangan dan tulisan dapat disistematisasikan ke dalam beberapa pokok permasalahan, mulai dari politik, budaya, sosial dan ekonomi. Tiga aspek pemikiran pertama telah banyak diungkapkan dalam berbagai karya, mulai dari Akira Nagazumi (1989), Savitri Scherer (1982) dan yang mutakhir dari Frank Dhont (2005). Sementara pemikiran ekonominya relatif masih belum banyak diungkapkan dan dibahas. Frank Dhont yang menyoroti kiprah dan perjuangan Soetomo pada tahun 1920-an ketika bergerak dalam Studi Klub Indonesia tidak memberikan perhatian pada aspek tersebut. Savitri Scherer yang mengungkapkan sisi budaya priyayi Soetomo menyisipkan kilas-kilas gagasan dan pemikirannya yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Sementara Nagazumi hanya menyoroti awal dan perkembangan awal Boedi Oetomo.

Pandangan yang menarik berkenan dengan nuansa ekonomi dalam sosok Soetomo adalah, "PBI berusaha meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia dengan mendirikan pelbagai lembaga ekonomi di kota maupun di desa. PBI yang berlandaskan persatuan nasional itulah yang didekati oleh Boedi Oetomo. Pada tahun 1934 keduanya membentuk suatu panitia untuk mempelajari kemungkinan-kemungkinan fusi. Usaha ini berhasil pada Konperensi di Yogyakarta pada bulan Oktober 1935. Nama baru yang dipakai adalah Partai Indonesia Raya (Parindra). Kegiatan-kegiatan PBI tetap diteruskan namun dasar-dasar kebudayaan dari Boedi Oetomo memberi arti yang khusus pada kegiatan-kegiatan ekonomik itu. Kemudian pelbagai organisasi ethnis bergabung pula dalam Parindra…..Parindra merupakan suatu wadah dari golongan yang ingin mengubah struktur masyarakat dengan cara-cara pembangunan ekonomi. Usaha ini sangat banyak berhasil terutama di kalangan masyarakat Jawa. Juga cabang-cabang Parindra di Ujung Pandang dan Ambon sangat banyak membantu menanamkan kesadaran akan perubahan masyarakat dan peningkatan kemakmuran (Leirissa 1985: 70-71).[10] Tentunya, perjuangan organisasi pergerakan nasional itu dilatarbelakangi dan dilandasi oleh keprihatinan, gagasan dan pemikiran, yang tidak pelak lagi berasal dari Soetomo.

10 Berkenan dengan pembentukan PBI, bandingkan dengan "Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda, juga dapat mengubah cara berpikir Dr. Soetomo, yaitu yang pada mulan-ya tetap mengikuti cara pergerakan Budi Utomo yang menempuh melalui pergerakan dalam bidang sosial budaya, maka sejak kembalinya dari negeri Belanda berubah dengan menem-puh melalui pergerakan politik. Berhubung untuk pergerakan politik mengalami kesulitan apabila tetap menggunakan wadah organisasi yang pernah didirikannya, yaitu Budi Utomo itu, maka Dr. Soetomo mendirikan wadah organisasi yang lain yang langsung bergerak da-lam bidang politik. Organisasi yang baru ini bernama Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). (Sudiyo 1989, hal. 118-119).

Priyayi dan Ekonomi

Priyayi telah banyak dipelajari, dalam berbagai aspeknya, oleh berbagai pakar, terutama yang menaruh perhatian pada masyarakat dan budaya Jawa.[11] Peranan mereka dalam pentas sejarah Indonesia memang tidak dapat diabaikan dan memberikan warna yang sangat kuat dalam perubahan sosial, walau mereka juga merupakan hasil dari proses tersebut. Asal usul dan perkembangan mereka memiliki akar pada masa lalu (sejarah) dalam interaksi dengan kolonialisme. Mereka tidak hanya bertindak pasif di bawah cakrawala kolonial, melainkan memainkan peranan dan fungsi yang tidak dapat diabaikan. Walau, watak, sifat dan identitas mereka tidak dapat dilepaskan dari kolonialisme Belanda. Namun, keberadaan mereka seyogyanya difahami dalam pertemuan dua kultur birokrasi dalam konteks perubahan-perubahan yang terjadi dalam kepentingan masing-masing pihak, yang dapat dikategorikan sebagai birokrasi tradisional dan modern. [12]

Penjelasan priyayi mencakup mulai dari asal keturunan, status sosial, varian budaya

11 Studi yang menarik adalah karya Kuntowidjojo dan Kartodirdjo dkk. Keduanya menyibak struktur budaya dan mentalitas kelompok sosial tersebut. Menambahkan kerangka pemikiran di sekitar peralatan analisis itu adalah pandangan dari Helius Syamsudin (2007: 327-329) yang menyatakan, "Sejarah mentalitas mempunyai cakupan yang cukup luas yang berhubungan dengan ide, ideologi, orientasi nilai, sikap, watak, mitos dan segala hal yang berkaitan dengan struktur kesadaran. Dalam sejarah mentalitas yang menjadi perhatian adalah bagaimana idea tau semangat mempengaruhi proses sejarah tertentu. Dalam prakteknya melihat bagaimana interaksi antara ide dan aksi, terutama sebagai mentalitas kolektif atau kelompok." Selanjutnya dikatakan bahwa "Sering kali kajian sejarah intelektual dianggap tumpang tindih dengan sejarah mentalitas karena kedua-duanya bersumber pada *mentifact*, fakta kejiwaan atau mentalitas. Tetapi untuk mudahnya dibedakan sejarah intelektual mempelajari ide-ide (ideas) sedangkan sejarah mentalitas mengkaji kepercayaan dan sikap-sikap rakyat (*popular beliefs and attitudes*)…..Alam pikiran manusia pada masa lalu pada hakekatnya menjadi perhatian utama sejarah intelektual. Alam pikiran itu mempunyai struktur-struktur dan struktur-struktur ini dianggap lebih dapat bertahan dan mempunyai pengaruh langsung terhadap perbuatan manusia daripada struktur sosial- ekonomi. Contohnya kongkrit misalnya ideologi-ideologi politik seperti liberalisme, sosialisme, konservatisme dan sebagainya….Akhirnya, segala sesuatu yang berhasil dicapai oleh akal budi manusia pada masa lampau merupakan obyek penelitian sejarah intelektual."

12 Studi birokrasi modern dirintis oleh Max Weber yang membedakannya dengan birokrasi tradisional berdasarkan prinsip rasionalitas dan pembagian tugas serta wewenang yang jelas. Namun, dalam konteks kolonialisme yang sarat dengan kepentingan eksploitasi dan tidak sepenuhnya mengindahkan prinsip-prinsip birokrasi modern. Sejak tahun 1960-an, studi tentang Birokrasi negara sedang berkembang, terutama di Asia Tenggara dirintis oleh Frederick Riggs yang memunculkan teori birokratik politik (*bureaucratic polity*) atau masyarakat politik birokratik. Asumsinya adalah dalam pembuatan kebijakan di negara-negara baru itu, birokrasi merupakan salah satu pilarnya. Peranan ini tidak sesuai untuk kultur politik yang modern dan demokratis, yang berdasarkan pada suara rakyat.

hingga lapisan politik. Etimologi Priyayi adalah Para dan *Yayi* atau adik, yaitu para adik raja (penguasa). Oleh karena mereka, sebenarnya, tidak memiliki ikatan darah, keturunan dan kekerabatan dengan raja atau bangsawan. Mereka adalah para elit yang diangkat karena mengemban fungsi dan tugas tertentu dalam penyelenggaraan kekuasaan kerajaan (birokrasi). Dalam lingkungan Feodalisme Eropa, dikenal para bangsawan berjubah (*noble of the robe*), yang berbeda dengan bangsawan berpedang (*noble of the sword*). Mereka menjadi bangsawan karena fungsi dan tugas dalam urusan upacara keagamaan dan administrasi.

Mereka kemudian diberikan gelar mirip dengan para bangsawan sejalan dengan kedudukan dalam jenjang pemerintahan, yang menjadi turun temurun. Dalam penyelenggaraan pemerintahan kolonial, mereka menjadi bagian perantara dengan rakyat. Dalam alam kolonialisme, saat kebutuhan penyelenggaraan kekuasaan meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi, mereka memperoleh pendidikan Barat melalui sekolah. Awalnya, Sekolah Raja (*Hoofdenscholen*) didirikan hanya untuk putera-putera bangsawan dan penguasa tradisional. Sekolah ini berkembang menjadi OSVIA dan MOSVIA, yang menerima kalangan Priyayi (Djojohadikusumo 1969).

Sebagai varian budaya, Priyayi diteliti oleh Clifford Geertz (1960) yang berbeda dengan varian Santri dan Abangan. Orientasi budaya mereka, menurut Soemarsaid Moertono (1984), adalah pada sinkretisme Hindu dan Islam. Di kalangan Abangan, kepercayaan ini dikenal juga sebagai Kejawen. Dalam politik, kepercayaan ini melahirkan suatu budaya politik yang memiliki akar sejarah berkaitan dengan kehadiran kolonialisme. Budaya politik mereka sering dipandang korup, sarat dengan nepotisme dan despostik. Tentunya, gambaran ini menyisakan pembicaraan apakah sifat dan ciri birokrasi yang pramodern ini merupakan warisan dari sebelum masa kolonialisme Hindia Belanda, atau justru merupakan dampak dari birokratisasi kolonialisme.[13] Suatu pembicaraan yang menarik adalah warisan dan kontribusi budaya politik mereka dalam perkembangan politik nasional Indonesia, terutama di masa kini dalam menghadapi pengaruh globalisasi yang sarat dengan persaingan ketat antar bangsa dalam mempertahankan kepentingan nasional masing-masing.

13 Apabila merujuk kembali ke masa-masa awal abad ke-19, ketika kepulauan Indonesia dikelola tidak lagi oleh perusahaan dagang VOC yang sudah runtuh melainkan oleh Negara Hindia Belanda, banyak tulisan mengenai perlunya penerapan birokrasi modern untuk melindungi rakyat jajahan dari penindasan para penguasa tradisional mereka. Juga pada masa Raffles, ungkapan serupa muncul dalam penerapan kebijakan politik pemerintahan peralihan Inggris tersebut. Namun, politik kolonial menjadikan mereka terkontaminasi ekses dari praktik birokrasi yang eksploitatif dari para pejabat kolonial Belanda yang sebenarnya juga penuh dengan *vested-interest* atau pamrih. Dalam birokrasi pemerintahan kolonial, tidak hanya menyerabut mereka dari rakyat atau kaula mereka melainkan juga menjadi bagian kebijakan yang eksploitatif untuk keuntungan negara kolonial dan terutama negeri induk. Walau tidak jarang, birokrasi kolonial membela rakyat jajahan dari perlakuan yang dipandang tidak sesuai dari para priyayi. Umumnya, dalam konflik antara priyayi dan pejabat kolonial, para priyayi jarang "menang". Biasanya, ukuran kalah dan menang itu adalah mutasi jabatan.

Savitri Scherer (1985) mencatat adanya dua tipologi priyayi yaitu, priyayi ningrat dan bukan ningrat. Merujuk kepada istilah awalnya, sebagai adik raja atau penguasa, tampaknya ada proses perluasan kalangan priyayi. Keluarga bangsawan atau ningrat berkemungkinan tidak terserap ke dalam pemerintahan. Untuk itu, mereka memasuki lingkungan profesi, seperti guru dan kedokteran. Mereka lalu turun derajad, menjadi priyayi. Juga kalangan ningrat birokrat disebut juga sebagai priyayi, sehingga memunculkan pembedaan antara priyayi tinggi dan rendahan. Di bawah pengaruh kolonialisme, yang merasuk melalui penerapan pendidikan modern, pemilahan ini tampak pada kalangan priyayi yang diperbolehkan memasuki sekolah pemerintahan dan profesi. Mereka yang berlatarbelakangkan pendidikan pemerintahan dan masuk ke dalam jajaran birokrasi digolongkan sebagai priyayi tinggi. Sementara mereka yang terjun ke dunia profesi dikatakan sebagai priyayi rendahan.

Pemilahan ini tampaknya tidak diperhitungkan dalam roda pemerintahan kolonial. Apabila penghargaan lebih diukur dari pendapatan materi, berupa bea siswa, pemerintah kolonial lebih memperhatikan sekolah-sekolah profesi, seperti guru dan dokter. Para siswa kedua sekolah ini, yang berasal dari kalangan priyayi rendahan memperoleh santunan lebih besar daripada siswa sekolah pemerintahan, yang malahan harus membayar sendiri uang sekolah mereka. Bahkan seorang priyayi pendukung kalangan tinggi, sempat menyarankan kepada pemerintah kolonial untuk menutup sekolah kedokteran dan mengalihkan pengetahuan itu kepada kurikulum pengajaran di sekolah pemerintahan. Namun, gagasan ini tidak memperoleh tanggapan dari pemangku kebijakan jajahan.

Status yang disandang berdasarkan pandangan masyarakat tidak selalu memberikan kepuasan kepada kalangannya. Kesan ini membias tampaknya di kalangan priyayi rendahan. Misalnya, ayah Soetomo, R. Soewadji yang menjadi seorang priyayi birokrasi merasa tidak nyaman dalam lingkungan pekerjaannya karena selalu merasa diremehkan oleh para birokrat kolonial (Belanda). Oleh karena itu, ia tidak pernah mengharapkan anaknya, seperti dr. Soetomo untuk memasuki pendidikan pemerintahan. Ia lebih mendorong puteranya itu ke sekolah profesi, yang sebenarnya memang diperuntukkan untuk kalangan priyayi seperti mereka. Memang, putera-putera lelakinya, adik-adik Soetomo, tidak ada yang memasuki sekolah itu, melainkan mengikuti jejak kakak tertuanya, menjadi dokter.

Perlakuan sosial yang membedakan selalu mencari jalan keluar untuk menyejajarkan, kalau tidak membalikkan, keadaan. Kalangan priyayi rendahan mencari emansipasi melalui peluang-peluang yang terbuka seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman. Kalangan elite bumiputera berada di bawah cakrawala kolonialisme yang tidaklah statis, melainkan selalu berubah seiring dengan kepentingan kolonialnya dan upaya memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan global. Pembuatan kebijakan kolonial sering kali melalui perdebatan dan persaingan untuk berakhir menjadi suatu keputusan.[14] Emansipasi

14 Contoh yang sangat jelas adalah sejak masa Sistem Tanam Paksa. Gagasan J. van den

kalangan priyayi profesional disambut oleh berbagai gagasan modern yang berasal dari perimbangan dan persaingan dalam tubuh kolonialisme.

Berkaitan dengan ekonomi, persepsi terhadap Priyayi dan budaya yang sarat dengan simbol-simbol status dan jabatan, tidak menempatkan mereka sebagai pilar perkembangan ekonomi. Mereka dipandang tidak memiliki jiwa dan semangat kewirausahawan *(entrepreneurship)*, yang merupakan salah satu faktor dalam proses ekonomi. Budaya priyayi tidak memberikan tempat pada pencarian keuntungan (*profit seeking*) dan pemupukan modal (*capital accumulation*) yang diperlukan untuk menggerakan perekonomian. Walau mereka menguasai salah satu faktor modal (*capital*) yaitu tanah (*land*). Berdasarkan warisan politik tradisional, mereka umumnya dianugrahi sebidang tanah atau lahan sesuai dengan jabatan yang disandang, yang kemudian diukur dan diganti dengan gaji (*salaries*) dalam bentuk mata uang.[15] Pendidikan modern makin memperkuat pandangan orientasi ekonomi ini, walau masih memberikan celah penggalian mengenai moral ekonomi priyayi.

Dalam pemikiran ekonomi politik dikenal suatu istilah dan konsep Kelas Menengah (*Middle Class*). Perkembangan di Prancis menjelang Revolusi tahun 1789 memperlihatkan kemunculan dan peningkatan peranan suatu lapisan masyarakat yang sering disebut sebagai lapisan ketiga (*the third estate*). Kemudian, dalam kepustakaan Ilmu Politik muncul istilah dan konsep Kelas Menengah. Merujuk kepada konteks Revolusi Prancis, kelas menengah adalah kelompok yang tidak memiliki kekuasaan dan status sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam stratifikasi politik dan sosial Prancis menjelang revolusi, mereka menempati lapisan di antara para elite yang terdiri atas Raja, keluarganya, Bangsawan, dan Agamawan yang memiliki berbagai keistimewaan (*privileges*), dan rakyat jelata. Pada hal, secara ekonomi mereka merupakan para pedagang, pengusaha dan profesi sejenis lainnya yang tidak diminati oleh kalangan elite, yang menjalankan sebagian besar roda kehidupan masyarakat.

Secara intelektual, mereka menyerap dan mengartikulasi gagasan-gagasan modern baik yang berasal dari kazanah pengetahuan warisan kejayaan Helenisme hingga pemikir-pemikir sezaman sejak masa Renaissance dan Pencerahan (*Aufklarung*). Melalui mereka

---

Bosch bukan satu-satunya usulan yang sampai ke hadapan Raja Belanda. Gagasan tandingan lainnya adalah pemulihan jaringan pelayaran dan perdagangan seperti pola VOC. Akan tetapi, kebijakan kolonial yang muncul adalah Sistem Kulturstelsel, yang berasal dari van den Bosch. Juga gagasan *Eereschuld* (Hutang Budi) dari van Deventer yang menjelma menjadi kebijakan atau Politik Etis *(Etische Politiek)* melalui serangkaian perdebatan. Dalam perdebatan-perdebatan selain kepentingan kolonial yang menjadi pokok pembicaraan, masalah penduduk jajahan terselip juga yang tidak jarang berlatarbelakangkan simpati dari kalangan yang sedikit banyak bersifat philantropis atau progresif.

15 Penggajian ini juga menjadi symbol bahwa priyayi menjadi bagian birokrasi kolonial, tidak lagi merupakan kepala-kepala rakyat (*volkshoofden*). Walau secara budaya dan ekonomi, hubungan *kawula lan gusti* tidak hapus seluruhnya.

gagasan dan pemikiran pembaharuan politik, sosial, budaya dan ekonomi menandingi struktur monarki dan feodalisme yang menyokong sistem absolutisme. Wacana intelektual itu berkembang menjadi gerakan sosial dan massa yang berhasil meruntuhkan kekuasaan monarki absolut di Prancis.

Kelas Menengah tidak sama dengan Wiraswasta *(Entreprenur)* yang merupakan salah satu faktor dalam Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi. Walau peranan mereka dalam perekonomian signifikan dan relevan dengan orientasi dan kepentingan mereka. Lalu, dalam teori Politik dan Ekonomi Politik, peranan mereka diandalkan terutama untuk bangsa-bangsa yang baru merdeka, atau dalam istilah Bank Dunia sebagai negara-negara sedang berkembang *(developing countries)*, untuk membangun demokrasi dan perkembangan ekonomi. Dalam pengalaman bangsa-bangsa Barat, demokratisasi politik menjadi faktor penting dalam perkembangan ekonomi. Pada lingkup ini, peranan Kelas Menengah menjadi jelas. Dalah teori Marxisme, peranan Kelas Menengah juga penting membuka gerbang proletarisasi sebagai kekuatan yang revolusioner.

Perkembangan pembicaraan berikut, dalam pusaran mencari sosok kelompok pembaharu dan pendorong kemajuan, konsep sosial politik ini menjadi menyempit pada kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi dan menempati lapisan menengah dalam stratifikasi kelas menurut Max Weber, yang berdasarkan pada indikator ekonomi, seperti pendapatan, kekayaan dan lainnya. Walau bergeser makna, daya penjelasan konsep ini tidaklah pudar. Dalam perkembangan Teori Ilmu Sejarah, Strukturisme menempatkan kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk melakukan perubahan, disebut sebagai *Agency*.

Dalam perkembangan Sejarah Indonesia, perubahan-perubahan dicetuskan dan dibawa oleh kelompok-kelompok tertentu, mulai dari ulama, pedagang hingga intelektual. Pada kategori yang disebutkan terakhir, tercakup kalangan Priyayi. Pergerakan nasional yang mencetuskan gagasan dan konsepsi kebangsaan, kemerdekaan dan bangsa Indonesia memperlihatkan inisiatif dan peranan berbagai kalangan masyarakat jajahan, terutama Priyayi. Benih-benih kebangsaan disemai oleh kalangan Priyayi muda melalui pendirian suatu organisasi modern, Boedi Oetomo.

Pada masa kolonial, umumnya kelompok Priyayi tidak bergerak langsung di lapangan perekonomian, seperti perdagangan dan usaha. Mereka lebih banyak bergerak dalam bidang pemerintahan dan profesi. Namun mereka juga merupakan aktor perekonomian dalam kategori golongan berpendapatan tetap yang memiliki potensi untuk menjadi pelaku perekonomian.

R.Z. Leirissa (1985: (35-36; 37-39) menjelaskan bahwa "Suatu hal yang menarik menurut

para sejarawan tersebut adalah kurangnya economic mobility di kalangan masyarakat tingkat priyayi ataupun santri. Dengan munculnya tuntutan-tuntutan baru yang bersumber pada revolusi industri di Eropa, sebenarnya terbuka peranan-peranan baru dalam bidang ekonomi. Umpamanya peranan pedagang perantara yang menyalurkan hasil-hasil perkebunan rakyat dan hasil agrarian lainnya ke kota-kota besar (untuk disalurkan ke luar negeri ataupun untuk dipakai sendiri oleh penghuni kota) atau pun sebagai penyalur barang-barang konsumsi baru yang mulai meluas sampai ke taraf pedesaan. Yang mengambil keuntungan ini ternyata orang-orang Cina yang sudah lama sebelumnya banyak terdapat di Indonesia dan lain-lain daerah di Asia Tenggara….Sejumlah sejarawan juga mempersoalkan mengapa kaum priyayi tidak mengambil kesempatan-kesempatan bagus tersebut. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa bagi kaum priyayi perdagangan adalah fungsi untuk golongan rendahan….Jadi VOC lah yang menggagalkan peranan ekonomi yang melekat pada kedudukan priyayi. Ketika kesempatan-kesempatan baru tersebut muncul dalam bagian kedua abad ke-19, dengan sendirinya kaum penguasa (priyayi) tidak dapat mempergunakannya."

Semangat Politik Etis

Nasionalisme di Indonesia merupakan suatu fenomena yang beraneka ragam dan harus dibedakan antara fase-fase pergerakan yang lebih awal dan lebih kemudian, antara mereka yang berpikir di dalam kerangka kebangkitan kembali Islam dan di dalam kerangka kemerdekaan politik, serta antara orang-orang yang terutama menghendaki kemerdekaan dari kekuasaan Belanda dan orang-orang yang menginginkan perubahan-perubahan sosial yang radikal. Keanekaragaman ini kadang-kadang mewujud dalam bentuk perhatian—yang pada umumnya bersifat aristokratik, atau sekurang-kurangnya elitis—terhadap pendidikan dan perbaikan nasib penduduk pada umumnya, kadang-kadang dalam upaya-upaya untuk menciptakan suatu gerakan massa dengan atau tanpa landasan Islam, seperti Sarekat Islam atau Partai Nasional Indonesia (PNI), dan kadang-kadang dalam bentuk yang lebih radikal seperti Federasi Sosial-Demokrat Hindia (yang di kemudian hari menjadi Partai Komunis Hindia). Dari segi ideologi, teori Marxis dapat bergandengan dengan reformisme Islam atau pemikiran demokratis Barat. Sejak pertengahan dasawarsa 1920, konsolidasi dari apa yang dinamakan nasionalisme secular yang dapat dibedakan dengan bentuk-bentuk nasionalisme Islam atau nasionalisme komunis, mencerminkan suatu perlawanan yang lebih terbatas dan berfokus lebih sempit terhadap kekuasaan Belanda. Cara pendekatan ini diwakili dalam Perhimpunan Indonesia di Belanda, *studie club-studie club* di Indonesia, dan dalam pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927.

Pengisahan berikut ini menarik untuk disimak, yakni "Pada tahun 1901-1904 sebuah majalah bulanan, *Insulinde*, terbit di Padang. Di halaman depan majalah ini tercantum nama-

nama para pembantunya yang tersebar di beberapa kota di Sumatera dan Jawa. Majalah ini tidak saja memuat artikel dan berita tentang "Hindia Belanda", tetapi juga tentang Asia dan Eropa, namun tema utama yang membayangi semua tulisan itu selalu sama—"kemajuan" dan "zaman maju" . Kedua tema ini pulalah yang selalu dipakai dalam hampir setiap tulisan Dr. A. Rivai dalam majalah bergambar *Warta Hindia* yang terbit di negeri Belanda, sejak tahun 1904 sampai ia kembali ke 'tanah Hindia' beberapa tahun kemudian. Untuk mencapai 'kemajuan' dan terwujudnya 'Hindia yang maju' Rivai menganjurkan agar dibentuk organisasi 'kaum muda'. Untuk keperluan ini, katanya, tidak ada salahnya untuk meminta nasehat pada para pentolan Tionghoa yang telah terlebih dahulu mempunyai perkumpulan untuk kemajuan kaumnya. Ternyata gagasan Rivai ini mendapat tanggapan positif dari Dr. Wahidin Soediro Hoesodo. Dalam salah satu tulisannya yang dimuat dalam *Retno Dumilah* pensiunan dokter ini mendukung gagasan Dr. A. Rivai akan perlunya suatu organisasi para 'kaum muda', yaitu kaum yang progresif. Kalau perlu, katanya, nasihat dari Rivai akan perlunya bisa juga diminta. Gagasan Wahidin ini akhirnya terwujud ketika para pelajar 'sekolah dokter Jawa,' Stovia, mendirikan sebuah organisasi yang bernama Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908." (Taufik Abdullah 2005: xv).

Semangat perubahan sosial yang ditampilkan dalam citra "kaum muda" ternyata harus berhadapan dengan kenyataan tanpa kompromi sebagai tanggapan balik. "(178) Koesoemo Oetoyo ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua dalam sebuah rapat tertutup yang diadakan pada bulan Desember 1926. Naiknya Koesoemo Oetoyo sebagai ketua Boedi Oetomo merupakan kemenangan "kaum tua" dari "kaum muda". Soetomo yang ketika itu (179) berusia 38 tahun dikategorikan sebagai kaum muda (Habsjah, Sudiharto, Trihusodo 2007: 178).

Semangat Soetomo yang modern tampak pada berbagai peristiwa politik yang digerakkan dan dialaminya. Namun, suatu gambaran lain yang mencerminkan semangat humanis universalnya dapat ditarik pada kehidupan pernikahannya. Frances Gouda memberi makna pada masalah itu sebagai "Dalam otobiografinya, seorang pejuang nasionalis pertama Indonesia, Dr. Soetomo, menulis pada 1917 bahwa pernikahannya dengan seorang janda berkebangsaan Belanda, yang sebelumnya datang ke Jawa untuk bekerja sebagai perawat demi melupakan kesedihannya karena kematian suaminya yang tiba-tiba, membangkitkan reaksi kejam dan ejekan di antara orang-orang Eropa. Menurut Soetomo, isterinya terpaksa ahrus putus hubungan dengan semua teman-teman sebangsanya karena pada umumnya "mereka tidak menghargai orang Indonesia" meskipun beberapa di antara mereka memperlakukan suaminya dengan baik dan hormat. Tulisnya lagi. Perkawinan mereka tetap berlangsung meskipun membuat marah kaka perempuan isterinya yang menolakknya dengan keras karena ia orang Indonesia, hanya seorang inlander, yang memiliki nyali untuk jatuh cinta pada adik kandungnya yang begitu terhormat. Mereka menikah dengan upacara secara Islam yang oleh sebagian tokoh nasionlais Indonesia dirayakan sebagai "kemenangan

umat Islam". Dalam pidato pemakaman istrinya tujuh (299) belas tahun kemudian, Soetomo mengenang istrinya dengan bahasa yang sangat menyayat hati: "Sebagai seorang perempuan Belanda istri saya mencintai kebebasan, ekadilan dan kesetaraan, sehingga ia tidak tahan pada keadaan yang penuh diskriminasi dan ia sangat benci melihat perilaku yang dapat menodai nama baik bangsanya itu." (Gouda 2007: 297, 298).[16]

Zaman Pembangun

Soetomo ingin membawa kesejahteraan sosial dan kemakmuran kepada rakyatnya, dengan jalan membimbing mereka membuat keuntungan sebanyak mungkin dalam batas lingkungan mereka yang diatur oleh kebijaksanaan kolonial dan bentuk sosial Jawa tradisional, dengan menerima kedua sistem itu dengan kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan mereka. Soetomo "tidak pernah" pertanyakan apakah peraturan-peraturan itu adil dan benar, tetapi ia berjuang supaya rakyatnya dapat menuju kepada penghidupan yang makmur dan serasi, meskipun mereka menghadapi kesukaran-kesukaran sebagai akibat berbagai peaturan-peraturan kolonial yang tidak adil (Scherer 1985: 198-199).

Selanjutnya, "Dalam *Kenang-kenangan*, Soetomo dengan mahirnya mencampurkan suatu konsep tradisional seperti itu untuk menuliskan pengalaman seorang dengan gaya modern penulisan riwayat hidup secara sastra … Riwayat hidup ini memperlihatkan betapa konsistennya persepsi-persepsi Soetomo dengan tradisi kebudayaan Jawa. Tulisan-tulisannya yang lain menganalisis masyarakatnya dan menguraikan pandangan-pandangan politiknya juga memperkuat gambaran ini tentang betapa ia berakar dengan teguh dalam tradisi kebudayaan Jawanya (Scherer 1985: 203).

Gambaran Scherer berikutnya, "Tahun 1935, Soetomo berhasil menggabungkan

16 Padahal hubungan sosial di bawah cakrawala colonial menyemburatkan perlakuan yang sepihak dan tidak seimbang, seperti gambaran berikut, "Meskipun begitu, di salah satu karya kontemporernya, Lulofs menambahkan humor tentang kecenderungan penduduk Belanda kolonial dalam menggambarkan analogi antara orang pribumi dengan binatang, atau lelucon mereka tentang "muka-muka monyet" para inlander. Padahal orang Belanda sendiri memiliki wajah mirip seekor sapi dan tampak kurang pintar, demikian candanya, yang mengingatkan ia pada "kandang babi atau sapi" tempat ranjang buaian saat mereka lahir seharusnya berada! Dr. Soetomo, nasionalis Indonesia, mungkin akan sepenuhnya setuju dengan lelucon itu, ia juga menyebut pejabat pemerintah atau polisi Belanda sebagai karbouwen, kerbau air yang berjalan melenggak-lenggok, binatang yang sangat berguna, tetapi sangat tidak berbudaya" (Gouda 1985: 249).

partainya Partai Bangsa Indonesia dengan Boedi Oetomo, dan menamakan partai baru itu Parindra atau Partai Indonesia Raya. Ketika itu dapat dikatakan bahwa penggabungan priyayi professional dan birokratis, priyayi bependidikan barat dan tradisional telah diselesaikan dengan serasi, sebagaimana telah lama dicita-citakan Soetomo……Soetomo sendiri melihat penggabungan Boedi Oetomo dan PBI dalam Parindra sebagai prestasi paling besar dari karir politik dan kebudayaannya, yang telah mewujudkan konsepnya mengenai masyarakat yang harmonis (Scherer 1985: 201).

Tiga faktor dalam pemikiran Soetomo yang sangat penting tentang bagaimana masyarakat mencapai kemerdekaan dan kesejahteraan (Scherer 1985: 230), meliputi:

"Pertama, ada kewajiban moral (kewajiban) setiap orang, mengabdi kepada neegrinya jika ia mencintai tanah airnya. Yang kedua, dalam memilih bentuk pengabdian itu harus melaksanakan pengaweyannya sesuai keahlian. Yang ketiga, setiap orang mesti melaksanakan pengaweyannya selaras dengan masyarakat selebihnya, sama seperti jika mereka semua sedang memainkan orkes gamelan. Jika setiap orang berbuat demikian, serasi satu sama lain, maka sudah pasti kemerdekaan negeri dapat dicapai. Dengan demikian, menurut Soetomo, kemerdekaan negeri tergantung kepada kewajiban perorangan terhadap, betapa baiknya ia melaksanakan kewajibannya melalui pengabdian, betapa relanya ia bekerja secara serasi dengan masyarakat selebihnya."

Dengan demikian, apa yang diperlukan dalam saran Soetomo adalah bahwa kesetiaan perorangan itu hanya terhadap kewajiban moralnya sendiri, sehubungan dengan cintanya kepada negerinya, bukan kepada seseorang tertentu atau kepada suatu gerakan tertentu (Schrerer 1985: 231). Lebih lanjut digambarkannya: "Nampaknya masyarakat yang dicita-citakan oleh Soetomo adalah suatu masyarakat serasi yang ideal dari suatu dunia tradisional yang setiap anggotanya tahu tempat dan peranannya dan menerima status sosialnya sebagaimana ditentukan bagianya oleh masyarakatnya. Suatu masyarakat yang hidup dalam keseimbangan, seluruhnya tenang, seluruhnya seimbang, bukan suatu masyarakat yang gundang dan dirusak oleh pertikaian dan pertentangan, oleh kekuatan-kekuatan dalam masyarakat itu yang bertentangan satu sma lain, Masyarakat yang jauh berbeda dari masyarakat di atas mana Marx membangun ideologinya. Kekuatan-kekuatan dalam masyarakat Soetomo seluruhnya serasi satu sama lain, seluruhnya selaras, suatu masyarakat yang meskipun mempunyai berbagai kekuatan yang berbeda di dalamnya, dengan sifat-sifat yang berbeda dan watak-watak yang berbeda, hidup dalam keseimbangan yang serasi sama seperti konsep lama mengenai masyarakat idela dalam suatu kerangka Gusti-Kawula. Tentang siapa yang memerintah dan siapa yang diperintah tidak menjadi masalah. Yang memerintah adalah pemerintah dan warganegara adalah warganegara. Tidak ada kemungkinan pada suatu hari kelak warganegara sendiri menjadi pemerintah (Ibid 232)."

Indonesia Mulia

Paul van der Veur (1984: 25-44) menyiratkan pemikiran dr. Soetomo ke dalam 8 (delapan) pokok, yaitu:

a. Persatuan Indonesia paling utama
b. Perbedaan antara 'Kooperasi' (Ko) dan 'Nonkooperasi' (Non) tidaklah penting
c. Baik Ekstrimitas Komunis maupun Ketidaktoleransian golongan Islam harus ditentang
d. Semua manusia berusaha dan merupakan penjelmaan Tuhan yang terakhir
e. Jalan menuju kemerdekaan panjang dan sukar
f. Pendidikan Barat telah mengasingkan bangsa Indonesia dari kebudayaannya sendiri dan mencetak manusia-manusia yang asosial
g. Pencetakan kader, disiplin atas diri sendiri, bakti tanpa pamrih, tugas dan kewajiban
h. Kembali ke desa, dirikanlah Roekoen Tani

Van der Veur tidak memilah pemikiran ini lebih lanjut ke aspek politik dan seterusnya. Namun, dari penjelasannya ini, pokok-pokok perhatian terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat tampak di dalamnya. Dalam kesimpulan tulisannya, tercantum "Akhirnya, konsepsi Soetomo tentang Indonesia Mulia adalah konsep tak mengenal batas waktu, konsep itu mampu menggerakkan generasi mendatang, sekalipun Indonesia Merdeka menjadi kenyataan sejarah (hal. 46).

Frank Dhont telah menelusuri gagasan dan cita-cita Soetomo sejak ia kembali dari Negeri Belanda dan mendirikan Studi Klub Indonesia (Indonesische Studieclub) di Surabaya. Perkumpulan intelektual itu bertujuan memupuk persatuan nasional, mendorong kesadaran tentang keadaan yang berlangsung, mendorong kemajuan intelektual dan moral dan menciptakan jaringan intelektual antar seluruh lapisan masyarakat dan yang paling penting adalah bahwa kesemua itu bermuara pada mencapai kemerdekaan (Dhont 2005: 66). Pada masa ini, Soetomo telah menelurkan gagasan dan pemikiran tentang kesejahteraan serta sikapnya terhadap tatanan politik yang ada, sebagaimana dituliskannya: "Soetomo menginginkan kesejahteraan sosial dan kemakmuran untuk rakyat Hindia-Belanda. Sebagai seorang realis, Soetomo mencoba menerima sistem kolonial dan tradisional yang sudah ada dan berjuang agar rakyat bisa mencapai kemakmuran. Soetomo sadar bahwa kemajuan tidak bisa tercapai tanpa mengikutsertakan rakyat desa dalam proses modernisasi. Soetomo berpendapat bahwa priyayi sebagai kelas elit mempunyai suatu tugas sosial untuk membantu rakyat sebagai guru dalam perkembangannya. *Indonesische Studieclub* ingin menjadi suatu

perhimpunan dari intelektual yang melalui kreasi mereka mendorong rakyat untuk ikut serta dan memandu mereka sampai ke peningkatan kebahagiaan dan kemakmuran negerinya" (Dhont 2005: 66-67).

Kenichi Goto (1998: 366-367) "Dalam anggaran dasar partai Parindra disebutkan bahwa tujuan dan gagasan ideologi partai yang paling mendasar adalah mewujudkan 'Indonesia Mulia', dengan pengertian Indonesia yang makmur. Meskipun saat itu kata-kata idelogis 'Merdeka'lah yang paling digandrungi dalam gerakan kebangsaan, Soetomo sebagai ketua partai dalam aktivitas politiknya tetap mengutamakan misi partai Untuk mewujudkan Indonesia 'Mulia' tersebut. Menurutnya, mewujudkan 'merdeka' tidak otomatis membawa kemakmuran bagi suatu bangsa, tetapi mewujudkan 'masyarakat yang makmur' pasti dilandasi oleh kemerdekaan terlebih dahulu. Karena itu, daripada melakukan gerakan politik dengan mobilisasi masyarakat secara massal atau melancarkan kegiatan sosial-ekonomi yang bersifat reformatif atau kegiatan yang bersifat penerapan di bidang pendidikan dan budaya".

Selanjutnya, ia mengungkapkan, "Partai yang dipimpin oleh kaum intelektual Jawa yang tergolong lapisan kaya, dan menitikberatkan aktivitas yang mengacu pada reformasi ini, mencoba mencari model modernisasi Indonesia bukan dari negara-negara Barat melainkan dari negara maju di kawasan Asia. Di mata dr. Soetomo, penganut reformasi sosial yang tulus, sejarah modernisasi Jepang yang hanya dalam jangka waktu 70 tahun telah berhasil mengubah dirinya dari negara agraris yang semi feudal menjadi negara industri yang modern tampak merupakan suatu contoh keberhasilan nyata yang berharga, sehingga ia sering berbicara sambil mencontohkan Jepang. Hal itu terutama berdasarkan keyakinan bahwa Jepang merupakan contoh terbaik untuk membuktikan kebenaran gagasan partai yang mementingkan segi pendidikan serta reformasi sosial-ekonomi secara bertahap hingga dapat mewujudkan kondisi 'mulia' tersebut di atas. Kemudian keyakinan itu rupanya menjadi lebih kuat saat ia berkunjung ke negeri itu.

Dalam pandangan Kenichi Goto (2003: 125,126) tercantum, *"While very proud of the cultural traditions of Java, Sutomo, as a medical doctor, also placed a high value on the science and technology of modern Europe. In his mind, harmonizing tradition and modernity was the task facing Indonesia and more important than mere political independence. For Sutomo, therefore, Japan was a place of great intellectual interest, as it was the only industrialized nation in Asia and possessed a rising nationalism oriented toward past traditions.. In the mid-1930s, Indonesian intellectuals were discussing how to modernize their country. Sutomo, who favored a revival of Javanese cultural traditions, engaged in heated arguments with Takdir Alisyahbana, a Europe-oriented intellectual. In the course of these discussions, Sutomo held up Japan as a model for Indonesia, and he encouraged students to go there to study. Japan, he said, 'is pushing straight ahead with modernization,*

making use of Western technology while at the same time restoring traditional culture. That is why Japan can stand firm on its own feet. This is a Japanese strong point that we must learn.' Sutomo desired a revival of the ksatria spirit (chivalric code of Java) and stressed the need for an 'emergence of heroes in Indonesian society who bear obligation without expecting any reward.' He admired Japan for maintaining its cultural tradition of Bushido, which is warrior-based like the ksatria spirit."

Soetomo pernah menulis tulisan mengenai tujuan luhur itu. Dalam ulasan Scherer (1985: 244) adalah "Dengan demikian rakyat perlu dituntun supaya mereka dapat hidup dalam kemakmuran, dan kemakmuran mereka sangat penting untuk mewujudkan Indonesia Mulia. Apa yang menarik dalam anjuran Soetomo mengenai rakyat bukanlah semata-mata bahwa rakyat mesti dituntun, melainkan bahwa hanya rakyat jelata, kaum murba, kaum karma, kaum buruh, kaum tani itulkah yang terpikir oleh Soetomo yang harus dipimpin Parindra. Mengenai golongan menengah, Soetomo berkata dalam artikelnya, 'Parindra mesti memberikan contoh dan kegiatan supaya barisan nasional yang kuat dapat dibangun dengan teguh. Kepada golongan berpendidikan, Parindra akan membuat suatu upaya untuk menambah dan meningkatkan darma bakti mereka kepaa rakyat dan bangsa, sebagai penuntun bagi masyarakat selebihnya. Soetomo menganggap golongan berpendidikan itu sebagai golongan yang paling pantas menuntun masyarakat selebihnya, karena mereka dipersenjatai lebih daripada cukup."

Gagasan berikutnya terdapat pada pidatonya (1982: 319-321), yaitu "Dalam kalangan social dapat dilakoekan djoega soeatoe actie jang oemoem bersama-sama mentjari daja opeja dan djalan goena menjelidiki dengan seksama, masalah kelebihanpendoedoek (overbevolking) berhoeboeng dengan emigratie, meroendingkan indoesrialisatie dan membitjarakan diadakannja soesoenan masjarakat jang lebih loeas, dan jang bermatjam-matjam, soepaja dapat timboel kemoengkinan hidoep jang dapat mementingkan penghasilan dan mengekang penganggoeran. Indoestrialisatie Indoensia berhoeboneg dengan kelebihan pendoedoek jang mengantjam itoe dieprbintjangkan oleh pemerintah agoeng dinegeri Belanda beebrapa tahoen jang laloe.Soeatoe kehormatan terlimpah pada dirinja toean van Kol oentoek memadjoekan rapport tentang masalah ini kepada pemerintah, berhoeboeng dengan perdjalanan studie toean itoe ke Djepang oentoek memberi penerangan akan kemoengkinannja indsutrialisatie di Indoensia ini.. Beberapa tahoen soedah liwat sedjak itoe, dan sekarang kelebihan pendoedoek tanah Djawa soedah mendjadi kenjataan, feit jang njata, jang menjedihkan. Tambahan pendoedoek itoe sekarang ada berlipat doea daripada dahoeloe. Maka dengan djalan emigratie sadja masalah kelebihan pendoedoek ini tidak moengkin dapat dikoepas. Meskipoen begitoe toh sedikit sekali terdengar tentang rentjana pemerintah jang dapat menoedjoe maksoed oentoek menambah kemadjoean industrialisatie jang pertama2 dan teroetama oentoek keperloean dan keoentoengan ra'jat anak negeri kita.. Mengingat kemelaratan oemoem dan kekoerangan modal, atau tidak adanja modal dalam

masjarakat Indonesia, mengingat poela oentoek dan sifat jang specipiek dari masjarakat Indonesia, jalah jang masih berdasar atas adat dan kemaoean tolong-menolong dari orang-orang poeteranja, maka oesaha jang paling gampang dan baik oentoek mengganti dan memperbaiki masjarakat itoe kira-kira ialah jang didasarkan atas adat dan kebiasaan jang soedah ada itoe, hanja sadja dibaharoekan, dibikin modern, dan diatoer dengan pengetahoean, artinja membangoenkan masjarakat atas dasar dan perasaan cooperatief, tolong menolong tetapi dalam mana tentoenja masih ada tempat djoega boeat oesaha-oesaha seseorang sendiri (individueel initiatief) dan oentoek emngakoei hak satoe-satoenja orang oentoek mempoenjai milik (privaat bezit)……..Dengan tjara begitoe soedah tentoe dengan sendirinja dan dengan melaloei djalan jang natuurlijk dan menoeroet evolutie, lantas dilompatilah seoatoe phase, seoatoe massa, dari kemadjoean masjarakat."

Dalam tulisan lainnya, Soetomo mengatakan bahwa dalam mencapai kemajuan bersama, sejumlah kewajiban perlu dijalankan yang meliputi "Membangunkan hati orang banyak, supaya rakyat mengerti dan turut serta dalam gerakan yang kita selenggarakan; Membangun para cendikiawan, para orang terpelajar, para ningrat dan para priayi agar turut memikirkan dan memperbaiki nasib rakyat yang pada umumnya menyedihkan sekali, sebab serba kekurangan dalam hal hak maupun kekayaan." Ia juga menyatakan bahwa "Yang dimaksud bekerja ke dalam ialah agar setiap orang bersedia memperlihatkan keberaniannya untuk bekerja bagi pergerakan nasional…….agar bangsa kita, besar atau kecil dan semua golongan mau bekerja menurut bakat dan kemampuannya, menurut kekuatan dan keterampilannya, asal dalam bekerja itu bersatu dan sama tujuannya…Setiap saat harus berani berkorban sebanyak-banyaknya dan dengan sekuat tenaga meningkatkan nasib rakyat." (van der Veur 1984: 85).

Jelas, Soetomo sangat prihatin dan perhatian terhadap keadaan dan perkembangan kesejahteraan bangsa yang dicita-citakannya untuk menggapai kemerdekaan. Indonesia mulia merupakan perwujudan pandangan transendentalnya mengenai tujuan perjuangan yang tidak hanya berhenti pada perolehan kemerdekaan. Kemerdekaan tidak memiliki arti untuk perjuangannya tanpa memasukkan pencapaian ekonomi dan kesejahteraan.

Signifikansi dan Relevansi untuk Masa Kini

Menurut van der Veur (1984: 45), bahwa "Soetomo telah menjalankan peranan utama dalam usaha membangkitkan orang Jawa dengan mendirikan Boedi Oetomo dan kemudian mengarahkannya kepada, pemikiran bagi tegaknya negara Indonesia melalui studi-klub yang didirikannya. Tanpa lelah ia bekerja mencapai tujuan yang praktis, dalam situasi kolonial, bagi bangsanya. Filsafat hidup Soetomo dan cita-citanya yang praktis menunjukkan kepercayaan

terhadap teman-teman dan rakyat, kedermawanannya yang luar biasa, kesediaannya mengeritik diri sendiri dan penegasannya akan cinta, kesucian, dan suatu Indonesia yang harus mulia dan sempurna. Sekalipun cita-cita ini sering diungkapkannya dalam peristilahan Jawa, namun yang dimaksudkannya ialah semua bangsa Indonesia.

Lalu, "Perhatian Soetomo selalu ditujukan kepada semua rakyat jelata dari segala macam lapisan. Sementara ia bekerja bersama teman-teman kelompok cendekiawannya, ia mencoba meletakkan dasar bagi sebuah negara modern dengan menjadikan suatu kerangka kerja yang sesuai baik bagi para tani dan buruh. Sampai dengan akhir 1937, Soetomo belum juga putus asa mengajak kaum ningrat agar mereka berjuang sesuai dengan martabatnya. Tanpa lelah ia bekerja bagi rakyat jelata di rumahnya di Surabaya.

Dalam bagian akhir tulisannya tentang dr. Soetomo, Savitri Scherer (1985: 256) menyatakan, "Pandangan Soetomo mengenai pembangunan masih berlaku dan perlu serta menguntungkan untuk mencoba membuat masyarakat (meskipun hal itu hanya terbatas kepada masyarakat Jawa—dalam pengertian yang paling sempit, masyarakat priyayi), sekuat mungkin dan keadaannya semantap mungkin sehingga bila kemerdekaan tercapai, sudah ada suatu masyarakat yang sehat dan kuat untuk melaksanakan tugas-tugas menjadikan negeri baik dan mulia. Dalam pengertian ini kita harus menghargai saran Soetomo supaya rakyat menyumbangkan apa saja yang dapat mereka sumbangkan dalam bidang sendiri demi terwujudnya kejayaan Indonesia. Seperti itulah sumbangan yang dianggapnya dapat dipersembahkannya kepada rakyat dan bangsanya, membuat masyarakatnya dapat bertahan di bawah sistem apapun diharuskan hidup. Dengan cara ini, kita dapat melihat dalam perspektif yang lebih luas mengapa bagi Soetomo penting bekerja demi perwujudan kemuliaan bangsa ketimbang demi kemerdekaan yang terbatas. Ia melihat tindakan-tindakannya dalam hubungan keuntungan-keuntungan jangka panjang ketimbang menggulingkan pemerintahan asing secara langsung dengan segera. Kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat lebih penting bagi Soetomo, daripada konsep kemerdekaan yang abstrak dan samar. Lagi pula, rakyat mesti hidup dalam kebahagiaan walaupun pemerintahan asing tetap ada atau tidak. Inilah sumbangan Soetomo kepada pembangunan gerakan nasionalis Indonesia." Makna ini mungkinkah mampu menjadi pembelajaran sejarah *(lesson and learning from history)* untuk bangsa yang dicita-citakannya dahulu, memerlukan jawaban selaras dengan perjalanan sejarah.

Pemikiran dr. Soetomo mengenai kesejahteraan rakyat dan perekonomian Indonesia tersebar dalam sejumlah sumber dan hanya sebagian tulisan yang mengungkap, mengulas dan menampilkannya sehingga masih memerlukan kajian lebih lanjut yang lebih mendalam. Tulisan ini belum memasuki ranah analisis yang lebih lengkap dan mendalam, dan hanya memberikan temuan-temuan awal yang disajikan secara deskripsi melalui sejumlah kutipan, yang diharapkan dapat menjadi pijakan untuk pembahasan lebih lanjut. Kecenderungan

penelitian sejarah dan historiografi dewasa ini memperlihatkan signifikansi dan relevansi kajian lebih lanjut mengenai pemikiran ekonomi tokoh ini. Sumbangsihnya menjadi diperlukan untuk menjadi sumber kearifan dan pedoman dalam meningkatkan dan memperbaiki keadaan kesejahteraan dan perekonomian bangsa dan negara di tengah-tengah persaingan global yang semakin tajam.

Daftar Pustaka

Abdulgani, Roeslan (1976). *Alm. Dr. Soetomo yang Saya Kenal Hasil Penyelidikan dan Penelitian pada Berbagai Sumber Sejarah Baik yang Ada di Jakarta Maupun di Berbagai Arsip Negeri Belanda*. Jakarta: Yayasan Idayu

Abeyasekere, Susan (1972). "Partai Indonesia Raja, 1936-42: A Study in Cooperative Nationalism" *Journal of Southeast Asian Studies,* Vol. 3, No. 2, September, hal. 262-276

Abdullah, Taufik (2009). *Indonesia towards Democracy*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies

------- (2005). "Kata Pengantar" dalam: Sartono Kartodirdjo. *Sejak Indisch sampai Indonesia.* Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Anderson, Benedict O'Gorman (1983). "Masa Kegelapan dan Masa Terang Benderang Perubahan Pemikiran Kaum Nasionalis Indonesia di Masa Awal," dalam: Anthony Reid & David Marr. *Dari Raja Ali Haji hingga Hamka Indonesia dan Masa Lalunya*. Jakarta: Grafitipers

Blackburn, Susan (2004). *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press

Burgers, Herman (2001). *De Garoeda en de Ooievaar Indonesie van Kolonie tot Nationale Staat*. Leiden: KITLV Uitgeverij, 2001

Departemen Penerangan RI (1999). *Kebangkitan Nasional dan Lahirnya Boedi Oetomo.* Jakarta: Departemen Penerangan RI

Dhont, Frank (2005). *Nasionalisme Baru Intelektual Indonesia Tahun 1920-an.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Djojohadikusumo, Margono (1969). *Reminiscence from 3 Historical Periods A Family Tradition Put in Writing.* Jakarta: Indira

Frederick, William & Soeri Soeroto (peny.) (1982/ 84). *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum & Sesudah Revolusi.* Jakarta: LP3ES

Frederick, William (1989). *Pandangan dan Gejolak Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946).* Jakarta:Yayasan Karti Sarana & Gramedia

Gouda, Frances (2007). *Dutch Culture Overseas Praktik Kolonial di Hindia Belanda*, 1900-1942. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta

Goto, Ken'ichi (2003). *Tensions of Empire Japan and Southeast Asia in the Colonial & Postcolonial World.* Singapore: Singapore University Press

------- (1998). *Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Haris, Syamsuddin (1994). *Demokrasi di Indonesia Gagasan dan Pengalaman*. Jakarta: LP3ES

Ingleson, John (1983). *Jalan ke Pengasingan Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927—1934.* Jakarta: LP3ES

Kartodirdjo, Sartono (2005). *Sejak Indisch sampai Indonesia.* Jakarta: Penerbit Buku Kompas

------- (1999). Pengantar Sejarah Indonesia Baru Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme

Kuntowijoyo (2004). *Raja, Priyayi, dan Kawula: Surakarta, 1900-1915*. Yogyakarta: Ombak

Latif, Yudi (2011). *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Legge, J.D. (1993/ 2003) *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan Peranan Kelompok Sjahrir.* Jakarta: Grafiti-Freedom Institute.

Leirissa, R.Z (1985). *Terwujudnya Suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia* 1900-1950. Jakarta: Akademika Pressindo

Madjid, Nurcholish (2004). *Indonesia Kita*. Jakarta: Universitas Paramadina

Mrazek, Rudolf (1996). *Sjahrir Politik dan Pengasingan di Indonesia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Nasruddin Anshoriy Ch, H.M. , Djunaidi Tjakrawerdaya (2008). "Bab II Perintis Pergerakan Nasional Kebajikan Sang Dokter" dalam: *Rekam Jejak Dokter Pejuang & Pelopor Kebangkitan Nasional Seri Satu Abad Kebangkitan Nasional.* Yogyakarta: LKiS

Nery, John (2011). *Revolutionary Spirit Jose Rizal in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS

Noer, Deliar (1990). *Mohammad Hatta Biografi Politik.* Jakarta: LP3ES

Sastroamidjojo, Ali (1974). *Tonggak-tonggak di Perjalananku.* Jakarta: Kinta

Soetomo (1982). "Pidato pada Kongres Parindra I." dalam: Pitut Soeharto & A Zainoel Ihsan. *Permata Terbenam Capita Selecta Keempat.* Jakarta, Aksara Jayasakti

Soetomo dan Perjuangannya (2011). Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional

Sudiyo (1989). *Perhimpunan Indonesia sampai dengan Lahirnya Sumpah Pemuda.* Jakarta, Bina Aksara

van der Veur, Paul W (ed.) (1984). *Kenang-kenangan Dokter Soetomo*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan

Prof. Dr. Djoko Marihandono

PERJUANGAN DR. SOETOMO

Bagi masyarakat Surabaya, nama Soetomo mengacu pada dua orang tokoh, yang kedua-duanya memiliki peran penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Pertama, Soetomo, atau yang dikenal dengan sebutan *Bung Tomo*, adalah tokoh yang berkaitan erat dengan penyerbuan kota Surabaya oleh pasukan Sekutu. Tokoh *Bung Tomo* muncul tatkala rakyat dan para pejuang Indonesia di Surabaya berupaya untuk melucuti senjata tentara Jepang sebelum mereka dilucuti oleh tentara sekutu. Sementara itu, tokoh kedua adalah dr. Soetomo, lulusan Sekolah Dokter Jawa, STOVIA, yang menjadi pendiri organisasi Boedi Oetomo, bersama-sama dengan teman-temannya di STOVIA.

Nama Soetomo (Bung Tomo) mencuat, ketika upaya untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar, sebagai kelanjutan kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Sebagai tindak lanjut dari peristiwa itu, tentara Inggris didaratkan di Jakarta pada 15 September 1945, kemudian didaratkan pula di Surabaya pada 25 Oktober 1945, dengan berdalih untuk melucuti tentara Jepang. Tentara Inggris, atas nama tentara Sekutu didaratkan dengan membawa misi mengembalikan Nusantara kepada pemerintah kolonial Belanda sebagai wilayah bekas jajahannya. Tentu saja hal ini membuat masyarakat ikut serta mengangkat senjata. Di Surabaya, kemarahan rakyat itu ditandai dengan pecahnya insiden Bendera pada 19 September 1945 di Hotel Yamato atau Hotel Oranye. Pada peristiwa itu, rakyat Surabaya tidak rela melihat bendera merah putih biru berkibar di puncak hotel tersebut. Kondisi tersebut membuat arek-arek Suroboyo berkumpul di sekitar gedung itu. Dengan pebuh semangat mereka meneriakkan pekik “Merdeka!!”. Secara spontan, tanpa ada yang memerintahkan, beberapa orang memanjat dinding menuju ke puncak bangunan tersebut guna menurunkan bendera merah putih biru dan menyobek bagian birunya, kemudian mengibarkannya kembali di puncak bangunan tersebut. Selama peristiwa tersebut terjadi, pekikan “Merdeka!” tak henti-hentinya diteriakkan oleh massa yang berkerumun di sekitar hotel tersebut. Peristiwa tersebut merenggut korban gugurnya empat arek Surabaya, Cak Sidik, Mulyadi, Hariono dan Mulyono. Sementara itu, di pihak Belanda gugur Mr. Ploegman yang tewas terbunuh akibat amukan masa. Insiden di jalan Tunjungan Surabaya ini menyulut peristiwa-peristiwa lainnya yang puncaknya menewaskan Brigadir Jenderal AWS Mallaby, komandan tentara Inggris untuk wilayah Jawa Timur pada 30 Oktober 1945.

Peristiwa terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby membuat tentara Inggris mengeluarkan ultimatum yang intinya meminta semua orang Indonesia yang memiliki senjata harus melaporkan dan menyerahkan senjatanya paling lambat 10 Nopember 1945 pukul 06.00 pagi. Para pejuang di Surabaya menolaknya. Bahkan, para pejuang itu termotivasi dengan padoto Soetomo (Bung Tomo) yang berpidato di radio untuk menyemangati para pejuang

Indonesia. Melalui radio ini pula Bung Tomo memberikan komando dan mengobarkan semangat perjuangan rakyat Surabaya.

Berbeda dengan Bung Tomo, pejuang peristiwa 10 Nopember 1945 di Surabaya, dr. Soetomo adalah seorang dokter lulusan dari STOVIA. Ia dianggap sebagai pendiri organisasi Boedi Oetomo, bersama-sama dengan tokoh Boedi Oetomo lainnya. Dengan demikian, walaupun namanya sama (Soetomo), hidup dalam era yang hampir sama, sama-sama berjuang melawan pemerintah kolonial Belanda, namun mengacu kepada dua tokoh yang berbeda. Tulisan ini akan membahas tentang dr. Soetomo yang dikenal sebagai pendiri organisasi Boedi Oetomo.

Masa Kecil Soetomo

Soetomo, dilahirkan di desa Ngepeh, Nganjuk, Jawa Timur pada 30 Juli 1888.[1] Nama aslinya adalah Soebroto. Ia adalah putera pertama dari tujuh bersaudara pasangan Raden Soewadji dan Raden Ayoe Soedarmi. Saat kedua orangtuanya menikah, mereka tidak memeroleh restu dari orangtua Raden Ayoe Soedarmi yang bernama Raden Ngabehi Singowidjojo. Alasannya adalah karena Raden Soewadji berasal dari status sosial yang berbeda. Pasangan ini akhirnya menikah, walaupun tidak mendapatkan restu dari orang tua mempelai wanita. Pasangan ini dikaruniai tujuh anak. Anak pertama diberi nama Soebroto (yang kemudian bernama Soetomo). Soebroto memiliki adik enam orang, yakni Raden Soesilo (1892—1943), Raden Soeratno (1895—1942), Raden Ayoe Sriyati (1896—1963), Raden Ayoe Swi Woelan (1898—1983), Raden Ayoe Sri Oemiyati (1903—1989), dan Raden Ayu Siti Soendari (1906—1998).[2]

Sejak kecil, ia tinggal bersama kakeknya di desa Ngempal, Nganjuk, Jawa Timur. Ayahnya, Raden Suwadji tidak tinggal bersama-sama dengan Soebroto, karena ayahnya bertugas di Maospati. Setiap hari ia diasuh oleh neneknya, yang sangat taat menjalankan ibadah agama. Ayahnya, yang semula dikenal sebagai seorang guru, berkat ketekunan dan kepandaiannya, diangkat menjadi asisten wedana di Maospati. Ia dikenal sebagai seorang yang berkemauan keras dan mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Bahkan, kerapkali ia melawan perintah atasannya demi membela kepentingan rakyat. [3]

---

1. Penetapan tanggal lahir ini berdasarkan buku karangan dr. Soetomo sendiri yang berjudul *Kenang-Kenangan*, yang ditulis pada 1934.

2 Lihat Santo Koesoebjono dan Solita Koesoebjono Sarwono (2008) *Siti Soendari Adik Bungsu Dr. Soetomo.* Pustaka Fahima, Yogyakarta, halaman 38.

3. Raden Soewadji, ayah Soebroto pada awalnya mengikuti pendidikan di *Kweekschool* di kota Magelang. Sekolah ini kemudian ditutup oleh pemerintah kolonial Belanda, dan

Menginjak usia 7 tahun, Soebroto kecil harus berpisah dengan kakek dan neneknya, karena harus tinggal bersama orang tuanya di Bojonegoro. Kesendiriannya inilah yang membuat Soebroto selalu ingat akan kakek dan neneknya yang tetap bermukim di desa. Setahun kemudian, ia harus meninggalkan orang tuanya karena harus masuk sekolah di *Europeesche Lagere School* atau yang dikenal sebagai ELS[4] di kota Bangil. Sekolah ini adalah sekolah rendah untuk bangsa Eropa, bangsa Timur Asing (Cina, Arab), dan putera pejabat bumi putra. Untuk keperluan ini, ia harus pindah dan tinggal bersama pamannya yang bernama Raden Arjodipoero. Soebroto kecil merasa kerasan tinggal di rumah itu, karena putera Arjodipoera yang bernama Raden Sahit usianya sebaya dengan Soebroto. Raden Sahit yang usianya sedikit lebih tua, sudah menjadi siswa ELS terlebih dahulu. Tatkala pamannya mendaftarkan Soebroto masuk ke ELS, ia ditolak menjadi murid di ELS tanpa alasan yang jelas oleh kepala sekolahnya. Pamannya, Raden Arjodipoero tidak putus asa. Ia mengubah nama Soebroto menjadi Soetomo, yang diakuinya sebagai anaknya sendiri, adik dari Raden Sahit. Akhirnya pada 1896, Soetomo diterima menjadi murid di ELS.[5]

Rasa setia kawan Soetomo dengan murid-murid bumi putra lainnya sangat tinggi. Bahkan ia tidak segan-segan untuk berkelahi dengan anak-anak Eropa atau Timur Asing guna membela teman-temannya orang bumi putra. Dalam catatan di ELS, Soetomo dikenal sebagai murid yang berani melawan murid Eropa. Dengan tindakannya itu, ia disegani oleh murid-murid Eropa, namun disenangi oleh murid-murid bumi putra. Beberapa kali kepala sekolah ELS memanggilnya dan menasehatinya agar tidak berkelahi. Namun, hal ini tetap saja dilakukan, yang akhirnya membuat kepala sekolah maklum, bahwa Soetomo berkelahi untuk membela teman-temannya sesama bumi putra.[6]

---

murid-muridnya dipindahkan ke *Kweekschool* di kota Probolinggo dan Bandung. Raden Soewadji memilih untuk melanjutkan sekolahnya di kota Bandung.

4. *Europeesche Lagere School* adalah sekolah setingkat sekolah dasar saat ini. Namun untuk tamat dari sekolah ini, diperlukan waktu selama tujuh tahun sejak yang bersangkutan memasuki sekolah.

5. Ditemukan dua versi tentang hari kelahiran Soetomo. Berdasarkan bukunya yang berjudul *Kenang-Kenangan* yang ditulisnya sendiri pada awal 1934, disebutkan bahwa ia dilahirkan pada 30 Juli 1888 di desa Ngepeh, Nganjuk, Jawa Timur. Sementara itu, dari sumber lain yang terdapat dalam *Gedenkboek Stovia 1851—1926* disebutkan bahwa ia dilahirkan di Bangil pada 1889 tanpa disebutkan tanggal dan bulannya. Hal ini diduga berkaitan untuk kepentingan pamannya Raden Arjodipoero ketika mengganti data Soetomo ketika akan masuk ke ELS. Penolakan masuk ELS diduga menjadi penyebab dari adanya data yang berbeda ini. Data Soetomo sengaja dipalsukan oleh pamannya agar pihak kepala sekolah ELS percaya bahwa Soetomo adalah benar-benar adik Raden Sahit, anaknya.

6. Lihat Sutrisno Kutojo dan Mardanas Safwani (1973) *Seri Pahlawan, Riwayat Hidup dan Perjuangan Dr. Soetomo.* Angkasa, Bandung. Halaman 8.

Setelah berhasil menamatkan sekolahnya di ELS, Soetomo meminta nasehat baik kepada ayahnya maupun kepada kakeknya. Kakeknya menghendaki agar kelak, Soetomo menjadi seorang pegawai Pangreh Praja, yang saat ini merupakan profesi yang sangat tinggi dan terpandang di masyarakat. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan ELS-nya, kakeknya meminta agar Soetomo masuk ke *Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA). OSVIA adalah sekolah pendidikan pegawai bumi putra, yang saat itu sangat diminati oleh banyak anggota masyarakat, karena lulusannya akan bekerja di pemerintahan sebagai pegawai Pangreh Praja. Berseberangan dengan kakeknya, ayahnya menghendaki agar Soetomo setelah menyelesaikan ELS-nya segera melanjutkan pendidikannya di sekolah dokter di Batavia, STOVIA (*School Tot Opleiding van Inlandsche Artsen).* Untuk sementara, ia belum menentukan pilihan. Namun, dalam hati kecilnya ia lebih suka untuk melanjutkan sekolahnya di STOVIA. Yang menjadi pertimbangan adalah, apabila ia melanjutnya sekolahnya di OSVIA, ia akan menjadi pegawai Pangreh Praja yang sering diperlakukan tidak manusiawi oleh orang Belanda. Oleh karena itu, ia memberanikan diri untuk menanyakan kepada ayahnya mengapa ia tetap betah menjadi pegawai Pangreh Praja. Ayahnya tidak segera menjawabnya. Akhirnya, ia menjelaskan bahwa kondisi ekonomi keluarga saat itu bisa lebih baik berkat pekerjaan ayahnya yang menjadi Pangreh Praja. Dengan gaji yang cukup besar, ayahnya dapat mengangkat perekonomian keluarga. Kemudian ditegaskan kembali oleh ayahnya bahwa ia tidak menginginkan anaknya mengikuti jejak ayahnya sebagai pegawai Pangreh Praja. Soetomo menyadari betul bahwa ayahnya sering kali harus menahan diri dan mengorbankan perasaan karena diperlakukan tidak adil oleh atasannya yang orang Belanda. Ini semua dilakukan demi ekonomi keluarga.

Hal ini disadari betul oleh Soetomo. Apalagi setelah ayahnya membawakannya dan menunjukkan kepadanya foto-foto seragam siswa sekolah dokter dengan jas putih dan mengenakan peci. Dengan alasan untuk menumbuhkan motivasi anaknya agar mau melanjutkan ke sekolah dokter, foto-foto itu selalu ditunjukkan kepada Soetomo. Oleh karena itu, Soetomo pun paham bahwa ayahnya tidak menghendaki dirinya melanjutkan sekolahnya di OSVIA. Motivasinya untuk masuk ke STOVIA menjadi semakin besar tatkala ia mengetahui bahwa perlakukan pegawai pemerintah yang berkebangsaan Belanda selalu minta dihormati dan dinomorsatukan walaupun jabatannya lebih rendah bila dibandingkan dengan pegawai Pangreh Praja bumi putra.

Dari hasil diskusi dengan ayahnya tentang rencana ke depan setelah Soetomo menyelesaikan ELS-nya, membuat Soetomo lebih hormat dan sayang kepada ayahnya. Ia paham betul akan pengorbanan ayahnya yang harus dilakukanya demi keluarganya. Akhirnya, ia berjanji untuk melanjutkan pendidikannya di STOVIA walaupun harus mengecewakan keinginan kakeknya.

Soetomo di Kampus STOVIA

Setelah menyelesaikan ELS-nya Soetomo akhirnya mendaftar masuk di STOVIA. Pada 10 Januari 1903, ia secara resmi diterima menjadi pelajar di STOVIA bersama teman-teman lainnya. Dengan diterimanya di sekolah tersebut, berarti ia harus meninggalkan kota dan keluarganya menuju Batavia guna menuntut ilmu, berhubung para siswanya harus masuk asrama. Pengalaman jauh dari keluarga maupun temannya inilah yang menjadikannya ia bermalas-malasan, suka melanggar peraturan dan berkelahi di antara mereka. Setiap kali membuat keributan, direktur STOVIA selalu memberikan hukuman. Namun, hal itu tidak membuat ia jera, bahkan ia belajar secara serampangan dan tidak memiliki tanggung jawab sama sekali. Suasanalah yang membuat ia tidak betah di asrama. Dengan kondisi seperti ini mengakibatkan hasil evaluasi belajarnya tidak memuaskan baik bagi guru, direktur, maupun ayahnya. Karena telah kehabisan gagasan untuk menghukum Soetomo, Direktur STOVIA akhirnya mengirimkan surat kepada orangtuanya yang isinya berupa ancaman bagi Soetomo. Ia akan dikeluarkan dari sekolahnya apabila tidak ada kemauan untuk memperbaiki hasil evaluasi belajarnya.[7] Surat peringatan dari Direktur Stovia menjadikan ayahnya geram dan merasa prihatin, mengapa hal itu bisa terjadi.

Begitu menerima surat peringatan dari Direktur Stovia, ayahnya kemudian menulis surat kepada Soetomo, yang berbunyi sebagai berikut:

> *"Saya sedih, mengapa kamu berbuat demikian, Cuk? Bagi saya sedikit artinya uang yang saya kirimkan setiap bulan kepadamu. Demikian pula susah payah yang saya lakukan supaya kamu meneruskan sekolah tersebut. Yang membuatku sedih khusus karena kamu menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepadamu.*
>
> *Ingat bangsamu, Cuk. Bangsamu yang dijajah Belanda. Mereka harus ditolong. Siapa yang akan menolong jika bukan anak negeri sendiri? Dan jika kamu kelak berhasil menjadi dokter kamu bisa berbuat banyak. Orang Belanda tidak bisa mendekati mereka, sedangkan kamu mampu. Maklum kamu mengerti cara mereka hidup dan berpikir.*

---

7. Lihat Paul W. van der Veur (ed.) (1984). *Kenang-Kenangan Dokter Soetomo*. Jakarta, Sinar Harapan. Halaman 158. Menurut Veur, Soetomo berperilaku demikian karena ia merasa tidak cocok dengan system pendidikan yang sangat ketat. Selain itu ia tidak merasa takut karena apabila ia dikeluarkan dari STOVIA, ia masih bias melanjutkan studinya di OSVIA, yang merupakan keinginan kakeknya.

Cuk, harus ada orang yang memimpin mereka. Saya selalu berdoa semoga sesudah menjadi dokter kelak kamu bisa menjadi pemimpin bangsamu. Bangsa yang kini melarat karena seluruh kekayaannya dihabisi oleh Bangsa Penjajah, ternyata kini waktumu kau habiskan secara sia-sia, Cuk.

Saya yakin kamu bisa mengikuti pelajaran itu asal kamu mau. Bukankah mengenai hal itu pernah kamu perhatikanketika bersekolah di Bangil dulu? Jadi, Cuk, saya harap sesudah menerima surat ini kamu akan berubah. Saya percaya kamu bisa. Malah jika kamu mau, setiap anak Belanda dapat kau kalahkan, ingat, Cuk. Bangsamu menunggu. Jangan sia-siakan harapan mereka itu"[8]

Membaca surat dari ayahnya, hati kecil Soetomo tersentuh, kemudian ia berjanji untuk belajar lebih giat lagi. Surat ayahnya itu menjadi titik balik bagi dirinya untuk mengubah sikap dan perilakunya selama ini. Teman-teman seangkatannya melihat perubahan yang terjadi pada diri Soetomo. Kini, setelah menerima surat dari ayahnya itu, waktunya dihabiskan untuk membaca buku-buku referensi di perpustakaan. Keseriusannya dalam mengejar ketinggalannya itu membuat heran para guru, termasuk Direktur STOVIA saat itu Dr. H.F. Roll. Perubahan perilaku dan prestasinya, membuat ia mulai dihargai baik oleh teman seangkatannya maupun oleh guru-gurunya. Saat berlibur, waktunya ia habiskan untuk berdiskusi dengan ayahnya. Banyak gagasan Soetomo yang diterapkan oleh ayahnya, khususnya dalam menghadapi baik permasalahan di kantor maupun di rumah.

Kondisi ini tidak berlangsung lama, karena pada 28 Juli 1907, ia menerima telegram dari keluarganya yang mengabarkan bahwa ayahnya, Raden Soewadji meninggal dunia. Telegram ini sangat menggoncangkan hati Soetomo, karena sebagai anak sulung, ia harus berkorban menggantikan peran ayahnya dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Untuk merealisasikannya, ia berniat untuk keluar dari STOVIA agar segera dapat bekerja menggantikan peran ayahnya. Keinginannya ini mendapat tantangan tidak hanya dari keluarga, tetapi juga dari teman-teman dan guru-gurunya. Kebiasaan berkumpul dengan teman-temannya yang senang berpesta sebelum ayahnya meninggal, kini ia hindari. Keputusan ini ia ambil karena ia sadar benar akan pesan ayahnya itu. Perubahan perilaku

---

8. Lihat Redi Panuju (2002). *Dr. Soetomo Pahlawan Bangsaku*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman 65—66. Istilah sapaan *Cuk* adalah singkatan dari *Kacuk*, yaitu sapaan untuk memanggil anak kecil yang belum menikah. Biasanya digunakan oleh orang tua untuk memanggil anak laki-lakinya, di samping istilah lain, seperti *le* (dari kata *tole*), *nang* (dari kata *lanang),* dsb.

dan pemikirannya terlihat dari raut mukanya sehari-hari yang selalu terlihat murung. Akibat dari kematian ayahnya itu pribadinya berubah. Kini ia menjadi pribadi yang teratur, cermat, dan penuh kehati-hatian. Hal ini juga tampak dalam kegiatan diskusi bersama teman-teman dan gurunya. Ia juga sangat hemat dalam membelanjakan uang beasiswa yang diterimanya dari pemerintah Belanda. Uang tabungan yang dimilikinya digunakan untuk membantu teman-temannya yang membutuhkan. Dengan alasan inilah akhirnya ia dipercaya oleh teman-temannya untuk menjadi bendahara perkumpulan di kelasnya. Semua guru dan Direktur STOVIA melihat perubahan pribadinya itu. Akhirnya, pada 11 April 1911, ia berhasil menyelasaikan sekolahnya dengan memperoleh nilai bagus.[9]

Soetomo dan Boedi Oetomo

Dalam buku-buku teks banyak dituliskan bahwa Boedi Oetomo (selanjutnya disingkat BO) didirikan pada 20 Mei 1908 oleh dr. Wahidin Soediro Hoesodo. Pendapat ini banyak ditentang baik oleh saksi sejarah maupun oleh penulis sejarah yang telah menggunakan sumber-sumber yang dapat dipercaya. Sebelum Boedi Oetomo dinyatakan pendiriannya, kondisi masyarakat bumi putra sangat memprihatinkan kondisinya. Banyak pemuda-pemudi bumi putra yang pandai, namun tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tergerak oleh semangat sosial yang tinggi dan solider terhadap bangsanya, dr. Wahidin Soediro Hoesodo berkeinginan untuk mendirikan suatu lembaga yang disebut sebagai *studie fonds.* Lembaga ini nantinya akan bergerak dalam bidang sosial, yaitu mengumpulkan dana untuk membiayai pemuda-pemudi yang pandai, tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk melanjutkan studinya. dr. Wahidin sebagai pemrakarsa gagasan ini berusaha untuk melakukan lobby dengan beberapa siswa sekolah, termasuk siswa sekolah kedokteran STOVIA. Beberapa kali diskusi diselenggarakan di STOVIA guna menumbuhkan motivasi dan semangat membantu pemuda sebangsanya yang kurang beruntung. Ia juga melakukan perjalanan keliling Jawa untuk menyebarkan gagasannya guna menghimpun dana yang berasal dari anggota masyarakat termasuk di dalamnya para bangsawan Jawa dan orang Belanda. dr. Wahidin berharap dengan upayanya itu, orang tergerak dan terketuk hatinya untuk menyisihkan sebagian harta dan kekayaannya untuk membantu kaum muda bumi putra yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, namun tidak memiliki biaya. Dr. Wahidin berharap agar kaum muda bumi putra yang memperoleh bantuan ini nantinya mengabdikan pengetahuan dan keahliannya untuk

9. Diploma *Indlanschen Arts* atau Ijazah sebagai dokter bumi putra diberikan kepada siswa sekolah kedokteran berikut: Raden Soetomo, Mas Guenawan, J. Latumenten, Raden Slamet, Mas Mohamad Saleh, A. Andu, Raden Mas Gumbrek dan Mas Ramelan. Lihat *de Sumatera Post*, 18 April 1911, halaman 1 dan Paul W. van de Veur (1984) Penerbit Sinar Harapan: Jakarta, halaman 47.

kemajuan bangsanya. Dengan upaya itu, diharapkan, suatu saat nanti bangsa Indonesia akan mengalami peningkatan kehidupan dan kesejahteraanya. [10]

Ajakan Dr. Wahidin ini mendapat tanggapan positif dari Soetomo, dan ia menyampaikan perlunya mendirikan suatu organisasi untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa pemuda dan pelajar ingin memajukan rakyatnya di segala bidang. Soetomo sangat intensif dan sangat *concern* terhadap gagasannya itu. Untuk merealisasikannya, ia dibantu oleh teman sekelasnya Goenawan Mangoenkusumo.[11] Apa yang dilakukan oleh dr. Wahidin, telah mengilhami mereka berdua. Soetomo melakukan lobby dengan kakak kelas maupun adik kelasnya di STOVIA. Di kelas Soetomo, terdapat 17 siswa (termasuk Soetomo dan Goenawan), kakak kelasnya berjumlah 11 siswa, sementara adik kelasnya berjumlah 20 siswa.[12] Sebagai kelanjutan dari lobbynya itu, ditetapkan suatu hari tertentu untuk membulatkan ikrar mereka. Tepat pada hari Minggu, 20 Mei 1908, dengan mengambil tempat di STOVIA di zaal van het eerste jaar der geneeskundige afdeeling (Ruang kelas 1)[13], Soetomo dan Goenawan mengumpulkan siswa-siswa STOVIA seperti dilaporkan oleh Goenawan berikut:

> *Tepat pukul 9 pagi, semua sudah berkumpul. Pemuda Soetomo mulai bicara, menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan pagi itu. Beliau mengemukakan gagasan dan cita-citanya secara singkat, terang, dan jelas. Beliau berbicara: "Zonder hartstocht, sober en duidelijk": tanpa nafsu, sederhana dan*

10. Lihat Tashadi (1982) *Dr. Wahidin Sudirohusodo.* Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional 1982-1983.

11. Dalam hubungannya dengan temannya yang bernama Goenawan Mangoenkoe-soemo, Soetomo menjelaskan dalam bukunya *Kenang-Kenangan* dituliskan bahwa kedua tokoh ini (Soetomo dan Goenawan) memiliki pandangan yang sama tentang cita-cita dan pendapatnya. Soetomo lebih dikenal sebagai seorang yang mahir dalam berpidato, pandai meyakinkan orang, dan sangat berhati-hati dalam ucapan-ucapannya. Sementara Goenawan dikenal sebagai siswa yang lebih tegas dan tajam dalam tulisan-tulisannya. Keduanya saling terbuka sehingga banyak kalangan yang berpendapat bahwa Soetomo lebih banyak berkarya melalui perbuatannya, sementara Goenawan melalui tulisan-tulisannya begitu kuat, dilanda-si oleh ilmu pengetahuan yang begitu rasional dan tajam kata-katanya, yang mengakibatkan ia ditakuti oleh lawan dan digemari oleh kawan-kawannya. Hal ini dikemukakan oleh Dr. H. Roeslan Abdulgani (1976) *Alm Dr. Soetomo yang Saya Kenal.* Yayasan Idayu: Jakarta, halaman 18—19.

12. Menurut keterangan Soetomo, masih banyak lagi jumlah siswa yang jauh lebih rendah. Ia melakukan lobby dengan semua murid dan memperoleh dukungan sepeuhnya dari mereka. (Lihat Dr.H. Roeslan Abdulgani (1976) *Alm Dr. Soetomo yang Saya Kenal.* Yayasan Idayu: Yogyakarta, cetakan II, halaman 20-21.

13. Di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta, ruang ini dinamai Ruang Budi Utomo.

> *tegas. Selesai Soetomo berbicara, maka -–tulis Goenawan Mangoenkoesoemo--, reaksinya adalah hebat sekali. "Donderend was het applaus": semua tepuk tangan gegap gempita, tanda setuju sepenuhnya. Gagasan Soetomo cs berhasil. Didirikan sa'at itu juga perkompulan "Boedi Oetomo"; organisasi modern yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Organisasi yang baru ini diketuai oleh Soetomo.*[14]

Lahirnya Boedi Oetomo itu masih sangat dirahasiakan. Para pendirinya berpendapat apabila tidak dirahasiakan, kemungkinan akan menimbulkan rintangan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Hal ini sangat disadari oleh para pendirinya mengingat beberapa pokok pikiran masih menjadi isu krusial bagi pemerintah kolonial Belanda. Pasal 111 RR (*Regerings Reglement)* menghadang para pengurus Boedi Oetomo, karena bunyi dari pasal 111 RR itu adalah pelarangan bagi organisasi-organisasi rakyat untuk mencampuri urusan pemerintah. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial kepada kaum intelektual bumi putra bertujuan agar kaum bumi putra tetap mengabdi kepada pemerintah kolonial. Dalam pertemuan tersebut telah dihasilkan kesepakatan tentang kepengurusan Boedi Oetomo, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : R. Soetomo

Wakil Ketua : M. Soelaiman

Sekretaris I : Soewarno

Sekretaris II : Goenawan Mangoenkoesoemo

Bendara : R. Angka

Komisaris : M. Soewarno, M. Mohamad Saleh, dan M. Goembrek.

Pendirian organisasi Boedi Oetomo ini diketahui baik oleh guru-guru maupun pimpinan STOVIA. Banyaknya dukungan terhadap organisasi yang baru ini mengkhawatirkan mereka. Mereka mengancam akan mengeluarkan Soetomo dari STOVIA apabila tidak menghentikan kegiatannya. Ancaman yang dikeluarkan dari STOVIA tidak menyurutkan niat Soetomo untuk mengembangkan organisasi Boedi Oetomo, termasuk Goenawan Mangoenkoesoemo

14. Laporan ini dikutip dari buku Dr. H. Roeslan Abdulgani *Alm Dr. Soetomo yang Saya Kenal,* halaman 21.

dan beberapa siswa STOVIA lainnya. Apabila Soetomo dikeluarkan dari sekolah, mereka akan solider dengan Soetomo ikut keluar dari STOVIA. Kegundahan para pengajar ini ditindaklanjuti oleh pimpinan STOVIA dr. HF Roll. Ia memahami sepenuhnya sikap anak-anak muda seusia Soetomo dan kawan-kawan. Oleh karena itu, dalam rapat pengajar, dr. HF Roll membela Soetomo dengan mengatakan bahwa anak muda, di mana pun mereka berada, akan memiliki sikap radikal menentang ketidakadilan yang terjadi di masyarakat.[15]

Berdirinya Boedi Oetomo ini telah menandai perubahan perjuangan rakyat yang mengedepankan diplomasi dan bukan fisik. Boedi Oetomo telah menginspirasi berdirinya organisasi-organisasi pergerakan lainnya seperti Sarekat Islam, Indische Partij, Partai Nasional Indonesia, dan partai-partai lain yang masing-masing memperjuangkan tercapainya tujuan organisasi tersebut.

Meskipun Boedi Oetomo didirikan pada 20 Mei 1908, namun Anggaran Dasar organisasi baru disahkan pada sidang yang I yang diselenggakan pada 3 sampai dengan 5 Oktober 1908 di kota Yogyakarta. Dalam catatan sejarah, organisasi ini mencatat perkembangan yang sangat spektakuler. Beberapa bulan setelah organisasi Boedi Oetomo didirikan (tepatnya 5 bulan), organisasi ini telah memiliki 40 cabang dengan jumlah anggota mencapai lebih dari 10.000 orang.[16]

Berdasarkan laporan yang dibuat oleh Afdeeling Yogyakarta yang ditandatangani oleh sekretarisnya M.NG.D Sewaja[17], dikatakan bahwa anggota Boedi Oetomo cabang Yogyakarta sangat kagum terhadap para pemuda STOVIA yang telah memprakarsai pendirian organisasi Boedi Oetomo. Dr. Wahidin sebagai motivator memahami benar apa yang terjadi di dalam sanubari para siswa STOVIA dan dan pemuda-pemuda di luar STOVIA. Sebagai ketua Kongres, ia membuka dan memimpin kongres. Kongres yang dihadiri oleh kurang lebih 400 peserta itu berasal dari beberapa kota, antara lain Jakarta, Bogor, Bandung, Magelang, Surabaya, Probolinggo dan Yogyakarta.[18] Dalam kesempatan

---

15. Lihat *Seri Pahlawan, Riwayat Hidup dan Perjuangan Dr. Soetomo*, karya Sutrisno Kutojo dan Mardanas Safwani (1973), Angkasa, Bandung, halaman 26.

16. Lihat Redi Panuju (2002) *Dr. Soetomo Pahlawan Bangsaku.* Perpustakaan Pelajar: Yogyakarta, halaman 23—26.

17. Oleh Dr. H. Roeslan Abdulgani dikatakan bahwa arsip tentang Kongres I Boedi Oetomo ditulis oleh sekretaris Afdeeling Yogyakarta M.Ng. D Sewaja dan dicetak oleh Percetekan H. Burning, Yogyakarta. Arsip ini saat ini disimpan di KITLV (*Koninklijk Institutt voor Taal, Land-en Volkenkunde)* di Leiden, Belanda. (Dr. H. Roeslan Abdulgani, halaman 25).

18. Selain tokoh-tokoh pemuda yang dating dari beberapa kota tersebut, juga hadir wakil dari Pakualaman, pembesar-pembesar Belanda, para bupati dari berbagai kota seperti bupati Temanggung, Blora dan Magelang. Utusan dari Mangkunegaran sebanyak 6 opsir juga

itu, ia menjelaskan keinginannya agar Boedi Oetomo menjadi suatu *studie fonds* yang kuat sehingga dapat membantu para pelajar bumi putra dan memelihara kebudayaan Jawa. Setelah membuka sidang, dr. Wahidin mempersilakan Soetomo sebagai pendiri organisasi Boedi Oetomo untuk menyampaikan gagasan-gagasannya dalam bahasa Belanda.[19] Usulan itu disetujui oleh semua peserta, karena mayoritas dari mereka mampu berbicara dalam bahasa Belanda.

Dalam kesempatan itu, Soetomo mengusulkan agar Boedi Oetomo menjadi organisasi yang memotivasi semua orang ke arah kemajuan semua bumi putra di pulau Jawa dan Madura. Kondisi yang ada saat ini akan membuat pemuda-pemuda bumi putra ketinggalan dibandingkan dengan pemuda bangsa lain. Untuk mencapai tujuan itu, pendidikan dan pengajaran harus diutamakan untuk mendorong kemajuan yang lebih cepat dari pada apa yang ada pada saat itu. Sebagai pemuda hendaknya tidak hanya menerima saja apa yang sudah digariskan kebijakannya oleh pemerintah kolonial. Pemuda bumi putra harus menjadi motor perubahan itu. Pidato Soetomo mendapatkan sambutan yang sangat meriah dari peserta kongres. Hal ini disebabkan karena Soetomo adalah seorang calon dokter, suatu profesi yang memiliki kedudukan yang amat tinggi di masyarakat pada saat itu.

Pada hari kedua kongres, giliran pemuda Goenawan tampil di mimbar. Ia menegaskan pentingnya membangun dan membangkitkan kepercayaan diri, agar tidak selamanya menggantungkan nasibnya pada pemerintah kolonial. Perubahan hanya akan datang apabila dimulai dari diri sendiri. Sambutan Goenawan memperoleh tanggapan yang meriah dari para peserta kongres yang terdiri atas semua kalangan baik tua maupun muda, kalangan yang maju maupun yang belum maju. Kongres itu akhirnya menjadi ajang bertemunya semua kalangan, yang sangat mendambakan kemajuan. Kongres pertama Boedi Oetomo telah mempersatukan mereka guna merumuskan cita-cita Boedi Oetomo yang menyerahkan kepemimpinan itu kepada kaum tua. Sementara kaum muda akan menjadi motor dan penggeraknya. Dari hasil kongres pertama ini diputuskan bahwa organisasi Boedi Oetomo akan ditangani oleh:

Ketua : R.T. Aryatirtakusumo

Wakil Ketua : dr. Wahidin

Anggota : Dwidjosewojo dan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo.

---

hadir dalam kongres tersebut.

19. Pimpinan siding sebelumnya meminta izin kepada pada peserta siding agar Soetomo diberikan kesempatan untuk menjelaskan gagasannya tidak dalam bahasa Jawa Kromo Inggril atau bahasa Melayu, tetapi dalam bahasa Belanda. Peserta sidang mengizinkan dan memberikan dukungan kepada Soetomo.

Dengan demikian pupuslah anggapan yang menentang organisasi Boedi Oetomo. yang berkembang sebelum dilaksanakannya kongres ini. Mereka yang belum memahami mengenai organisasi ini beranggapan bahwa Boedi Oetomo adalah salah satu organisasi yang akan membuang segala adat istiadat Jawa, dan menggantikannya dengan adat istiadat bangsa Eropa.

Setelah kongres I Boedi Oetomo berakhir, muncul beberapa gagasan untuk memperluas jangkauan organisasi Boedi Oetomo. Gagasan itu muncul dari dr. Tjipto Mangoenkoesoemo yang menginginkan agar kiprah kaum muda bumi putra ini lebih diberdayakan.[20] Ia mencoba memasukkan gagasan radikal dalam jajaran Boedi Oetomo dengan mengusulkan memperluas keanggotaan Boedi Oetomo, tidak hanya meliputi bumi putra Jawa dan Madura saja, melainkan juga pemuda yang berasal dari kepulauan lain di nusantara dan orang-orang asing yang bersimpati terhadap organisasi ini. Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo menghendaki agar gagasan trio Douwes Dekker, dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan Ki Hadjar Dewantara dapat diterima. Namun, gagasan ini ditolak, karena dianggap terlalu radikal dan belum diperoleh manfaat apabila organisasi ini diperluas ke luar Jawa dan Madura. Dengan ditolaknya usulan ini, dr. Tjipto Mangoenkoesoemo menyatakan diri keluar dari Boedi Oetomo.[21]

20. Sejak awal pendiriannya, Boedi Oetomo mencurahkan perhatian khusus pada pendidikan anak Indonesia. Campur tangan pertama kea rah ini muncul dalam aksi untuk memperbaiki sekolah pribumi kelas-1 yang dalam keputusan Pemerintah bulan Desember 1910 nomor 8, dijadikan HIS. Selain itu, karena program Boedi Oetomo juga memajukan kaum perempuan pribumi, sehingga pada 1913 kaum perempuan muda dapat diterima di sekolah guru. Pada 1913 juga didirikan *Studie Fonds Boedi Oetomo Woro.* Sementara itu pada 1914 dan 1915 beberapa sekolah Boedi Oetomo didirikan di Solo, Yogyakarta dan Batavia, yang berstatus sebagai sekolah pribumi kelas-2, *Schakel* atau HIS. Antara 1916 dan 1922 Boedi Oetomo membatasi diri pada pelaksanaan aksi dalam Volksraad untuk memperbaiki pendidikan pribumi. Lihat Laporan Kongres Fusi Boedi Oetomo dan PBI dalam *Ministerie van Kolonien* nomor 183/K III, Januari 1936, Koleksi Nationaal Archief Nederlands, Den Haag, Belanda.

21. Sebagai konsekuensi dari tidak diterimanya gagasan itu, dr. Tjipto Mangoenkoesoemo bersama Douwes Dekker dan Ki Hadjar Dewantara mendirikan Indische Partij, suatu organisasi politik yang memiliki tujuan untuk membangun bangsa yang baru, bangsa *indier* dengan tanah air *insulinde* yang terdiri dari semua penduduk *insulinde.* Istilah *indier* digunakan untuk menyebut penduduk yang tinggal di kepulauan seluruh Nusantara, sementara *insulinde* digunakan untuk menyebut pulau-pulau yang berada di kepulauan Nusantara, seperti Sumatera, Jawa, Madura, Ambon, Minahasa, baik yang bumi putra maupun non-bumi putra yang berpendirian *Het land dat gij voedt, zij het land dat gij hoedt* 'Negeri yang menghidupi kamu adalah Tanah Airmu yang harus kamu bela'. (Lihat Dr. Roeslan Abdulgani (1976, halaman 30).

Pada 1912, bersamaan dengan didirikannya Indische Partij oleh dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan kawan-kawannya, berdiri pula organisasi lain seperi Muhammadiyah dan Sarekat Islam. Berdirinya organisasi ini menunjukkan bahwa banyak anggota masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasinya, baik berdasarkan keagamaan seperti Mummadiyah, maupun berdasarkan profesi seperti pengusaha dan guru-guru yang beragama Islam. Dengan demikian, berdirinya Boedi Oetomo telah menginspirasi berdirinya organisasi-organisasi lain yang mendasarkan organisasinya pada aliran politik nasionalisme dan keagamaan.

Dokter Soetomo Setelah Lulus dari STOVIA

Setelah lulus dari Sekolah Kedokteran STOVIA pada 1911, dr. Soetomo, yang diwisuda bersama enam sahabatnya, harus menerima pos dinasnya yang pertama yaitu di Semarang. Kondisi di Jawa dan beberapa tempat lainnya di luar Jawa saat itu, sedang terjangkit wabah penyakit pes, sehingga pemerintah kolonial sangat memerlukan tenaga medis. Setahun menjalankan tuasnya di Semarang, ia kemudian dipindahkan ke Tuban pada 1912. Keberhasilannya menangani wabah penyakit ini membuat tenaganya sangat dibutuhkan dalam mengatasi penyakit yang berjangkit di masyarakat ini. Baru satu tahun bertugas di Tuban, ia dipindahkan ke Lubuk Pakam, karena di kota itu berjangkit penyakit pes yang makin lama makin meluas. Penugasannya di Lubuk Pakam merupakan tugas pertamanya di luar Jawa. Di kota itu, ia ditugaskan untuk menangani orang yang bekerja di perkebunan-perkebunan hingga masuk jauh ke pelosok-pelosok. Berdasarkan pengamatannya di sejumlah wilayah di Lubuk Pakam, ia merasakan kondisi pemuda yang lebih parah bila dibandingkan dengan kondisi kaum muda di Jawa. Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan yang dilakukannya, dr. Soetomo semakin yakin bahwa organisasi yang telah dibentuknya sebaiknya tidak hanya terbatas di pulau Jawa dan Madura saja, melainkan meliputi seluruh kepulauan yang berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda.

Dianggap berhasil mengatasi wabah pes yang meluas di wilayah Lubuk Pakam, dr. Soetomo dimutasikan ke Malang, karena di kota ini baru saja terjangkit wabah pes. Posisinya di Lubuk Pakam digantikan oleh dokter Jawa Mas Muhammad. Mengingat bahwa kota Malang merupakan kota yang tdak terlampau luas, wabah pes yang mewabah di kota itu segera dapat diatasi. Belum lama berselang ditempatkan di kota Malang, ia harus kembali lagi ke pulau Sumatera untuk ditugaskan di Batu Raja, yang penduduknya juga mulai banyak yang terjangkit penyakit pes. Di Batu Raja, ia harus menghadapi masalah yang sama, yakni banyaknya korban di kalangan anggota masyarakat yang menjadi korban keganasan penyakit pes. Ia juga menyaksikan kondisi masyarakat yang miskin, yang hidupnya sangat susah. Mengingat banyaknya penderita dan luasnya wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, dr. Soetomo tetap dipertahankan di kota itu hingga 1917. Ia berkarya di

wilayah itu hingga wabah penyakit pes berkurang. Dr. Soetomo ternyata di tempat tugasnya tidak hanya mejalankan tugasnya sebagai dokter, tetapi juga mengikuti beberapa kegiatan perkumpulan *Among Bongso,* suatu perkumpulan yang terdiri dari pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan orang-orang yang menghendaki kemajuan bangsanya. Ia ditunjuk sebagai sekretarisnya. Dari kegiatan *Among Bongso* ini, ia mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi beberapa kota lain di Sumatera Barat. Dalam catatannya, ia menekankan pentingnya diberikan kebebasan yang lebih besar bagi para pegawai Pangreh Praja oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda agar adapat memajukan bangsanya. Tanpa diberikan kebebasan yang lebih besar, dalam catatannya ia berpendapat bahwa Pangreh Praja tidak akan dapat berkembang dan mandiri, tidak dapat mengambil inisiatif dan selalu tergantung pada kebijakan pemerintah kolonial

Pada 1917 tersebut, dr. Soetomo dipindahtugaskan dari Batu Raja ke Blora di Jawa, karena wabah pes di Batu Raja sudah dapat diatasi. Di Blora, ia diperbantukan di rumah sakit Blora di Jawa Tengah, yang merupakan rumah sakit bantuan dari Zending, yang dikelola oleh gereja. Banyak tenaga medis di sana yang didatangkan dari Belanda termasuk juru rawat dan beberapa dokter. Dari sinilah Dr. Soetomo tertambat hatinya pada seorang perawat berkebangsaan Belanda yang bernama Suster de Graff, seorang janda, yang memiliki nama kecil Everdina Bruring. Untuk pertama kalinya ia berkenalan dengan perawat itu ketika ditugaskan untuk menjemputnya di stasiun kereta api. Berkat ketekunan dan kerajinan Zuster de Graff, Dr. Soetomo akhirnya berniat untuk mempersuntingnya. Sebelum penugasannya kembali ke Batujajar, Palembang, ia menikahi Everdina Broering secara Islam di Blora.[22] Setelah menjadi isteri Soetomo, perawat yang berkebangsaan Belanda ini tetap memberikan kebebasan kepada suaminya untuk tetap memperjuangkan cita-citanya yang telah diperjuangkan selama ini.

Secara diam-diam, ternyata pemerintah kolonal memberikan perhatian tentang apa yang sudah dilakukan oleh Dr. Soetomo terhadap bangsanya. Prestasi yang dicapainya selama berkarya di masyarakat, khususnya dalam menangani penyakit tropis menjadi suatu keahlian tersendiri bagi dirinya, yang akhirnya disadari oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Melihat karya nyata yang telah dilakukannya, khususnya selama pengabdiannya kepada masyarakat baik di Jawa maupun di Sumatera, pemerintah Hindia Belanda memberikan beasiswa kepadanya untuk memperdalam pendidikannya, khususnya untuk mempelajari penyakit kulit dan kelamin di Belanda, berdasarkan usul yang diajukannya. Hal ini terjadi karena Perang Dunia I telah usai, dan di Eropa sudah tidak terjadi lagi perang antarnegara Eropa.[23] Berita tersebut sangat menggembirakan dirinya, karena selain sudah

22. Peristiwa ini diberitakan dalam *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indie,* 12 September 1917, halaman 1.

23. Pada 1919, kondisi Eropa sudah tenang kembali setelah selesainya Perang Dunia I (1914—1917). Hubungan antara wilayah koloni dan Negara induk sudah mulai normal

lama ia berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan di Eropa, khususnya di Belanda, ia juga berkeinginan untuk memperoleh ijazah agar kedudukannya sama dengan dokter-dokter Belanda yang ditugaskan di Jawa. Akhirnya, lamarannya diterima, dan ia memperoleh beasiswa untuk mengambil gelar *Nederlandsche Artsen* bersama dengan Dr. Muhamad Sjaaf di Belanda.

Pada November 1919, bersama isterinya, ia pergi ke Belanda. Ia terdaftar sebagai mahasiswa kedokteran di Universitas Amsterdam dengan nomor pendaftaran D 355. Selama memperdalam pendidikannya, ia tinggal di Amsterdam dengan harapan agar dapat tetap membina hubungan baik dengan keluarga isterinya, yang belum dikenalnya dengan baik. Di kota inilah ia menghabiskan waktunya bersama isterinya untuk menuntut ilmu. Namun, di sela-sela waktu belajarnya, Soetomo tetap meluangkan waktu untuk tetap aktif dalam kegiatan pergerakan. Bersama-sama dengan pelajar Hindia Belanda lainnya, ia selalu berdiskusi dan berdebat tentang segala hal yang menyangkut kemajuan bangsanya. Karena pandangannya yang luas itulah, ia diajak oleh teman-temannya sesama pelajar Hindia Belanda untuk bergabung dalam *Indische Vereeniging,* yaitu suatu perkumpulan yang didirikan oleh pelajar-pelajar yang berasal dari Hindia Belanda di Negeri Belanda. [24] Dr. Soetomo yang dikenal sebagai pendiri Boedi Oetomo, akhirnya terpilih sebagai ketua *Indische Vereeniging* di Belanda pada 1921. Jabatan itu diterimanya, karena pada 2 Desember 1919 ia sudah menamatkan studinya dan memperoleh ijazah *Nederlandsche Artsen,* yaitu ijazah yang lebih tinggi dari Sekolah Dokter Jawa STOVIA di Batavia. Organisasi *Indische Vereeniging* dinilai sangat Eropa sentris. Oleh karena itu, atas usul dr. Soetomo organisasi ini diubah namanya menjadi *Perhimpoenan Indonesia* pada 1922. Pada tahun itu juga, ia juga mendirikan cabang Serikat Dokter Hindia Belanda di Amsterdam. Pendirian organisasi itu diharapkan dapat membantu program-program para dokter Hindia Belanda, sekaligus dapat menjadi penghubung antara para dokter yang sedang belajar melanjutkan studi spesialis di Belanda dan para dokter yang berkarya di Hindia Belanda. Serikat Dokter Hindia

---

kembali. Oleh karena itu, banyak siswa-siswa lulusan sekolah atas yang melanjutkan studinya di Belanda dan beberapa Negara lain, seperti Jerman dan Austria. Beberapa tokoh yang melanjutkan studinya di luar negeri antara lain Moh. Hatta, Tan Malaka, Samsi, dan Soebardjo. Dr. Soetomo melanjutkan studinya agar memperoleh ijazah *Nederlandsche Artsen*, yaitu ijazah yang setara dengan dokter-dokter Belanda yang tingkatnya lebih tinggi dari pada *Indlansche Artsen* lulusan STOVIA di Batavia.

24. *Indische Vereniging* adalah perkumpulan pelajar Hindia Belanda yang melanjutkan pendidikannya di Belanda. Nama *Indische Vereniging* kemudian diubah menjadi *Indonesische Vereniging* yang berarti kaum pelajar ini sudah menamakan dirinya sebagai orang Indonesia lagi dan bukan pelajar Hindia Belanda. Sebagai konsekuensi dari perubahan nama ini memiliki tujuan yang lebih jelas dan lebih terarah, dari pada sebelumnya. Bahkan pada 1925, Soekiman Wirjosandjojo Ketua *Indonesische Vereniging* mengubah namanya menjadi *Perhimpunan Indonesia* yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

belanda cabang Amterdam diketuai oleh dr. Sitanala, sekretaris dijabat oleh dr. Soetomo, dan bendahara oleh dr. Slamet.[25]

Waktu studi yang cepat, memungkinkan bagi dr. Soetomo untuk membuka parktek dokter bersama-sama dengan Profesor S. Mendes da Costa, seorang ahli dermatologi (penyakit kulit dan kelamin). Setelah menerima ijazah dari Universitas Amsterdam, ia melanjutnya studi spesialis dermatologi di Universitas Hamburg, di bawah bimbingan dua orang guru besar Jerman terkenal, yakni Prof. PG Unna dan Prof. HC Plaut. Pengalaman praktek bersama dokter da Costa dan pendalaman spesialisasi dermatologi di Jerman nantinya akan sangat berguna untuk memajukan kesehatan masyarakat di tanah air. Baru pada 1923, ia bersama isterinya kembali ke tanah air untuk memulai tugasnya yang baru.

Dr. Soetomo di Surabaya

Pada Juni 1923, dr. Soetomo kembali ke tanah air. Sekembalinya dari Belanda, ia memperoleh tugas baru untuk bekerja di rumah sakit Simpang di Surabaya (CBZ). Selain bekerja sebagai dokter di rumah sakit itu, ia juga memperoleh tugas tambahan untuk menjadi pengajar di Sekolah Kedokteran di Surabaya NIAS (*Nederlandsche-Indische Artsen School*). Ia menerima tugas dari pemerintah melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Sekolah kedokteran Hindia Belanda, bahwa terhitung mulai tanggal 31 Juli 1923, dr. Soetomo, dokter pemerintah di Rumah Sakit Umum pusat di Surabaya diserahi tugas untuk memberikan kuliah dua kali per minggu dalam bidang penyakit kulit dan kelamin.[26] Sementara itu, di sore hari, ia juga masih meluangkan waktunya untuk membuka praktek di rumahnya.

Profesinya sebagai dokter tetap di rumah sakit, sebagai dosen di NIAS, praktek di rumah, dan menghadiri rapat-rapat organisasi mengharuskan dr. Soetomo dan isterinya tinggal di kota Surabaya. Kondisi kota Surabaya tidak begitu cocok bagi isterinya, sehingga menyebabkan istrinya mengalami sesak nafas karena menderita penyakit asma akut. Atas saran dari kawan-kawannya sesama dokter, isterinya disarankan untuk menetap di daerah pegunungan, yang udaranya masih bersih. Akhirnya dipilihlah tempat peristirahatan isterinya, di desa Cilaket di lereng gunung Penanggungan Malang. Jarak antara Surabaya – Malang yang dianggap tidak terlalu jauh, memungkinkan baginya untuk menengok isterinya dua kali sebulan. Di tempat tinggalnya yang baru ini, nyonya Soetomo masih memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk sekitarnya. Melihat kondisi isterinya yang semakin parah, dr. Soetomo memutuskan dalam waktu singkat untuk berangkat ke Eropa. Direncanakan

25. Lihat *Bataviaasch Nieuwsblad,* 7 Agustus 1922, halaman 1.
26. Lihat *De Indische Courant,* 9 Juli 1923, halaman 1.

keluarga ini akan tinggal di Swiss. Setelah enam bulan tinggal di Eropa, ia akan kembali ke Jawa, sementara isterinya akan tetap tinggal di Swiss untuk meneruskan pengobatannya.[27] Namun, rencana tersebut tidak terlaksana. Setelah berita itu muncul, tidak ada berita lagi tentang nyonya Soetomo. Baru pada 19 Februari 1934, diberitakan koran di *Algemeen Handelsblad,* 19 Februari diberitakan bahwa Nyonya Soetomo, terlahir Everdina Broering, meninggal dunia pada 19 Februari 1934 di Pacet, Malang tempat tinggalnya selama ini, akibat penyakit dada yang sudah lama dideritanya.[28]

Situasi kota Surabaya sudah sedikit berubah sejak ditinggalkan oleh dr. Soetomo selama empat tahun studi di Belanda (1919—1923). Perubahan itu tidak hanya menyangkut kondisi sosial budaya, tetapi juga konstelasi politik di Jawa Timur. Kondisi kota Surabaya yang dipenuhi dengan warga yang berprofesi sebagai pedagang telah menjadi basis yang kuat bagi organisasi Sarekat Dagang Islam yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam (SI). Kongres-kongres SI sejak 1913 sampai dengan 1921 selalu diadakan di kota Surabaya. Organisasi ini menarik ribuan penduduk Surabaya berkat upaya yang diprakarsai oleh Ketua Sarekat Islam HOS Tjokroaminoto, yang menyebarkan ide-idenya melalui surat kabar mereka yang bernama *Oetoesan Hindia.* Berkat surat kabar inilah SI mempunyai pengikut yang cukup signifikan di Surabaya. Namun sejak 1921, pengaruh SI di kota Surabaya mulai mengalami pasang surut sebagai akibat dari ditahannya pemimpin SI HOS Tjokroaminoto oleh polisi pemerintah kolonial Hindia Belanda. HOS Tjokroaminoto dikenal oleh masyarakat sebagai "Raja Orang Jawa yang akan datang" dan Soerjopranoto dikenal sebagai "Raja Mogok" yang sangat ditakuti. Gerakan yang dimotori oleh SI ini terdesak oleh propaganda komunis yang dimotori oleh Partai Komunis Indonesia. Akibat dari penahanan ini, pemuda yang bernama Kusno (kelak bernama Soekarno) yang indekos di rumah HOS Tjokroaminoto di Paneleh Surabaya pindah dan meninggalkan kota Surabaya. Penurunan pengaruh SI ini juga dipengaruhi oleh mulai naiknya pamor gerakan komunis yang dimotori oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) di bawah pimpinan Alimin dan Muso. Gerakan PKI ini lebih banyak untuk menghimpun anggota masyarakat guna melakukan pemogokan-pemogokan. Salah satunya adalah memotori pemogokan di pabrik gula di Surabaya sebagai akibat dari menurunnya harga gula di pasar internasional. PKI juga menyeponsori pemogokan-pemogokan lain di bengkel kereta api, pabrik baja, percetakan van Dorp, dan di pabrik Nederlandsch-Indische Industrie.

Ketika dr. Soetomo kembali ke Surabaya yang penuh dengan kegiatan pemogokan, ia tidak tertarik sama sekali dengan kegiatan pemogokan itu, baik yang dimotori oleh SI maupun oleh PKI. Walaupun ia menyetujui gerakan-gerakan itu, namun ia tidak menyetujui cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Di luar kota Surabaya, meletuslah pemberontakan di berbagai tempat seperti di Jakarta, Banten, Jawa Tengah, dan Sumatera

27. Lihat pemberitaan tentang hal ini di *De Indische Courant,* 8 Juli 1931.
28. Koran ini disimpan di Perpustakaan Nasional RI, Jl Salemba Jakarta.

Barat yang dimotori oleh kaum komunis.

Tanggapan atas pemogokan dan pemberontakan itu diulas di koran *Bataviasch Courant* yang menyatakan bahwa pemogokan dan kerusuhan itu memang gagal, hanya para pemogok yang tidak mau menyerah, sehingga pabrik-pabrik harus tetap berjalan walau dengan pegawai baru.[29] Dari sini lebih banyak dilontarkan perasaan kecewa daripada bangga. Dalam pembahasan tentang pemogokan dapat ditunjukkan bahwa kemungkinan tidak adanya pekerja intelektual yang ikut serta. Dengan jumlah pemogok yang besar dan tindakan pemerintah yang tepat, kerugian akibat pemogokan ini bisa ditekan seminimal mungkin. Jadi memang banyak pekerja yang bekerja di pabrik-pabrik itu meminta untuk pindah ke pedalaman sehingga muncul kebutuhan pekerja ahli di beberapa kota besar. Namun, setelah peristiwa itu, selesai, kebanyakan dari para pemogok itu ingin kembali ke tempat kerjanya semula. Sejauh masih ada lowongan mereka diterima kembali bekerja di tempat semula.

Dari pidato dr. Soetomo terlontar simpati pada sikap para pemogok. Ia telah berbicara secara terbuka dan tidak menyetujui cara-cara anarkis yang digunakan. Ia percaya bahwa banyak kaum nasionalis bersimpati kepada pemogokan itu termasuk dirinya. Namun, juru bicara dan wakil mereka di *Volksraad*, Soeroso, kurang gigih dalam memperjuangkan tuntutan para pemogok dan menyampaikan penyelesaiannya kepada pemerintah. Ia juga tidak dapat mengusulkan kepada lembaga wakil rakyat itu untuk menyelesaikannya secara damai. Yang jelas bahwa para penguasa daerah tidak berani mengambil tindakan tegas sebelum mereka menerima izin dari pusat. Tentunya dalam sidang di *Volksraad* muncul pertanyaan tentang tindakan polisi dalam mengatasi pemogokan tersebut. Pemogokan ini menjadi ujian bagi aparat kepolisian. Mereka harus selalu waspada. Mereka juga harus bertindak tenang, sehingga masalah tersebut dapat diatasi dengan menekan kerugian yang ditimbulkannya se minimal mungkin.

Pemerintah harus berjuang menghadapi kekuatan yang bertumpu pada kerahasiaan, yang memiliki kemampuan menyalahgunakan aturan-aturan resmi untuk bisa menyerang penguasa. Kelompok rahasia bawah tanah harus diungkap dengan resiko apapun dan dengan demikian bisa menggunakan segala cara, guna mengatasi pemogokan ini.

Berdasarkan investigasi, menurut *Pewarta* terdapat sebelas orang dijebloskan ke dalam penjara dan harus diajukan ke pengadilan. Sementara itu, masih terdapat 17 orang yang ditahan di kantor pusat. Sisanya yang berjumlah 55 setelah diperiksa, mereka dibebaskan.

29. Ulasan ini dimuat dalam harian *Bataviasch Courant*, 9 Januari 1926, halaman 1. Ulasan ini dibuat untuk menetralisir keadaan dan radakturnya menghimbau kepada pemerintah untuk berhati-hati dalam menangani masalah ini, karena adanya gerakan bawah tanah yang merongrong kewibawaan pemerintah kolonial.

Tentu saja, reaksi dr. Soetomo menimbulkan reaksi bagi kaum komunis yang merencanakan pemogokan itu. Namun, secara diplomatis ia berhasil menangkis tudingan-tudingan itu, karena prinsip utama yang selalu dia tonjolkan adalah prinsip persatuan di semua lapisan masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemogokan itu berakhir. Konsentrasi dr. Soetomo kembali pada perkembangan Boedi Oetomo yang masih berorientasi pada kegiatan kaum priyayi yang baginya sudah tidak menarik lagi. Berkat kesadarannya akan masih banyaknya generasi muda tahun 20-an yang memerlukan tempat di luar gerakan-gerakan ekstrem tersebut, ia berniat mendirikan lembaga studi atau yang dikenal dengan nama *Studie Club*. Diharapkan di lembaga ini, kaum intelektual baik dari kalangan muda maupun tua, tidak memandang dari kelompok mana mereka berasal, dapat berkumpul, berkomunikasi dan berdiskusi antarmereka secara ilmiah tentang berbagai macam permasalahan dan kepentingan nusa dan bangsa. Dengan wadah seperti inilah, dr. Soetomo mengharapkan munculnya rasa persatuan dan sikap saling menghargai di antara para anggotanya. Semangat persaudaraan ini timbul sebagai reaksi dari pemerintahan di Batavia yang menjalankan tindakan tangan besi untuk menindas rakyat. Gubernur Jenderal Fock yang berada di Batavia dianggap sebagai pemimpin yang bertangan besi dan tidak mengenal kompromi. Akhirnya, pada 11 Juli 1924, pada hari Jumat di rumah RM Soejono di Palmenlaan, atas undangan dr. Soetomo diselenggarakan rapat kaum intelektual bumi putra. Tujuan rapat tersebut adalah mendirikan sebuah *studie club* untuk membahas persoalan kepentingan umum. Hadir sebanyak 30 peserta dalam rapat ini.

Dr. Soetomo di depan para peserta menjelaskan tujuan rencana didirikannya *studie club* ini. Ia menguraikan masalah dan persoalan penting yang dihadapi masyarakat saat itu. Akhirnya diputuskan untuk mendirikan kelompok ini. Semua hadirin langsung sepakat menjadi anggotanya. Dari diskusi itu diputuskan pendirian *Studie Club* dan kepengurusannya. Terpilih dr. Soenarjo, dr. Soejono, dan Soenario. Sementara ketua dipercayakan langsung kepada dr. Soetomo, pencetus gagasan tersebut. Setelah kepengurusan *Studie Club* terbentuk, dr. Soetomo memberikan ceramah tentang nasionalisme. Seperti biasanya, setelah menyampaikan pandangannya, ia meminta pemohon yang hadirin untuk mengajukan pertanyaan dan menyiapkan sanggahan. Kepada semua hadirin ditekankan bahwa masyarakat perlu hidup tenang, berdampingan dengan berbagai pihak termasuk di dalamnya penganut agama yang berbeda-beda.[30]

Sebelum rapat dibubarkan, dibacakan kesimpulan dari didirikannya organisasi *Studie Club* ini. Tujuan didirikannya *Indonesische Studieclub* antara lain

a. Mendorong kaum terpelajar dari masyarakat bumi putra ke arah keinsyafan

30. Lihat *De Indische Courant,* 14 Juli 1924, halaman 1.

persatuan dan kepahaman politik. (*De Ontwikkeleden in de Inlandse samenleving op te wekken tot gemeenschapsbesef en politiek inzicht)*;

b. Mengajak kaum terpelajar masyarakat bumi putra untuk bekerja secara konstruktif dengan cara membahas persoalan-persoalan nasional (kebangsaan) dan sosial. (*Hen de ontwikkelden door bespreking van nationale en sociale vraagstukken te bewegen tot gemeenschappelijke constructive arbeid).*

Tujuan didirikannya *Indonesische Studie Club* tidak hanya terbatas pada pendidikan formal saja. Dalam perkembangannya, *Indonesische Studie Club* menyediakan asrama-asrama untuk para pelajar di Surabaya, mendirikan rumah untuk para pejabat di Surabaya, mendirikan balai latihan kerja bagi kaum wanita agar menjadi lebih terampil, sehingga mampu mencari nafkah untuk dirinya sendiri secara halal. Untuk memberi keterampilan kepada yang memerlukan, *Indonesische Studie Club* juga membuka *weekschool,* yaitu sekolah pendidikan menenun.

Dengan aktivitas yang demikian banyak dan berguna bagi pengembangan diri rakyat Surabaya, banyak simpastisan yang bergabung dengan *Studie Club* ini karena organisasi ini tidak hanya bergerak di bidang politik, tetapi juga di bidang sosial ekonomi. Saat itu, koran *Sin Jit Po* (koran ini nantinya berubah namanya menjadi *Sin Tit Po)* pada 14 Juli 1924 menurunkan laporan khusus tentang pendirian *Indonesische Studie Club.* Organisasi ini didirikan di rumah RM Hario Soejono di Palmenlaan (kini bernama jalan Panglima Soedirman). Pada pertemuan pendirian organisasi itu, hadir antara lain Soenjoto, Soenarjo, Mr. Koesnoen, dr. Saleh, dan beberapa tokoh lain serta orang Belanda seperti Mr. Koch, dan Mr. Tillema, yang semuanya berjumlah 25 orang. Dalam pertemuan itu tampil dr. Soetomo yang memberikan ceramah yang berjudul *Gerakan Nasionalisme*. Dalam ceramah itu, ia banyak mengutip pendapat Koch yang sangat berjasa dalam perbaikan keadaan di kampung-kampung di Surabaya. [31]

Pendirian *Indonesische Studie Club* dianggap sangat penting oleh para tokoh yang hidup sezaman dengannya. Pengaruhnya sangat besar bagi kaum muda di seluruh tanah air. Dalam waktu singkat, berdiri studi klub-studi klub di kota lain seperti di Bandung didirikan *Algemeene Studie Club* yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Menyusul di kota lain seperti Solo, Yogyakarta, Jakarta, Semarang dan Bogor yang mengikuti jejak studi klub di Surabaya. Dari studi klub yang muncul di beberapa kota ini, terdapat tiga studi klub yang menonjol, karena berhasil menerbitkan majalahnya sendiri. Studi klub Surabaya memiliki majalah *Soeloeh Indonesia;* Studi klub Bandung memiliki majalah *Indonesia Moeda;* dan studi klub Solo memiliki majalah yang berjudul *Timboel,* yang diasuh oleh dr. Radjiman dan Mr. Singgih.

31. Lihat Paul W.V van der Veur (1984) halaman 47—49 dan H. Roeslan Abdulgani (1976) halaman 39.

Dengan menggunakan majalah mereka masing-masing, para tokoh ini menyampaikan gagasannya kepada masyarakat, sehingga sejak tahun 1925, muncul pandangan dan gagasan mengenai perlunya bangsa Indonesia bersatu agar mampu mandiri tidak tergantung kepada bangsa asing. Pada tahun-tahun ini belum dikenal benar organisasi yang mau bekerjasama (*cooperatif)* dengan pemerintah kolonial maupun yang tidak (*non-cooperatif)*.

Perbedaan di antara dua kubu ini baru muncul sekitar 1926—1927 tatkala banyak kaum cendekiawan muda pulang dari negeri Belanda setelah mereka menyelesaikan studinya di sana. Banyak di antara mereka yang sebelumnya adalah anggota *Perhimpoenan Indonesia,* kemudian dikembangkan dan ditingkatkan oleh kaum militan terutama oleh pengikut PNI yang dipimpin oleh Bung karno. Sementara itu, dengan berkembangnya studi klub di Surabaya, dr. Soetomo diminta untuk duduk sebagai wakil rakyat di *Gemeenteraad Soerabaja* (atau DPRD Surabaya), bersama dengan 19 anggota lainnya.[32] Kesediaannya menjadi anggota *Gemeenteraad Soerabaja* ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi kalangan intelektual. Sikapnya ini dianggap sebagai sikap yang kooperatif dengan pemerintah kolonial. Seperti diberitakan di koran *De Indische Courant*, ia terpilih menjadi anggota *Gemeenteraad Soerabaja* melalui pemilihan Dewan Pemerintah Daerah. Dari hasil pemilihan tersebut yang dibuka pada 29 Juli 1924 pukul 12 malam di Kantor Pemungutan Suara di Genteng, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nama	**Jumlah suara yang masuk**
Bartman	473 suara
Van Itallie	506 suara
Van Moek	458 suara
Nessel van Lissa	508 suara

32. Jumlah anggota *Gemeenteraad Soerabaja* sebanyak 20 anggota dengan perincian 10 anggota orang Belanda, di antaranya Van Mook sebagai Dewan pemerintah Daerah, 6 orang orang anggota bumi putera, di antaranya Dr. Soetomo, RM Hario Soenjono, Sastrowinangun, Sunyoto, ditambah dengan 3 orang wakil dari masyarakat Tionghoa. Apa yang dilakukan dr. Soetomo di lembaga ini adalah menyuarakan kepentingan rakyat seperti perbaikan kampung-kampung dan kesehatan masyarakat. Sementara itu, 10 anggota wakil dari partai politik Belanda seperti PEB (*Politiek Economische Bond),* VC (*Vaderlandsche Club),* dan IEV (*Indo-Europeesche Verbond)* berpihak pada kepentingan pemerintah kolonial di Surabaya.

Nix	458 suara
Stemmerix	498 suara
Ir. Wermuth	487 suara
Rosenquist	232 suara
Koch	220 suara
Teeuwen	192 suara
Buys	117 suara
Noordzij	105 suara
Dr. Soetomo	461 suara
Askaboel	274 suara
Mr. Koesnoen	174 suara
Soedirman	38 suara
Sangaji	45 suara

Jadi, 9 orang yang terpilih untuk menjadi anggota *Gemeenteraad Soerabaja* wakil dari Dewan Pemerintah Daerah, berdasarkan suara terbanyak, terpilih calon dari PEB yakni Van Moek, Stemmerix, Askaboel, dan dr. Soetomo. Sementara calon dari IEV terpilih Hartman, Nix. Ir. Wermuth dan calon Katolik Nessel van Lisa juga terpilih. Sementara itu, para calon dari sayap kiri tidak memiliki wakil sama sekali karena jumlah suara yang diperolehnya tidak sampai mencapai sepertiga dari jumlah pemilih.[33]

Namun berhubung komposisi anggota di *Gemeenteraad Soerabaja* (juga di *Volksraad* di Batavia) dikuasai oleh mayoritas mutlak kaum penjajah, maka keputusan yang diambil tidak memihak kepada kepentingan masyarakat. Sangat sering keputusan diambil melalui pemungutan suara. Namun akhirnya, kepentingan pemerintah kolonial yang selalu menang.

Pada awal Maret 1925, *Gemeenteraad Soerabaja* akan menyelenggarakan pemilihan bagi seorang anggota eksekutif yang bernama Van Gennep. Pemungutan suara dilakukan,

33. Lihat *Bataviasch Nieuwsblad,* 30 Juli 1924, halaman 1.

dan van Gennep terpilih untuk menjadi anggota eksekutif *Gemeenteraad Soerabaja,* dengan 12 suara menerima berbanding 8 menolak.[34] Van Gennep dikenal sebagai tokoh yang selalu mementingkan kepentingan pemerintah kolonial pada khususnya dan kepentingan orang-orang Eropa di Surabaya pada khususnya. Perilakunya selalu menganggap remeh kaum bumi putra. Merasakan iklim yang tidak sehat di *Gemeenteraad Soerabaja* yang selalu jauh dengan kepentingan rakyat banyak di Surabaya, pada 16 Maret 1925, dr. Soetomo menyatakan diri berhenti dan keluar dari *Gemeenteraad Soerabaja* setelah diedarkan surat edaran keliling. Anggota *Gemeenteraad* dr. Soetomo dan Soendjoto menyatakan diri keluar dari anggota dewan. Tekadnya, kedua tokoh keluar dari keanggotaan di Lembaga Perwakilan Rakyat ini dikarenakan usulannya tentang perbaikan kampung dan kesehatan masyarakat selalu ditolak dalam sidang, sementara usulan perbaikan di wilayah yang dihuni oleh kebanyakan orang Belanda selalu disetujui. Ketidakadilan inilah yang memotivasi dr. Soetomo untuk berhenti sebagai anggota *Gemeenteraad Soerabaja*. Keluarnya dari dewan kotapraja juga dimuat dalam majalah yang bernama *Pewarta Soerabaja.* Majalah Melayu-Tionghoa ini mengulasnya pada penerbitan 14 maret 1925. Demikian kutipannya:

> "*Oleh Dr. Soetomo dimadjoekan ia poenya permintaan berhenti sebagai lid dari itoe Madjelis, lantaran toean terseboet tidak bisa liat lobang akan kerdja boeat kebaekannja ia poenja bangsa. Djoega ia poenja tempo jang diboeang boeat itoe oeroesan jang lebih perloe. Ia bisa goenakan temponya boeat laen oeroesan penting sadja, dan djoega sebab lihat ia poenya kedoedoekan sekarang tidak bergoena.*"[35]

Keputusan dr. Soetomo dan kawan-kawan segera tersiar tidak hanya di kota Surabaya namun juga tersebar hingga ke kota-kota lain. Keberanian mereka dianggap sebagai sesuatu yang mendobrak kepura-puraan demokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sikap dr. Soetomo dan kawan-kawan mendapatkan dukungan dari wakil-wakil Boedi Oetomo lain yang duduk di dewan kolonial baik di pusat maupun di daerah. Selain itu, ia juga memperoleh dukungan dari para pemuda yang baru pulang dari negeri Belanda,

34. Lihat berita di *Het Nieuws van den Daag voor Nederlandsch Indie,* 14 Maret 1925, halaman 1.

35. Surat kabar ini dipimpin oleh Lim Kiok Han, seorang Cina yang simpati terhadap perjuangannya. Peristiwa keluarnya dr. Soetomo dari lembaga ini mendapat tanggapan dari Mr. Ploegman dan Van Mook, serta ketua dewan Mr. GJ Dijkerman. Mereka bertiga menantang anggota-angota lainnya dengan mengajukan pertanyaan "*wie volgt?*" yang artinya siapa lagi yang meminta berhenti. Secara spontan RM Haria Soejono, Soendjoto dan Sastrowinangun menyatakan berhenti dari keanggotaan dewan menyusul keputusan dr. Soetomo.

yang telah menyelesaikan studinya di sana. Terlepas dari itu semua, para pengurus organisasi Islam dan Komunis juga mendukung sikapnya itu. Bahkan ada beberapa di antaranya yang menanyakannya mengapa ia masih bersedia untuk bekerja di rumah sakit pemerintah kolonial dan masih tetap menjadi dosen di NIAS yang nota bene milik pemerintah kolonial. Hal ini dijawabnya dalam diskusinya dengan tokoh-tokoh lainnya bahwa prinsip yang dianutnya adalah ia memisahkan antara profesi dan cita-cita politiknya. Profesinya sebagai seorang dokter sangat diperlukan oleh anggota masyarakat yang didasarkan atas rasa sosial yang tinggi, tidak memilah-milah dari mana pasiennya berasal. Dalam menjalankan profesinya sebagai dokter dan dosen, ia bekerja bagi bangsanya sendiri. Dan untuk kepentingan lainnya ia solider dengan rakyatnya yang dijajah dan menderita akibat penjajahan pemerintah kolonial Belanda.

Setelah menyatakan diri keluar dari *Gemeenteraad Soerabaja*, dr. Soetomo tetap menghabiskan waktunya semenjak pagi di rumah sakit, siang mengajar di NIAS, dan sore membuka praktek di rumahnya di Simpang Dukuh.[36] Malamnya, ia habiskan waktunya untuk memimpin pergerakan rakyat dengan menghadiri rapat-rapat organisasi. Pada bulan Juni 1925, ia menyelenggarakan hari *inter-insulair*, yaitu hari pertemuan besar antarsuku dari seluruh pemuda di pulau Jawa, Madura, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pertemuan ini mendapatkan perhatian yang cukup besar dari kalangan intelektual muda. Pertemuan ini tidak menghasilkan suatu keputusan apa pun karena hanya digunakan sebagai lobby dan membina hubungan baik dengan para intelektual muda.

Tindak lanjut dari pertemuan *inter-insulair* itu adalah penggabungan antara majalah studi klub Surabaya yang bernama *Soeloeh Indonesia* dan majalah studi klub Bandung yang bernama *Indonesia Moeda.* Hasil fusi dari dua majalah ini adalah munculnya majalah baru yang benama *Soeloeh Indonesia Moeda,* yang diasuh oleh Ir. Soekarno dan dr. Soetomo. Dengan bergabungnya dua majalah ini, dapat diketahui bahwa telah terjadi penggabungan antara kelompok moderat dan kelompok radikal. Langkah dr. Soetomo ini menggelisahkan pemerintah kolonial di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, sudah dapat ditebak langkah yang akan diambil oleh studi klub ini, yaitu akan menuju ke langkah yang radikal dan non-kooperatif. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda melakukan pendekatan dan mencoba

36. Dalam melaksanakan prakteknya di Simpang Dukuh, Roeslan Abdulgani menjadi saksi kebaikan dr. Soetomo dalam membantu pasien yang tidak mampu. Ia sering mengantarkan ibunya yang sakit asma untuk berkonsultasi kepadanya. Dia dikenal sebagai dokter yang baik hati, ramah dan sabar dengan pasien-pasiennya, sehingga orang yang tidak menderita penyakit kulit pun datang berobat kepadanya. Yang menjadi kesulitan bagi para pasiennya adalah bahwa dr. Soetomo tidak pernah menagih ongkos berobatnya. Kalau ditanya, selalu dijawab dengan tersenyum. Oleh karena itu, setiap Roeslan Abdulgani mengantar ibunya berobat, uang berobatnya tidak pernah diserahkan kepadanya, tetapi ditaruh saja di atas meja prakteknya. (Lihat Roeslan Abdulgani (1976), halaman 8-9).

untuk mempengaruhi agar tidak condong ke kelompok radikal Bandung. Usaha pemerintah kolonial ternyata sia-sia, karena Dr. Soetomo menolaknya, karena pada prinsipnya yang dikehendakinya adalah unsur persatuan di antara studi klub Surabaya dan Bandung, walaupun keduanya memiliki prinsip-prinsip yang berbeda. Dengan azas persatuan inilah dr. Soetomo berpendapat bahwa perbedaan pendapat pasti bisa diatasi. [37]

Kongres PNI Pertama

Setelah Partai Nsional Indonesia berdiri, Ir. Soekarno selaku Ketua Umum merencanakan untuk menyelenggarakan Kongres PNI yang pertama. Kongres ini diselenggarakan di Kota Surabaya, yang berlangsung dari 27 sampai dengan 30 Mei 1928. Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada *Ministerie van Kolonien* (Menteri Koloni) dalam *mailrapport* no. 749/28[38] disebutkan bahwa pada dasarnya kongres ini terdiri atas tujuh rapat, termasuk empat rapat tertutup dan tiga terbuka. Yang termasuk rapat tertutup pertama dan kedua hanya dihadiri oleh perwakilan cabang-cabang PNI, sementara dua rapat terakhir juga dihadiri oleh orang-orang yang khusus diundang untuk itu (keterangan H. Fachrodin bersama H. Moechtar utusan dari Moehammadiyah, yang oleh Ir. Soekarno atas permohonan mereka diizinkan untuk mengikuti rapat). Karena utusan Muhamadiyah seperti juga PSI menurut keterangannya pembuat laporan mereka tidak menerima undangan, sehingga pada pertemuan ini mereka tidak hadir.

Semua persoalan agenda dari rapat tertutup disusun, dengan perkecualian masalah pembentukan kader, yang pembicaraannya menurut keterangan Mr. Sartono kepada pembuat laporan harus ditunda. Sementara itu, rapat-rapat umum diselenggarakan secara terbuka di teater kebun kota.

Rapat umum pertama pada hari Senin tangal 28 Mei. Rapat ini diperkirakan dihadiri oleh 1300 orang termasuk 40-an wanita bumi putra. Sebagai pengurus hadir Ir. Soekarno (ketua pengurus pusat), Mr. Iskaq (Sekretaris), dr. Samsi, Ir. Anwari dan Mr. Moh. Joesoef. Di belakang mereka, juga duduk Mr. Sartono, Mr. Boediarto dan anggota pengurus PNI cabang Surabaya. Ir. Anwari meminta orang-orang yang usianya masih di bawah 18 tahun agar meninggalkan ruangan. Setelah memberikan sambutan, Ir. Anwari menyerahkan pimpinan kepada Ir. Soekarno.

Sebagai pengurus pusat PNI, Ir. Soekarno mengucapkan kepada hadirin atas perhatian

---

37. Roeslan Abdulgani mengutip laporan Residen Surabaya Hardeman kepada Gubernur Jenderal De Graeff tertanggal 12 Januari 1928. (lihat Roeslan Abdulgani (1976), halaman 48).

38. Arsip *Mailrapport* ini disimpan di Nationaal Archief Nederland di Den Haag, Negeri Belanda.

yang diberikan, khususnya pers yang layak diberikan sambutan, bahwa PNI merasa bangga memperoleh perhatian dari mereka. Pembicara menyatakan bahwa nama organisasinya saat ini adalah Partai Nasional Indonesia dan PNI didirikan pada hari-hari tahun lalu ketika di seluruh Asia suasananya gelap. PNI-lah yang memberikan reaksi paling keras. PNI, dengan bendera merah putih sebagai simbolnya dan kepala banteng, lahir bersama prinsip mulia dan murni. Oleh rekan-rekannya ada pemahaman apa yang bisa disimpulkan dari kenyataan bahwa dalam setahun, cabang Jakatra, Bandung, Mataram, Cirebon, Pekalongan, Surabaya, Makasar, Ulu Siau, Pariaman dan Palembang muncul. Perkembangan terbesar pada kongres ini Bung Karno juga menjadi bukti bahwa di Surabaya semangat PNI sangat menonjol.

Selanjutnya dia menyebut ada tanda keberuntungan bahwa selama kongres PNI di Pekalongan kerjasama antara PNI dan PSI menghasilkan pembentukan PPPKI. Dalam aksi-aksinya PNI bersama organisasi politik lainnya bekerja sama demi mendukung kepentingan mahasiswa Indonesia di Belanda. Dia menekankan pembentukan kesatuan semua organisasi politik Indonesia karena dengan kesatuan ini orang akan menjadi kuat dan menang. PNI akan meneruskan usahanya demi kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan.

Setelah pidato Ir. Soekarno yang disambut dengan tepuk tangan riuh, utusan dari organisasi undangan diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan bagi PNI, yang banyak dimanfaatkan di antaranya oleh para tokoh seperti Nojodihardjo yang berbicara atas nama PSI Surabaya mengucapkan selamat bagi pertumbuhan PNI.

A.M. Sangadji yang atas nama pengurus pusat PSI Hindia Timur mengucapkan selamat kepada PNI dengan kongres pertamanya. Selanjutnya pembicara terutama menekankan pada kenyataan bahwa prinsip PNI sebagian besar sama seperti PSI. juga disampaikan bahwa PSI dan PNI bergandengan tangan. Kerjasama antara dua organisasi ini di Pekalongan tampak jelas dalam membahas rencana kesatuan. Selanjutnya PSI dan PNI akan saling bekerjasama di mana perwujudan cita-cita ini berlaku untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.

Zainal atas nama pengurus pusat Sarekat Madoera menyampaikan pujian kepada PNI. Bersamaan dengan kelahiran PNI, kekuatan organisasi Indonesia bertambah. Pembicara berharap agar PNI bisa tetap melaksanakan programnya untuk mencapai kemerdekaan, betapapun hambatan merintangi jalurnya. Dia yakin bahwa PNI akan mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pembicara menyatakan bahwa Sarekat Madoera akan memihak kepada PNI dan selanjutnya juga bersedia bergabung dengan PPPKI (Sarekat Madorea seperti yang terbukti dari laporan keamanan berada di bawah pimpinan Ir. Anwari dan Roeslan Wongsokoesoemo kemudian berubah menjadi pendukung PNI).

Mr. Soewono yang atas nama Studieclub Indonesia mengucapkan selamat kepada PNI. Dia berharap agar organisasi baru ini memperoleh dukungan dari setiap orang. Dr. Soetomo,

yang tampil ke podium diiringi tepuk tangan riuh dan berbicara atas nama PPPKI (diundang oleh Mr. Iskaq untuk itu, sebagai ketua PPPKI, tetapi yang sekarang harus duduk di meja pengurus PNI) mengatakan sangat bangga pada kenyataan bahwa PNI menggelar kongres pertamanya di Surabaya, apa yang bagi kota ini bisa disebut sebagai kehormatan dan orang Surabaya bisa memberikan apresiasi dan penghargaannya hanya dengan berbondong-bondong memasuki PNI.

PSI menurut pembicara hanya dimasuki oleh orang Islam. Boedi Oetomo hanya berjuang bagi penduduk Jawa, Madura, Bali dan Lombok (prinsip BO ini dia segera menyatakan pasti harus diubah). Akan tetapi, PNI terbuka bagi semua orang Indonesia yang memperhatikan kepentingan tanah dan bangsanya, tanpa peduli ras dan agama. Penduduk Surabaya, bahkan setiap orang Indonesia, perlu membantu PNI sekuat tenaga. Kemudian Ir. Soekarno membacakan telegram yang masuk tentang hambatan dan kesulitan dr. Soekiman dari Yogya, sebagai pengurus pusat Boedi Oetomo dan Dohan, ketua cabang Ulu Siau, yang masih dalam perjalanan di laut menuju kongres. Komite Perasaan Penduduk Surabaya mengirimkan sebuah karangan bunga besar kepada kongres. Setelah berbagai pembicara mengucapkan selamatnya, ketua yang harus mengarahkan program prinsip, menyerahkan kepemimpinan rapat kepada dr. Samsi.

Ir. Soekarno menguraikan sejarah Eropa pada abad XVI, ketika perubahan sosial terjadi di Belanda dan para petani berangkat ke kota demi mencari kebutuhan hidup. Saat itu orang terbentur pada pemikiran untuk membuka koloni dan mencari daerah baru untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian di sini orang-orang Belanda mendirikan sebuah koloni, pada mulanya murni dengan tujuan ekonomi. Setiap kolonisasi kata Bung Karno, suatu kesalahan muncul sehubungan dengan penduduk, yakni amoralitas. Akan tetapi kaum penjajah mulai memberikan suatu pemahaman berbeda. Mereka membantah bila kolonisasi hanya demi memikirkan keuntungan material, tujuan ekonomi, semata tetapi menjelaskan kolonisasi sebagai membawa peradaban di sebuah negara yang kelak bermanfaat bagi pengembangan dan kemakmuran penduduk. Ia melanjutkan, jika kita merujuk pada kebudayaan bangsa kita yang tinggi (Mendut, Borobudur, dan sebagainya), maka dari pihak orang-orang Belanda bisa disadarkan bahwa tingkat peradaban mereka mereka belum cukup tinggi.

Ir. Soekarno juga menguraikan politik orang-orang Belanda, yang pada mulanya berangkat dari negaranya demi kepentingan ekonomi. Namun, perlahan-lahan mereka berusaha mendapatkan kekuasaan atas negeri ini. Hasil tanah itu dengan murah dibeli dan diangkut ke Belanda, demi memperoleh keuntungan besar setelah dijual pasar dunia. Modal Eropa (gula) ditanamkan di sini. Pembicara menyebut semua ini sebagai imperialisme modern, yang menghisap Indonesia, menekan industrinya dan menghancurkan ekonominya.

Pendidikan hanya ditujukan untuk mendidik pekerja upahan demi kepentingan modal besar. Kaum cendekiawan ditakdirkan untuk bekerja sebagai buruh. Massa luas menurut Soekarno merasa aneh bila para ahli hukum, insinyur, dokter dan sebagainya tidak mau memasuki dinas pemerintah. Tetapi ada keyakinan bahwa satu-satunya penyelesaian yang bisa menyelamatkan bangsa dari neraka sekarang ini telah ditemukan. Bangsa ini harus merdeka untuk membangun bahtera sendiri, membuat kereta api sendiri, dan semua kebutuhan masyarakat lainnya. Sebelum meraih kebebasan politik, semua itu tidak bisa dilakukan, tidak dapat mendirikan sekolah dan usaha sendiri. Oleh karena itu PNI terketuk bahwa semua usaha tidak akan bisa dilakukan. Dan yang paling penting, lanjut Ir. Soekarno pemerintahan Belanda di negeri ini harus diakhiri. Jika ini tercapai, maka Belanda akan kehabisan nafas. Oleh karena itu, semua orang tidak pernah bisa berharap dari Belanda, bahwa kemerdekaan negara ini secara sukarela akan diberikan. Harapan itu tampak tidak logis.

Jika Belanda memberi bangsa Indonesia kebebasan, maka hal itu berarti bunuh diri bagi negara ini. Oleh karena itu, seluruh komponen masyarakat harus bekerja melalui kekuatan dan kemampuan sendiri, tanpa mengharapkan bantuan dari luar. Bangsa ini tidak boleh kehilangan waktu dan mulai dari sekarang harus memadukan tenaga untuk mempersiapkan diri menghadapi waktu ketika Indonesia kembali memperoleh kemerdekaannya, untuk mencegah negara ini dari kebangkrutan. Bersama dewan-dewan lokal, *Volksraad*, PNI tidak ingin campur tangan karena kita menduga bahwa mereka semua dimaksudkan sebagai sarana pendukung kolonialisme modern. Selain itu di Mesir terlihat bagaimana pemerintah Inggris segera bersiap diri untuk mengirimkan pasukan dan kapal perangnya ke Mesir, segera setelah berbagai dewan di sana yang bisa disebut sempurna mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah. Oleh karena itu PNI, tidak akan mencurahkan tenaganya dalam dewan ini, tetapi di luar lembaga ini akan berjuang untuk menyatukan kekuatan rakyat Indonesia. Kesatuan ini bisa diusahakan oleh semua orang.

Apakah Indonesia yang terdiri atas berbagai kelompok penduduk masing-masing dengan bahasa dan agamanya sendiri, bisa dibawa menuju kesatuan? Bung Karno menjawab, sangat jelas. Orang bisa melihat pada Swiss, di mana kesatuan rakyat muncul meskipun di antara penduduknya ada perbedaan bahasa. Selanjutnya Mesir bisa digunakan sebagai contoh, di mana umat Kristen dan Islam merasakan semangat nasionalisme mereka. Karena Inggris dan Amerika mencurahkan modalnya di tanah ini, PNI selanjutnya ingin berjuang gigih menghadapi imperialisme internasional. Terhadap kaum imperialis yang memperluas kekuasaan mereka di Asia, oleh bangsa-bangsa Asia harus ditunjukkan reaksi secara bersama-sama. Karenanya PNI ingin membentuk aksi antar-Asia.

Semangat nasional perlu dibangkitkan. Hal ini diperlukan untuk mencapai suatu keinginan nasional. Selanjutnya, semua ini akan mengarah pada tindakan nasional. Ketika

Indonesia belum merasakan semangat nasional atau menyadari keinginannya, maka Indonesia memang ditakdirkan untuk punah. Setelah membangkitkan semangat kepada setiap orang, harus dilanjutkan juga pada setiap pergerakan nasional seperti Boedi Oetomo, Pasundan dan sebagainya, agar berjuang bersama demi kesatuan Indonesia. Akhirnya, Ir. Soekarno mengakhiri pidatonya yang bersemangat dengan sambutan meriah dari para hadirin. Setelah pemberitahuan bahwa PNI cabang Jakarta mengirimkan sebuah telegram ucapan selamat, kesempatan diberikan kepada Mr. Sartono dari Batavia yang menguraikan program kerja partai ini.

Program kerja PNI mencakup beberapa hal

1. Prioritas utama
    a. Memperkuat perasaan nasionalisme dan kesatuan Indonesia;
    b. Penyebaran pengetahuan tentang sejarah nasional serta memperbaiki hukum nasional dan bukan hukum adat;
    c. Memperkuat ikatan antara bangsa-bangsa se-Asia;
    d. Mencabut semua hambatan terhadap kebebasan individu, kebebasan bergerak, kebebasan pers, kebebasan berorganisasi dan berserikat;
2. Prioritas kedua
    a. Memajukan kehidupan yang merdeka;
    b. Memajukan industri dan perdagangan bumi putra;
    c. Mendirikan bank-bank nasional;
    d. Mendirikan organisasi koperasi nasional;
    e. Memerangi lintah darat;
3. Prioritas ketiga
    a. Pendirian sekolah-sekolah nasional dan memberantas buta huruf;
    b. Memperbaiki posisi wanita Indonesia;
    c. Mendorong emigrasi inter-Indonesia;
    d. Memajukan organisasi pertanian dan keahlian;
    e. Mendirikan lembaga perantara bagi para pencari kerja ;
    f. Memperhatikan kesehatan rakyat;
    g. Memerangi candu dan minuman keras;
    h. Memberantas perkawinan anak-anak dan mendorong monogamy.

Dalam menjelaskan program kerja ini, Mr. Sartono menekankan kebutuhan menjunjung tinggi kebudayaan Indonesia, ketika negeri ini diperintah oleh anak-anak negeri sendiri, agar tidak merosot dalam kondisi yang semakin memburuk. Penyebaran pengetahuan tentang hukum nasional dan adat juga diperlukan, agar hukum sekarang ini tidak bertentangan dengan apa yang dianut oleh bangsa ini. Sekolah-sekolah nasional diperlukan mengingat lembaga pendidikan pemerintah ditunjuk untuk menjadikan pemuda Indonesia sebagai alat dari modal yang mereka tanamkan di sini.

Setelah istirahat sebentar, Mr. Soejoedi memberikan sambutan. Dia berkata telah menduga bahwa banyak orang takut tampil sebagai pemimpin mengingat ada dugaan bahwa mereka bisa berbuat hanya untuk menimbulkan kebingungan pada masyarakat. Tidak tepat bila dari situ disimpulkan bahwa dalam rapat-rapat yang menarik perhatian banyak orang, merupakan bukti bahwa rakyat sangat memahami apa yang dikehendaki oleh pemimpinnya. Selanjutnya Mr. Soejoedi menyampaikan bahwa para pejabat pemerintah yang hadir sedang bersepakat dengan semua hadirin dalam kongres ini.

Setelah itu beberapa orang pembicara menerima giliran: Roeslan Wongsokoesoemo (Surabaya), Djawoto sebagai utusan dari Makasar, A.H. Sangadji, Zainal (Sarekat Madoera), Inoe Martokoesoemo, seorang siswa AMS dari Bandung (utusan Pemuda Indonesia), Moenawar redaktur *Pemberita Kemadjoean*, juga sebelumnya dikenal sebagai tokoh komunis; Boedikario, Goenardjo (seorang pencetak letter) yang dahulu juga dikenal sebagai komunis, Soewondo dari Bangil yang dahulu dikenal sebagai komunis, Moeljodihardjo, Sosrowijono sebagai guru di sekolah Muhamadiyah di Surabaya dan Soedjiman (karyawan pada *Pemberita Kemadjoean*) dahulu dikenal sebagai komunis, yang menunjukkan kesetiannya pada program kerja PNI. Pembicara terakhir ini begitu bersemangat sehingga dia segera mengajukan permohonan untuk dicatat sebagai anggota PNI.

A.M. Sangaji kembali menemukan kesempatan dalam pertemuan ini untuk menyatakan bahwa apa yang termasuk program kerja PNI bagi sebagian besar dimuat dalam program kerja PSI. jadi disampaikan bahwa organisasinya akan bekerjasama dengan PNI. Pidato A.M. Sangaji kemudian dilanjutkan dengan pidato Mr. Boediarto. Setelah mengucapkan salam nasional dan menyampaikan salam dari masyarakat Palembang, disampaikan bahwa di Palembang pandangan nasional juga dibangkitkan seperti di Jawa. Ketika di mana-mana cabang PNI dibentuk maka pembicara yakin bahwa Indonesia dapat memperoleh kebebasannya.

Dr. Soetomo membenarkan sepenuh hati bahwa PNI bertugas untuk mencegah perkawinan anak-anak. Data statistic terlihat, yang diterima dari Penasehat Urusan Bumi putra dan beberapa orang bupati memberikan contoh yang jelas betapa menyedihkan kondisi di Jawa ini. Tetapi juga di luar Jawa, kondisinya sangat buruk. Pembicara mengambil contoh

dari Aceh mengenai hal ini. Dr. Soetomo menduga, tidak adanya tindakan dari pemerintah sangat disesalkan bahwa ketika mendengar pendapat dari pihak tertentu (yang dimaksudkan adalah dari PSI), mereka tidak mau ikut campur dengan pencegahan perkawinan anak-anak. Kini PNI harus melakukan tugas penting dan mulia ini dengan tenaganya sendiri. Baginya memang salah satu sarana adalah menarik hati penduduk. PNI selalu mengingat hal itu.

Soerowijono selanjutnya mengkritik ssstem pendidikan yang berlaku selama itu. Ia juga menyebut anggota masyarakat Indonesia dipersiapkan untuk dijadikan buruh. Mulo, HBS dan sebagainya dimaksudkan bagi kepentingan Belanda. Kemudian ia melanjutkan bahwa pendidikan yang ada mengikuti arah BBL dan untuk mengharapkan pensiun bila sudah memasuki usia tua. Ini dianggap sebagai suatu kesalahan. Oleh karena itu, bangsa ini harus mengambil alih inisiatif untuk mendirikan sekolah-sekolah yang kemudian menyiapkan anak-anak untuk bisa memperoleh kehidupan mandiri. Hanya kebebasan yang mampu mewujudkan semua ini.

Ir. Soekarno berterimakasih kepada para pembicara atas kata-katanya yang baik. Dia sependapat dengan pandangan utusan Sarekat Madoera, yakni bahwa lebih baik masuk neraka daripada menjalani kehidupan yang baik tetapi sebagai budak. Memang hal ini merupakan pandangan PNI. Sehubungan dengan pencegahan perkawinan anak-anak, Ir. Soekarno berkata tidak setuju dengan pandangan dr. Soetomo, yang menyesalkan bahwa pemerintah tidak mau ikut campur. Apa yang dilakukan pemerintah dalam hal ini diabaikan oleh PNI. Partai ini ingin menangani sendiri persoalan itu tanpa bantuan siapapun juga.

Rapat umum kedua pada hari Selasa petang 29-30 Mei, juga menarik perhatian besar seperti pada rapat pertama, dengan kata sambutan singkat dari Ir. Soekarno. Sebuah telegram ucapan selamat diterima dari pengurus pusat Jong Islamieten Bond. Pembicara mendorong Mr. Iskaq yang akan membahas masalah hak-hak *exorbitante* dan selanjutnya memberitahukan bahwa usul yang bersifat ilmiah murni harus ditekankan sehingga orang memperoleh kesempatan untuk mempelajari kasus ini. Setelah memberikan tinjauan panjang lebar tentang sejarah dan arti penting hak-hak *exorbitante* seperti juga alasan yang mendorong pemerintah untuk bisa menyatakan semuanya berlaku bagi Hindia, Mr. Iskaq memberikan pandangannya bahwa hak-hak ini dianggap sebagai prinsip hidup pemerintah. Jadi sarana preventif digunakan untuk melestarikan kekuasaan Belanda di negeri ini. Apa yang dimaksudkan untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban umum, justru sebaliknya digunakan untuk memaksakan kepatuhan dan penghormatan kepada pemerintah. Mereka semua dianggap sebagai hukuman, pelengkap Hukum Pidana. Mereka memberi Gubernur Jenderal wewenang untuk menahan orang-orang yang bisa menimbulkan bahaya bagi keamanan dan ketertiban umum. Tetapi apa yang dipahami sebagai bahaya dan dengan ketertiban dan ketenangan umum? Mr. Iskak berkata tidak tahu dan pemerintah mungkin juga tidak. Apa yang disebut bahaya oleh pemerintah dalam pandangan rakyat mungkin bisa dianggap mulia.

Persoalan ini sering ditinjau dan dibahas dari semua sisi. Berbagai organisasi politik berulang kali telah berjuang untuk menghilangkan hak-hak *exorbitante*. Di Parlemen dan dalam *Volksraad* juga ditunjukkan ketimpangan yang terjadi. Akan tetapi sampai saat itu, semua itu tidak membawa hasil. PNI yakin bahwa Indonesia tetap menjadi koloni dan kapal apung bagi Belanda. Bisa dikatakan bahwa pemerintah mendidik Indonesia ke arah kebebasan dan menunjukkan sifat Hukum Negara. Bila Indonesia merdeka berarti kebangkrutan bagi Belanda, Demikian ditegaskan oleh Mr. Iskaq.

Pembicaraan mengenai *exorbitante* ini memperoleh tanggapan dari para pembicara lainnya seperti Mr. Soejoedi dari Yogyakarta. Mr. Sartono dari Batavia melontarkan kritik terhadap pengungkapan dugaan untuk bisa menahan seseorang. Hal ini mengarah pada kesewenang-wenangan. Sebagai contoh, ia menyebutkan seorang kyai di Jawa Barat yang dibuang dari tempat kelahirannya meskipun ada pengakuan tidak bersalah oleh pemerintah. Cucunya pun mengalami nasib serupa.

Rapat ini ditutup dengan sebuah pidato oleh Ir. Soekarno ketika dia masih menunjukkan bahwa hak-hak *exorbitante* dianggap menghambat bagi orang-orang Indonesia yang akan berjuang demi tanah dan negaranya. Selanjutnya dia menunjukkan apa yang dimaksud semangat nasional di Mesir. Semangat itu juga kita miliki di sini, kata Soekarno. Semangat nasional para siswa Indonesia di Belanda juga berlaku di Surabaya; di mana-mana kini semangat itu pasti berkobar. Jika semangat ini muncul, orang tidak perlu takut lagi.

Sementara rapat dihentikan sejenak, karena ada permohonan dari Kepala Reserse Daerah kepada ketua sidang agar menutup pintu gedung rapat yang berbatasan dengan jalan raya, karena jika tidak maka pertemuan itu akan dianggap sebagai rapat terbuka, dan ini dilarang.

Timbul usulan untuk memutuskan pengurus dalam rapat tertutup ini. Setelah disepakati, ditetapkan sebagai berikut :

Ketua Pengurus Pusat : Ir. Soekarno

Bendahara : Mr. Sartono

Sementara, para anggota pengurus lainnya ditunjuk berdasarkan tokoh-tokoh yang ada. Kongres selanjutnya akan diadakan di Yogyakarta yang direncanakan diselenggarakan pada awal Juli. Untuk itu PNI akan menerbitkan jurnal tengah bulanan. Majalah ini bukanlah organ partai melainkan untuk kepentingan Indonesia secara keseluruhan. Nama jurnal ini adalah *Persatoean Indonesia*. Jika mungkin jurnal ini segera akan berubah menjadi mingguan.

Sebagai penutup kongres ini, Ir. Soekarno tampil yang dengan kata-kata bersemangat memberikan pidato penutup. Pidato ini mendorong hadirin untuk bergabung dengan PNI

atau dengan partai politik lain. Sejak sekarang setiap orang Indonesia mencurahkan diri untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Bekerja tanpa memikirkan hari esok seperti kata-kata Sri Kresna kepada Arjuna:"Lakukan kewajibanmu tanpa memikirkan akibatnya". Juga dia mengutip kata-kata Gandi: apabila orang berani hidup, maka orang juga harus berani berusaha. Selanjutnya dia menekankan bahwa gerakan kebebasan rasional di Mesir di mana Zaghul Pasha telah menampilkan diri, tidak bisa ditekan oleh peluru dan kapal perang Inggris. Mesir hanya menampung 14 juta jiwa, dan Indonesia empat kali lipatnya. Apakah bangsa ini tidak merasa malu ketika tidak siap merebut kembali kemerdekaan itu? Pengorbanan harus ada. Tetapi tidak perlu takut karena bangsa ini memiliki aji-aji Condobiworo (mati satu, tiga lahir, mati tiga lima lahir). Pidato ini diakhiri dengan tepuk tangan yang meriah dari para hadirin.

Peran Soetomo Dalam PPKI

Semangat persatuan yang didengung-dengungkan dalam setiap kongres organisasi mana pun yang membuat dr. Soetomo berniat untuk aktif di PPPKI (Permoefakatan Perhimpoenan Politik Kebangsaan Indonesia), suatu konfederasi perkumpulan sosial politik yang ada saat itu, seperti PNI, PSI, Boedi Oetomo, Pasundan, Sarekat Sumatera, Kaum Betawi, Sarekat Madura, dan studi klub-studi klub yang ada di beberapa wilayah, yang akan didirikan pada bulan Desember 1927. Dalam Kongresnya yang pertama yang diselenggarakan pada bulan Agustus—September 1928 di kota Surabaya, ia terpilih untuk menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Penasehat.

Kegiatan PPPKI kurang berhasil dibandingkan dengan organisasi lain, karena reaksi pemerintah kolonial Belanda terhadap kelompok radikal ini sangat ketat. Kontrol pemerintah pusat maupun daerah diperketat sehubungan dengan reaksi kaum pergerakan nasional menuju ke arah yang dianggap ekstrim. Hal ini ditandai dengan munculnya pemberontakan kaum komunis di beberapa tempat seperti di Banten, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat. Sementara di Surabaya terjadi kerusuhan sebagai akibat dari pelemparan bom di pasar malam tahunan *Jaarmarkt.* Kerusuhan yang dipelopori oleh PKI ini menimbulkan reaksi pro dan kontra di masyarakat. Bagi kaum pergerakan nasional, banyak yang bersikap diam menanggapi kerusuhan yang dipelopori kaum komunis itu. Namun, bagi dr. Soetomo, secara terang-terangan ia menolak cara-cara anarkis yang dilakukan oleh kelompok komunis ini. Bahkan ia sempat diwawancarai oleh koran Belanda *Indische Courant* yang dimuat pada 15 Desember 1926. Inti dari wawancara itu adalah bahwa sebagai seorang nasionalis dr. Soetomo tidak menyetujui komunisme apalagi dengan tindakannya yang anarkis. Namun ia sadar bahwa di masyarakat luas telah terjadi keresahan dan kegelisahan sebagai akibat dari kebijakan pemerintah kolonial. Walaupun ia mengecam tindakan kaum komunis, tetapi ia

juga tidak mengelak bahwa tindakan anarkis itu disebabkan oleh rasa ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Interview ini dilakukan oleh koran tersebut kepada Dr. Soetomo karena kapasitasnya sebagai pemimpin studi klub Surabaya.

Hasil interview di *Indisch Courant* ini menimbulkan banyak reaksi, terutama dari kaum pergerakan seperti PSI (Partai Sarekat Islam) cabang Surabaya. Reaksi PSI cabang Surabaya ini tertuang dalam artikelnya di majalah mereka *Sawoenggaling* terbitan Januari 1927. PSI dengan tegas tidak menyetujui hasil interview dr. Soetomo. Hasil interview itu dianggap tidak mewakili kelompok Studi Klub Surabaya, namun merupakan pendapat pribadi. Seharusnya dr. Soetomo merundingkan terlebih dahulu dengan anggota-anggotanya sebelum mengeluarkan pendapatnya. Hal ini menurut tulisan itu, sangat beralasan, karena di dalam tubuh Studi Klub itu terdapat juga anggota PSI. Oleh karena itu, hasil interview itu dianggap tidak mewakili kelompok Studi Klub Surabaya, tetapi merupakan pendapat pribadinya. Semenjak interview tersebut, hubungan dari PSI untuk dr. Soetomo tidak seharmonis dahulu.

Reaksi lain datang dari Studi Klub Bandung. Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo justru menekankan pada penyebab terjadinya kerusuhan-kerusuhan yang dilakukan oleh kaum komunis. Pemerintah Belanda tidak peka terhadap kegelisahan yang dialami oleh rakyat. Politik penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dengan semena-mena menuduh dan menangkap orang tanpa alasan yang jelas. Untuk alasan itulah dr. Tjipto Mangoenkoesoemo menulis buku yang berjudul *Het Communisme in Indonesie, naar Annleiding van de Relletjes.* Dalam buku itu ia mengecam secara tegas, jelas dan lugas sistem kolonial yang melakukan pemerasan. Kondisi inilah yang merupakan sumber dari semua kerusuhan yang ada, termasuk di dalamnya kerusuhan yang didalangi oleh kaum komunis.

Berbagai pihak mempertentangkan pandangan dr. Soetomo dengan pandangan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, khususnya dalam menanggapi masalah komunisme. Namun, dr. Soetomo memahami benar bahwa ada upaya untuk mempertentangkan dirinya dengan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo. Oleh karena itu, ia menulis dalam *Soeloeh Indonesia* nomor 2 bulan Februari 1927. Dalam tulisannya itu ia menanggapi tulisan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dengan mengatakan bahwa susunan ketatanegaraan yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda harus segera diubah.

Akibat dari tulisan itu, dr. Tjipto Mangoenkoesoemo ditangkap oleh pemerintah Belanda (untuk kesekian kalinya dia ditangkap), kemudian dibuang ke pulau Banda. Mendengar berita pembuangan itu, dr. Soetomo kembali menuliskan pendapatnya di majalah *Soeloeh Indonesia* nomor 9 bulan September 1927. Jiwa solidaritas dr. Soetomo dengan tokoh-tokoh radikal Studi Klub Bandung tetap terpelihara. Solidaritas dr. Soetomo tetap teruji, tatkala

Studi Klub Bandung diubah namanya menjadi *Partai Nasional Indonesia* (PNI) di bawah pimpinan Soekarno. Ia tidak menentang tindakan Soekarno ini. Ia justru menunjukkan sifat moderatnya dan dapat menerima apa yang dilakukan olehnya.

Sementara itu, dari pihak pemerintah kolonial Belanda melihat adanya gejala yang kurang baik atas sikap dr. Soetomo terhadap apa yang dilakukannya kepada Soekarno. Pemerintah mengkhawatirkan terjadinya koalisi antara dia dan Ir. Soekarno, yang bisa jadi akan tumbuh menjadi suatu kekuatan yang tidak dapat dibendung oleh pemerintah. Ir. Soekarno dan dr. Soetomo dianggap sebagai dua tokoh yang dapat mempengaruhi banyak orang. Oleh karena itu, pada 1927 secara sadar pemerintah kolonial menawarkan kepada dr. Soetomo untuk duduk sebagai anggota *Volksraad* di Batavia. Tawaran itu menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan. Banyak orang di kalangan Boedi Oetomo yang mengharapkan agar dr. Soetomo bersedia menerima tawaran untuk menjadi anggota *Volksraad* itu. Hal ini menarik perhatian seorang wartawan harian *de Locomotif* di Surabaya. Ia bertanya kepadanya apakah ia bersedia apabila permohonan resmi dari pemerintah dimintakan kepadanya.

Dr. Soetomo menyatakan bahwa dirinya tidak merasa keberatan terhadap usulan pengangkatannya menjadi anggota *Volksraad* di Batavia. Namun, karena ia menganggap dirinya sebagai wakil pergerakan rakyat Surabaya, dan dia memiliki pengalaman sehubungan dengan pengunduran dirinya dari *Gemeenteraad Soerabaja*, maka ia tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Ia harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan mereka dan meminta pendapat dari organisasi. Apabila mereka mengizinkan untuk tampil sebagai amggota *Volksraad*, maka ia akan menerima tawaran itu. [39] Dr. Soetomo tidak segera memberikan jawaban atas tawaran tersebut. Untuk membahas usulan ini,[40] ia memerintahkan kepada pengurus *Indonesische Studie Club* untuk secepat mungkin membuat undangan rapat yang agenda utamanya membicarakan pencalonannya menjadi angota *Volksraad.*

Dalam rapatnya itu, anggota *Studie Club* Surabaya memberikan persetujuannya dengan suara 59 menyetujui dan 11 suara menolak pengusulannya.[41] Sementara itu, di koran *Indisch Courant* terbitan 18 Maret 1927, disebutkan bahwa rekan-rekan partainya di Probolinggo telah mengingatkan kepadanya agar dirinya bersedia menerima pengangkatannya sebagai anggota *Volksraad.*[42]

---

39. Lihat *Bataviasch Nieuwsblad,* 10 Oktober 1927, halaman 1.

40. Lihat *De Indische Courant,* 16 Maret 1927 yang berjudul "Dr. Soetomo, Volksraadlid".

41. Hasil *pooling* pendapat ini dimuat dalam Koran *Nieuwsblaad van Noorden*, 14 April 1927, di halaman 1 dengan judul "Dr. Soetomo, Lidmaatschap". Berita ini juga terdapat di Koran *Nieuwsblad van Noorden*, 14 April 1927, halaman 1 dan *Limburgsche Dagblad,* 16 April 1927.

42. Lihat *De Indische Courant* 18 Maret 1927, halaman 1 yang berjudul "Dr. Soetomo,

Semula dr. Soetomo bersedia untuk mempertimbangkan usulan itu.[43] Ia menerima usulan itu, namun mengajukan beberapa syarat berdasarkan pengalamannya menjadi anggota *Gemeenteraad Soerabaja.*[44] Semula pemerintah pusat menyanggupi melaksanakan apa yang dipersyaratkannya. Akhirnya, pada 20 April 1927, Dr. Soetomo mengirimkan berita bahwa ia menerima jabatan sebagai anggota *Volksraad.*[45] Ternyata desakan dari anggota *Studie Club* berhasil meyakinkan Dr. Soetomo. Bahkan, para anggota itu akan mengirimkan permohonan khusus kepada Gubernur Jenderal untuk mengangkatnya sebagai anggota *Volksraad* apabila yang bersangkutan menolaknya. Namun, pada akhirnya tawaran itu tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah. Akibatnya, dr. Soetomo menarik kembali kesediaannya menjadi anggota *Volksraad* di Batavia.

Berita tentang penolakan Dr. Soetomo menjadi anggota *Volksraad* mendorong pemerintah untuk mengadakan konferensi pers pada 4 Mei 1927. Redaktur harian *de Locomotief* menyatakan bahwa di kalangan masyarakat bumi putra banyak dibahas tentang pembicaraan yang dilakukan antara dr. Soetomo dan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal menyampaikan apa yang sudah dibicarakan dengannya. Hasil pembicaraannya itu bagi Gubernur Jenderal bukan merupakan janji atau kesanggupan pemerintah seperti yang telah diduga sebelumnya oleh banyak orang. Gubernur Jenderal menjelaskan bahwa yang disampaikan adalah penjelasan tentang kebijakan pemerintah. Wali negeri ini menyampaikan bahwa sebenarnya dia pribadi sangat menghargai pertanyaan yang diajukan oleh dr. Soetomo yang sebetulnya merupakan pertanyaan spontan. Keterangan yang disampaikan oleh gubernur Jenderal kepadanya merupakan informasi murni dan bukan merupakan kesanggupan pemerintah.[46] Dengan konferensi pers ini dianggap bahwa pemerintah kolonial telah melakukan verifikasi tentang kabar yang beredar di masyarakat tentang penolakan dr. Soetomo menjadi anggota *Volksraad.* Kedudukannya sebagai anggota *Volksraad* digantikan oleh anggota legislatif Batavia Moh. Thamrin. Dalam surat kabar *Bataviasch Courant* terbitan 18 Mei 1927 muncul tulisan yang menetralisir pendapat yang beredar di masyarakat

---

Volksraadlid".

43 *Het Vaderland,* 11 April 1927 memberitahukan persetujuan dr. Soetomo untuk duduk di dalam *Volksraad*. Berita yang sama juga dimuat dalam *Algemeen Handelsblad,* 11 April 1927, halaman 1 dan *Het Volks,* 12 April 1927, halaman 1.

44 Harian *De Soematra Post,* 19 April 1927 memuat berita yang dikutip dari Koran *Het Vaderland* bahwa kesediaan dr. Soetomo menjadi anggota *Volksraad* merupakan kemenangan bagi para penguasa di Hindia Belanda. Koran itu menyebutkan bahwa apabila pemerintah berhasil menjadikan anggota lembaga itu, pemerintah colonial di Hindia Belanda dianggap sudah bekerja dan berada di jalur yang benar, sehingga perhatian dari Negara induk ke wilayah Hindia Timur akan lebih besar lagi.

45 Lihat *De Soematera Post,* 20 April 1927, halaman 1.

46 Berita ini dimuat dalam *Het Nieuws van den Daag voor Nederlandsc Indie.* 5 Mei 1927, halaman 1.

tentang mundurnya dr. Soetomo dari keanggotaan *Volksraad.* Mundurnya tokoh ini menurut harian tersebut disebabkan oleh adanya kesalahpahaman yang bertumpu pada pandangan logika dan perasaan terhormat untuk menyampaikan terima kasih atas keanggotaan dalam *Volksraad* kepada Gubernur Jenderal.

Dengan berdirinya banyak *Studie Club* di beberapa kota, timbul gagasan untuk mengadakan pertemuan bagi para intelektual muda guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Prakarsa ini mendapatkan sambutan dari masing-masing *Studie Club*. Tokoh-tokoh pergerakan nasional yang mewakili partai politik, organisasi kemasyarakatan dan *Studie Club* mengadakan pertemuan di Gedung Sekolah Taman Siswa Bandung. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan untuk membentuk suatu perhimpunan di antara masing-masing organisasi tersebut. Dari hasil pertemuan di Bandung tersebut, pada 17 Desember 1927 terbentuklah Perhimpoenan Permoefakatan Politik Kebangsaan Indonesia, yang disingkat PPPKI.[47] Organisasi PPPKI merupakan gabungan dari berbagai macam organisasi yang dibentuk untuk menyamakan visi dan misi berbagai organisasi dan perkumpulan yang menghadiri pertemuan di Bandung tersebut. Selain untuk keperluan tersebut, perhimpunan yang baru ini, dibentuk dengan tujuan agar masing-masing organisasi tidak bentrok satu dengan lainnya, sehingga perselisihan antaranggota dapat diatasi. Hal ini patut dihindari karena dapat melemahkan perjuangan masing-masing organisasi. Perhimpunan ini diharapkan mampu memperkuat organisasi-organisasi dan bekerjasama dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Namun, dalam perjalanannya, PPPKI mengalami banyak kendala, karena masing-masing organisasi memiliki ideologi, visi, misi, tujuan dan arah sendiri-sendiri. Benih-benih konflik selalu menyertai perjalanan PPPKI ini. Ikatan organisasi yang tidak begitu kuat, tidak adanya pemimpin yang memiliki kekuasaan untuk mengendalikan organisasi menyebabkan banyak organisasi anggota PPPKI yang menginginkan untuk keluar dari perhimpunan ini. Dr. Soetomo selaku Ketua Dewan Penasehat PPPKI tidak mampu berbuat banyak, bahkan ia dinilai bertindak terlampau moderat. Lama kelamaan, perkumpulan ini bubar dengan sendirinya.

Walaupun PPPKI tidak dapat melanjutkan kegiatannya, namun *Studie Club* Surabaya tetap berkembang dengan pesat. Jumlah anggotanya bertambah cukup banyak, sehingga mendorong pengurusnya untuk meluaskan gerakannya dan mengarahkan perkumpulan itu ke arah politik. Melalui rapat pengurus yang diselenggarakan pada 16 Oktober 1930 secara resmi *Indische Studie Club* diubah namanya menjadi *Persatuan Bangsa Indonesia* (PBI) yang diketuai oleh dr. Soetomo.[48] Berbeda dengan *Inlandsche Studie Club*, Sifat

47 Lihat Parakitri T. Simbolon (2006) *Menjadi Indonesia.* Penerbit Buku Kompas: Jakarta, halaman 362.

48 Lihat Penoentoen (1935) *Azas dan Dasar Kebatinan PBI*, PBI Cabang Jakarta,

PBI lebih terbuka, menerima anggotanya dari kelompok mana pun tanpa membedakan ras, agama, pendidikan maupun asal-usulnya. Dalam semboyannya, PBI lebih menekankan pada peningkatan derajat bangsa dan tanah air berdasarkan kebangsaan Indonesia. Dalam kehidupan praktis, PBI menekankan pada kegiatan yang dapat diikuti oleh orang banyak seperti memajukan kerajinan, perdagangan, peternakan, pertanian dan koperasi demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Seperti halnya organisasi lain yang dipimpinnya, PBI selalu mengedepankan kepentingan rakyat. Sifat yang merakyat ini membuat organisasi ini disukai oleh berbagai lapisan masyarakat, sehingga dalam waktu singkat jumlah anggota PBI meningkat dengan cepat. Demikian pula cabang-cabang PBI di kota lain juga dibuka, karena program-programnya yang sederhana dan mudah diikuti oleh orang banyak dan dirasakan oleh masyarakat.

Sifat moderat dr. Soetomo tampak dalam perannya menyelenggarakan Kongres Inonesia Raya Pertama di Surabaya pada 1 sampai dengan 3 Januari 1932. Kongres ini diselenggarakan dengan penyesuaian waktu bebasnya Bung karno dari penjara Sukamiskin. Kongres ini diselenggarakan di Gedong Nasional Indonesia (GNI) di Bubutan, Surabaya. Roeslan Abdulgani yang menjadi saksi Kongres itu menceritakan betapa gagahnya Bung Karno menyampaikan pidatonya di Kongres itu setelah keluar dari penjara. Pidatonya yang berapi-api menarik perhatian semua hadirin, dengan memberikan tepuk tangan yang luar biasa ketika Bung Karno mengakhiri pidatonya. Selanjutnya, giliran dr. Soetomo menyampaikan pidatonya. Dengan gayanya yang khas, penuh senyum dan percaya diri, ia memuji ketabahan Bung Karno yang dipenjara oleh Belanda dalam mempertahankan prinsip-prinsipnya. Dr. Soetomo kemudian menegaskan bahwa kemerdekaan itu hendaknya menjadi pedoman seluruh bangsa. Sementara itu, bila terjadi perbedaan pendapat di antara kaum pergerakan nasional, hendaknya tidak menimbulkan perpecahan, namun tetap menjunjung tinggi azas persatuan. Perbedaan yang terjadi merupakan bunga kehidupan yang akan memperindah persatuan itu.

Kongres ini mendapatkan perhatian yang sangat besar dari Pemerintah Kolonial. Peristiwa ini dianggap sebagai momentum untuk menghimpun kekuatan yang lebih besar untuk melawan pemerintah kolonial. Berdasarkan laporan Kepolisian Umum Surabaya[49]

Jakarta, halaman 5. Sumber lain menyatakan bahwa perubahan dari *Indische Studie Club* ke Persatuan Bangsa Indonesia pada bulan Januari 1931 (Paul W. van der Veur (1984), halaman 48). Sementara Redi Panuju (2002) menyatakan bahwa bahwa PBI didirikan pada 16 Oktober 1930 sebagai penggabungan antara Persatuan Bangsa Indonesia dan Sarekat Madura (halaman 29).

49 Lihat Laporan koleksi *Ministerie van Kolonien* nomor D/69 koleksi Nationaal Archief Nederland, Den Haag, Belanda. Laporan ini dinyatakan sebagai Laporan Dinas Penerangan Politik no. 106/S yang masuk dalam klasifikasi sangat rahasia.

dilaporkan kepada Gubernur Jenderal bahwa rapat ini dihadiri oleh 200 orang. Dalam rapat itu tampil Soenarjo Gondokoesoemo yang melaporkan tentang kondisi keuangan organisasi ini dan perencanaan untuk membeli mobil yang akan digunakan untuk propaganda, karena untuk keperluan konsolidasi, di daerah-daerah diperlukan mobilitas yang tinggi. Selain itu Dr. Soetomo mengusulkan dalam kaitannya dengan propaganda ini harus disampaikan dengan cara yang legal dan tidak melanggar hukum. Ia mengusulkan agar progaganda dilakukan dengan memberikan ceramah, kursus, penulisan brosur, tentang persoalan organisasi, dan persoalan lain yang dianggap penting dan menarik perhatian setiap orang Indonesia. Dan untuk keperluan ini perlu dididik tenaga terampil yang khusus mengenai hal ini.

Kongres ini dilanjutkan dengan laporan dari masing-masing wilayah seperti delegasi dari Wlingi, Semarang, Solo (disampaikan oleh Mr. Singgih), Jember, Kediri (disampaikan oleh dr. Drajad) yang ingin mendirikan Studie Fond bagi anggotanya di Kediri. Hampir semua delegasi menyampaikan permasalahan yang ditemuinya, yang langsung ditanggapi oleh dr. Soetomo.

Hal yang menjadi pembicaraan penting adalah ketika dr. Soetomo membicarakan masalah Swadeshi. Ia menjelaskan tentang asal-usul gerakan yang dicetuskan oleh Mahatma Gandhi sebagai salah satu dasar kegiatannya untuk memperkuat ekonomi rakyat India. Garakan yang oleh Satyagraha oleh Gandi ini sengaja dilontarkan oleh dr. Soetomo agar peserta lain tergerak untuk mulai memberdayakan ekonomi rakyat. Selanjutnya dikatakan bahwa gerakan Satyagraha memiliki tiga aksi, yakni:

a. Swadeshi, berjuang menuju kemerdekaan ekonomi atau kebebasan untuk mengatur eknominya di tanah sendiri;

b. Pembaharuan sosial dengan memperbaiki hubungan sosial kehidupan bersama sesuai tuntutan dan perasaan sendiri;

c. Pembaharuan politik, perbaikan, dan perombakan sesuai cita-cita sendiri.

Dilaporkan pula oleh pihak kepolisian kepada Gubernur Jenderal bahwa pada hari ketiga, kongres itu, tepatnya hari Minggu petang kongres dihadiri oleh lebih dari 250 orang. Dr. Soetomo tetap memimpin rapat. Ada empat keinginan yang yang disampaikannya dalam kongres itu, antara lain:

d. Semua cabang harus mencari kontak erat dengan rakyat di lingkungan kerjanya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan sebanyak mungkin rapat umum yang membahas kebutuhan hidup rakyat, khususnya petani secara cermat;

a. Pengurus harus sepenuhnya memahami kepentingan rakyat;

b. Anggota diwajibkan taat dan jika perlu wajib membentu pengurus dalam segala hal;

c. Setidaknya setiap tiga hari semua anggota harus berkumpul untuk berdiskusi dalam mencari jati diri mereka. Dari kegiatan ini, menurutnya akan memunculkan dasar keimanan yang siap untuk menolak egoisme.

Dalam kaitannya dengan pemerintah, dilaporkan bahwa PBI telah mendesak pemerintah untuk membuat aturan tentang pendidikan dasar. Pemerintah berjanji untuk menyusunnya, namun hingga kongres diselenggarakan, aturan itu belum dibuat. Hadirin memberikan perhatian pada peristiwa di Tondano (Manado), bahwa pemerintah di sana telah mendirikan sekolah MULO. Rakyat Minahasa di sana meminta agar didirikan AMS. Janji diberikan kepada pemerintah. Namun kenyataannya MULO yang sudah didirikan di tanah Minahasa itu malahan dibubarkan.

Diskusi yang lebih hebat berlangsung beberapa saat sebelum kongres ditutup. Peserta yang bernama Soedirman dan Mr. Singgih membahas masalah disiplin organisasi ini. Disebutkan terdapat dua disiplin, yakni disiplin positif dan disiplin negatif. PBI menganut sistem disiplin positif, sehingga menuntut para anggotanya untuk aktif di organisasi ini. Dalam kesempatan ini Mr. Singgih mengusulkan didirikannya kepanduan bagi PBI menekankan pada pembinaan diri baik lahir dan batin yang dapat dimanfaatkan bagi pergerakan nasionalis.

Sebelum rapat ditutup, dalam kaitannya dengan para pekerja, diputuskan hal-hal sebagai berikut:

a. Semua pekerja harus bisa memperbaiki nasibnya sendiri.

b. Kekuatan pekerja hanya bisa diwujudkan melalui organisasi buruh yang kuat;

c. Kekuatan pekerja hanya bisa terwujud apabila dalam suatu organisasi buruh dipisahkan antara aksi politik dan aksi massa, sehingga pengerahan aksi massa sebagai akibat perpecahan ideologi politik dapat dihindari;

d. Diperlukan agar gerakan buruh di Indonesia didasarkan atas azas nasionalisme.[50]

50 Laporan rahasia ini dibuat oleh Soentoro, Asisten Wedana bagian PID di Surabaya pada 23 Mei 1932 yang ditujukan kepada Gubernur Jenderal sebagai tindak lanjut dari Surat no. 104/S 19 Mei 1932, dimuat dalam bundle *Ministerie van Kolonien.*

Kongres ditutup dengan mengagendakan diselenggarakannya Kongres berikutnya di kota Solo pada 1935.[51]

Solidaritas dr. Soetomo dengan kaum radikal terbukti lagi tatkala terjadi pemberontakan kapal *Zeven Provincien* pada Februari 1933. Kota Surabaya sebagai basis angkatan laut Belanda menjadi kota yang panas dan genting dengan pemberontakan itu. Dampak dari peristiwa itu terasa tidak hanya di Asia, bahkan di seluruh dunia, karena belum pernah terjadi di manapun. Kasusnya adalah baru pada saat itu sebuah kapal perang Belanda dilarikan oleh anak buahnya sendiri yang kebanyakan berasal dari angkatan laut bumi putra. Pristiwa itu diliput dalam surat kabar *Soeara Oemoem* di bawah asuhan Dr. Soetomo. Dalam tajuk itu dituliskan tentang permohonan pengertian dari pemerintah kolonial tentang sebab-sebab terjadinya pemberontakan tersebut. Akibat dari pemberitaan itu, pemimpin redaksi surat kabar *Soeara Oemoem*, R.T. Tjindarbumi ditangkap dan dipenjara dengan dakwaan telah menghasut rakyat melakukan pemberontakan ini.

Sejak peristiwa itu, Dr. Soetomo memberikan perhatian penuh pada perkembangan PBI. Untuk menjawab aspirasi anggotanya, dan mementukan arah yang lebih jelas tentang organisasi ini, pada 1935, PBI menyelenggarakan Kongres di kota Surabaya. Dalam kongres tersebut Dr. Soetomo melontarkan gagasan untuk menggabungkan antara PBI dan Boedi Oetomo, sehingga organisasi ini mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Pembentukan organisasi baru yang merupakan fusi dari dua organisasi PBI dan Boedi Oetomo juga untuk melawan dominasi bangsa Eropa yang selalu memisahkan bangsa Eropa dan rakyat terjajah, misalnya dalam penggunaan kereta api, trem listrik, nonton di bioskop, restauran atau tempat-tempat umum lainnya, yang memiliki tempat khusus bagi orang-orang Belanda. Oleh karena itu, untuk mensejahterakan rakyat, Dr. Soetomo berniat untuk menggabungkan dua organisasi, PBI dan Boedi Oetomo.

Guna merealisasikan gagasannya ini, diselenggarakanlah Kongres yang intinya menggabungkan antara PBI dan Boedi Oetomo.[52] Kongres diselenggarakan di kota Solo

51 Kondisi politik yang memanas, khususnya setelah keluarnya Ir. Soekarno dari penjara membuat pemerintah kolonial lebih cermat dan meningkatkan pengawasan terhadap kehidupan organisasi yang muncul di daerah-daerah. Para pejabat di daerah diminta melaporkan kepada Gubernur Jenderal tentang kegiatan yang dilakukan oleh kaum pergerakan yang sudah mulai membebaskan diri dari cengkeraman pemerintah Belanda. Oleh karena itu, laporan rahasia selalu dibuat agar pemerintah pusat dapat memantau situasi di daerah seperti terdapat dalam laporan kepada menteri koloni *Ministerie van Kolonien* di negeri Belanda.

52 Pada tahun tersebut Boedi Oetomo memiliki lembaga pendidikan di beberapa kota, seperti di Yogyakarta: sebuah *Schsakel*, HIS, Mulo dan beberapa sekolah rakyat,

pada 24 dan 25 Desember 1935. Kongres itu dihadiri oleh 600-700 orang termasuk 25 orang wanita. Sebagai hasil fusi kedua organisasi itu, peserta kongres memutuskan untuk mendirikan partai baru dengan nama Partai Indonesia Raya, disingkat Parindra, yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia mulia dan sempurna.[53] Berdasarkan laporan Penasehat Urusan Bumi Putera E. Gobee kepada Gubernur Jenderal tertanggal 4 Februari 1936, disebutkan bahwa kedua organisasi ini telah memberitahukan akan bergabung dengan suatu gerakan yang baru dibentuk yang bernama Tirtayasa, suatu organisasi yang bekerja untuk kepentingan masyarakat Banten dan Sarikat Sumatera, sebuah organisasi politik orang Sumatera yang memiliki cabang di Bandung dan Batavia.[54] Peserta kongres secara aklamasi menunjuk dr. Soetomo sebagai ketuanya setelah dilakukan pemungutan suara.

Partai baru yang bernama Parindra ini berusaha untuk merangkul semua kelompok maupun golongan yang ada di masyarakat. Parindra sepenuhnya berorientasi ke Indonesia. Konsep jawaisme sudah tidak relevan lagi dan harus segera dibuang. Setiap ungkapan kedaerahan harus dicegah. Selain itu, Parindra juga memerangi buta huruf. Apabila buta huruf tidak diberantas, gerakan nasionalis akhirnya akan gagal. Buta huruf dapat dijembatani dengan pendidikan yang diberikan kepada rakyat yang bersifat nasional, yang tidak hanya mengarah pada kemakmuran materi saja, tetapi juga membangkitkan jiwa nasionalisme.

Setelah pembentukan partai baru ini, banyak pedagang, petani, buruh, maupun anggota masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan ikut bergabung dengan Parindra. Sementara itu beberapa organisasi juga tercatat bergabung seperti organisasi Sarekat Sumatera, Sarekat Selebes, Sarekat Ambon, Timor Verbond, Perkoempoelan Kaoem Betawi dan Tirtajasa, ikut serta bergabung dengan partai baru ini. Beberapa tokoh pergerakan nasional juga ikut serta bergabung dengan Parindra seperti Mohamad Hoesni Thamrin, Soenarjo, dan Iskaq Tjokrohadisoerjo. Para tokoh tersebut secara suka rela mendaftaran diri mereka sebagai anggota Parindra. Mengingat bahwa tujuan didirikannya Parindra yang utama adalah mencapai Indonesia Mulia dan Sempurna, yang sebenarnya adalah mensejahterakan masyarakat, maka segala upaya ditempuh untuk mencapai tujuan itu. Partai ini memiliki memiliki dasar Nasionalisme Indonesia, dengan semboyan *cooperative,* dengan kemungkinan *incidentele non cooperative.* Disadari betul oleh pengelola partai ini bahwa untuk menjalin

---

sekolah lanjutan dan sebuah asrama; Di Solo: 4 HIS dan beberapa sekolah rakyat dan sekolah lanjutan; di Batavia: beberapa sekolah rakyat dan *Schakel;* di Tasikmalaya: Institute Crisis; di Weleri: satu sekolah; di Semarang: HIS *Kartiyoso;* di Blora *Institute Boedi Oetomo,* Madiun: sekolah *Schakel,* HIS dan MULO; dan di madiun HIS bagi perempuan muda.

53 Soeroto (1985). *Dr. Soetomo Peletak Batu Pertama Cita-Cita Indonesia Raya.* PN Balai Pustaka, Jakarta, halaman 45.

54 Lihat Laporan Penasehat Urusan Bumi Putera E. Gobee nomor 183/K III *Ministerie van Kolonien,* koleksi Nationaal Archief Nederland, Den Haag, Belanda.

hubungan antara pengurus dan anggotanya, diperlukan media, sehingga komunikasi antara pengurus partai dan anggotanya tetap terjamin. Cara yang paling efektif adalah menerbitkan surat kabar dan majalah. Agar supaya tidak ada kendala dalam merealisasikannya, didirikan pula percetakan-percetakan yang mendukung aktivitas Parindra. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Parindra berkembang menjadi partai yang besar, yang memiliki pengikut yang banyak. Mayoritas program Parindra adalah melanjutkan program-program yang semula merupakan program *Indlandsche Studi Club* dan program Persatoean Bangsa Indonesia. Pemerintah Kolonial belanda mendukung mayoritas program kerja Parindra karena partai baru ini dianggap oleh pemerintah sebagai partai yang bersikap kooperatif. Salah satu kegiatannya adalah membina para petani, agar mereka dapat hidup sejahtera. Mengingat bahwa jumlah anggota Parindra dari unsur petani berjumlah cukup banyak, maka didirikanlah perkumpulan khusus yang anggotanya adalah kaum tani yang diberni nama *Perkoempoelan Roekoen Tani.*[55] Mengingat bahwa kondisi para petani ini sangat sulit, bahkan kadang-kadang harus meminjam uang dari lintah darat, Parindra mendirikan bank, yang diberi nama Bank Nasional Indonesia.[56] Bank yang baru didirikan ini bertugas untuk melayani siapa saja yang membutuhkan bantuan perbankan, baik bumi putra maupun bangsa Belanda. Bank ini juga menyalurkan kredit untuk para petani, sehingga banyak di antara kaum tani yang dapat membebaskan diri dari lintah darat yang sangat mencekik kehidupan mereka. Hal inilah yang memicu Parindra untuk mendirikan bank. Menjawab tantangan yang ada pada masa itu, semua aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah, termasuk aktivitas ekonomi dan politik, bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka. Dengan demikian, kebijakan yang diambil oleh pemerintah kolonial menyebabkan kondisi perekonomian rakyat menjadi terbelakang. Cara-cara produksi dengan menggunakan teknologi lama, membutuhkan ongkos produksi

---

55 Pendirian Perkoempoelan Roekoen Tani oleh PBI ini didasarkan atas kenyataan bahwa 90% penduduk Indonesia adalah petani. Dengan demikian, desa, yang mayoritas aktivitasnya bertani menjadi dasar kekuatan rakyat. Petani masih hidup dalam suatu alam kebodohan. Tugas Roekoen Tani dengan demikian bergerak baik di bidang politik maupun ekonomi. Lihat Laporan Kongres Fusi BO-PBI di Surakarta dari 24 sampai dengan 26 Desember 1935 di Surakarta, yang ditulis oleh Sowiryo, *Ministerie van Kolonien,* No. 183/K III, koleksi Nationaal Archief Nederland, Den Haag, Belanda.

56 Menurut Sartono Kartodirdjo dalam *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme* (1999), (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman 223) Pendirian Bank Nasional Indonesia oleh Parindra tidak hanya sekadar untuk membela kaum tani, tetapi lebih mendalam lagi, yakni untuk mengatasi kesenjangan social yang saat itu sengaja dibuat oleh pemerintah kolonial. Pada masa itu pembedaan ras dan etnis masih sangat tinggi, sehingga melalui bank ini masyarakat bumi putra memiliki kedudukan yang setara dengan kaum penjajah. Bank-bank yang ada pada masa iyu hanya dapat dinikmati oleh kelompok menengah ke atas, sehingga kalangan mengenah bawah tidak terlayani dan harus berhubungan dengan lintah darat yang meminta bunga pinjaman sangat tinggi.

yang lebih banyak dibandingkan dengan proses produksi yang baru yang menggunakan teknologi dan sistem yang lebih baik. Hal inilah yang mendorong Parindra, yang dimotori oleh dr. Soetomo untuk mendirikan Bank Nasional Indonesia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan kaum petani dan produsen kecil, mereka menjadi korban dari permainan pemilik modal. Dr. Soetomo melihat penderitaan mereka. Sebagai reaksi dari kondisi ini, muncullah banyak jenis koperasi, baik koperasi konsumsi, koperasi produksi, maupun koperasi simpan pinjam. Koperasi-koperasi ini kemudian dikumpulkan, dan dibentuklah *Persatoean Cooperasi Indonesia* (PCI) yang berpusat di Plampitan. Melihat banyaknya orang yang menghubungi lembaga ini, kehadiran PCI sangat menyentuh kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Bagi para nelayan, didirikan koperasi *Roekoen Pelajaran Indonesia* (Roepelin) yang anggotanya adalah para pemilik perahu. [57] Untuk melawan lintah darat, di mana-mana berdiri Koperasi Kredit, yang bergerak di bidang simpan pinjam uang. Koperasi-koperasi kredit ini kemudian dikumpulkan dan dipusatkan dalam *Credit Centrale Kahuripan*, yang menyalurkan uang bagi masyarakat dengan bunga yang terjangkau. [58]

Di samping itu, mengingat bahwa banyak di antara kaum muda yang perlu dibina secara khusus, Parindra mendirikan organisasi pemuda yang dinamakan *Surya Wirawan.* Para pemuda yang bergabung di dalam organisasi pemuda ini dilatih secara khusus agar mereka memiliki disiplin yang tinggi. Mereka dipersiapkan untuk menjadi pemuda yang tangguh yang mampu menyaingi pemuda-pemuda Belanda yang bergabung dalam berbagai organisasi, seperti organisasi olah raga, Excelsior, Thor, Zeemacht dan organisasi lainnya yang sifatnya sangat eksklusif. Untuk mengangkat gengsi kaum muda yang tergabung di dalam *Surya Wirawan,* mereka diberikan pakaian seragam khusus yang menyerupai pandu (pramuka).

Upaya yang dilakukan dr. Soetomo dalam bidang sosial-ekonomi bukannya berjalan mulus. Gagasannya ini banyak ditentang oleh kawan maupun lawan, khususnya yang beraliran radikal. Mereka berpendapat bahwa upaya dengan jalan yang ia tempuh tidak akan memiliki makna apa-apa di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena perekonomian saat itu dikuasai oleh sistem ekonomi kolonial dan sistem kapitalisme. Upayanya tidak akan mampu melawan mereka. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa sistem ekonomi kapitalisme liberal hanya dapat dihancurkan melalui aksi-aksi masal yang bersifat radikal.

57 Lihat *Het Vaderland,* edisi 31 Mei 1938, halaman 1.

58 Kondisi kelompok tani sangat memprihatinkan, karena bunga pinjaman dapat mencapai 100 hingga 200 persen per tahun. Bahkan di daerah Banyuwangi, bunga pinjaman rata-rata dapat mencapai 300% setahunnya. Sebagai jaminan, tanah merekalah yang dijadikan jaminan pinjaman, karena inilah satu-satunya harta yang mereka miliki.

Sebelum penutupan Kongres memutuskan dan menyetujui kepengurusan Parindra sebagai berikut:

Ketua : dr. Soetomo

Wakil Ketua : RMH Woerjaningrat

Sekretaris : Mr. Soebroto

Bendahara : Soedjoko dan sejumlah komisaris sampai 34 .

Pada saat penutupan Kongres, Parinda telah memiliki 53 cabang di seluruh Nusantara.

Perjalanan Dr. Soetomo ke Beberapa Negara

Dalam kesibukannya sebagai dokter, dosen dan motivator pergerakan pada masa itu, dr. Soetomo merasa perlu untuk belajar dari negeri lain tentang perjuangan bangsanya dalam membebaskan diri dari cengkeraman penjajah. Selain untuk belajar, ia juga akan meminta dukungan, khususnya dari kawan-kawannya di luar negeri agar mendukung semua upaya yang ia lakukan bersama-sama dengan tokoh lainnya. Untuk keperluan itu, ia merencanakan untuk melakukan perjalanan ke beberapa negara untuk mendiskusikan dengan beberapa tokoh di luar negeri. Perjalannya dilakukan pada 1936 dengan tujuan mempelajari berbagai budaya dan pengetahuan yang diharapkan dapat diterapkan di Indonesia. Menurut rencana, ia akan mengadakan perjalanan keliling Jepang, India, Mesir, Belanda, Inggris, Turki dan Palestina, yang akan memakan waktu kira-kira satu tahun.

Seminggu sebelum keberangkatannya ke luar negeri, korps dokter bumi putra mengadakan petang perpisahan di pendopo Gedung Nasional. Pidato dr. Soetomo dirasakan banyak hadirin yang datang sangat menyayat hati. Siangnya, pukul 1 siang, para pegawai harian *Soeara Oemoem* menyelenggarakan makan siang bersama dengan dr. Soetomo, yang menjabat sebagai direkturnya. Banyak di antara karyawannya itu yang meminta agar diizinkan untuk mengantarkannya hingga pelabuhan.[59]

Pada hari Sabtu, 21 Maret 1936, Dr. Soetomo pergi menuju dermaga Genoa, di mana kapal Jepang *Nagoya Maru* ditambatkan. Lebih dari seribu orang berkumpul di dermaga itu, untuk mengucapkan selamat jalan kepadanya yang segera akan berangkat ke Jepang. Di antara mereka yang diizinkan naik ke kapal adalah bupati Bangkalan dan sejumlah dokter

59 Berita ini berasal dari *De Indisch Courant*, 19 Maret 1936, halaman 1.

Eropa dan bumi putra. Sejumlah karangan bunga yang berasal dari perusahaan bumi putra, Cina dan Jepang menghiasi dermaga. Sementara anak-anak dari panti asuhan bumi putra PPAJ melantunkan lagu-lagu perpisahan.

Selain dr. Soetomo, dengan kapal *Nagoya Maru* juga berangkat adik wanitanya, istri Goenawan Mangoenkoesoemo, anggota Volksraad Soekardjo Wirjopranoto bersama istri dan wartawan J. Waney. Tepat pada pukul 11 tanda keberangkatan diumumkan dan sejumlah tokoh Parindra melepas kepergian dr. Soetomo dan rombongan. Polisi mengatur para pengantar dengan baik, sehingga tidak terjadi insiden yang tidak diinginkan. [60] Menurut rencana ia akan mengunjungi Eropa, dengan Jepang sebagai negara tujuan pertamanya. Setelah itu, ia akan mengunjungi India untuk mengenal secara pribadi budaya India lama.

Di Eropa, menurut rencana ia akan menghadiri kongres kedokteran di Madrid, mengunjungi Inggris dan Jenewa untuk mempelajari karya Liga Bangsa-Bangsa di bidang medis. Perjalanan pulang direncanakan akan melalui Amerika Serikat. Dari sana, ia akan kembali ke Jawa melalui Filipina.[61] Berita keberangkatan Dr. Soetomo ke luar negeri ternyata menyebar ke mana-mana. Harian *Nieuwe Rotterdamsche Courant* pada 10 Januari 1937 mengutip tulisan dari Koran *de Locomotif* yang menerima berita dari seorang wartawan di Surabaya yang menyebutkan bahwa dr. Soetomo, pimpinan kaum nasionalis Indonesia dan ketua Studie Club berencana mengadalam perjalanan selama setahun ke Amerika Serikat untuk mengadakan kunjungan kepada saudaranya dr. Soeselo yang seperti diketahui oleh umum bahwa ia menerima tugas untuk tinggal di negara itu guna meneliti penyakit-penyakit tropis. Disebutkan dalam Koran tersebut bahwa perjalanan akan melalui Jepang dan apabila memungkinkan akan melewati India, di mana dr. Soetomo akan melihat sendiri pergerakan nasionalis di sana.[62]

Sekembalinya dari perjalanannya di luar negeri, Soetomo kembali ke Jawa melalui pelabuhan Tanjung Priok di Batavia. Pada Minggu, 28 Maret 1937 ia kembali ke Surabaya dengan menaiki kereta api malam ekspres dari Batavia ke Surabaya. Sesampainya di stasiun Surabaya, banyak orang masih mengingat dengan baik, bahwa dr. Soetomo berada di luar negeri untuk jangka waktu kira-kira satu tahun. Banyak kerabat dan temannya yang menjemput di peron stasiun. Tokoh nasional ini memerlukan beberapa waktu untuk bersalaman dengan beberapa tokoh pergerakan yang menyambutnya. Kedatangannya itu diiringi dengan lagu yang dinyanyikan oleh paduan suara anak-anak. Tidak ada upacara khusus di stasiun kereta api. Sebelum kembali ke rumahnya, ia singgah di Gedung Nasional Bubutan. Di gedung itu, ia disambut oleh banyak anggota kepanduan. Pada hari itu, dr. Soetomo menyampaikan

60 Berita ini ditemukan di dalam surat kabar *Soerabajasch Handelsblad,*

23 Maret 1936, halaman 1.

61 Lihat *Het Vaderland,* 3 April 1936 halaman 1.

62 Lihat *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, 10 januari 1937, halaman 1.

bahwa pada 10 April 1937, ia akan mengadakan rapat untuk menyampaikan pengalaman perjalannya selama setahun ini. Setelah itu, ia kembali ke rumahnya.

Berdasarkan berita yang ditulis dalam *De Indische Courant* terbitan tanggal 1 Mei 1937 disebutkan bahwa di depan kelompok studi budaya di Surabaya, di bawah pimpinan Van Hoogstraten, di rumah salah satu anggota yang bernama dr. Muhamad Saleh Mangoendihardjo, dr. Soetomo memberikan ceramah mengenai perjalanannya terakhir ke Jepang, India, Mesir, Belanda, Inggris, Turki dan Palestina.[63]

Dalam ceramahnya di rumah dr. Muhamad Saleh Mangoendihardjo, dr. Soetomo memberikan sambutan. Pertama-tama is berbicara mengenai Jepang, satu-satunya negara yang maju di Timur. Yang ia anggap penting adalah bahwa Negara Jepang merupakan Negara yang berbentuk kekaisaran, namun dikelola secara modern. Lembaga-lembaga tradisional yang sudah ada sejak abad pertengahan masih tetap dipertahankan. Banyak orang memiliki persepsi yang salah tentang Jepang. Jepang sepenuhnya diperintah secara modern. Kekuasaan Mikado tidak bisa disamakan dengan raja di negara Barat yang memiliki konstitusi seperti Inggris, Belanda, atau pun negara lainnya. Keunikan dari negara Jepang lainnya adalah *Bushido* yang menurut pemahaman modern berarti semangat ksatria, atau jiwa serdadu dalam arti kata murni, karena *bushi* dalam bahasa Jepang berarti serdadu. Sejak muda kaum Samurai atau ksatria hanya dididik dengan kesederhanaan dan keberanian. Jiwa ksatria dan keberanian mewakili nilai tertinggi dalam pandangan hidup dan jiwa mereka. Kemenangan yang diraih Jepang dalam perang melawan Cina dan Rusia bagi sebagian besar orang berasal dari jiwa berani Samurai ini. Dr. Soetomo menyebut nama Jenderal Nogi di sini. Sebagai tentara Jepang, dia memainkan peranan penting dalam pengepungan Port Arthur. Dia adalah sosok yang sederhana dan juga seorang penyair terkenal. Selain itu Jenderal Nogi juga merupakan seorang yang cakap.

Dr. Soetomo menegaskan di depan para hadirin bahwa semangat Cinta tanah air yang melekat pada setiap pribadi orang Jepang merupakan kewajiban tertinggi dan termahal. Dengan sadar dan sistematis, jiwa cinta terhadap tanah air ini ditumbuhkan. Hal ini lebih mudah dilakukan karena orang Jepang memiliki sifat individu. Ia menyatakan bahwa ia tidak lagi berani mengatakan atau lebih tepatnya menganjurkan agar orang bumi putra sejak awal mengikuti apa yang ia anjurkan.

Dengan suara yang lantang ia melanjutkan laporannya tentang perjalanannya di India.

63 Lihat *De Indische Courant,* 1 Mei 1937, halaman 1. Dalam *Soerabajasche Handelsblad,* 22 April 1927, halaman 1 disebutkan bahwa dr. Soetomo telah menjalin hubungan dengan rekan-rekannya di Inggris. Bahkan pada saat berada di Inggris, ia sempat mengadakan pertemuan dengan anggota Majelis Rendah untuk membicarakan beberapa persoalan rumit yang dihadapi oleh masyarakat Hindia.

Ia berbicara tentang organisasi keagamaan di Pondicherry, yang terletak di koloni Prancis di pantai timur India Selatan. Yang menarik dari aliran keagamaan ini menurutnya adalah mereka terdiri atas berbagai anggota etnis. Juga para penulis dan pelukis terkenal dijumpai di sana.

Ajaran Svami Vivekananda yang terkenal, di mana Dr. Rabindranath Tagore pengajar dari aliran Shantiniketan dan Dr. Mohammad Karamachand Gandhi termasuk di antara para muridnya yang terbaik, masih memiliki banyak pengikut seperti yang juga terjadi di Amerika Serikat. Cara berpikir yang khas dari negeri Hindu ini adalah samadi atau meditasi. Menjawab pertanyaan peserta tentang apa yang dimaksudkan sebagai meditasi, ia menjelaskan bahwa meditasi adalah memusatkan semua pemikiran pada satu titik tertentu hingga mencapai alam kosmos.

Selanjutnya, dr. Soetomo menjelaskan perjalanannya di Mesir. Di Mesir terutama kehidupan mahasiswa yang berasal dari Hindia yang menarik perhatiannya.[64] Para mahasiswa itu kebanyakan bukan mahasiswa kaya dan oleh karena itu, di sana mereka memenuhi semua kebutuhan hidupnya sendiri. Sebagai contoh ia melihat sebuah mesin jahit di rumah seorang siswa di mana para siswa santri (santri berarti murid di sekolah keagamaan dan tidak berhubungan dengan kyai atau guru agama di pulau Jawa) membuat pakaiannya sendiri. Jiwa mereka sama sekali berbeda dengan jiwa mahasiswa di Batavia. Mereka di Kairo masih sangat bebas, terutama bebas dalam mengungkapkan pandangannya.

Dari Mesir saat itu dr. Soetomo terbang ke Belanda, negara yang dia sangat inginkan untuk dikunjungi. Sebagai orang yang pernah studi di sana, ia melakukan lobby dengan beberapa guru dan teman-temannya yang masih bermukim di Belanda. Ia dengan bangga menjelaskan bahwa dia diterima oleh Perdana Menteri Dr. H. Colijn.[65] Ia juga menjelaskan isi pembicaraannya dalam berbagai pertemuan, khususnya tentang banyaknya masalah di wilayah koloni Hindia Belanda, termasuk kondisi pertahanannya apabila terjadi ancaman dari luar. Dr. Soetomo menghendaki agar lebih banyak perwira bumi putra yang direkrut dalam kemiliteran Hindia.

Dari Belanda, pembicara beralih ke negara lain yang dikunjunginya, yakni tentang

64 Yang dimaksudkan dengan Hindia adalah wilayah koloni Hindia Belanda.

65 Alasan mengapa Perdana Menteri Colijn mau menerima kunjungan Dr. Soetomo, menurut *Bataviaasch Nieuwsblad* yang dikirimkan melalui pos udara ke koran *De Soematera Post* karena isi pidatonya di Leiden yang dihadiri oleh banyak orang, tidak hanya oleh anggota *Perhimpoenan Indonesia*, tetapi juga oleh orang-orang yang berminat terhadap masalah-masalah di Hindia Belanda. Pembicaraan antarkeduanya diberitakan cukup lama. Yang menarik adalah, menurut koran tersebut, tidak ada satu koran Belanda pun yang memuat berita penting tersebut. (*De Soematera Post,* 16 November 1936, halaman 1).

kondisi di Turki. Di Negara ini pembicara tidak menemukan rasa rendah diri karena menurutnya orang Turki modern merasa sama kedudukannya dengan rekan-rekan mereka dari negara Barat. Orang-orang Turki kini merasa puas dengan apa yang telah mereka miliki. Mereka tidak lagi memiliki aspirasi untuk mengembalikan wilayah negaranya berdasarkan batas-batas sebelum perang. Apa yang kini mereka lakukan adalah meneruskan dengan sekuat tenaga proses modernisasi di negara sendiri. Sejarah dengan jelas telah menunjukkan kepada mereka bahwa luas kesultanan Turki hanya menimbulkan lebih banyak kerugian dan beban daripada ketenangan. Oleh karena itu, bangsa Turki memutuskan lebih baik tidak ikut campur dalam persoalan yang terjadi di jazirah Arab. Dalam aspek keagamaan orang-orang Islam Turki menurut pembicara sangat toleran terhadap pemeluk agama lain.

Sebelum menutup ceramahnya, ia menegaskan bahwa Pantai timur lautan dunia masih ditandai dengan kerusuhan, dan dia menemukan rasa rendah diri pada banyak orang. Di sini mentalitasnya berbeda dibandingkan dengan negara lain. Di sana orang dapat menerima banyak pendapat yang tidak dapat ditemukan di negara lain. Menurut berita dari *Noord Rotterdam Courant,* koran Rotterdam yang dikutip oleh *De Indisch Courant*, 16 November 1936, dr. Soetomo memberikan ceramah di Ceylon sebanyak 4 kali, di Mesir lima kali, di Belanda sembilan kali. Di Belanda juga diberitakan bahwa ia sempat bertemu dengan sejumlah tokoh penting.[66]

Menurut berita yang diterima di Surabaya, Dr. Soetomo membatalkan perjalanan pulangnya melalui Amerika Serikat. Setelah mengunjung kota London, Ketua Umum Parindra ini kembali ke Hindia Belanda melalui Jepang.[67]

Pada 15 Mei 1937, Parindra menyelenggarakan kongresnya yang pertama di Jakarta. Pada kongres tersebut selain disepakati untuk menentukan program-program partai, juga untuk menetapkan kepengurusan Parindra. Dari hasil kongres tersebut terpilih dr. Soetomo sebagai ketua umum partai. Dengan terpilihnya sebagai ketua Parindra, ia harus keliling ke pelosok daerah untuk mensosialisasikan program-program yang sudah diputuskan pada kongres tersebut.

Reaksi Masyarakat atas Wafatnya Dr. Soetomo.

Akibat dari aktivitasnya yang sangat padat, menyebabkan kesehatan dr. Soetomo mulai terganggu. Pada tanggal 1 Maret 1938 Dr. Soetomo dirawat di rumah sakit karena

66 Berita ini diterbitkan oleh *De Indische Courant,* 16 November 1936, halaman 1.

67 Soerabajasch Handelsblad, 11 desember 1936.

penyakitnya yang sudah kronis.[68] Setelah opname di rumah sakit selama hampir dua bulan, pada 30 Mei 1938, pukul 16.30 Dr. Soetomo menghembuskan nafasnya yang terakhir.

Berita meninggalnya Dr. Soetomo menimbulkan reaksi spontan dari semua kalangan. Beberapa koran secara khusus menurunkan artikel tentang jasa dan perjuangan Dr. Soetomo. *De Soematra Post* menurunkan artikel khusus tentang Dr. Soetomo pada 31 Mei 1938 di halaman 1 koran itu untuk mengiringi kepergian tokoh nasional itu. Selain diuraikan tentang riwayat hidupnya, juga diulas tentang sosok politiknya. Ia adalah pendiri PBI (*Persatoean Bangsa Indonesia),* sebuah organisasi yang menampung anggota baik dari kooperator maupun non-kooperator. Dr. Soetomo sebagai ketua sejak dahulu merupakan non-kooperator. Apabila dipandang perlu maka ia akan mendukung kooperasi, tetapi jika tidak maka akan non-kooperasi. Meskipun berbagai tokoh dalam organisasinya telah diawasi oleh polisi politik yang bersifat revolusioner, dr. Soetomo sendiri tidak pernah berhadapan dengan aparat kepolisian dan pengadilan.

Gedung Nasional Indonesia, bangunan besar di Bubutan Surabaya yang di lingkungan sekitarnya terdapat kompleks pemakaman, sebagian besar menjadi warisan Soetomo. Ia juga menjadi pendiri Bank Nasional Indonesia, membantu dengan sekuat tenaga baik moral maupun keuangan setiap inisiatif dalam masyarakat Indonesia. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang berhasil menyatukan dua partai besar, yakni Persatoean Bangsa Indonesia dengan Boedi Oetomo menjadi Partai Indonesia Raya (Parindra).

Dokter Soetomo tidak ikut duduk dalam lembaga umum. Melalui penerimaan keanggotaannya dalam Volksraad pada tahun 1927 dia menolak, tetapi pada saat terakhir dia menerimanya. Dari kantor berita di Batavia *Aneta,* diberitakan bahwa beberapa wakil organisasi bumi putra termasuk Moh. Thamrin berangkat ke Surabaya untuk menghadiri pemakaman Dr. Soetomo.

Sementara itu, redaktur *de Indisch Courant* menurunkan tulisan khusus yang menempatkan siapa sebenarnya dr. Soetomo dalam jajaran tokoh pergerakan nasional Indonesia. Koran ini menyatakan bahwa rakyat bumi putra kehilangan seorang tokoh sangat luar biasa, yang memiliki kehidupan yang sangat kaya, namun memiliki penampilan yang sangat sederhana dengan banyak bakat. Pernyataan "Dr. Soetomo meninggal" yang ditulis dalam judul artikel itu membuat orang tersedak walaupun dalam beberapa minggu

---

68 Koran *De Indische Courant* menerbitkan berita tentang sakitnya Dr. Soetomo. Dalam berita itu disebutkan bahwa dr. R. Soetomo, kepala bagian Dermatologi Rumah Sakit Umum Pusat dan Ketua Parindra sejak 1 Maret 1938 dirawat di rumah sakit ini. Ia harus beristirahat total dan tidak boleh menerima kunjungan. Mengenai penyakit apa yang dideritanya, Koran ini belum memperoleh informasi (*De Indische Courant,* 5 Maret 1938, halaman 1).

sebelumnya telah diberitakan bahwa dr. Soetomo, yang ahli dermatologi itu berbaring sakit di rumah sakit. Rakyat seolah tidak percaya dengan berita itu. Dr. Soetomo meninggal karena penyakit yang dideritanya, suatu penyakit yang baru muncul akhir-akhir ini. Prof. Siegenbeek, telah ikut serta mengusahakan kesembuhannya, namun menurutnya, Soetomo telah mengakhiri kehidupannya yang sibuk. Di rumahsakit yang sama, tempat lima belas tahun lalu dia bertugas sebagai kepala bagian dermatologi, dr. Soetomo pada hari Minggu Kliwon sore pukul 16.20 tanggal 30 Mei 1938 wafat dikelilingi oleh anggota keluarga dan kerabatnya. Di rumahsakit umum, pada saat kematiannya berkumpul saudara-saudaranya antara lain dr. Soesilo dan dr. Soeratmo, sebagai inspektur dinas kesehatan rakyat di Palembang dan kepala dinas kesehatan hewan di Batavia, seperti juga ibu almarhum Raden Ayu Soewadji, saudarinya Nyonya Goenawan Mangoenkoesoemo, Nyonya Soeratin, Nyonya Oemjati, kepala sekolah Kartini di Cirebon, dan Nyonya Siti Soendari.

Berita kematian ini membuat sahabat dan kenalannya berdatangan untuk ikut berjaga di dekat jenazah almarhun. Anggota kepanduan Surya Wirawan ditugasi untuk berjaga di pintu gerbang dan di pekarangan. Jenazah dr. Soetomo sejak pukul 21.00 dipindahkan dari rumahsakit umum ke rumah di Simpang Dukuh no. 12.[69]

Beberapa pertimbangan sempat dilontarkan dari pihak keluarga, apakah jenazahnya akan dimakamkan di Surabaya atau di kompleks makam bupati di Solo. Berdasarkan pertimbangan pihak keluarga dan sahabat-sahabatnya, akhirnya diputuskan untuk dimakamkan di tempat dr. Soetomo telah hidup dan berjuang, yaitu di Gedung Nasional, Bubutan. Prosesi pemakaman berlangsung pukul setengah empat sore dari rumah duka. Jalur yang ditempuh antara lain melalui Genteng – Genteng Kali – Plampitan - Peneleh – Pandaan – Pasar Betan Wetan – Jalan Alun-Alun hingga sampai ke Bubutan.

Penutup

Dokter Soetomo, seorang dokter terkemuka telah pergi. Ia adalah seorang yang telah mencurahkan seluruh kehidupannya pada tugasnya. Ia adalah sosok yang penuh perhatian di bidang politik, seorang tokoh nasionalis yang memahami arti penting jauh melebihi batas-batas luas kepulauan di Nusantara bersama dengan banyak dinamika kelompok penduduk, agama dan budayanya. Semua ini disatukan melalui suatu ikatan yang telah ada selama berabad-abad.

Hilangnya seorang tokoh yang sangat pandai seperti dr. Soetomo ini dianggap sebagai kehilangan oleh rekan-rekan partainya tempat dia menjadi pemimpin rakyat dengan kesadaran tanggungjawab yang tinggi. Periode itu merupakan tahun-tahun sulit tidak hanya

69 Lihat *Indische Courant*, 31 Mei 1938 lembar 1 yang berjudul *Bij het Heengaan van Dr. Soetomo.* Koleksi Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.

bagi pemerintah, tetapi juga bagi pemimpin rakyat karena kesadaran tanggungjawab mereka. Cara-cara anarkis yang ditempuh untuk memperjuangkan suatu tujuan tertentu justru akan menjadi kontra produktif. Zaman telah membuktikan bahwa diplomasi akan menyelesaikan hampir semua permasalahan. Sebaliknya cara-cara anarkis bukannya memecahkan masalah, malah sebaliknya akan menimbulkan masalah baru. Apalagi masa sebelum kemerdekaan yang diperjuangkan oleh Soetomo merupakan masa konsolidasi. Persatuan dan kesatuan seluruh komponen bangsa menjadi hal yang sangat diperlukan dalam menangkis semua serangan dari penjajah.

Nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh Soetomo yang anti penjajahan dalam segala bentuk mengajarkan kepada generasi muda untuk mengedepankan persatuan antarkomponen bangsa merupakan semangat yang akan terus diperlukan selama negara ini masih berdiri. Keteladanan dan kesabaran dalam menghadapi masalah bangsa menjadi sesuatu yang langka saat ini saat negara ini menghadapi banyak permasalahan yang justru datang bukan dari luar, tetapi dari dalam negeri.

Mengentaskan kemiskinan merupakan salah satu program yang dijadikan cita-cita dr. Soetomo yang sejak ia masih hidup hingga 100 tahun ke depan masih merupakan hal yang belum tercapai. Ketimpangan ekonomi, ketidakadilan, dan kemalasan merupakan musuh bangsa yang segera harus diakhiri. Itu semua memerlukan proses yang harus diupayakan secara terus menerus. Ruh Budi Oetomo dan semangat para pencetusnya akan tetap relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hingga kapan pun.

Daftar Pustaka

A. Koran dan Arsip

De Sumatera Post, 18 April 1911

De Soematra Post, 19 April 1927

De Soematera Post, 20 April 1927

De Soematera Post, 16 November 1936

De Indische Courant, 9 Juli 1923

De Indische Courant, 14 Juli 1924

De Indische Courant 18 Maret 1927

De Indische Courant, 1 Mei 1937

De Indische Courant, 16 November 1936
De Indische Courant, 8 Juli 1931
De Indische Courant, 16 Maret 1927 berjudul "Dr. Soetomo, Volksraadlid".
De Indische Courant, 19 Maret 1936
De Indische Courant, 5 Maret 1938,
De Indische Courant, 31 Mei 1938 berjudul *Bij het Heengaan van Dr. Soetomo.*

Bataviaasch Nieuwsblad, 7 Agustus 1922.
Bataviasch Nieuwsblad, 30 Juli 1924.
Bataviasch Nieuwsblad, 10 Oktober 1927.
Bataviasch Courant, 9 Januari 1926.

Soerabajasch Handelsblad, 11 Desember 1936.
Soerabajasch Handelsblad, 23 Maret 1936.
Soerabajasche Handelsblad, 22 April 1927

Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indie, 12 September 1917.
Het Nieuws van den Daag voor Nederlandsch Indie, 14 Maret 1925
Het Nieuws van den Daag voor Nederlandsch Indie. 5 Mei 1927.

Nieuwsblaad van Noorden, 14 April 1927,

Het Vaderland, 11 April 1927
Het Vaderland, 31 Mei 1938
Het Vaderland, 3 April 1936

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10 Januari 1937.

Koleksi *Ministerie van Kolonien* nomor 183/K III, Januari 1936, Koleksi NAN, Den Haag.
Koleksi *Ministerie van Kolonien* nomor D/69 koleksi NAN, Den Haag, Belanda.
Koleksi *Ministerie van Kolonien* No. 106/S. Koleksi NAN, Den Haag.

Koleksi *Ministerie van Kolonien* 23 Mei 1932 Surat no. 104/S. Koleksi NAN, Den Haag.

Koleksi *Ministerie van Kolonien, nomor 183/K III*. Koleksi NAN Den Haag

Koleksi *Ministerie van Kolonien,* No. 183/K III (lanjutan), koleksi NAN Den Haag.

B. BUKU

Abdulgani, Dr. H. Roeslan (1976) *Alm Dr. Soetomo yang Saya Kenal.* Yayasan Idayu: Jakarta,

Kartodirdjo, Sartono (1999). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Koesoebjono, Santo dan Solita Koesoebjono Sarwono (2008) *Siti Soendari Adik Bungsu Dr. Soetomo.* Pustaka Fahima, Yogyakarta

Kutojo, Sutrisno dan Mardanas Safwani (1973) *Seri Pahlawan, Riwayat Hidup dan Perjuangan Dr. Soetomo.* Angkasa, Bandung

Panuju, Redi (2002). *Dr. Soetomo Pahlawan Bangsaku*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Penoentoen (1935) *Azas dan Dasar Kebatinan PBI*, PBI Cabang Jakarta, Jakarta,

Simbolon, Parakitri T. (2006) *Menjadi Indonesia.* Penerbit Buku Kompas: Jakarta

Soeroto (1985). *Dr. Soetomo Peletak Batu Pertama Cita-Cita Indonesia Raya.* PN Balai Pustaka, Jakarta

Tashadi (1982) *Dr. Wahidin Sudirohusodo.* Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional 1982-1983.

Veur, Paul W. van der (ed.) (1984). *Kenang-Kenangan Dokter Soetomo*. Jakarta, Sinar Harapan.